



**KEBERHASILAN PROGRAM
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
TAHUN 2017/2018**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2018**



**KEBERHASILAN PROGRAM PEMBANGUNAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2017/2018**

KATALOG DALAM TERBITAN

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Dasar dan
Menengah, Tahun 2017/2018/Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan
Pelayanan. – Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan
Kebudayaan, Kemendikbud, 2018
xi, 136 hal, bbl, ilus, 26,7 cm

ISSN 0216-8294

Pengarah:
Bastari
L. Manik Mustikohendro

Penulis
Chusnul Chotimah

Pengolah Data
Chusnul Chotimah

Penyunting:
Sudarwati

Design Layout
Syahreza

© Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

KATA PENGANTAR

Buku “Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah, Tahun 2017/2018” ini merupakan hasil pendayagunaan data dan statistik pendidikan yang mengkaji indikator pendidikan yang telah dikembangkan selama ini. Buku ini disusun dalam upaya memberikan gambaran keberhasilan program pembangunan pendidikan yang dikaji berdasarkan misi Kemendikbud M2, yaitu mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan misi M3, yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu.

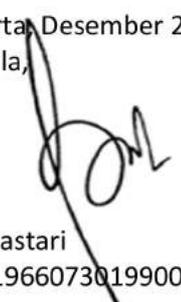
Misi M2 akses menggunakan 13 indikator, terdiri dari akses yang meluas dengan tujuh jenis indikator, akses yang merata dengan tiga jenis indikator, dan akses yang berkeadilan dengan tiga jenis indikator. Misi M3 pembelajaran yang bermutu menggunakan 10 jenis indikator, terdiri dari mutu guru dengan dua jenis indikator, mutu siswa dengan tiga jenis indikator, dan mutu prasarana dengan lima jenis indikator. Dengan demikian, terdapat 23 indikator yang digunakan dalam kajian ini.

Indikator pendidikan yang digunakan dalam misi M2 dan misi M3 pendidikan memiliki satuan yang berbeda, sehingga perlu dilakukan konversi menggunakan standar tertentu sebagai komposit indikator. Dengan menggunakan standar tersebut maka dihasilkan nilai maksimal 100. Rata-rata dari nilai indikator misi 2 dijadikan ukuran untuk menentukan akses dan rata-rata dari nilai indikator misi 3 dijadikan ukuran untuk menentukan mutu, sehingga rata-rata dari akses dan mutu adalah keberhasilan program pembangunan pendidikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan program pembangunan pendidikan dipengaruhi oleh komposit nilai indikator misi M2 dan misi M3.

Sumber data yang digunakan dalam menyusun indikator pendidikan ini adalah statistik SD, SMP, SMA, dan SMK yang diterbitkan oleh PDSPK, data nonpendidikan terutama penduduk usia masuk sekolah dan usia sekolah dari proyeksi BPS, Bappenas, dan UNFPA serta Permendikbud, UU, dan PP yang terkait dengan pendidikan.

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, sehingga buku ini dapat disusun. Saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2018
Kepala,



Dr. Bastari
NIP 196607301990011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Buku “Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah, Tahun 2017/2018” ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ketercapaian program pembangunan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah pada tahun pelajaran 2017/2018. Untuk mengukur ketercapaian program pendidikan tersebut maka digunakan misi M2 dan misi M3 pendidikan dengan 23 jenis indikator. Misi M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan misi M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Masing-masing misi pendidikan memiliki nilai tersendiri, sehingga dari kedua misi tersebut dihasilkan keberhasilan program pendidikan pada tingkat Provinsi dan nasional.

Misi M2 akses yang meluas menggunakan tujuh indikator, yaitu 1) rasio siswa/sekolah (R-S/Sek), 2) rasio siswa/kelas (R-S/K); 3) rasio kelas/ruang kelas (R-K/RK), 4) persentase perpustakaan (%Perpus), 5) persentase laboratorium (%Lab), 6) persentase ruang usaha kesehatan sekolah (%RUKS), dan 7) persentase toilet siswa (%TS). Akses yang merata menggunakan tiga indikator, yaitu angka partisipasi kasar (APK), angka masukan kasar (AMK) (khusus SD) atau angka melanjutkan (AM) (SMP dan SM), dan tingkat pelayanan sekolah (TPS). Akses yang berkeadilan menggunakan tiga indikator, yaitu 1) perbedaan gender (PG) APK, 2) indeks paritas gender (IPG) APK, dan 3) persentase siswa swasta (%S-Swt).

Misi M3 terdiri dari tiga kelompok mutu, yaitu mutu guru, mutu siswa, dan mutu prasarana. Mutu guru terdapat dua indikator, yaitu 1) persentase guru layak (%GL) dan 2) rasio siswa/guru (R-S/G). Mutu siswa terdapat tiga indikator, yaitu 1) angka lulusan (AL), 2) angka mengulang (AU), dan 3) angka putus sekolah (APS). Mutu prasarana terdiri dari lima indikator, yaitu 1) persentase ruang kelas baik (%RKb), 2) persentase perpustakaan baik (%Perpusb), 3) persentase laboratorium baik (%Labb), 4) persentase RUKS baik (%RUKSb), dan 5) persentase toilet siswa baik (%TSb).

Metode bahasan yang digunakan adalah studi dokumentasi. Studi ini dilaksanakan dengan mempelajari dokumen yang ada seperti statistik persekolahan, khususnya SD, SMP, SMA, dan SMK serta data nonpendidikan khusus penduduk usia masuk sekolah dan usia sekolah untuk dilakukan analisis dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan teknik tabulasi dilengkapi dengan perhitungan indikator pendidikan dan analisis indikator, sehingga dihasilkan keberhasilan program pembangunan pendidikan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dilengkapi dengan tabel dan penjelasan cara membaca indikator serta grafik untuk memudahkan memahami cara membaca.

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program aplikasi yang telah disusun dan telah dilengkapi dengan standar untuk melakukan konversi terhadap masing-masing indikator yang dijelaskan sebelumnya dan kategori wajar dikdas 9 tahun, sehingga dapat dengan segera diketahui Provinsi mana yang memiliki nilai yang terbaik dan mana yang terburuk. Nilai 100 berarti nilai yang terbaik atau ideal dan nilai mendekati 100 makin baik.

Dengan menggabungkan nilai keberhasilan program akses dan keberhasilan program pembelajaran bermutu, kemudian dibagi 2 merupakan hitungan keberhasilan program pembangunan pendidikan. Keberhasilan program pembangunan pendidikan dirinci menjadi lima jenis, yaitu paripurna bila nilainya 95,00—100,00, utama bila nilainya 90,00—94,99, madya bila nilainya 85,00—89,99, pratama bila nilainya 80,00—84,99, dan kurang bila nilainya kurang dari 80. Dihasilkan pula keberhasilan program pendidikan tiap Provinsi dan tiga jenjang pendidikan.

Bila dilihat pada misi 2 akses pendidikan maka untuk SD sebesar 83,18 termasuk pratama, SMP sebesar 85,41 termasuk madya, dan SM sebesar 82,57 termasuk pratama, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 83,72 termasuk pratama. Dengan demikian, akses terbesar pada SMP termasuk madya sedangkan SD dan SM dalam kategori pratama. Akses pendidikan dirinci menjadi tiga akses, untuk akses yang meluas terbesar pada SMP sebesar 77,67 termasuk kurang dan terkecil pada SD sebesar 65,68 juga termasuk kurang, SM sebesar 68,43 juga termasuk kurang, sehingga rata-rata akses meluas sebesar 70,59 termasuk kurang. Akses yang merata terbesar pada SM sebesar 97,49 termasuk paripurna dan terkecil pada SMP sebesar 91,03 termasuk utama, SD sebesar 94,44 termasuk utama, sehingga rata-rata akses merata sebesar 94,32 termasuk utama. Akses yang berkeadilan terbesar pada SD sebesar 89,42 termasuk madya dan terkecil pada SM sebesar 81,77 termasuk pratama, SMP sebesar 87,54 termasuk madya, sehingga rata-rata akses berkeadilan sebesar 86,24 termasuk madya.

Bila dilihat pada misi 3 pembelajaran bermutu maka untuk SD sebesar 89,01 termasuk madya, SMP sebesar 90,15 termasuk utama, dan SM sebesar 93,14 termasuk utama, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 90,77 termasuk utama. Dengan demikian, pembelajaran bermutu terbesar pada SM termasuk utama dan terkecil pada SD termasuk madya. Pembelajaran bermutu dihasilkan dari tiga mutu, mutu guru terbesar pada SMP sebesar 88,77 termasuk madya dan terkecil pada SD sebesar 82,99 termasuk pratama, SM sebesar 88,41 termasuk madya, sehingga rata-rata mutu guru sebesar 86,73 termasuk madya. Mutu siswa terbesar pada SMP sebesar 99,51 termasuk paripurna dan terkecil pada SM sebesar 98,92 juga termasuk paripurna, SD sebesar 99,24 juga termasuk paripurna, sehingga rata-rata mutu siswa sebesar 99,22 termasuk paripurna. Mutu prasarana terbesar pada SM sebesar 92,10 termasuk utama dan terkecil pada SMP sebesar 82,16 termasuk pratama, SD sebesar 84,79 juga termasuk pratama, sehingga rata-rata mutu prasarana sebesar 86,35 termasuk madya.

Dengan melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan maka nilai yang kurang terjadi pada akses yang meluas karena nilainya hanya 70,59. Untuk itu, disarankan agar terdapat pengadaan untuk prasarana seperti perpustakaan, laboratorium, RUKS, dan toilet siswa pada 32 Provinsi dalam kondisi kurang. Bila pengadaan prasarana tersebut dapat dilaksanakan maka keberhasilan program pembangunan pendidikan akan dapat mencapai lebih baik lagi.

Bila dilihat berdasarkan Provinsi maka keberhasilan program pembangunan pendidikan dari tiga jenjang pendidikan lima besar pada Provinsi DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Sebaliknya, lima terkecil

terdapat pada Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Dengan demikian, kondisi pendidikan di lima Provinsi terkecil perlu mendapat perhatian khusus.

Berdasarkan keberhasilan program pendidikan menurut jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SM maka rata-rata nasional sebesar 87,24 termasuk madya dengan rincian SD sebesar 86,09 termasuk madya, SMP sebesar 87,78 termasuk madya, dan SM sebesar 87,85 juga termasuk madya. Dengan demikian, keberhasilan program pendidikan semua jenjang dalam kondisi baik karena semuanya termasuk madya. Namun, terbesar adalah SM dan terkecil adalah SD. Besarnya nilai SM karena lokasi SM lebih mudah dijangkau dan terletak di kota besar jika dibandingkan dengan SMP dan SD.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN/TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	xi
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Manfaat Studi	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	8
B. Program Pembangunan Pendidikan	9
C. Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi Pendidikan	11
BAB III METODOLOGI	20
A. Metode	20
B. Cara Menghitung Indikator Pendidikan	23
C. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan	43
BAB IV HASIL DAN BAHASAN	45
A. Akses Pendidikan	45
B. Pembelajaran yang Bermutu	86
C. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan	122
BAB V PENUTUP	132
A. Simpulan	132
B. Saran	133
C. Rekomendasi	134
PUSTAKA ACUAN	136

DAFTAR BAGAN/TABEL

	Halaman	
BAB II		
Bagan 2.1	Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3 Rencana Strategi Kemendikbud 2015-2019	17
Bagan 2.2	Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3 Pendidikan	18
BAB III		
Tabel 3.1	Variabel Data berdasarkan Misi 2 dan Misi 3	20
Tabel 3.2	Indikator Pendidikan berdasarkan Misi 2 dan Misi 3	21
Tabel 3.3	Standar untuk Melakukan Konversi Tiap-tiap Indikator Pendidikan	22
Tabel 3.4	Jenis Keberhasilan Pendidikan Berdasarkan Kategori Wajar Dikdas 9 Tahun	22
BAB IV		
Tabel 4.1	Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Meluas Menurut Jenjang Pendidikan	44
Tabel 4.2	Data Akses yang Meluas SD Tiap Provinsi	47
Tabel 4.3	Indikator Akses yang Meluas SD Tiap Provinsi	48
Tabel 4.4	Akses yang Meluas SD Tiap Provinsi	49
Tabel 4.5	Data Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi	51
Tabel 4.6	Indikator Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi	52
Tabel 4.7	Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi	53
Tabel 4.8	Data Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi	55
Tabel 4.9	Indikator Akses yang Meluas SM Tiap Provinsi	56
Tabel 4.10	Akses yang Meluas SM Tiap Provinsi	57
Tabel 4.11	Akses yang Meluas Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	58
Tabel 4.12	Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Merata Menurut Jenjang Pendidikan	61
Tabel 4.13	Data dan Indikator Akses yang Merata SD Tiap Provinsi	62
Tabel 4.14	Akses yang Merata SD Tiap Provinsi	63
Tabel 4.15	Data dan Indikator Akses yang Merata SMP Tiap Provinsi	64
Tabel 4.16	Akses yang Merata SMP Tiap Provinsi	65
Tabel 4.17	Data dan Indikator Akses yang Merata SM Tiap Provinsi	67
Tabel 4.18	Akses yang Merata SM Tiap Provinsi	68

Tabel 4.19	Akses yang Merata Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	69
Tabel 4.20	Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Berkeadilan Menurut Jenjang Pendidikan	71
Tabel 4.21	Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SD Tiap Provinsi	73
Tabel 4.22	Akses yang Berkeadilan SD Tiap Provinsi	74
Tabel 4.23	Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SMP Tiap Provinsi	75
Tabel 4.24	Akses yang Berkeadilan SMP Tiap Provinsi	76
Tabel 4.25	Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SM Tiap Provinsi	78
Tabel 4.26	Akses yang Berkeadilan SM Tiap Provinsi	79
Tabel 4.27	Akses yang Berkeadilan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	80
Tabel 4.28	Rangkuman Akses Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan	82
Tabel 4.29	Rangkuman Akses Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	83
Tabel 4.30	Data, Indikator, dan Nilai Mutu Guru Menurut Jenjang Pendidikan	85
Tabel 4.31	Data dan Indikator Mutu Guru SD Tiap Provinsi	86
Tabel 4.32	Mutu Guru SD Tiap Provinsi	87
Tabel 4.33	Data dan Indikator Mutu Guru SMP Tiap Provinsi	88
Tabel 4.34	Mutu Guru SMP Tiap Provinsi	89
Tabel 4.35	Data dan Indikator Mutu Guru SM Tiap Provinsi	90
Tabel 4.36	Mutu Guru SM Tiap Provinsi	91
Tabel 4.37	Mutu Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	92
Tabel 4.38	Data, Indikator, dan Nilai Mutu Siswa Menurut Jenjang Pendidikan	94
Tabel 4.39	Data dan Indikator Mutu Siswa SD Tiap Provinsi	95
Tabel 4.40	Mutu Siswa SD Tiap Provinsi	96
Tabel 4.41	Data dan Indikator Mutu Siswa SMP Tiap Provinsi	98
Tabel 4.42	Mutu Siswa SMP Tiap Provinsi	99
Tabel 4.43	Data dan Indikator Mutu Siswa SM Tiap Provinsi	100
Tabel 4.44	Mutu Siswa SM Tiap Provinsi	101
Tabel 4.45	Mutu Siswa Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	102
Tabel 4.46	Data, Indikator, dan Nilai Mutu Prasarana Menurut Jenjang Pendidikan	104
Tabel 4.47	Data Mutu Prasarana SD Tiap Provinsi	105
Tabel 4.48	Indikator Mutu Prasarana SD Tiap Provinsi	106

	Halaman	
Tabel 4.49	Mutu Prasarana SD Tiap Provinsi	107
Tabel 4.50	Data Mutu Prasarana SMP Tiap Provinsi	108
Tabel 4.51	Indikator Mutu Prasarana SMP Tiap Provinsi	109
Tabel 4.52	Mutu Prasarana SMP Tiap Provinsi	110
Tabel 4.53	Data Mutu Prasarana SM Tiap Provinsi	111
Tabel 4.54	Indikator Mutu Prasarana SM Tiap Provinsi	112
Tabel 4.55	Mutu Prasarana SM Tiap Provinsi	113
Tabel 4.56	Mutu Prasarana Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	114
Tabel 4.57	Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan	116
Tabel 4.58	Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	117
Tabel 4.59	Keberhasilan Program Pendidikan menurut Misi 2 dan Misi 3 serta Jenjang Pendidikan	119
Tabel 4.60	Keberhasilan Program Pendidikan SD Tiap Provinsi	121
Tabel 4.61	Keberhasilan Program Pendidikan SMP Tiap Provinsi	123
Tabel 4.62	Keberhasilan Program Pendidikan SM Tiap Provinsi	125
Tabel 4.63	Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi	127

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
BAB IV	
Grafik 4.1 Akses yang Meluas Semua Jenjang Tiap Provinsi	59
Grafik 4.2 Akses yang Merata Semua Jenjang Tiap Provinsi	70
Grafik 4.3 Akses yang Berkeadilan Semua Jenjang Tiap Provinsi	81
Grafik 4.4 Rangkuman Akses Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan	82
Grafik 4.5 Rangkuman Akses Pendidikan Semua Jenjang Tiap Provinsi	84
Grafik 4.6 Mutu Guru Semua Jenjang Tiap Provinsi	93
Grafik 4.7 Mutu Siswa Semua Jenjang Tiap Provinsi	103
Grafik 4.8 Mutu Prasarana Semua Jenjang Tiap Provinsi	115
Grafik 4.9 Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan	116
Grafik 4.10 Rangkuman Pembelajaran Bermutu Semua Jenjang Tiap Provinsi	118
Grafik 4.11 Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan	120
Grafik 4.12 Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Misi 2 dan Misi 3 Pendidikan	120
Grafik 4.13 Keberhasilan Program Pendidikan SD Tiap Provinsi	122
Grafik 4.14 Keberhasilan Program Pendidikan SMP Tiap Provinsi	124
Grafik 4.15 Keberhasilan Program Pendidikan SM Tiap Provinsi	126
Grafik 4.16 Keberhasilan Program Pendidikan Semua Jenjang Tiap Provinsi	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program pembangunan pendidikan sampai saat ini terus diupayakan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Bahkan, pemerintah mempunyai komitmen untuk mendukung program pembangunan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2010 pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN dan APBD. Pembangunan pendidikan dapat dilihat secara nyata pada penyelenggaraan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal. Dengan berkembangnya peserta didik maka diperlukan tambahan guru dan prasarana pendidikan. Pada saat sekarang, penyediaan guru terus diupayakan agar mencukupi kebutuhan guru sesuai dengan bertambahnya peserta didik. Demikian juga pengadaan sarana prasarana pendidikan terus dilakukan pemerintah seperti penyediaan gedung, rehabilitasi ruang kelas, dan fasilitas sekolah lainnya seperti perpustakaan, laboratorium, ruang usaha kesehatan sekolah, dan lain-lainnya. Bukti lain adalah adanya penyempurnaan kurikulum dalam rangka pengembangan proses pendidikan yang bermutu.

Proses pendidikan setidaknya-tidaknya bertumpu pada empat pilar pendidikan yang dicanangkan oleh *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), yaitu 1) *learning to know*, 2) *learning to do*, 3) *learning to be*, dan 4) *learning to live together* yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar, yaitu 1) membaca, 2) menulis, 3) mendengar, 4) menutur, 5) menghitung, 6) meneliti, 7) menghafal, dan 8) menghayal. Hal ini sesuai dengan penyempurnaan kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan saat ini (UNESCO/OECD, 2015).

Dalam kaitan dengan pendidikan, penyusunan kebijakan pendidikan, pengambilan keputusan tentang pendidikan, dan perencanaan pendidikan seharusnya ditunjang dengan data dan informasi. Dengan adanya data dan informasi yang akurat, tepat waktu, dan reliabel akan dapat diambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Demikian juga untuk perencanaan, penggunaan data dan informasi yang benar akan menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak akan terjadi adanya kesalahan penempatan sekolah, kesalahan distribusi prasarana pendidikan, kesalahan alokasi guru, dan terlebih kesalahan dalam alokasi dana, dan lainnya. Oleh karena itu, data dan informasi tersebut hendaknya dijadikan bahan acuan oleh para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan baik dalam perencanaan, pembinaan, penyelenggaraan pendidikan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan.

Arah kebijakan dan strategi nasional dalam rencana strategi merupakan penugasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kepada

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kemendikbud bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden dan bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kemendikbud.

Arah pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berlandaskan gotong royong. Kebijakan ini dijabarkan dalam kerangka pembangunan yang dapat memastikan Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dan kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, terdapat permasalahan pokok dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Oleh karena itu, tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok sosial ekonomi, antarwilayah dan antarjenis kelamin, dan meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat.

Dengan mengacu pada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025 serta integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan maka ditetapkan visi Kemendikbud 2019, yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rencana strategi kebijakan Kemendikbud yang sedang digalakkan maka kebijakan pendidikan tertuang dalam Rencana Strategi Kemendikbud dalam rangka Pembangunan Pendidikan 2015--2019. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam lima misi Kemendikbud, yaitu 1) M1 adalah mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, 2) M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, 3) M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu, 4) M4 mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, dan 5) M5 adalah mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 11, Tahun 2015 Pasal 797 sampai 816 berisi tentang Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK), yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, PDSPK menyelenggarakan fungsi 1) penyusunan kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; 2) pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pendidikan dan kebudayaan; 3) pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; 4) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik pendidikan dan kebudayaan; dan 4) pelaksanaan administrasi pusat (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015b).

Mengolah data dan menyajikan data ini terutama ditujukan untuk memberi kemudahan kepada para penyusun kebijakan dan pengambil keputusan terutama di lingkungan Kemendikbud dalam rangka perencanaan pembangunan pendidikan dan pelayanan data pendidikan dan kebudayaan. Perhatian utama dipusatkan pada visi Kemendikbud 2019 yang dijelaskan sebelumnya adalah Terbentuknya Insan serta

Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong.

Dalam rangka perumusan kebijakan, khususnya di bidang pendidikan, informasi mengenai jumlah sekolah, siswa baru, siswa, guru, lulusan, kelas, ruang kelas, dan data pendidikan lainnya sangat diperlukan untuk menunjang upaya perencanaan pembangunan sistem pendidikan dan penilaian perkembangan pendidikan. Di samping itu, dalam perkembangan selanjutnya penyediaan data dan informasi tidak hanya terbatas pada data pokok melainkan juga data yang lebih rinci dan menyangkut individu sekolah. Data pendidikan tidak hanya untuk kepentingan di dalam negeri melainkan juga untuk kepentingan internasional dan dalam studi perbandingan antarnegara sebagai wahana memperluas wawasan dalam melaksanakan analisis sistem pendidikan nasional. Pemahaman akuntabilitas kinerja pendidikan di luar negeri akan memacu pendidikan nasional untuk mengikuti perkembangan pendidikan dalam kancah internasional dalam rangka globalisasi khususnya globalisasi pendidikan.

Dengan keberhasilan program pembangunan pendidikan selama ini maka kebutuhan akan peningkatan mutu data dan bentuk informasi pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini mengakibatkan makin banyaknya warganegara terdidik, masyarakat makin kritis, dan perhatian terhadap pendidikan makin baik dalam hal pelaksanaan misi pendidikan.

Untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan dapat dinyatakan dalam berbagai indikator pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penyediaan indikator pendidikan yang sesuai dengan misi pendidikan khususnya M2 dan M3, baik secara makro maupun mikro. Walaupun demikian, model indikator pendidikan yang disajikan pada saat ini dibatasi pada data agregat nasional dan Provinsi dengan maksud untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional dan Provinsi secara makro. Selain itu, indikator pendidikan tersebut dapat memenuhi kebutuhan perbandingan antarPROVINSI dan antarnegara. Indikator pendidikan juga merupakan salah satu dari sejumlah faktor yang sangat penting dalam upaya mendeteksi tercapainya cita-cita sistem pendidikan nasional. Indikator pendidikan ini dapat digunakan sebagai peringatan awal terhadap permasalahan pendidikan yang ada di lapangan.

Indikator adalah suatu alat yang memiliki potensi untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hubungan antara berbagai aspek pendidikan yang berbeda di dalam sistem pendidikan dan antara beberapa aspek tertentu di dalam sistem pendidikan dengan sistem sosial, ekonomi, dan budaya lingkungan hidup manusia. Potensi itu akan menjadi kekuatan yang nyata bila indikator itu disusun dan disajikan secara sistematis dan mudah serta menarik mengenai hubungan-hubungan tersebut sehingga mudah dipahami oleh setiap pengelola pendidikan dan para *stakeholders*.

Menurut "*World Education Report*", indikator yang baik mempunyai lima karakteristik, yaitu 1) relevan dengan kebijakan, 2) mudah digunakan, 3) diambil dari suatu variabel, 4) secara teknis valid, reliabel, dan dapat dibandingkan, dan 5) mudah diukur dan menggunakan dana yang sesuai. Pertama, relevan dengan kebijakan, artinya mampu memberikan keterangan secara jelas dan tidak memiliki

multiarti terhadap isu kebijakan kunci. Kedua, mudah digunakan, artinya mudah dipahami karena dalam bentuk angka-angka yang sederhana, sehingga semua pengelola pendidikan di pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota, dan sampai satuan pendidikan memahaminya. Ketiga, diambil dari suatu variabel (misalnya siswa/mahasiswa), sehingga dapat dilakukan interpretasi di dalam konteks variabel lain (misalnya kependudukan) atau satu indikator dapat digunakan bersama-sama dengan indikator lain untuk menghasilkan indikator yang tidak hanya berkaitan dengan kondisi pendidikan melainkan juga kondisi nonpendidikan. Keempat, secara teknis valid, reliabel, dan dapat dibandingkan, artinya data yang dihasilkan selalu sesuai dengan kebutuhan, tepat waktu ketika diperlukan, dan dapat dibandingkan dengan data lainnya agar menghasilkan indikator yang rasional. Kelima, mudah diukur dan penggunaan dana yang sesuai, artinya statistik yang diperoleh sebagai hasil penurunan beberapa indikator mudah diukur dalam kurun waktu yang tersedia dan dengan biaya yang terjangkau.

Pada kenyataannya, sampai saat ini belum semua pengelola pendidikan yang berada di jajaran Kemendikbud maupun pengelola pendidikan di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang memahami apa yang dimaksud dengan indikator pendidikan dan apa kaitannya dengan akuntabilitas keberhasilan program pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, penyusunan dan kajian indikator pendidikan untuk akuntabilitas keberhasilan program pembangunan pendidikan ini menjadi salah satu cara agar pengelola pendidikan dapat memahami berbagai jenis indikator pendidikan yang dapat digunakan untuk menilai program pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan. Untuk itu, Rencana Strategi Kemendikbud dalam rangka Pembangunan Pendidikan 2015—2019 dengan misi pendidikan yang sesuai dengan program pembangunan pendidikan adalah pada misi 2 dan misi 3. Misi 2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan misi 3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Dengan demikian, untuk menilai program pembangunan pendidikan yang dilaksanakan maka digunakan indikator pendidikan yang terkait dengan misi 2 dan misi 3 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah:

1. Bagaimana indikator pendidikan dari misi 2 mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dapat diterapkan dalam program pembangunan pendidikan?
2. Bagaimana indikator pendidikan dari misi 3 mewujudkan pembelajaran bermutu dilihat pada mutu dari guru, mutu dari siswa, dan mutu dari prasarana dapat diterapkan dalam program pembangunan pendidikan?
3. Bagaimana keberhasilan program pembangunan pendidikan yang digambarkan dari indikator pendidikan misi 2 dan misi 3 berdasarkan Renstra Pendidikan 2015-2019?

C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang timbul, terdapat dua tujuan, yaitu 1) tujuan umum dan 2) tujuan khusus. Tujuan umum dilakukannya kajian keberhasilan program pembangunan pendidikan ini adalah untuk melihat keberhasilan pembangunan pendidikan yang diukur menggunakan indikator pendidikan berdasarkan misi 2 dan misi 3 pendidikan. Dengan kata lain, tujuan umum kajian yang berjudul “Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2017/2018” ini adalah bagaimana program pembangunan pendidikan dinyatakan berhasil menggunakan indikator pendidikan berdasarkan misi 2 dan misi 3 pendidikan. Indikator pendidikan ini dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dilihat dari keakuratan, ketepatan, dan kecepatannya oleh para pengambil keputusan serta para penentu kebijakan di bidang pendidikan.

Tujuan khusus kajian keberhasilan program pembangunan pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD, SMP, dan SM tahun pelajaran 2017/2018 tiap Provinsi dan nasional ini adalah:

1. Mengkaji sejauh mana misi 2 yang terdiri dari akses yang meluas, merata, dan berkeadilan jenjang pendidikan dasar dan menengah telah tercapai.
2. Mengkaji sejauh mana misi 3 mewujudkan pembelajaran yang bermutu yang terdiri dari mutu dari guru, mutu dari siswa, dan mutu dari prasarana jenjang pendidikan dasar dan menengah telah tercapai.
3. Mengkaji sejauh mana keberhasilan program pembangunan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan komposit misi 2 akses dan misi 3 pembelajaran bermutu telah tercapai.

D. Ruang Lingkup

Fokus utama kajian program pembangunan pendidikan adalah menghasilkan indikator pendidikan yang berasal dari misi 2 mewujudkan akses dan misi 3 mewujudkan pembelajaran bermutu serta keberhasilan program pembangunan pendidikan. Misi 2 adalah akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, yang dinyatakan dalam nilai 0 sampai 100. Misi 3 adalah mutu dari guru, mutu dari siswa, dan mutu dari prasarana yang dinyatakan dalam nilai 0 sampai 100. Keberhasilan program pembangunan pendidikan dihitung merupakan komposit berdasarkan misi 2 dan misi 3 pendidikan.

Berdasarkan pada tujuan khusus maka terdapat tujuh kajian. Kajian pertama tentang indikator pendidikan sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana akses yang meluas telah terwujud. Kajian kedua tentang indikator pendidikan sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana akses yang merata telah terwujud. Kajian ketiga tentang indikator pendidikan sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana akses yang berkeadilan telah terwujud. Kajian keempat tentang indikator pendidikan sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana mutu dari guru telah terwujud. Kajian kelima tentang indikator pendidikan sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana mutu dari siswa telah terwujud. Kajian keenam tentang indikator pendidikan sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana mutu dari

prasarana telah terwujud. Kajian ketujuh tentang indikator pendidikan sebagai ukuran untuk mengetahui sejauh mana program pembangunan pendidikan menggunakan indikator misi 2 dan misi 3 telah tercapai. Kemudian ketiga kelompok indikator akses pendidikan tersebut diambil rata-ratanya sebagai ukuran keberhasilan misi 2 akses dan ketiga kelompok mutu pendidikan diambil rata-ratanya sebagai ukuran keberhasilan misi 3 pembelajaran bermutu, sedangkan kedua kelompok akses pendidikan dan pembelajaran bermutu diambil rata-ratanya sebagai ukuran keberhasilan program pembangunan pendidikan.

Oleh karena keterbatasan data yang dimiliki maka indikator pendidikan yang disusun juga berasal dari data yang tersedia dan dianggap relevan untuk menggambarkan keberhasilan program pembangunan pendidikan suatu daerah. Untuk itu, hanya digunakan 13 indikator pendidikan dari misi 2 akses pendidikan dan 10 indikator pendidikan dari misi 3 pembelajaran bermutu.

Untuk jenis satuan pendidikan, kajian dilakukan hanya pada pendidikan dasar dan menengah atau jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SM yang dikelola oleh Kemendikbud.

E. Manfaat Studi

Kajian terhadap program pembangunan pendidikan ini memberikan informasi tentang keberhasilan program pendidikan di tingkat pusat, Provinsi, maupun kabupaten/kota. Namun, pada buku ini hanya dijabarkan untuk tingkat Provinsi dan nasional secara makro. Oleh karena itu, kajian ini sangat bermanfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota agar dapat diketahui seberapa jauh ketercapaian misi 2 dan misi 3 dari Renstra Pendidikan dan keberhasilan program pembangunan pendidikan.

1. Bagi pemerintah pusat:

- a. Dapat mengetahui bagaimana kesenjangan antarPROVINSI maupun antarkabupaten/kota dalam pencapaian keberhasilan pendidikan menggunakan ukuran misi 2 dan misi 3 pendidikan.
- b. Dapat mengetahui misi pendidikan mana yang belum dapat dicapai pada tingkat nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. Dapat mengetahui apakah akses pendidikan telah meluas, merata, dan berkeadilan pada tingkat nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota.
- d. Dapat mengetahui apakah mutu pendidikan telah tercapai dari segi mutu guru, mutu siswa, dan mutu prasarana pada tingkat nasional, Provinsi, dan kabupaten/kota.
- e. Dapat digunakan sebagai alokasi pengadaan prasarana sekolah, penambahan ruang kelas baru atau rehabilitasi yang terkait dengan prasarana pendidikan pada tingkat nasional.
- f. Dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan atau tambahan yang diperlukan pada tingkat nasional.
- g. Dapat sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tingkat nasional terkait dengan misi 2 dan misi 3 pendidikan.

2. Bagi pemerintah Provinsi:
 - a. Dapat mengetahui bagaimana kesenjangan antarkabupaten/kota dalam pencapaian keberhasilan pendidikan menggunakan ukuran misi 2 dan misi 3 pendidikan.
 - b. Dapat mengetahui misi pendidikan yang mana yang belum dapat dicapai pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
 - c. Dapat mengetahui apakah akses pendidikan telah meluas, merata, dan berkeadilan pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
 - d. Dapat mengetahui apakah mutu pendidikan telah tercapai dari segi mutu guru, mutu siswa, dan mutu prasarana pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.
 - e. Dapat digunakan sebagai alokasi pengadaan prasarana sekolah, penambahan ruang kelas baru atau rehabilitasi yang terkait dengan prasarana pendidikan pada tingkat Provinsi.
 - f. Dapat digunakan sebagai bahan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan atau tambahan yang diperlukan pada tingkat Provinsi.
 - g. Dapat sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tingkat Provinsi terkait dengan misi 2 dan misi 3 pendidikan.

3. Bagi pemerintah kabupaten/kota:
 - a. Dapat mengetahui misi pendidikan mana yang belum dapat dicapai oleh kabupaten/kota.
 - b. Dapat digunakan sebagai alokasi pengadaan prasarana sekolah, penambahan ruang kelas baru atau rehabilitasi yang terkait dengan prasarana pendidikan pada tingkat kabupaten/kota.
 - c. Dapat digunakan sebagai bahan kebutuhan sumber daya manusia pendidikan atau tambahan yang diperlukan pada tingkat kabupaten/kota.
 - d. Dapat sebagai bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan tingkat kabupaten/kota terkait dengan misi 2 dan 3 pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rencana Strategi Pendidikan 2015-2019 ditetapkan lima misi. Misi dengan kode M1 adalah mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat, kode M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, kode M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu, kode M4 adalah mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa, dan M5 adalah mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Misi Kemendikbud dapat dimaknai dalam lima hal sebagai berikut.

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah dengan menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan, memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan, serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi.
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional;

mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi Renstra dapat pula dijelaskan sebagai bagian dari revolusi mental. Misi Renstra tersebut dilihat sebagai tujuh jalan revolusi mental yang mengintegrasikan pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu

1. Menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian;
2. Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak;
3. Menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak;
4. Memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar;
5. Memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak;
6. Membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah;
7. Menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.

Berdasarkan pada misi pendidikan maka kajian ini tidak menggunakan semua misi Kemendikbud, melainkan hanya diterapkan pada pendidikan, yaitu misi 2 mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan misi 3 mewujudkan pembelajaran yang bermutu karena disesuaikan dengan kajian keberhasilan program pembangunan pendidikan.

B. Program Pembangunan Pendidikan

Sesuai dengan misi pendidikan dan kebudayaan misi 1 sampai misi 5 maka layanan pendidikan hanya difokuskan pada misi 2 dan misi 3. Oleh karena itu, program pembangunan pendidikan yang dimaksud di sini adalah semua program yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi 2, yaitu mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan serta misi 3 mewujudkan pembelajaran yang bermutu dilihat dari segi guru, siswa, dan prasarana.

Mewujudkan misi 2 dilaksanakan dengan cara mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun, meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Mewujudkan misi 3 dilaksanakan dengan meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan dan memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman dan penguatan praktik baik dan inovasi.

Berdasarkan misi 2 dan misi 3 pendidikan maka untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi maka diperlukan tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—2019. Misi 2 dan misi 3 ada pada tujuan strategis 3 dan

tujuan strategis 4. Tujuan strategi 3 adalah peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Peningkatan akses pendidikan di semua jenjang dan dalam pendidikan masyarakat telah dilaksanakan selama ini, namun upaya lebih lanjut akan dilakukan mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antarPROVINSI dan kabupaten/kota. Perhatian lebih besar diberikan pada peningkatan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus. Peningkatan akses PAUD perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan karena PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dalam menyiapkan memasuki jenjang pendidikan dasar. Selain itu, meskipun penuntasan wajib belajar 9 tahun telah dilaksanakan namun peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar 12 tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya, lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah merupakan fokus peningkatan akses pendidikan menengah. Peningkatan akses pendidikan masyarakat mencakup peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan pelatihan serta pendidikan orang dewasa/keluarga (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Tujuan strategis 4 adalah peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran berorientasi pada pembentukan karakter. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu PAUD merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya. Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik, evaluasi secara terus menerus atas pelaksanaan kurikulum, sehingga menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan keterampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus sangat diperlukan untuk menjamin mutu peserta pelatihan dan kursus dapat diterima oleh pasar kerja. Peningkatan mutu pendidikan orang dewasa juga dilakukan dengan pendidikan keluarga yang memberikan wawasan, pemahaman dan keterampilan tentang kiat mendidik anak melalui pendampingan yang menyeluruh (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015a).

Berdasarkan program pembangunan pendidikan yang dijelaskan di atas maka kajian ini diterapkan hanya untuk jenjang pendidikan formal, yaitu SD, SMP, dan SM (penjumlahan dari SMA dan SMK), menggunakan misi 2 dan misi 3 yang terkait dengan pendidikan.

C. Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi Pendidikan

Berdasarkan misi pendidikan maka ditentukan berbagai jenis indikator pendidikan yang sesuai dengan masing-masing misi pendidikan tersebut. Indikator pendidikan hanya dapat diperoleh setelah ada perhitungan antara berbagai variabel data pendidikan maupun data pendidikan dengan data nonpendidikan.

1. Misi 2 Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan

Berdasarkan misi 2 akses maka jenis indikator pendidikan yang digunakan juga dirinci menjadi tiga, yaitu akses yang meluas terdiri dari delapan indikator, akses yang merata terdiri dari empat indikator, dan akses yang berkeadilan terdiri dari tiga indikator sehingga terdapat 15 indikator.

Untuk menentukan apakah misi 2 akses yang meluas telah berhasil dilaksanakan maka digunakan delapan jenis indikator pendidikan, yaitu

- a. Rasio siswa per sekolah (R-S/Sek)
- b. Rasio siswa per kelas (R-S/K)
- c. Rasio kelas per ruang kelas (R-K/RK)
- d. Persentase perpustakaan (%Perpus)
- e. Persentase ruang usaha kesehatan sekolah (RUKS) (%RUKS)
- f. Persentase laboratorium (%Lab)
- g. Persentase tempat olahraga (%TOR)
- h. Persentase toilet siswa (%TS)

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk akses yang meluas disesuaikan dengan data tahunan yang dihasilkan. R-S/Sek dijadikan ukuran untuk melihat besar kecilnya sekolah yang ditetapkan dari kepadatan kelas. Untuk SD adalah 32 maka seharusnya rasionya 192.

R-S/K digunakan untuk melihat padatnya suatu kelas berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23, Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Setiap kelas seharusnya dalam perencanaan pembangunan sekolah diisi oleh 32 siswa untuk jenjang SD dan 36 untuk jenjang SMP.

R-K/RK digunakan untuk melihat pemakaian atau pemanfaatan ruang kelas apakah sudah sesuai dengan tujuan bahwa setiap ruang kelas hanya digunakan sekali kegiatan belajar mengajar. Idealnya adalah 1. Kurang dari 1 berarti kelebihan dan lebih dari 1 berarti kekurangan.

%Perpus dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan perpustakaan di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki perpustakaan. Idealnya adalah 100% artinya semua sekolah memiliki perpustakaan.

%RUKS dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan ruang usaha kesehatan di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki ruang RUKS. Idealnya adalah 100% artinya semua sekolah memiliki RUKS.

%Lab dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan laboratorium di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki laboratorium, terlebih SMA harusnya memiliki 6 jenis laboratorium dan SMK memiliki 3 jenis laboratorium.

%TOR dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan tempat olahraga di sekolah karena setiap sekolah harusnya memiliki tempat olahraga. Idealnya adalah 100% artinya semua sekolah memiliki tempat olahraga.

%TS dijadikan ukuran untuk melihat ketersediaan toilet untuk siswa, di mana siswa SD adalah 60 untuk laki-laki dan 50 untuk perempuan, siswa SMP dan SM adalah 40 untuk laki-laki dan 30 untuk perempuan. Idealnya adalah 100 artinya tiap sekolah memiliki toilet untuk 60 siswa SD, 40 siswa SMP dan SM.

Dengan demikian, untuk mengetahui apakah akses pendidikan telah meluas maka kedelapan indikator tersebut dilakukan konversi untuk menghasilkan satuan yang sama menjadi nilai akses yang meluas. Nilai akses yang meluas adalah penjumlahan nilai kedelapan indikator akses yang meluas dibagi delapan dengan asumsi bahwa setiap indikator akses yang meluas memiliki peranan yang sama.

Untuk menentukan apakah misi 2 akses yang merata telah berhasil dilaksanakan dengan baik maka digunakan empat jenis indikator pendidikan, yaitu:

- a. Angka partisipasi kasar (APK) atau angka partisipasi murni (APM).
- b. Angka masukan kasar (AMK) atau angka masukan murni (AMM) khusus SD dan angka melanjutkan (AM) khusus SMP dan SM.
- c. Tingkat pelayanan sekolah (TPS)
- d. Satuan biaya (SB)

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk mengetahui akses yang merata dan disesuaikan dengan data tahunan yang dihasilkan. Penggunaan APK tingkat SD adalah untuk melihat partisipasi siswa tingkat SD terhadap penduduk usia 7-12 tahun, APK tingkat SMP adalah untuk melihat partisipasi siswa tingkat SMP terhadap penduduk usia 13-15 tahun, sedangkan APK tingkat SM adalah untuk melihat partisipasi siswa tingkat SM terhadap penduduk usia 16-18 tahun. Sebaliknya, APM tingkat SD adalah partisipasi siswa tingkat SD yang sesuai dengan usia sekolah resmi SD, APM tingkat SMP adalah partisipasi siswa tingkat SMP yang sesuai dengan usia resmi SMP, sedangkan APM tingkat SM adalah partisipasi siswa tingkat SM yang sesuai dengan usia resmi SM. APK bisa terjadi lebih dari 100% karena adanya siswa di luar usia resmi yang masih berada pada jenjang tersebut.

Pemilihan AMK SD karena merupakan akses pertama kali masuk ke SD, sedangkan AM khusus untuk SMP dan SM, karena merupakan akses lanjutan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Artinya, untuk masuk SD tidak harus tamat dari PAUD tetapi dapat langsung dari rumah tangga atau dari penduduk usia 6--7 tahun. Idealnya adalah 50%. Sebaliknya, pemilihan AM SMP karena berasal dari lulusan SD/MI atau Paket A yang dapat melanjutkan ke tingkat SMP, demikian juga AM SM karena berasal dari lulusan SMP/MTs atau Paket B yang dapat melanjutkan ke tingkat SM/MA. Idealnya adalah 100% artinya semua lulusan melanjutkan ke jenjang berikutnya.

TPS dijadikan alat untuk menilai tingkat pelayanan pendidikan sekolah. Bila nilainya kecil, artinya dapat menampung siswa lebih besar jika dibandingkan dengan

nilai yang besar, artinya dapat menampung lebih sedikit. Dengan demikian, akses yang besar dapat diartikan lebih merata bila dibandingkan dengan akses yang kecil.

SB dijadikan alat untuk menilai akses yang merata dilihat dari segi biaya. Bila nilainya kecil maka partisipasi pemerintah dalam pendidikan kecil, sehingga akses sekolah oleh masyarakat kurang merata. Sebaliknya, bila nilainya besar maka partisipasi pemerintah dalam pendidikan sangat besar, sehingga akses ke sekolah oleh masyarakat lebih mudah.

Dengan demikian, untuk mengetahui akses yang merata maka keempat indikator tersebut dilakukan konversi untuk menghasilkan satuan yang sama menjadi nilai akses yang merata. Nilai keempat indikator akses yang merata kemudian dijumlahkan dan dibagi empat dengan asumsi bahwa setiap indikator memiliki peranan yang sama.

Untuk menentukan apakah misi 2 akses yang berkeadilan telah berhasil dilaksanakan dengan baik maka digunakan tiga jenis indikator pendidikan, yaitu:

- a. Perbedaan gender APK (PG APK)
- b. Indeks paritas gender APK (IPG APK)
- c. Persentase siswa swasta (%S-Swt).

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk melihat keadilan dalam memperoleh layanan pendidikan disesuaikan dengan data tahunan yang tersedia. PG APK dijadikan ukuran untuk menilai apakah ada perbedaan layanan pendidikan antara laki-laki dengan perempuan. Bila nilainya minus (-) atau positif (+) berarti masih terjadi PG APK dalam layanan pendidikan. Disebut tidak ada PG APK dalam layanan pendidikan bila nilainya 0. Jadi, idealnya PG APK adalah 0.

IPG APK dijadikan ukuran untuk menilai apakah terjadi kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan antara laki-laki dengan perempuan. Bila nilainya kurang dari 1 (0,..) atau lebih dari 1 (1,..) berarti belum ada kesetaraan gender dalam layanan pendidikan. Bila nilainya kurang dari 1 berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan, sebaliknya bila lebih dari 1 berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Disebut setara dalam layanan pendidikan bila nilainya 1. Jadi, idealnya IPG APK adalah 1.

%S-Swt dijadikan ukuran keadilan dilihat dari status sekolah antara negeri dengan swasta sebagai partisipasi masyarakat. Artinya, tidak ada perbedaan dalam bersekolah di negeri maupun swasta. %S-Swt belum diketahui berapa nilai idealnya. Namun, makin tinggi nilainya berarti makin tinggi partisipasi swasta dalam pendidikan.

Dengan demikian, untuk mengetahui akses yang berkeadilan dalam layanan pendidikan maka ketiga indikator yang berkeadilan tersebut dilakukan konversi sehingga memiliki satuan yang sama menjadi nilai akses yang berkeadilan. Nilai akses yang berkeadilan kemudian dijumlahkan dan dibagi tiga dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

Bila masing-masing kelompok indikator telah diperoleh nilainya dengan menggunakan standar tertentu pada Tabel 3.3 maka untuk mengetahui akses pendidikan dilihat dari tiga sumber akses maka nilai tiga sumber akses dijumlahkan kemudian dibagi 3 dengan asumsi bahwa kelompok indikator memiliki peranan yang sama. (Kintamani, 2016).

2. Misi 3 Mewujudkan Pembelajaran Bermutu

Berdasarkan misi 3 pembelajaran yang bermutu maka jenis indikator pendidikan yang digunakan dapat dirinci menjadi tiga, yaitu mutu dari guru yang terdiri dari tiga indikator, mutu dari siswa terdiri dari enam indikator, dan mutu dari prasarana terdiri dari enam indikator sehingga terdapat 15 indikator.

Untuk menentukan apakah misi 3 mutu guru telah berhasil dilaksanakan dengan baik maka digunakan tiga jenis indikator pendidikan, yaitu:

- a. Persentase guru layak (%GL)
- b. Persentase guru sertifikat (%GS)
- c. Rasio siswa per guru (R-S/G)

Pemilihan jenis indikator pendidikan mutu guru disesuaikan dengan data tahunan yang dihasilkan. Mutu sumber daya manusia dilihat dari %GL, %GS, dan R-S/G karena guru dianggap yang paling menentukan mutu pendidikan. %GL dijadikan ukuran untuk melihat guru yang mengajar sesuai dengan persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Makin besar nilai %GL diharapkan guru mengajar lebih baik, sehingga mutu pendidikan diharapkan makin meningkat. Sesuai dengan UU tersebut maka %GL untuk SD sampai SM diukur dengan tingkat ijazah guru adalah sarjana atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi. Idealnya adalah 100% artinya semua guru memiliki ijazah sarjana atau Diploma 4.

%GS adalah guru yang memiliki sertifikat mengajar, artinya selain guru memiliki ijazah S1 dan lebih tinggi maka langkah berikutnya dilakukan sertifikasi guru. Makin tinggi nilainya maka makin banyak guru yang telah memiliki sertifikat atau memiliki kompetensi dalam mengajar, yang berarti pendidikan akan lebih bermutu. Idealnya adalah 100% artinya semua guru sudah memiliki sertifikat mengajar.

R-S/G dijadikan ukuran untuk melihat kuantitas guru. Bila angka R-S/G lebih kecil dari standar berarti kelebihan guru, sedangkan bila lebih besar dari standar berarti kekurangan guru.

Dengan demikian, untuk mengetahui mutu guru dalam layanan pendidikan maka ketiga indikator mutu guru tersebut dilakukan konversi sehingga memiliki satuan yang sama menjadi nilai mutu guru. Nilai mutu guru kemudian dijumlahkan dan dibagi tiga dengan asumsi bahwa semua indikator memiliki peranan yang sama.

Untuk menentukan apakah misi 3 dilihat dari mutu siswa telah dilaksanakan dengan baik maka digunakan enam jenis indikator pendidikan, yaitu:

- a. Persentase siswa baru PAUD (%SB PAUD) khusus SD
- b. Angka lulusan (AL)
- c. Angka mengulang (AU)
- d. Angka putus sekolah (APS)
- e. Angka bertahan tingkat 5 (AB5 SD) khusus SD atau angka bertahan (AB) khusus SMP dan SM.
- f. Rata-rata lama belajar (RLB)

Pemilihan jenis indikator pendidikan untuk melihat mutu siswa disesuaikan dengan data tahunan yang tersedia. Mutu masukan siswa SD dilihat dari %SB PAUD, sehingga makin tinggi %SB PAUD berarti makin baik. Mutu keluaran siswa dapat dilihat dari AL,

sehingga makin tinggi AL makin baik. Idealnya adalah 100% artinya semua siswa dapat menamatkan jenjang pendidikan dengan baik.

Mutu siswa dari proses belajar mengajar dilihat dari AU dan APS merupakan faktor yang negatif dari mutu pendidikan karena banyaknya siswa mengulang dan putus sekolah menunjukkan mutu pendidikan yang kurang baik. Oleh karena itu, makin kecil AU dan APS menunjukkan proses belajar-mengajar yang makin baik, sehingga mutu pendidikan akan meningkat. Idealnya adalah 0%.

Dengan melihat AB 5 SD, bisa diketahui siswa yang dapat bertahan sampai tingkat 5 jenjang SD, sehingga pendidikan menjadi efisien dan setelah tingkat 5 atau ketika siswa sudah mencapai tingkat 5 maka tidak akan menjadi buta huruf bila siswa tersebut tidak sekolah lagi. AB 5 SD adalah siswa yang dapat bertahan sampai tingkat 5 dengan nilai 95%. AB adalah siswa yang dapat bertahan sampai tingkat tertinggi. Dengan demikian, nilai maksimal AB adalah 100% artinya setiap siswa bertahan di sekolah sampai mereka lulus di masing-masing jenjang. Oleh karena itu, makin tinggi nilai AB berarti makin baik.

RLB juga ikut berpengaruh dalam efisiensi pendidikan karena RLB yang tinggi menyebabkan semakin besarnya tenaga, waktu, dan biaya yang digunakan dalam proses belajar mengajar, sehingga pendidikan menjadi tidak efisien. Makin tinggi nilai RLB makin buruk karena membutuhkan waktu lebih banyak karena adanya siswa yang mengulang. Idealnya untuk SD adalah 6 tahun dan SMP/SM adalah 3 tahun.

Dengan demikian, untuk mengetahui mutu siswa dalam layanan pendidikan maka keenam indikator mutu siswa tersebut dilakukan konversi sehingga memiliki satuan yang sama menjadi nilai mutu siswa. Nilai mutu siswa kemudian dijumlahkan dan dibagi enam dengan asumsi bahwa semua indikator siswa memiliki peranan yang sama.

Untuk menentukan apakah misi 3 mutu prasarana telah berhasil dilaksanakan dengan baik maka digunakan enam jenis indikator pendidikan, yaitu:

- a. Persentase ruang kelas baik (%RKB)
- b. Persentase perpustakaan baik (%Perpusb)
- c. Persentase RUKS baik (%RUKSb)
- d. Persentase laboratorium baik (%Labbb) khusus SMP dan SM.
- e. Persentase tempat berolahraga baik (%TORb)
- f. Persentase toilet siswa baik (%TSb)

Pemilihan jenis indikator pendidikan mutu prasarana disesuaikan dengan data tahunan yang dihasilkan. Proses belajar mengajar juga ditentukan oleh ketersediaan prasarana pendidikan seperti ruang kelas baik dan fasilitas sekolah lain seperti perpustakaan, RUKS, laboratorium, tempat olahraga, dan toilet siswa yang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa %RKB dapat dijadikan ukuran untuk melihat kondisi ruang kelas yang baik dan juga memacu siswa untuk belajar lebih baik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan. Makin besar nilai prasarana diharapkan mutu pendidikan akan meningkat karena proses belajar mengajar menjadi lebih baik sehingga siswa maupun guru dapat berinteraksi dengan baik pula.

%Perpusb menyebabkan siswa bertahan untuk belajar menggunakan buku penunjang yang berada di perpustakaan karena ruangan yang baik dan sarana buku yang lengkap. Idealnya adalah 100% artinya semua perpustakaan dalam kondisi baik.

%RUKSb menyebabkan siswa lebih terjamin dalam melaksanakan proses belajar mengajar karena bila ada masalah kesehatan dapat dengan segera ditangani di RUKS, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Idealnya adalah 100% artinya semua RUKS dalam kondisi baik.

%Rlabb menyebabkan siswa dapat belajar di laboratorium dengan baik karena kelengkapan fasilitas yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan laboratorium. Idealnya adalah 100% artinya semua laboratorium dalam kondisi baik.

%TORb menyebabkan siswa dapat berolahraga dengan baik, sehingga lebih sehat karena kelengkapan fasilitas yang diberikan. Jadi, adanya fasilitas sekolah yang baik dapat meningkatkan siswa untuk belajar dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Idealnya adalah 100% artinya semua tempat olahraga baik yang ada dalam ruangan atau di luar dalam kondisi baik.

%TSb menyebabkan siswa dapat memenuhi kebutuhan alamiahnya bila ketersediaan toilet bagi siswa dalam kondisi baik sehingga juga membuat siswa sehat. Idealnya adalah 100% artinya semua tempat olahraga baik yang ada dalam ruangan atau di luar dalam kondisi baik.

Dengan demikian, untuk mengetahui mutu prasarana dalam layanan pendidikan maka keenam indikator mutu prasarana tersebut dijumlahkan dan dibagi enam dengan asumsi bahwa semua indikator prasarana memiliki peranan yang sama.

Bila masing-masing kelompok indikator telah diperoleh nilainya dengan menggunakan standar pada Tabel 3.3 maka untuk mengetahui mutu layanan pendidikan dilihat dari tiga sumber mutu maka nilai tiga sumber mutu dijumlahkan kemudian dibagi 3 dengan asumsi bahwa kelompok indikator memiliki peranan yang sama (Kintamani, 2016).

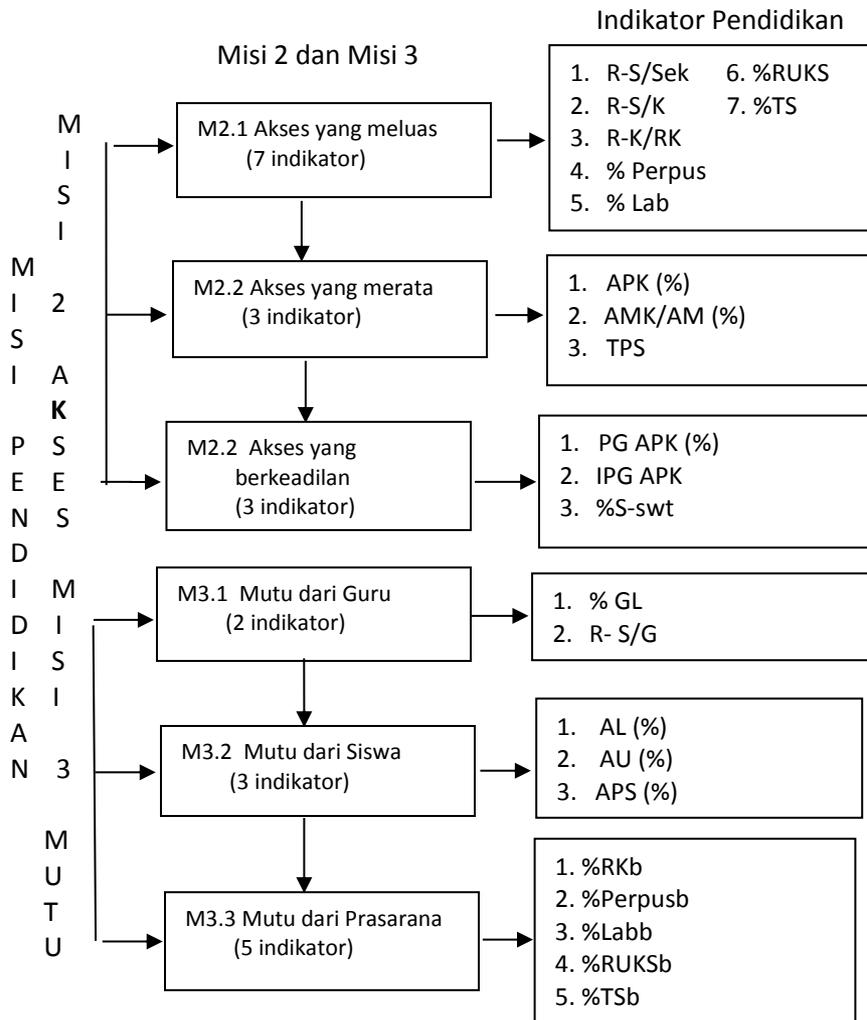
3. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan

Berdasarkan misi 2 terdapat 15 indikator untuk menilai akses dan misi 3 terdapat 15 indikator untuk menilai pembelajaran yang bermutu, sehingga terdapat 30 indikator pendidikan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pendidikan, baik di jenjang SD, SMP, maupun SM. Dengan demikian, untuk mengetahui keberhasilan program pembangunan pendidikan maka nilai indikator dari misi 2 dan misi 3 pendidikan tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan dua dengan asumsi misi 2 dan misi 3 memiliki peranan yang sama (Kintamani, 2016).

D. Pengukuran Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan

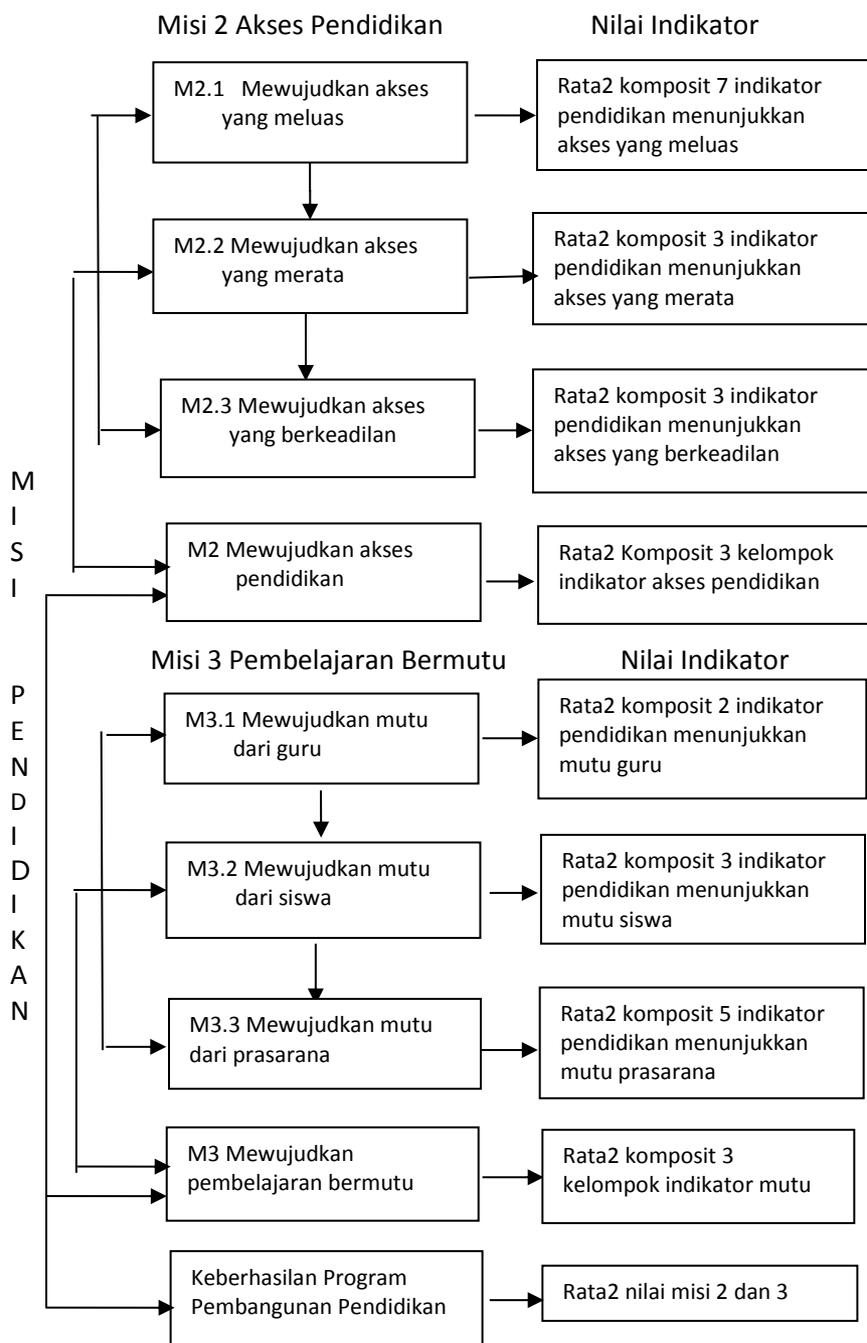
Sesuai dengan penjelasan sebelumnya dan berdasarkan pada 30 jenis indikator pendidikan dari misi 2 dan misi 3 pendidikan maka hanya 23 jenis indikator yang dapat digunakan untuk menghitung keberhasilan program pembangunan pendidikan dasar dan menengah tahun 2017/2018 karena ketersediaan data yang ada. Dari 23 jenis indikator tersebut, 13 jenis indikator pendidikan dari misi 2 akses dan 10 jenis indikator pendidikan misi 3 pembelajaran bermutu.

Bagan 2.1
Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3
Rencana Strategi Kemendikbud 2015-2019



Pada Bagan 2.1 dijelaskan adanya dua misi, yaitu misi 2 mewujudkan akses pendidikan dan misi 3 mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Pada misi 2 terdiri dari tiga subkelompok indikator pendidikan, yaitu akses yang meluas dengan tujuh indikator, akses yang merata dengan tiga indikator, dan akses yang berkeadilan dengan tiga indikator. Pada misi 3 juga terdapat tiga subkelompok, yaitu mutu guru dengan dua indikator, mutu siswa dengan tiga indikator, dan mutu prasarana dengan lima indikator. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015e).

Bagan 2.2
Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan
Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3



Bagan 2.2 adalah gambaran keberhasilan program pembangunan pendidikan merupakan rata-rata dari komposit kelompok indikator pendidikan misi 2 dan misi 3 (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2015e).

Dengan demikian, misi 2 dan misi 3 pendidikan menggunakan 23 indikator pendidikan. Misi 2 tercapai menggunakan komposit 13 indikator akses pendidikan menghasilkan nilai akses yang meluas dari 7 indikator, akses yang merata dari 3 indikator, dan akses yang berkeadilan dari 3 indikator atau disebut mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan. Misi 3 tercapai menggunakan komposit 10 indikator menghasilkan nilai mutu guru dari 2 indikator, mutu siswa dari 3 indikator, dan mutu prasarana dari 5 indikator atau disebut mewujudkan pembelajaran yang bermutu.

Setelah misi 2 dan misi 3 mendapatkan nilai berdasarkan Tabel 3.3 Standar maka keberhasilan program pembangunan pendidikan merupakan rata-rata dari penjumlahan nilai misi 2 dan misi 3.

BAB III METODOLOGI

A. Metode

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi digunakan dalam penyusunan keberhasilan program pembangunan pendidikan ini adalah dengan mempelajari dokumen yang ada untuk dilakukan analisis dengan menggunakan rumus-rumus tertentu dan ketentuan yang berlaku. Dokumentasi yang digunakan adalah statistik yang dihasilkan oleh PDSPK. Statistik dimaksud adalah Statistik SD, SMP, SMA, dan SMK tahun pelajaran 2017/2018 karena yang dilakukan analisis adalah semua jenjang pendidikan formal pada tingkat Provinsi dan nasional. Selain itu, digunakan juga proyeksi penduduk usia masuk sekolah dan usia sekolah yang dihasilkan oleh Bappenas, BPS, dan UNFPA (Bappenas, BPS, UNFPA, 2012).

Tabel 3.1
Variabel Data Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3

No.	Variabel Data	SD	SMP	SM
A.	Pendidikan			
1	Sekolah	v	v	v
2	Siswa Baru	v	v	v
3	Siswa mnr jenis kel	v	v	v
	a. Laki-laki	v	v	v
	b. Perempuan	v	v	v
	Siswa swasta	v	v	v
	Siswa tingkat tertinggi tahun lalu	v	v	v
	Siswa tahun lalu	v	v	v
4	Lulusan	v	v	v
5	Guru	v	v	v
	Guru S1+	v	v	v
6	Mengulang	v	v	v
7	Putus Sekolah	v	v	v
8	Kelas	v	v	v
9	Ruang Kelas	v	v	v
	Ruang Kelas Baik	v	v	v
10	Perpustakaan	v	v	v
	Perpustakaan Baik	v	v	v
11	Laboratorium	v	v	v
	Laboratorium Baik	v	v	v
12	Ruang UKS	v	v	v
	Ruang UKS Baik	v	v	v
13	Toilet Siswa	v	v	v
	Toilet Siswa Baik	v	v	v
B.	Nonpendidikan			
14	Penduduk usia masuk SD	v	-	-
15	Penduduk usia sekolah	v	v	v
	a. Laki-laki	v	v	v
	b. Perempuan	v	v	v
	Jumlah	28	27	27

Catatan: Penduduk usia masuk SD adalah usia 6-7 tahun, penduduk usia SD adalah 7-12 tahun, SMP adalah 13-15 tahun, dan SM adalah usia 16-18 tahun.

Berdasarkan keempat statistik dan proyeksi penduduk tersebut maka dihasilkan 15 variabel data yang dianalisis dengan rincian 28 jenis data untuk SD dan 27 jenis data untuk SMP dan SM yang terdapat pada Tabel 3.1. (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2017a, 2017b, 2017c, dan 2017d serta Bappenas, BPS dan UNFPA, 2012).

Dengan menggunakan variabel data dan rincian pada Tabel 3.1 maka dihasilkan indikator pendidikan berdasarkan misi 2 yang terdiri dari 13 jenis indikator dan misi 3 pendidikan yang terdiri dari 10 jenis indikator dirangkum pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Indikator Pendidikan Berdasarkan Misi 2 dan Misi 3

No.	Indikator	Singkatan	SD	SMP	SM
A.	Misi 2 Akses yg meluas, merata, dan berkeadilan				
	Misi 2.1 Akses yang meluas				
1	Rasio Siswa per Sekolah	R-S/Sek	v	v	v
2	Rasio Siswa per Kelas	R-S/K	v	v	v
3	Rasio Kelas per Ruang Kelas	R-K/RK	v	v	v
4	Persentase Perpustakaan	%Perpus	v	v	v
5	Persentase Laboratorium	%Lab	v	v	v
6	Persentase Ruang UKS	%RUKS	v	v	v
7	Persentase Toilet Siswa	%Toilet	v	v	v
	Misi 2.2 Akses yang merata				
1	Angka Partisipasi Kasar	APK	v	v	v
2	Angka Masukan Kasar/Angka Melanjutkan	AMK/AM	v	v	v
3	Tingkat Pelayanan Sekolah	TPS	v	v	v
	Misi 2.3 Akses yang berkeadilan				
1	Perbedaan Gender APK	PG APK	v	v	v
2	Indeks Paritas Gender APK	IPGAPK	v	v	v
3	Persentase Siswa Swasta	%SSwt	v	v	v
B.	Misi 3 Pembelajaran Bermutu				
	Misi 3.1 Mutu dari Guru				
1	Persentase Guru Layak	%GL	v	v	v
2	Rasio Siswa per Guru	R-S/G	v	v	v
	Misi 3.1 Mutu dari siswa				
1	Angka Lulusan	AL	v	v	v
2	Angka Mengulang	AU	v	v	v
3	Angka Putus Sekolah	APS	v	v	v
	Misi 3.3 Mutu dari Prasarana				
1	Persentase R.Kelas baik	%RKb	v	v	v
2	Persentase Perpustakaan baik	%Perpusb	v	v	v
3	Persentase Laboratorium baik	%Labbb	v	v	v
4	Persentase Laboratorium baik	%RUKSb	v	v	v
5	Persentase Toilet Siswa baik	%TSb	v	v	v
	Jumlah		23	23	23

Oleh karena indikator pendidikan menggunakan satuan yang berbeda seperti rasio dan persentase maka ditentukan standar untuk melakukan konversi sehingga

nilai setiap indikator pendidikan menggunakan satuan yang sama. Nilai akses pendidikan menggunakan komposit indikator dalam tiga kelompok sehingga dapat dijumlahkan dan dirata-ratakan menjadi keberhasilan program akses pendidikan. Nilai mutu pendidikan menggunakan komposit indikator dalam tiga kelompok sehingga dapat dijumlahkan dan dirata-ratakan menjadi keberhasilan pembelajaran yang bermutu. Nilai akses pendidikan dan mutu pendidikan kemudian dijumlahkan dan dirata-ratakan menjadi keberhasilan program pembangunan pendidikan. Standar untuk melakukan konversi setiap indikator berdasarkan misi 2 dan misi 3 pendidikan yang disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Standar untuk Melakukan Konversi Tiap-tiap Indikator Pendidikan

No.	Jenis Indikator	Singkatan	Satuan	SD	SMP	SM	Keterangan
A.	Misi 2 Akses yg meluas, merata, dan berkeadilan						
	Misi 2.1 Akses yang meluas						
1	Rasio Siswa per Sekolah	R-S/Sek	Siswa	192	324	432	Permendikbud
2	Rasio Siswa per Kelas	R-S/K	Siswa	32	36	36	Permendikbud
3	Rasio Kelas per Ruang Kelas	R-K/RK	Kelas	1	1	1	Ideal
4	Persentase Perpustakaan	%Perpus	Persentase	100	100	100	Ideal
5	Persentase Laboratorium	%Lab	Persentase	100	100	100	Ideal
6	Persentase Ruang UKS	%RUKS	Persentase	100	100	100	Ideal
7	Persentase Toilet Siswa	%TS	Persentase	100	100	100	Ideal
	Misi 2.2 Akses yang merata						
1	Angka Partisipasi Kasar	APK	Persentase	100	80	70	Renstra
2	Angka Masukan Kasar/ Angka Melanjutkan	AMK AM	Persentase	50 -	- 100	- 100	Ideal
3	Tingkat Pelayanan Sekolah	TPS	Siswa	52	81	62	Nasional
	Misi 2.3 Akses yang berkeadilan						
1	Perbedaan Gender APK	PG APK	Persentase	0	0	0	Ideal
2	Indeks Paritas Gender APK	IPG APK	Indeks	1	1	1	Ideal
3	Persentase Siswa Swasta	% S-Swt	Persentase	10,00	25,00	50,00	Nasional
B.	Misi 3 Pembelajaran Bermutu						
	Misi 3.1 Mutu dari Guru						
1	Persentase Guru Layak	%GL	Persentase	100	100	100	Ideal
2	Rasio Siswa per Guru	R-S/G	Siswa	16	14	12	Nasional
	Misi 3.2 Mutu dari siswa						
1	Angka Lulusan	AU	Persentase	100	100	100	Ideal
2	Angka Mengulang	APS	Persentase	0	0	0	Ideal
3	Angka Putus Sekolah	AL	Persentase	0	0	0	Ideal
	Mutu dari Prasarana						
1	Persentase Ruang Kelas baik	% Rkb	Persentase	100	100	100	Ideal
2	Persentase Perpustakaan baik	%Perpusb	Persentase	100	100	100	Ideal
3	Persentase Laboratorium baik	%Labbb	Persentase	100	100	100	Ideal
4	Persentase Ruang UKS baik	%RUKSb	Persentase	100	100	100	Ideal
5	Persentase Toilet Siswa baik	%Toiletb	Persentase	100	100	100	Ideal
	Jumlah Indikator			23	23	23	

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat diketahui adanya 23 jenis indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan. Dari 23 jenis indikator tersebut maka dua indikator menggunakan peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan, 17 indikator menggunakan standar ideal, tiga indikator menggunakan angka nasional, dan satu indikator menggunakan Renstra Pendidikan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis secara deskriptif dengan menggunakan standar ideal. Standar ideal dimaksud digunakan untuk menilai masing-masing misi pendidikan dan dirinci menjadi lima nilai, yaitu paripurna dengan nilai 95,00-100,00, utama dengan nilai 90,00-94,99, madya dengan nilai 85,00-89,99, pratama dengan nilai 80,00-84,99, dan kurang bila nilainya <80. Rincian masing-masing misi pendidikan menggunakan standar ideal berdasarkan kategori Wajar Dikdas 9 Tahun dan disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Jenis Keberhasilan Pendidikan Berdasarkan Kategori Wajar Dikdas 9 Tahun

No.	Nilai	Misi 2, Misi 3, Keberhasilan
1	95.00-100.00	Paripurna
2	90.00-94.99	Utama
3	85.00-89.99	Madya
4	80.00-84.99	Pratama
5	kurang dari 80.00	Kurang

Selain itu, untuk analisis yang dilakukan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sehingga memudahkan untuk memahami hasil dan interpretasi.

B. Cara Menghitung Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan yang disajikan sebanyak 30 jenis indikator yang dibagi 15 indikator akses dan 15 indikator pembelajaran bermutu. Namun, berdasarkan data yang tersedia, hanya 23 indikator yang dibagi 13 indikator akses dan 10 indikator pembelajaran bermutu yang digunakan dalam menghitung keberhasilan program pembangunan pendidikan.

1. Indikator Misi 2 Akses Pendidikan

Berdasarkan data pendidikan yang ada maka dapat dihasilkan 15 jenis indikator untuk misi 2 akses pendidikan. Untuk memahami berbagai indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur misi 2 akses pendidikan maka disajikan definisi, data dasar, rumus, kriteria, dan kegunaan indikator tersebut.

Indikator Misi 2.1 akses yang Meluas (8 indikator)

a. Rasio Siswa per Sekolah (R-S/Sek)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$R-S/\text{Sek } j = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Sekolah } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi rasio berarti makin padat siswa yang berada di sekolah atau makin kurang jumlah sekolah di suatu daerah.

Kegunaan: Untuk mengetahui rata-rata besarnya sekolah di suatu daerah sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk mengusulkan tambahan ruang kelas baru.

b. Rasio Siswa per Kelas (R-S/K)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah kelas pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah kelas SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$R-S/K j = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Kelas } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi rasio berarti makin padat siswa yang berada di kelas atau makin kurang ruang kelas di suatu daerah.

Kegunaan: Untuk mengetahui rata-rata besarnya kelas di sekolah dan daerah sehingga dapat ditentukan daerah mana yang sangat padat dan dapat sebagai bahan untuk mengusulkan tambahan ruang kelas baru.

c. Rasio Kelas per Ruang Kelas (R-K/RK)

Definisi: Perbandingan antara jumlah kelas (rombongan belajar) dengan jumlah ruang kelas pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah kelas SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah ruang kelas SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$R-K/RK j = \frac{\text{Kelas } j}{\text{Ruang Kelas } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 1, berarti ruang kelas hanya digunakan sekali, kurang dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang belum digunakan dan lebih dari 1 berarti terdapat ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Makin tinggi nilainya berarti makin kurang jumlah ruang kelas yang dimiliki.

Kegunaan: Untuk mengetahui kekurangan/kelebihan ruang kelas di sekolah dan daerah sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan prioritas sekolah mana yang akan diberi tambahan ruang kelas.

d. Persentase Perpustakaan Sekolah (% Perpus)

Definisi: Perbandingan antara jumlah perpustakaan yang dimiliki sekolah dengan jumlah sekolah yang ada pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah perpustakaan SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%Perpus\ j = \frac{\text{Perpustakaan } j}{\text{Sekolah } j} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang seharusnya dimiliki sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan perpustakaan pada tahun-tahun berikutnya.

e. Persentase Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (% RUKS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah RUKS yang dimiliki sekolah dengan jumlah sekolah yang ada pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah RUKS SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

		Ruang UKS j		
%RUKS j =	=	-----	X	100
		Sekolah j		

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki RUKS sesuai ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki RUKS yang seharusnya dimiliki, sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan RUKS pada tahun-tahun berikutnya.

f. Persentase Laboratorium (%lab)

Definisi: Perbandingan antara jumlah sekolah yang telah memiliki laboratorium pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah laboratorium SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$\%Lab\ j = \frac{\text{Laboratorium } j}{\text{Sekolah } j} \times 100$
--

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Khusus SMA sekolah dikalikan 6 sesuai ketentuan di SMA supaya memiliki 6 jenis laboratorium, yaitu fisika, kimia, biologi, multimedia, bahasa, dan komputer, sedangkan SMK sekolah dikalikan 3.

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki laboratorium yang seharusnya dimiliki sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan laboratorium pada tahun-tahun berikutnya.

g. Persentase Tempat Olahraga (%TOR)

Definisi: Perbandingan antara jumlah sekolah yang telah memiliki tempat olahraga pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah tempat olahraga SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$\%TOR\ j = \frac{\text{Tempat OR } j}{\text{Sekolah } j} \times 100$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya setiap sekolah memiliki tempat olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki tempat olahraga yang seharusnya dimiliki sehingga dapat dijadikan bahan

perencanaan pembangunan tempat olahraga pada tahun-tahun berikutnya.

h. Persentase Toilet Siswa (%TS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah toilet siswa yang seharusnya ada dengan jumlah toilet siswa yang ada pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah toilet siswa SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Ketentuan tiap toilet untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

		Toilet Siswa SD		
%TS SD	=	-----	X	100
		Siswa SD/60		

Keterangan: Khusus SD, 1 toilet untuk 60 siswa laki-laki dan 1 toilet untuk 50 siswa perempuan. Dalam rumusan ini digunakan 60 orang jadi tak dibedakan menurut jenis kelamin.

		Toilet Siswa j		
%TS j	=	-----	X	100
		Siswa j/40		

Catatan: j adalah jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK

Keterangan: Untuk SMP dan SM, 1 toilet untuk 40 siswa laki-laki dan 1 toilet untuk 30 siswa perempuan. Dalam rumusan ini digunakan 40 orang jadi tak dibedakan menurut jenis kelamin.

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, artinya untuk SD setiap 60 siswa terdapat 1 toilet sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk SMP dan SM setiap 40 siswa terdapat 1 toilet. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya sekolah yang belum memiliki toilet siswa sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dimiliki sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan pembangunan toilet siswa pada tahun-tahun berikutnya.

Indikator Misi 2.2 Akses yang Merata (4 indikator)

a. Angka Partisipasi

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.
- 2) Jumlah siswa tingkat SD, SMP, dan SM.

Rumus:

		Siswa j			
APK j	=	-----	X	100	
		Penduduk usia sekolah j			

Catatan: j = jenjang pendidikan, tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK

Tingkat SD: penduduk kelompok usia 7-12 tahun

Tingkat SMP: penduduk kelompok usia 13-15 tahun

Tingkat SM: penduduk kelompok usia 16-18 tahun

Kriteria: Makin tinggi APK berarti makin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah di satuan pendidikan. Nilai APK yang baik mendekati 100%.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang bersekolah di satuan pendidikan pada daerah tertentu.

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Penduduk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.
- 2) Jumlah siswa usia sekolah tingkat SD, SMP, dan SM.

Rumus:

		Siswa usia j			
APM j	=	-----	X	100	
		Penduduk usia sekolah j			

Catatan: j = jenjang pendidikan, tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK

Tingkat SD: penduduk kelompok usia 7-12 tahun

Tingkat SMP: penduduk kelompok usia 13-15 tahun

Tingkat SM: penduduk kelompok usia 16-18 tahun

Kriteria: Makin tinggi APM berarti makin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan usianya di satuan pendidikan. Nilai APM yang baik idealnya adalah 100%.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya penduduk yang bersekolah pada usia yang sesuai di satuan pendidikan pada daerah tertentu.

b. Angka Masukan

1) Angka Masukan Kasar (AMK) (khusus SD)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa baru SD dengan jumlah penduduk usia resmi masuk SD dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Penduduk usia masuk ke SD adalah penduduk 6-7 tahun.
- 2) Siswa baru SD semua usia.

Rumus:

		Siswa Baru SD		
AMK SD =		-----	X	100
		Penduduk usia masuk SD		

Catatan: Penduduk usia masuk SD 6-7 tahun

Kriteria: Makin tinggi AMK berarti makin banyak siswa masuk sekolah yang tidak sesuai dengan usia resmi. AMK mungkin lebih besar dari 100% karena banyak siswa yang masuk sekolah di luar usia resmi.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya anak usia masuk sekolah yang telah bersekolah di SD pada suatu daerah.

2) Angka Masukan Murni (AMM) (Khusus SD)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa baru usia resmi masuk SD dengan jumlah penduduk usia resmi masuk SD dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Penduduk usia masuk ke SD adalah penduduk 6-7 tahun.
- 2) Siswa baru usia masuk SD adalah usia 6-7 tahun.

Rumus:

		Siswa Baru usia masuk SD		
AMM SD =		-----	X	100
		Penduduk usia masuk SD		

Catatan: Penduduk usia masuk SD 6-7 tahun

Kriteria: Makin tinggi AMM berarti makin banyak siswa masuk sekolah yang sesuai dengan usia resmi. Idealnya=50% berarti sesuai dengan usia resmi masuk sekolah.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya anak usia masuk sekolah yang tepat waktu masuk SD pada suatu daerah.

3) Angka Melanjutkan (AM) (khusus SMP dan SM)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa baru pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah lulusan SD dan SMP
- 2) Jumlah siswa baru SMP dan SM

Rumus:

$$AM_j = \frac{\text{Siswa Baru } j}{\text{Lulusan } j-1} \times 100$$

Catatan: j = jenjang, lulusan j-1 = jenjang sebelumnya

Kriteria: Makin tinggi nilainya makin baik. Idealnya=100% berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila nilainya lebih dari 100% akibat adanya siswa baru yang berasal dari daerah lain seperti daerah kota dan perbatasan atau dari Madrasah.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi di suatu daerah.

c. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah penduduk usia masuk sekolah atau lulusan dengan sekolah ekuivalen pada jenjang pendidikan tertentu.

Sekolah ekuivalen adalah sekolah yang memiliki 6 ruang kelas atau 6 rombongan belajar (dipilih mana yang lebih besar). Digunakan sekolah ekuivalen agar antara SD, SMP, dan SM bisa dibandingkan. Pada SD adalah melayani penduduk usia masuk sekolah SD karena belum ada persyaratan bahwa siswa yang masuk SD harus dari tamatan PAUD, sedangkan untuk tingkat SMP dan SM adalah melayani lulusan pada jenjang yang lebih rendah yang akan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya karena untuk masuk ke SMP dan SM harus sudah lulus SD dan lulus SMP.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah penduduk usia masuk sekolah SD 6-7 tahun (untuk SD)
- 2) Jumlah lulusan SD dan SMP
- 3) Jumlah ruang kelas TK, SD, SMP, dan SM
- 4) Jumlah rombongan belajar TK, SD, SMP, dan SM

Rumus:

		Ruang Kelas/Rombel j
Sek Ekuivalen j	=	-----
		6

Catatan: j adalah jenjang, SD, SMP, SMA, dan SMK

		Penduduk 6-7 tahun
TPS SD	=	-----
		Sekolah Ekuivalen SD

		Lulusan SD/SMP
TPS SMP/SM	=	-----
		Sekolah Ekuivalen SMP/SM

Kriteria: Makin tinggi TPS berarti makin kecil kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia masuk sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin sedikit. Sebaliknya, makin kecil TPS berarti makin besar

kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia masuk sekolah atau lulusan. Artinya, sekolah makin makin banyak.

Kegunaan: Untuk mengetahui kesempatan yang diberikan sekolah dalam melayani penduduk usia masuk sekolah atau lulusan atau seberapa banyak sekolah yang ada sehingga semua penduduk usia masuk sekolah atau lulusan dapat bersekolah.

d. Satuan Biaya (SB)

Definisi: Perbandingan antara jumlah penerimaan atau pengeluaran anggaran sekolah dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu atau rata-rata biaya pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu.

Data dasar yang diperlukan:

- 1) Jumlah penerimaan atau pengeluaran anggaran sekolah seluruhnya SD, SMP, dan SM
- 2) Jumlah siswa SD, SMP dan SM

Rumus:

		Penerimaan Biaya j
SB j	=	-----
		Siswa j

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi satuan biaya pendidikan berarti makin mahal biaya pendidikan sehingga makin tidak terjangkau. Sebaliknya, makin kecil satuan biaya pendidikan maka makin terjangkau.

Kegunaan: Untuk mengetahui tinggi rendahnya satuan biaya pendidikan di suatu daerah sehingga dapat dibandingkan dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan dalam menentukan satuan biaya yang cocok untuk setiap jenjang pendidikan.

Indikator Misi 2.3 Akses yang Berkeadilan (3 indikator)

a. Perbedaan Gender (PG) APK

Definisi: Selisih antara APK laki-laki dengan APK perempuan pada jenjang pendidikan tertentu yang dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Perhitungan APK laki-laki TK, tingkat SD, SMP, SM, dan PT
- 2) Perhitungan APK perempuan TK, tingkat SD, SMP, SM, dan PT

Rumus:

PG APK j	=	APK Laki-laki - APK Perempuan j
----------	---	---------------------------------

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti tidak ada perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan ketika bersekolah. Makin tinggi nilainya berarti kondisi makin buruk, sebaliknya makin rendah berarti makin baik. PG menghasilkan tiga jenis nilai, yaitu 1) nilai positif, 2) nilai negatif, dan 3) nilai 0 (nol). Bila hasilnya positif berarti terjadi PG yang lebih besar laki-laki daripada perempuan. Sebaliknya, bila hasilnya negatif berarti terjadi PG lebih besar perempuan daripada laki-laki, sedangkan nilai 0 berarti tidak ada PG. Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan.

Kegunaan: Untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam bersekolah antara laki-laki dengan perempuan sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang.

b. Indek Paritas Gender (IPG) APK

Definisi: Perbandingan antara APK perempuan dengan APK laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Perhitungan APK laki-laki TK, tingkat SD, SMP, SM, dan PT
- 2) Perhitungan APK perempuan TK, tingkat SD, SMP, SM, dan PT

Rumus:

$$\text{IPG APK } j = \frac{\text{APK Perempuan}}{\text{APK Laki-laki } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 1 berarti ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Bila angkanya kurang atau lebih dari 1 maka tidak ada kesetaraan gender. Bila angkanya lebih dari 1 berarti perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sebaliknya, bila angkanya kurang dari 1 berarti laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Dengan demikian, nilainya adalah <1, 1, dan >1.

Kegunaan: Untuk mengetahui apakah sudah terjadi kesetaraan dalam bersekolah antara laki-laki dan perempuan sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang, misalnya dengan memberikan kuota untuk anak perempuan agar bersekolah atau memberikan beasiswa agar melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

c. Persentase Siswa Swasta (%S-Swt)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa bersekolah di sekolah swasta dengan jumlah siswa seluruhnya pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut status sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah siswa seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%S\text{-Swat } j = \frac{\text{Siswa Swasta } j}{\text{Siswa Seluruhnya}} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi nilainya berarti makin besar partisipasi sekolah swasta dalam menampung siswa. Belum ada ketentuan berapa nilai idealnya.

Kegunaan: Untuk mengetahui besarnya partisipasi sekolah swasta dalam menampung siswa di sekolah.

Penjelasan Akses Pendidikan

Walaupun indikator akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dalam layanan pendidikan terdapat 15 jenis indikator namun hanya dihitung dari komposit 13 indikator pendidikan yang tersedia datanya. Ke-13 indikator tersebut dinyatakan dalam satuan yang sama dengan melakukan konversi menggunakan standar dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel 3.3.

Konversi R-S/Sek dilakukan dengan menggunakan tipe sekolah atau pembakuan sekolah, untuk SD digunakan 192 karena setiap kelas diisi 32 siswa dan kebanyakan SD memiliki 6 kelas sedangkan untuk SMP digunakan 324 karena setiap ruang kelas diisi 36 siswa dan kebanyakan SMP mempunyai 9 ruang kelas dan SM digunakan 432 karena setiap ruang kelas diisi 36 siswa dan kebanyakan SM mempunyai 12 ruang kelas. Bila R-S/Sek SMP kurang dari standar (324) adalah 300 maka angka tersebut belum optimal, namun kondisinya lebih baik daripada yang berlebih, sehingga konversinya 100. Bila R-S/Sek SMA adalah 500 maka angka tersebut lebih dari optimal atau lebih dari standar (432) maka konversinya dihitung sebaliknya sebesar 86,40% ($432/500 \times 100 = 86,40\%$).

R-S/K SD digunakan 32, SMP digunakan 36 sebagai angka yang telah ditentukan dalam Permendiknas Nomor 23, Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal di Pendidikan Dasar. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Oleh karena SM belum ada Permendikbud maka digunakan sama dengan SMP, yaitu 36. Bila R-S/K SD kurang dari standar (32) adalah 24 maka angka tersebut belum optimal, namun kondisinya lebih baik daripada yang berlebih, sehingga konversinya 100. Bila R-S/K SMP adalah 37 maka angka tersebut lebih dari optimal atau lebih dari standar (36) maka konversinya dihitung dengan cara 36 dibagi 37 dikalikan 100 sama dengan 97,30% ($36/37 \times 100 = 97,30\%$). Begitu juga, R-S/K SMA adalah 47 maka angka tersebut lebih dari optimal atau lebih dari standar (36) maka konversinya dihitung dengan cara yang sama menjadi 76,60% ($36/47 \times 100 = 76,60\%$).

Untuk R-K/RK digunakan 1 sebagai angka ideal, artinya setiap ruang kelas hanya digunakan satu kali proses belajar mengajar atau 1 kelompok belajar (1 kelas). Dengan demikian, bila nilainya kurang atau lebih dari 1 keduanya tidak ideal. Hal inilah yang disebut sebagai menggunakan 2 standar. Bila R-K/RK adalah 1,2 berarti terdapat 20% ruang kelas digunakan lebih dari sekali maka angka tersebut dikonversi dengan cara 1 dibagi 1,2 sama dengan 83,3% ($1/1,2 \times 100 = 83,3\%$). Sebaliknya, bila R-K/RK adalah kurang dari 1, misalnya 0,9 berarti terdapat 10% ruang kelas belum digunakan atau digunakan tetapi tidak untuk kegiatan belajar,

misalnya untuk ruang Bimbingan Penyuluhan (BP) maka angka tersebut dikonversi dengan cara 0,9 dibagi 1 dikali 100 sama dengan 90,0% ($0,9/1 \times 100 = 90,0\%$).

Untuk %Perpus digunakan angka ideal 100%. Dengan demikian, bila nilainya kurang dari 100 tetap menggunakan angka tersebut. Hal yang sama diberlakukan untuk %Lab dengan menggunakan angka ideal 100%. Dengan demikian, bila nilainya kurang dari 100 tetap menggunakan angka tersebut. Sebaliknya, bila indikatornya lebih dari 100% maka nilainya tetap menjadi 100. Sesuai ketentuan maka untuk SMA dihitung 6 laboratorium per sekolah dan SMK dihitung 3 laboratorium per sekolah, sehingga rata-rata SM digunakan 5 jenis laboratorium. Demikian juga diberlakukan untuk %RUKS dengan menggunakan angka ideal 100%.

Untuk %TS digunakan angka ideal 100%, namun dengan ketentuan untuk SD adalah 1 toilet untuk 60 siswa dan untuk SMP dan SM adalah 1 toilet untuk 40 siswa. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24, Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Untuk SD 1 toilet untuk 60 siswa laki-laki dan 1 toilet untuk 50 siswa perempuan, untuk SMP dan SMA 1 toilet untuk 40 siswa laki-laki dan 1 toilet untuk 30 siswa perempuan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2007).

Setelah ketujuh indikator tersebut memiliki nilai maka untuk menghitung akses yang meluas adalah rata-rata dari tujuh nilai indikator tersebut atau jumlah nilai indikator dibagi 7. Demikian juga diberlakukan untuk akses yang merata adalah rata-rata dari tiga nilai indikator atau jumlah nilai indikator dibagi 3, sedangkan akses yang berkeadilan adalah rata-rata dari tiga nilai indikator atau jumlah nilai indikator dibagi 3.

Setelah indikator akses pendidikan memiliki satuan yang sama, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan nilai akses yang meluas dengan akses yang merata dan akses yang berkeadilan kemudian dibagi dengan jumlah kelompok indikator atau dibagi 3. Dengan demikian, untuk menghitung akses pendidikan maka rumus:

		Nilai merata+meluas+berkeadilan
Akses	=	-----
		3

2. Indikator Misi 3 Pembelajaran Yang Bermutu

Terdapat 15 jenis indikator untuk misi 3 pembelajaran yang bermutu. Untuk memahami berbagai indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan maka disajikan definisi, data dasar, rumus, kriteria, dan kegunaan indikator tersebut.

Indikator Misi 3.1 Mutu Guru (3 indikator)

a. Persentase Guru Layak (%GL)

Definisi: Perbandingan antara jumlah guru yang layak mengajar atau yang memiliki ijazah Sarjana/S1 atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi dengan jumlah

guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).

Data Dasar yang Digunakan

- 1) jumlah guru menurut ijazah tertinggi untuk SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) jumlah guru seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%GL_j = \frac{\text{Guru S1/D4 \& lebih tinggi } j}{\text{Guru seluruhnya } j} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, berarti semua guru memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti makin baik mutu sekolah dipandang dari sudut guru.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya jumlah guru berijazah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan baru dalam rangka peningkatan mutu guru pada tahun mendatang.

b. Persentase Guru Sertifikat (%GS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah guru yang memiliki sertifikat dengan jumlah guru seluruhnya dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan

- 1) jumlah guru menurut sertifikat yang dimiliki untuk SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) jumlah guru seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$\%GS_j = \frac{\text{Guru memiliki sertifikat } j}{\text{Guru seluruhnya } j} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen, berarti semua guru memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Makin tinggi nilainya berarti makin baik mutu sekolah dipandang dari sudut guru.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya jumlah guru yang memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan baru dalam rangka peningkatan mutu guru pada tahun mendatang.

c. Rasio Siswa per Guru (R-S/G)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah siswa SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah guru SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

$$R-S/G_j = \frac{\text{Siswa } j}{\text{Guru } j}$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Makin tinggi rasio berarti makin banyak siswa yang harus dilayani oleh seorang guru atau makin kurang jumlah guru di suatu daerah.

Kegunaan: Untuk mengetahui rata-rata guru yang dapat melayani siswa di suatu sekolah dan daerah sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan daerah mana yang memerlukan tambahan guru pada tahun mendatang atau yang telah kelebihan sehingga bisa dipindahkan.

Indikator Misi 3.2 Mutu Siswa (6 indikator)

a. Persentase Siswa Baru asal PAUD (%SB PAUD) khusus SD

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa baru SD yang berasal dari PAUD (Formal atau Nonformal) dengan jumlah siswa baru seluruhnya pada jenjang SD dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah siswa baru SD menurut asal
- 2) jumlah siswa baru SD seluruhnya

Rumus:

$$\%SB \text{ PAUD} = \frac{\text{SB asal PAUD}}{\text{SB seluruhnya}} \times 100$$

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa baru berasal dari tamatan PAUD. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa baru SD yang belum berasal dari tamatan PAUD, sehingga dapat dijadikan bahan kebijakan pada tamatan PAUD pada tahun mendatang.

b. Angka Lulusan (AL)

Definisi: Perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi dari jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah lulusan SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) jumlah siswa tingkat VI untuk SD, tingkat X untuk SMP atau tingkat XII untuk SMA dan SMK tahun ajaran sebelumnya

Rumus:

$$AL_{jt} = \frac{\text{Lulusan } j_t}{\text{Siswa } tk \text{ tertinggi } j_t-1} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA dan SMK
t adalah tahun, t-1 adalah tahun sebelumnya

Kriteria: Untuk SD sampai SM, idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa tingkat tertinggi lulus semuanya. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus dan tidak lulus dari jenjang pendidikan tertentu di suatu daerah sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program remedial bagi mereka yang tidak lulus pada tahun mendatang.

c. Angka Mengulang (AU)

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa mengulang pada tahun tertentu dengan jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah siswa mengulang SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) jumlah siswa seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK tahun ajaran sebelumnya

Rumus:

$$AU_{jt} = \frac{\text{Mengulang } jt}{\text{Siswa } jt-1} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK
t adalah tahun, t-1 adalah tahun sebelumnya

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang mengulang. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang mengulang di suatu daerah sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program remedial yang diperlukan pada tahun mendatang.

d. Angka Putus Sekolah (APS)

Definisi: Perbandingan antara jumlah putus sekolah pada tahun tertentu dengan jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya pada jenjang tertentu dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) jumlah siswa putus sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) jumlah siswa seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK tahun ajaran sebelumnya

Rumus:

$$APS_{jt} = \frac{\text{Putus Sekolah } jt}{\text{Siswa } jt-1} \times 100$$

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK
t adalah tahun, t-1 adalah tahun sebelumnya

Kriteria: Idealnya adalah 0 persen berarti semua siswa tidak ada yang putus sekolah. Makin rendah nilainya, berarti makin baik.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah, sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan program retrieval yang diperlukan pada tahun mendatang.

e. Angka Bertahan (AB)

AB untuk SD, SMP, dan SM sedikit berbeda dalam perhitungannya. Bila SD menggunakan AB Tingkat 5 atau AB5 SD dengan asumsi bila siswa putus SD tingkat 5 maka diharapkan tidak menjadi buta aksara. Sebaliknya, SMP dan SM menggunakan AB sampai selesai tingkat terakhir sehingga digunakan AB SMP dan SM.

1) AB5 SD

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa SD yang dapat bertahan sampai tingkat 5 dari suatu kohort sebesar 1000 dibandingkan dengan tahun-siswa dan dinyatakan dalam persentase.

Penggunaan AB5 SD dengan asumsi bila siswa putus tingkat 5 SD diharapkan tidak menjadi buta aksara

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut tingkat 2 tahun berurutan
- 2) Jumlah mengulang menurut tingkat tahun terakhir
- 3) Jumlah putus sekolah menurut tingkat tahun terakhir
- 4) Jumlah lulusan tahun terakhir
- 5) Menggunakan program aplikasi yang ada

Rumus:

Siswa Bertahan SD 5				
AB SD	=	-----	x	100
		6000		

Catatan: Jenjang pendidikan SD adalah 6 tahun sehingga dari seluruh kohor menjadi 6000

Kriteria: Makin mendekati 100 persen makin baik berarti siswa dapat bertahan di sekolah.

Kegunaan: Untuk mengetahui siswa yang dapat bertahan sampai tingkat 5 SD.

AB5 dikhususkan untuk SD, sedangkan AB SMP dan SM memiliki sedikit perbedaan seperti disajikan berikut ini.

2) AB SMP dan SM

Definisi: Perbandingan antara jumlah siswa yang dapat bertahan pada tingkat tertentu atau sampai lulus dari suatu kohort sebesar 1000 pada suatu jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan tahun-siswa jenjang yang sama dan dinyatakan dalam persentase.

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut tingkat 2 tahun berurutan
- 2) Jumlah mengulang menurut tingkat tahun terakhir
- 3) Jumlah putus sekolah menurut tingkat tahun terakhir
- 4) Jumlah lulusan tahun terakhir

5) Menggunakan program aplikasi yang ada

Rumus:

		Siswa Bertahan j		
AB j	=	-----	x	100
		3000		

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SMP atau SM, SMP dan SM atau jenjang pendidikan 3 tahun sehingga kohortnya menjadi 3000

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua siswa dapat bertahan sampai lulus dan tidak ada yang mengulang.

Kegunaan: Untuk mengetahui jumlah siswa yang dapat bertahan sampai lulus pada suatu jenjang pendidikan sehingga dapat menjadi bahan kebijakan di tahun mendatang.

f. Rata-rata Lama Belajar (RLB)

Definisi: Rata-rata lama belajar yang diperlukan siswa sampai lulus sekolah pada suatu jenjang pendidikan.

- 1) SD: Rata-rata lama belajar sampai lulus seharusnya 6 tahun
- 2) SMP/SM: Rata-rata lama belajar sampai lulus seharusnya 3 tahun

Data dasar yang digunakan:

- 1) Jumlah siswa menurut tingkat 2 tahun berurutan
- 2) Jumlah mengulang menurut tingkat tahun terakhir
- 3) Jumlah putus sekolah menurut tingkat tahun terakhir
- 4) Jumlah lulusan tahun terakhir
- 5) Menggunakan program aplikasi yang ada

Rumus:

		(LLs 1X6)+(LIs2x7)+(LIs3x8)
RLB IIs SD	=	-----
		Lulusan 1+2+3

Catatan: Jumlah lulusan I adalah lulusan tanpa mengulang, lulusan II adalah lulusan mengulang satu kali, dan lulusan III adalah lulusan yang mengulang dua kali

Kriteria: Idealnya adalah 6 tahun untuk SD dan 3 tahun untuk SMP dan SM berarti semua siswa lulus tepat waktu dan tak ada yang mengulang.

Kegunaan: Untuk mengetahui lama belajar siswa sampai lulus sehingga dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang.

Indikator Misi 3.3 Mutu Prasarana (5 indikator)

a. Persentase Ruang Kelas Baik (% Rkb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah ruang kelas kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah ruang kelas seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah ruang kelas menurut kondisi SD, SMP, SMA, dan SMK
- 2) Jumlah ruang kelas seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

		Ruang Kelas baik j		
%Rkb j	=	-----	x	100
		Ruang Kelas seluruhnya j		

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, dan SMK

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua ruang kelas dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya ruang kelas baik sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi sekolah yang rusak dalam rangka meningkatkan mutu.

b. Persentase Perpustakaan kondisi Baik (%Perpusb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah perpustakaan yang baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah perpustakaan seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah perpustakaan menurut kondisi tingkat SD, SMP dan SM
- 2) Jumlah perpustakaan seluruhnya tingkat SD, SMP dan SM

Rumus:

		Perpustakaan baik j		
%Perpusb j	=	-----	x	100
		Perpustakaan j		

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua perpustakaan dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan: Untuk mengetahui banyaknya perpustakaan baik sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi perpustakaan bagi yang rusak dalam rangka meningkatkan mutu.

c. Persentase RUKS kondisi Baik (% RUKSb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah RUKS dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah RUKS seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah RUKS menurut kondisi SD, SMP dan SM
- 2) Jumlah RUKS seluruhnya SD, SMP dan SM

Rumus:

		Ruang UKS baik j		
%RUKSb j	=	-----	x	100
		Ruang UKS j		

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua RUKS dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya RUKS yang baik, sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi RUKS yang rusak dalam rangka meningkatkan mutu.

d. Persentase Laboratorium kondisi Baik (% Labb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah laboratorium kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah laboratorium seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Rumus:

		Laboratorium baik j			
%Labb j	=	-----	x	100	
		Laboratorium j			

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua laboratorium dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya laboratorium yang baik, sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi laboratorium yang rusak dalam rangka meningkatkan mutu.

e. Persentase Tempat Olahraga kondisi Baik (% TORb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah tempat olahraga dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah tempat olahraga seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah tempat olahraga menurut kondisi SD, SMP, SMA dan SMK
- 2) Jumlah tempat olahraga seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

		TOR baik j			
%TORb	=	-----	X	100	
		TOR seluruhnya j			

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua tempat olahraga dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya tempat olahraga yang baik, sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi tempat olahraga dalam rangka meningkatkan mutu.

f. Persentase Toilet Siswa kondisi Baik (% TSb)

Definisi: Perbandingan antara jumlah toilet siswa dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah toilet siswa seluruhnya pada jenjang yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Data Dasar yang Digunakan:

- 1) Jumlah toilet siswa menurut kondisi SD, SMP, SMA dan SMK
- 2) Jumlah toilet siswa seluruhnya SD, SMP, SMA, dan SMK

Rumus:

		Toilet Siswa Baik j		
%TSb j	=	-----	X	100
		Toilet Siswa seluruh j		

Catatan: j adalah jenjang pendidikan, SD, SMP, dan SM

Kriteria: Idealnya adalah 100 persen berarti semua toilet yang ada dalam kondisi baik. Makin besar nilainya berarti makin baik dipandang dari prasarana sekolah.

Kegunaan : Untuk mengetahui banyaknya toilet yang baik, sehingga diketahui toilet yang rusak sehingga dapat ditentukan prioritas rehabilitasi toilet dalam rangka meningkatkan mutu.

Penjelasan Pembelajaran yang Bermutu

Walaupun pembelajaran yang bermutu terdiri dari 15 jenis indikator, yang dapat dilihat dari guru, siswa, dan prasarana namun hanya dapat dihitung dari 10 jenis indikator karena ketersediaan data yang ada. Mutu dihitung dari komposit tiga kelompok indikator dan 10 jenis indikator yang dinyatakan dalam satuan yang sama dengan melakukan konversi. Untuk melakukan konversi menggunakan standar dengan ketentuan seperti disajikan pada Tabel 3.3.

%GL, AL, %Rkb, %Perpusb, %Labb, %RUKSb, dan %TSb tidak dilakukan konversi karena standar idealnya 100, sedangkan AU dan APS karena standar idealnya 0, namun karena memberi nilai yang negatif maka dilakukan konversi dengan cara 100 - nilainya. Contoh AU SD = 5,60% maka konversinya adalah 100 - 5,60 = 94,40. R-S/G dilakukan konversi, bila nilainya kurang dari standar adalah nilai dibagi dengan standar. Sebaliknya, bila nilainya lebih tinggi dari standar maka standar dibagi dengan nilai. Dengan demikian, nilai maksimal masing-masing indikator 100. Contoh, R-S/G SD sebesar 18 maka konversinya adalah 16/18 x 100 = 88,89, bila R-S/G SD sebesar 15 maka konversinya adalah 15/16 x 100 = 93,75.

Setelah kedua indikator guru tersebut memiliki nilai maka untuk menghitung mutu guru adalah rata-rata dari dua nilai indikator tersebut atau jumlah nilai indikator dibagi 2. Demikian juga diberlakukan untuk mutu siswa adalah rata-rata dari tiga nilai indikator atau jumlah nilai indikator dibagi 3, sedangkan mutu prasarana adalah rata-rata dari lima indikator atau jumlah nilai indikator dibagi 5.

Setelah indikator pembelajaran bermutu dilakukan konversi sehingga memiliki satuan yang sama, langkah selanjutnya adalah jumlah nilai mutu guru ditambah

dengan mutu siswa dan mutu prasarana, kemudian dibagi dengan jumlah kelompok indikator atau dibagi 3. Dengan demikian, untuk menghitung pembelajaran yang bermutu maka rumus yang digunakan adalah:

		Nilai guru+siswa+prasarana
Mutu	=	-----
		3

C. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan

Keberhasilan program pembangunan pendidikan umumnya dinilai berdasarkan pengukuran mengenai terserapnya dana yang dialokasikan untuk program pembangunan pendidikan. Cara yang lebih akurat memberikan indikasi tentang keberhasilan program pembangunan pendidikan ialah dengan menggunakan data yang merupakan hasil pendidikan dikaitkan dengan misi pendidikan, yaitu mewujudkan akses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Keberhasilan program pembangunan pendidikan dihitung melalui gabungan dari misi 2 dan 3 dengan 30 jenis indikator pendidikan. Namun, karena keterbatasan data maka hanya digunakan 23 jenis indikator pendidikan.

Untuk menghitung keberhasilan program pembangunan pendidikan maka rumus yang digunakan adalah:

		Nilai Akses + Mutu
Keberhasilan Program	=	-----
		2

Teknik analisis yang digunakan untuk menghitung keberhasilan program pembangunan adalah menggunakan standar ideal masing-masing misi pendidikan yang dirinci menjadi lima nilai, yaitu paripurna dengan nilai 95,00-100,00, utama dengan nilai 90,00-94,99, madya dengan nilai 85,00-89,99, pratama dengan nilai 80,00-84,99, dan kurang bila nilainya ≤ 80 (lihat Tabel 3.4).

Contoh, keberhasilan program pembangunan pendidikan SD, bila diketahui nilai akses yang meluas sebesar 72,47, akses yang merata sebesar 94,63, dan akses yang berkeadilan sebesar 85,46 maka nilai nilai akses pendidikan adalah $(72,47 + 94,63 + 85,46) / 3 = 84,18$ dan mutu guru sebesar 81,83, mutu siswa sebesar 99,10 dan mutu prasarana sebesar 23,85 maka nilai mutu adalah $(81,83 + 99,10 + 23,85) / 3 = 68,26$. Dengan demikian, keberhasilan program pembangunan pendidikan SD adalah nilai akses ditambah nilai mutu dibagi 2 adalah $(84,18 + 68,26) / 2 = 76,18$.

Dengan menggunakan standar ideal maka keberhasilan program pembangunan pendidikan SD sebesar 76,18 termasuk kurang. Oleh karena itu, perlu usaha yang lebih agar dapat meningkatkan keberhasilan program pendidikan melalui

peningkatan mutu dari 68,26 menjadi sekitar 85, sehingga keberhasilan program pembangunan pendidikan mencapai 85 atau termasuk madya. Peningkatan mutu dapat dilakukan terutama prioritas pada prasarana yang sangat rendah.

BAB IV HASIL DAN BAHASAN

A. Akses Pendidikan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam mewujudkan akses pendidikan dapat dirinci menjadi tiga, yaitu akses yang meluas, akses yang merata, dan akses yang berkeadilan.

1. Akses yang Meluas

Terdapat tujuh jenis indikator yang diasumsikan terpenting untuk mengetahui akses pendidikan yang meluas. Dari lima indikator tersebut, tiga indikator, yaitu R-S/Sek, R-S/K, dan R-K/RK dilakukan konversi menggunakan standar tertentu yang ada pada Tabel 3.3, sehingga diperoleh satuan yang sama untuk menghasilkan nilai indikator, sedangkan %Perpus, %Lab, %RUKS, dan %TS tidak dilakukan konversi kecuali bila indikator lebih dari 100 maka nilainya tetap 100. Ketujuh nilai tersebut dijumlahkan dan dibagi 7 sehingga diperoleh akses yang meluas. Nilai maksimal 100, makin mendekati 100 disebut makin meluas.

Tabel 4.1
Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Meluas
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2017/2018

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A.	Data					
1	Sekolah	148.244	38.960	27.205		
2	Siswa	25.486.506	10.125.724	9.687.676		
3	Kelas	1.115.194	354.518	337.795		
4	Ruang Kelas	1.072.136	358.361	323.376		
5	Perpustakaan	94.550	30.030	19.713		
6	Laboratorium	17.772	26.426	49.070		
7	Ruang UKS	44.894	15.169	9.891		
8	Toilet Siswa	215.075	71.948	5.751		
B.	Indikator					
1	R-S/Sek	172	260	356		
2	R-S/K	23	29	29		
3	R-K/RK	1,04	0,99	1,04		
4	%Perpustakaan	63,78	77,08	72,46		
5	%Laboratorium	11,99	67,83	36,07		
6	%RUKS	30,28	38,93	57,72		
7	%Toilet Siswa	78,26	28,42	19,99		
C.	Nilai Indikator					
1	R-S/Sek	95,92	98,46	99,01	97,79	PARIPURNA
2	R-S/K	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA
3	R-K/RK	95,72	96,23	96,28	96,08	PARIPURNA
4	%Perpustakaan	65,87	77,35	75,41	72,88	KURANG
5	%Laboratorium	10,94	66,90	36,23	38,03	KURANG
6	%RUKS	30,45	36,05	34,70	33,73	KURANG
7	%Toilet Siswa	78,26	78,55	55,36	70,72	KURANG
	Akses yang meluas	68,17	79,08	71,00	72,75	KURANG
	Jenis akses yg meluas	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	

Tabel 4.1 menunjukkan data, indikator, dan nilai akses yang meluas menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat SD sebesar 148.244, SMP sebesar 38.960, dan SM sebesar 27.205. Sesuai dengan jumlah sekolah, jumlah siswa terbesar juga pada SD sebesar 25.486.506 dan terkecil pada SM sebesar 9.687.676. Demikian juga kelas terbesar juga pada SD sebesar 1.115.194 dan terkecil juga pada SM sebesar 337.795. Ruang kelas terbesar juga pada SD sebesar 1.072.136 dan terkecil pada SM sebesar 323.376. Perpustakaan terbesar juga pada SD sebesar 94.550 dan terkecil pada SM sebesar 19.713. Laboratorium terbesar pada SM sebesar 49.070 dan terkecil pada SD sebesar 17.772. terbesar pada SD sebesar 44.894 dan terkecil pada SM sebesar 9.891. Toilet siswa terbesar juga pada SD sebesar 215.075 dan terkecil pada SM sebesar 5.751.

Berdasarkan data siswa dan sekolah maka dapat dihitung R-S/Sek SD sebesar 172, SMP sebesar 260, dan SM sebesar 356. R-S/Sek SD sangat rendah dibandingkan dengan jenjang lainnya karena jumlah SD sudah menjangkau daerah terpencil, sehingga jumlah sekolah sudah sangat banyak. Dengan melihat kondisi seperti ini maka makin tinggi jenjang pendidikan kepadatan sekolah makin tinggi. Hal ini wajar karena jangkauan siswa SM atau pada jenjang yang tinggi makin luas dan letaknya sebagian besar di daerah kota. Padatnya SM juga berarti makin sedikit lembaga pada SM dan makin banyaknya sekolah pada jenjang yang lebih rendah seperti pada SD.

Dengan menggunakan siswa dan kelas maka dapat dihitung R-S/K. Hal yang berbeda dengan R-S/Sek ternyata kepadatan kelas SMP dan SM yang terbesar ditandai dengan R-S/K terbesar pada SMP dan SM sebesar 29, sedangkan SD sebesar 23. Dengan demikian, penggunaan kelas di SMP dan SMA lebih efektif daripada di SD, walaupun tetap masih di bawah standar yang berlaku sebesar 36 berdasarkan Permendiknas 23, Tahun 2013 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Berdasarkan kelas dan ruang kelas maka dapat dihitung R-K/RK. Dalam pemanfaatan ruang kelas, ternyata R-K/RK terbesar pada SD dan SM sebesar 1,04 yang berarti terdapat 4% ruang kelas yang dipakai lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar dan yang ideal adalah SMP sebesar 0,99. Hal ini juga menunjukkan bahwa di jenjang SD dan SM masih kekurangan ruang kelas bila setiap ruang kelas harus digunakan untuk satu rombongan belajar.

Dengan menggunakan sekolah dan perpustakaan maka dapat dihitung %Perpus. Dalam kepemilikan perpustakaan, ternyata %Perpus terkecil pada SD sebesar 63,78% sehingga masih terdapat 36,22% SD belum memiliki perpustakaan dan terbesar pada SMP sebesar 67,83% sehingga masih terdapat 22,17% SMP belum memiliki perpustakaan. Hal ini juga menunjukkan di semua jenjang masih kekurangan perpustakaan bila setiap sekolah harus memiliki perpustakaan.

Berdasarkan sekolah dengan laboratorium maka dapat dihitung %Lab. Dalam kepemilikan laboratorium, ternyata pada SMP yang terbesar sebesar 67,83% atau 32,17% sekolah belum memiliki laboratorium, sedangkan SD memiliki laboratorium terkecil sebesar 11,99% atau 88,01% sekolah belum memiliki laboratorium. Untuk SMA idealnya memiliki 6 jenis dan SMK memiliki 3 jenis atau untuk SM dirata-ratakan memiliki 5 jenis laboratorium sehingga terdapat 36,07% memiliki

laboratorium. Hal ini menunjukkan di semua jenjang masih kekurangan laboratorium, sedangkan kekurangan di SMP yang terkecil.

Dengan menggunakan data sekolah dan RUKS maka dapat dihitung %RUKS. Dalam kepemilikan RUKS, ternyata pada SMP yang terbesar sebesar 36,05% atau 63,95% sekolah belum memiliki RUKS, sedangkan SD memiliki RUKS terkecil sebesar 30,45% dan 69,55% sekolah belum memiliki RUKS.

Berdasarkan jumlah siswa dan toilet siswa yang ada maka untuk SD yang terbesar karena terdapat 78,26% toilet atau 21,74% belum memiliki toilet sesuai ketentuan SD digunakan 1 toilet 60 siswa. Untuk SM yang terkecil karena terdapat 55,36% toilet atau 44,64% belum memiliki toilet sesuai ketentuan SM digunakan 1 toilet untuk 40 siswa (Kementerian Pendidikan Nasional, 2007).

Dengan menggunakan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka tiga indikator akses yang meluas mengalami konversi, yaitu R-S/Sek SD menjadi sebesar 95,92, SMP menjadi 98,46, dan SM menjadi 99,01, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 97,79 termasuk kategori paripurna. R-S/K semua jenjang telah mencapai 100,00 termasuk kategori paripurna. R-K/RK SD mencapai 95,72, SMP mencapai 96,23, dan SM mencapai 96,28, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 96,08 termasuk kategori paripurna. %Perpus SD terbesar sebesar 65,87, SMP sebesar 77,35, dan SM mencapai 75,41, sehingga rata-rata menjadi 72,88 termasuk kategori kurang. %Lab terbesar pada SMP sebesar 66,90 dan terkecil pada SD sebesar 30,45, sehingga rata-rata menjadi 38,03 termasuk kategori kurang. %RUKS terbesar pada SMP sebesar 36,05 dan terkecil pada SD sebesar 30,45, sehingga rata-rata menjadi 33,73 termasuk kategori kurang. %TS terbesar pada SMP sebesar 78,55 dan terkecil pada SM sebesar 55,36, sehingga rata-rata menjadi 70,72 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, akses yang meluas SD sebesar 68,17 termasuk kategori kurang, SMP sebesar 79,08 juga termasuk kategori kurang, dan SM sebesar 71 juga termasuk kategori kurang, sehingga rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 72,75 juga termasuk kategori kurang. Dengan demikian, walaupun akses semua jenjang pendidikan kurang, namun yang paling meluas adalah SMP dan terkecil adalah SD.

a. Sekolah Dasar (SD)

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis tujuh indikator akses pendidikan yang meluas tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. Jumlah sekolah terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 19.533 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 463, sedangkan siswa terbesar juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.508.356 dan terkecil juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 78.556. Namun, dilihat dari indikator R-S/Sek SD terkecil terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 110 dan terbesar terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 321 dengan angka nasional sebesar 172. Dengan demikian, daya tampung sekolah hanya dimanfaatkan sebesar 89,58% dari standar sebesar 192.

Jumlah kelas terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 161.871 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3.884. Namun, indikator R-S/K SD terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 17 dan terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masing-masing sebesar 28 dengan angka nasional

sebesar 23. Dengan demikian, kisaran ini jauh dari standar ideal sebesar 32 sehingga pendayagunaan kelas menjadi sebesar 72,57%,. Rendahnya R-S/K SD menunjukkan bahwa sekolah belum terisi sesuai dengan kapasitas yang ada karena adanya perbedaan daerah dan geografis, walaupun di daerah padat pun ternyata tetap kurang dari standar sebesar 32.

Tabel 4.2
Data Akses yang Meluas SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data							
		Sekolah	Siswa	Kelas	Ruang Kelas	Perpustakaan	Laboratorium	Ruang UKS	Toilet Siswa
1	DKI Jakarta	2.579	828.707	29.754	27.973	1.899	2.094	1.683	4.607
2	Jawa Barat	19.533	4.508.356	161.871	141.721	10.316	2.364	4.882	30.549
3	Banten	4.562	1.195.653	42.126	37.282	2.433	891	1.120	6.600
4	Jawa Tengah	19.027	2.857.363	127.742	128.968	13.213	3.288	8.490	33.511
5	DI Yogyakarta	1.842	293.568	13.623	13.941	1.628	1.081	1.508	3.958
6	Jawa Timur	19.312	2.838.933	135.190	135.735	12.054	3.743	7.610	28.152
7	Aceh	3.447	490.326	24.315	24.465	2.734	131	862	4.262
8	Sumatera Utara	9.649	1.735.078	73.917	71.859	5.497	612	1.371	12.373
9	Sumatera Barat	4.161	640.046	30.433	30.185	2.800	169	1.283	6.190
10	Riau	3.653	798.194	33.735	31.343	2.050	500	1.082	5.645
11	Kepulauan Riau	921	226.257	9.288	7.981	664	185	440	1.715
12	Jambi	2.454	389.444	18.666	17.876	1.624	96	708	3.326
13	Sumatera Selatan	4.662	933.604	39.405	34.933	3.039	264	1.257	7.348
14	Bangka Belitung	807	160.738	6.464	6.677	795	134	692	1.967
15	Bengkulu	1.375	214.211	10.484	10.496	1.052	68	387	1.757
16	Lampung	4.660	842.711	37.123	34.975	2.884	284	1.210	6.373
17	Kalimantan Barat	4.381	594.474	30.687	28.958	2.872	181	950	7.006
18	Kalimantan Tengah	2.625	287.845	17.335	17.271	1.561	84	654	3.103
19	Kalimantan Selatan	2.911	381.207	20.566	20.834	1.990	217	1.010	4.123
20	Kalimantan Timur	1.869	413.048	17.488	16.108	1.183	270	839	3.384
21	Kalimantan Utara	463	78.556	3.884	3.516	274	30	163	677
22	Sulawesi Utara	2.227	240.618	14.311	14.527	1.464	64	502	2.904
23	Gorontalo	935	123.528	6.166	6.444	792	40	367	1.288
24	Sulawesi Tengah	2.889	343.667	18.842	18.975	1.815	49	465	3.023
25	Sulawesi Selatan	6.422	928.029	45.580	44.348	4.941	208	1.609	8.543
26	Sulawesi Barat	1.327	160.963	8.887	8.882	794	19	193	1.036
27	Sulawesi Tenggara	2.310	320.324	16.246	16.029	1.652	51	504	2.373
28	Maluku	1.772	228.754	11.765	11.364	1.034	51	251	1.466
29	Maluku Utara	1.305	158.315	8.281	8.085	748	12	69	917
30	Bali	2.444	399.644	17.162	17.191	1.940	248	907	4.160
31	Nusa Tenggara Barat	3.174	512.666	22.322	21.503	2.303	89	751	4.239
32	Nusa Tenggara Timur	5.056	776.844	36.857	38.550	3.384	107	877	5.889
33	Papua	2.474	448.483	17.649	16.553	739	106	109	1.663
34	Papua Barat	1.016	136.352	7.030	6.588	382	42	89	948
	Indonesia	148.244	25.486.506	1.115.194	1.072.136	94.550	17.772	44.894	215.075

Jumlah ruang kelas terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 141.721 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3.516. Namun, indikator R-K/RK SD terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,96 dan terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,16 dengan angka nasional sebesar 1,04, sedangkan Provinsi Jawa timur, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi barat, dan Bali dalam kondisi ideal sebesar 1,00. Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terdapat 4% ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sedangkan Kepulauan Riau terdapat 16% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga pada tingkat nasional terdapat 4% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar.

Tabel 4.3
Indikator Akses yang Meluas SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Indikator						
		R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpus	% Lab	%RUKS	%TS
1	DKI Jakarta	321	28	1,06	73,63	81,19	65,26	33,36
2	Jawa Barat	231	28	1,14	52,81	12,10	24,99	40,66
3	Banten	262	28	1,13	53,33	19,53	24,55	33,12
4	Jawa Tengah	150	22	0,99	69,44	17,28	44,62	70,37
5	DI Yogyakarta	159	22	0,98	88,38	58,69	81,87	80,89
6	Jawa Timur	147	21	1,00	62,42	19,38	39,41	59,50
7	Aceh	142	20	0,99	79,32	3,80	25,01	52,15
8	Sumatera Utara	180	23	1,03	56,97	6,34	14,21	42,79
9	Sumatera Barat	154	21	1,01	67,29	4,06	30,83	58,03
10	Riau	219	24	1,08	56,12	13,69	29,62	42,43
11	Kepulauan Riau	246	24	1,16	72,10	20,09	47,77	45,48
12	Jambi	159	21	1,04	66,18	3,91	28,85	51,24
13	Sumatera Selatan	200	24	1,13	65,19	5,66	26,96	47,22
14	Bangka Belitung	199	25	0,97	98,51	16,60	85,75	73,42
15	Bengkulu	156	20	1,00	76,51	4,95	28,15	49,21
16	Lampung	181	23	1,06	61,89	6,09	25,97	45,37
17	Kalimantan Barat	136	19	1,06	65,56	4,13	21,68	70,71
18	Kalimantan Tengah	110	17	1,00	59,47	3,20	24,91	64,68
19	Kalimantan Selatan	131	19	0,99	68,36	7,45	34,70	64,89
20	Kalimantan Timur	221	24	1,09	63,30	14,45	44,89	49,16
21	Kalimantan Utara	170	20	1,10	59,18	6,48	35,21	51,71
22	Sulawesi Utara	108	17	0,99	65,74	2,87	22,54	72,41
23	Gorontalo	132	20	0,96	84,71	4,28	39,25	62,56
24	Sulawesi Tengah	119	18	0,99	62,82	1,70	16,10	52,78
25	Sulawesi Selatan	145	20	1,03	76,94	3,24	25,05	55,23
26	Sulawesi Barat	121	18	1,00	59,83	1,43	14,54	38,62
27	Sulawesi Tenggara	139	20	1,01	71,52	2,21	21,82	44,45
28	Maluku	129	19	1,04	58,35	2,88	14,16	38,45
29	Maluku Utara	121	19	1,02	57,32	0,92	5,29	34,75
30	Bali	164	23	1,00	79,38	10,15	37,11	62,46
31	Nusa Tenggara Barat	162	23	1,04	72,56	2,80	23,66	49,61
32	Nusa Tenggara Timur	154	21	0,96	66,93	2,12	17,35	45,48
33	Papua	181	25	1,07	29,87	4,28	4,41	22,25
34	Papua Barat	134	19	1,07	37,60	4,13	8,76	41,72
	Indonesia	172	23	1,04	63,78	11,99	30,28	50,63

Jumlah perpustakaan SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 13.213 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 274. Indikator %Perpus terkecil juga terjadi di Provinsi Papua sebesar 29,87%, namun yang terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 98,51% dengan angka nasional sebesar 63,78%, yang berarti ketersediaan perpustakaan SD sebesar 63,78%, sehingga masih terdapat 36,22% sekolah tidak memiliki perpustakaan.

Jumlah laboratorium SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 3.743 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara masing-masing sebesar 12. Indikator %Lab SD terkecil juga terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,92% dan terbesar

terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,19% dengan angka nasional sebesar 11,99%, yang berarti ketersediaan laboratorium SD hanya 11,99%, sehingga masih terdapat 88,01% sekolah belum memiliki laboratorium.

Jumlah RUKS SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 8.490 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 69. Indikator %UKS SD terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 4,41% dan terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 85,75% dengan angka nasional sebesar 30,28%, yang berarti ketersediaan RUKS SD hanya 30,28%, sehingga masih terdapat 69,72% sekolah belum memiliki RUKS.

Tabel 4.4
Akses yang Meluas SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Meluas						Rata-rata	Jenis	
		R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpus	% Lab	%RUKS			%TS
		192	32	1	100	100	100	60		
1	DKI Jakarta	59,75	100,00	94,01	73,63	81,19	65,26	55,59	75,63	KURANG
2	Jawa Barat	83,19	100,00	87,55	52,81	12,10	24,99	67,76	61,20	KURANG
3	Banten	73,26	100,00	88,50	53,33	19,53	24,55	55,20	59,20	KURANG
4	Jawa Tengah	100,00	100,00	99,05	69,44	17,28	44,62	85,27	73,67	KURANG
5	DI Yogyakarta	100,00	100,00	97,72	88,38	58,69	81,87	74,17	85,83	MADYA
6	Jawa Timur	100,00	100,00	99,60	62,42	19,38	39,41	99,16	74,28	KURANG
7	Aceh	100,00	100,00	99,39	79,32	3,80	25,01	86,92	70,63	KURANG
8	Sumatera Utara	100,00	100,00	97,22	56,97	6,34	14,21	71,31	63,72	KURANG
9	Sumatera Barat	100,00	100,00	99,19	67,29	4,06	30,83	96,71	71,15	KURANG
10	Riau	87,87	100,00	92,91	56,12	13,69	29,62	70,72	64,42	KURANG
11	Kepulauan Riau	78,16	100,00	85,93	72,10	20,09	47,77	75,80	68,55	KURANG
12	Jambi	100,00	100,00	95,77	66,18	3,91	28,85	85,40	68,59	KURANG
13	Sumatera Selatan	95,88	100,00	88,65	65,19	5,66	26,96	78,71	65,86	KURANG
14	Bangka Belitung	96,40	100,00	96,81	98,51	16,60	85,75	81,72	82,26	PRATAMA
15	Bengkulu	100,00	100,00	99,89	76,51	4,95	28,15	82,02	70,22	KURANG
16	Lampung	100,00	100,00	94,21	61,89	6,09	25,97	75,62	66,26	KURANG
17	Kalimantan Barat	100,00	100,00	94,37	65,56	4,13	21,68	84,85	67,23	KURANG
18	Kalimantan Tengah	100,00	100,00	99,63	59,47	3,20	24,91	92,76	68,57	KURANG
19	Kalimantan Selatan	100,00	100,00	98,71	68,36	7,45	34,70	92,46	71,67	KURANG
20	Kalimantan Timur	86,88	100,00	92,11	63,30	14,45	44,89	81,93	69,08	KURANG
21	Kalimantan Utara	100,00	100,00	90,53	59,18	6,48	35,21	86,18	68,22	KURANG
22	Sulawesi Utara	100,00	100,00	98,51	65,74	2,87	22,54	82,86	67,50	KURANG
23	Gorontalo	100,00	100,00	95,69	84,71	4,28	39,25	95,91	74,26	KURANG
24	Sulawesi Tengah	100,00	100,00	99,30	62,82	1,70	16,10	87,96	66,84	KURANG
25	Sulawesi Selatan	100,00	100,00	97,30	76,94	3,24	25,05	92,06	70,65	KURANG
26	Sulawesi Barat	100,00	100,00	99,94	59,83	1,43	14,54	64,36	62,87	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	100,00	100,00	98,66	71,52	2,21	21,82	74,08	66,90	KURANG
28	Maluku	100,00	100,00	96,59	58,35	2,88	14,16	64,09	62,30	KURANG
29	Maluku Utara	100,00	100,00	97,63	57,32	0,92	5,29	57,92	59,87	KURANG
30	Bali	100,00	100,00	99,83	79,38	10,15	37,11	96,07	74,65	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	100,00	100,00	96,33	72,56	2,80	23,66	82,69	68,29	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	100,00	100,00	95,61	66,93	2,12	17,35	75,81	65,40	KURANG
33	Papua	100,00	100,00	93,79	29,87	4,28	4,41	37,08	52,78	KURANG
34	Papua Barat	100,00	100,00	93,71	37,60	4,13	8,76	69,53	59,10	KURANG
	Indonesia	95,92	100,00	95,72	65,87	10,94	30,45	78,26	68,17	KURANG
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	

Jumlah toilet siswa SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 33.511 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 677. Indikator %TS SD dihitung bahwa setiap 1 toilet digunakan oleh 60 siswa, %TS SD terkecil juga terjadi di Provinsi Papua sebesar 22,25% dan terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 80,89% dengan angka nasional sebesar 50,63%, yang berarti ketersediaan

toilet siswa SD hanya 50,63%, sehingga masih terdapat 49,37% sekolah belum memiliki toilet siswa sesuai ketentuan.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses pendidikan SD yang meluas yang terdapat pada Tabel 4.4. Indikator R-S/Sek di 26 Provinsi telah mencapai 100 atau ideal dengan terkecil pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 59,75, sehingga nasional menjadi 95,92 termasuk kategori paripurna. Indikator R-S/K di semua Provinsi menjadi 100,00 termasuk kategori paripurna, berarti sudah memenuhi standar kurang dari 32. Indikator R-K/RK menjadi terbesar yaitu 99,94 terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dan terkecil terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 85,93, sehingga nasional menjadi 95,72 termasuk kategori paripurna. Indikator %Perpus terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 98,51 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 29,87, sehingga nasional menjadi sebesar 65,87 termasuk kategori kurang. Indikator %Lab terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,19 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 0,92, sehingga nasional sebesar 10,94 termasuk kategori kurang. Indikator %RUKS terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 85,75 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 4,41, sehingga nasional sebesar 30,45 termasuk kategori kurang. Indikator %TS terbesar terjadi di Provinsi Jawa timur sebesar 99,16 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 37,08, sehingga nasional sebesar 78,26 termasuk kategori kurang.

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SD yang meluas menjadi 68,17 termasuk kategori kurang. Hal ini berarti akses pendidikan SD yang meluas sebesar 68% dari 100%. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata 32 Provinsi memiliki nilai kurang dari 80 termasuk kategori kurang, 1 provinsi termasuk kategori madya, dan 1 Provinsi termasuk pratama. Nilai terendah sebesar 52,78 termasuk kategori kurang terjadi di Provinsi Papua dan nilai tertinggi sebesar 82,26 termasuk pratama di Provinsi Bangka Belitung.

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis tujuh indikator akses pendidikan yang meluas tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. Jumlah SMP tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 5.101 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 169, sedangkan siswa SMP tertinggi juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.796.000 dan terendah juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 31.558. Namun, dilihat dari indikator maka R-S/Sek SMP berkisar antara 130 terendah sebesar Provinsi Maluku Utara sampai 482 tertinggi sebesar Provinsi Bali dengan angka nasional sebesar 269. Dengan demikian, daya tampung SMP hanya dimanfaatkan sebesar 82,92% dari standar sebesar 324.

Jumlah kelas SMP tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 56.795 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.215. Namun, indikator R-S/K SMP berkisar antara 24 terendah di 5 Provinsi, yaitu Aceh, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara sampai 32 tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan angka nasional sebesar 29. Dengan demikian, kisaran ini jauh dari standar ideal SMP sebesar 36 dengan pendayagunaan kelas SMP hanya 80,55%,. Rendahnya R-S/K SMP menunjukkan bahwa sekolah belum terisi sesuai

dengan kapasitas yang ada karena adanya perbedaan daerah dan geografis, walaupun di daerah padat pun ternyata tetap kurang dari standar.

Tabel 4.5
Data Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data							
		Sekolah	Siswa	Kelas	Ruang Kelas	Perpustakaan	Laboratorium	Ruang UKS	Toilet Siswa
1	DKI Jakarta	1.128	368.482	12.142	12.127	1.003	998	730	2.199
2	Jawa Barat	5.101	1.796.000	56.795	54.690	3.688	3.172	1.957	9.835
3	Banten	1.421	424.406	13.706	13.911	1.035	877	468	2.564
4	Jawa Tengah	3.285	1.194.666	40.710	41.632	2.960	2.988	2.247	8.478
5	DI Yogyakarta	435	128.538	4.540	4.804	419	468	367	1.358
6	Jawa Timur	4.607	1.254.971	44.401	44.537	3.472	3.314	2.338	8.987
7	Aceh	1.115	192.702	7.998	9.074	920	831	228	1.697
8	Sumatera Utara	2.525	666.883	22.412	23.249	1.971	1.626	640	4.246
9	Sumatera Barat	798	218.400	8.219	8.624	672	659	307	1.487
10	Riau	1.142	263.099	9.480	9.601	811	729	471	2.081
11	Kepulauan Riau	344	86.803	2.870	2.898	257	229	164	707
12	Jambi	662	126.656	4.921	5.277	517	443	245	1.196
13	Sumatera Selatan	1.312	355.306	11.959	11.699	1.035	828	562	2.569
14	Bangka Belitung	210	60.609	1.991	2.094	189	189	94	590
15	Bengkulu	419	89.985	3.442	3.645	353	325	164	794
16	Lampung	1.334	315.085	11.228	11.774	1.053	921	568	2.373
17	Kalimantan Barat	1.295	238.676	8.509	8.751	956	692	513	2.439
18	Kalimantan Tengah	822	109.900	4.531	4.891	569	458	252	1.307
19	Kalimantan Selatan	598	120.803	4.655	5.002	560	518	303	1.145
20	Kalimantan Timur	625	156.471	5.537	5.532	498	396	348	1.255
21	Kalimantan Utara	169	31.558	1.215	1.093	128	88	59	314
22	Sulawesi Utara	714	120.268	4.828	4.950	613	492	167	1.098
23	Gorontalo	329	50.893	2.105	2.137	251	218	94	564
24	Sulawesi Tengah	833	132.897	5.400	5.664	565	455	211	1.275
25	Sulawesi Selatan	1.643	384.045	14.653	15.065	1.313	1.200	496	2.836
26	Sulawesi Barat	358	62.943	2.439	2.513	266	186	74	465
27	Sulawesi Tenggara	747	130.201	5.388	5.670	590	535	153	1.136
28	Maluku	633	97.055	3.966	4.106	393	299	78	665
29	Maluku Utara	473	61.503	2.562	2.548	271	196	35	488
30	Bali	404	194.796	6.190	5.451	372	360	237	894
31	Nusa Tenggara Barat	894	179.489	6.915	6.960	609	528	236	1.466
32	Nusa Tenggara Timur	1.644	337.465	12.552	12.080	1.116	742	255	2.351
33	Papua	645	126.477	4.383	4.416	403	307	57	701
34	Papua Barat	296	47.693	1.876	1.896	202	159	51	388
	Indonesia	38.960	10.125.724	354.518	358.361	30.030	26.426	15.169	71.948

Jumlah ruang kelas SMP tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 54.690 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.093. Namun, indikator R-K/RK SMP berkisar antara 0,88 terendah di Provinsi Aceh sampai 1,14 tertinggi di Bali dengan angka nasional sebesar 0,99. Kondisi ideal yaitu sebesar 1,00 terjadi di tiga Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Provinsi Aceh masih terdapat 12% ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sebaliknya di Provinsi Bali terdapat 14% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar, pada tingkat nasional terdapat 1% ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Jumlah perpustakaan SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.688 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 128. Namun, indikator %Perpus terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 57,29% dan terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 96,32% dengan angka nasional sebesar

76,25%, yang berarti ketersediaan perpustakaan SMP hanya 77,08%, sehingga masih terdapat 22,92% sekolah tidak memiliki perpustakaan.

Tabel 4.6
Indikator Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Indikator						
		R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpustakaan	% Lab	% RUKS	%TS
1	DKI Jakarta	327	30	1,00	88,92	88,48	64,72	23,87
2	Jawa Barat	352	32	1,04	72,30	62,18	38,37	21,90
3	Banten	299	31	0,99	72,84	61,72	32,93	24,17
4	Jawa Tengah	364	29	0,98	90,11	90,96	68,40	28,39
5	DI Yogyakarta	295	28	0,95	96,32	107,59	84,37	42,26
6	Jawa Timur	272	28	1,00	75,36	71,93	50,75	28,64
7	Aceh	173	24	0,88	82,51	74,53	20,45	35,23
8	Sumatera Utara	264	30	0,96	78,06	64,40	25,35	25,47
9	Sumatera Barat	274	27	0,95	84,21	82,58	38,47	27,23
10	Riau	230	28	0,99	71,02	63,84	41,24	31,64
11	Kepulauan Riau	252	30	0,99	74,71	66,57	47,67	32,58
12	Jambi	191	26	0,93	78,10	66,92	37,01	37,77
13	Sumatera Selatan	271	30	1,02	78,89	63,11	42,84	28,92
14	Bangka Belitung	289	30	0,95	90,00	90,00	44,76	38,94
15	Bengkulu	215	26	0,94	84,25	77,57	39,14	35,29
16	Lampung	236	28	0,95	78,94	69,04	42,58	30,13
17	Kalimantan Barat	184	28	0,97	73,82	53,44	39,61	40,88
18	Kalimantan Tengah	134	24	0,93	69,22	55,72	30,66	47,57
19	Kalimantan Selatan	202	26	0,93	93,65	86,62	50,67	37,91
20	Kalimantan Timur	250	28	1,00	79,68	63,36	55,68	32,08
21	Kalimantan Utara	187	26	1,11	75,74	52,07	34,91	39,80
22	Sulawesi Utara	168	25	0,98	85,85	68,91	23,39	36,52
23	Gorontalo	155	24	0,99	76,29	66,26	28,57	44,33
24	Sulawesi Tengah	160	25	0,95	67,83	54,62	25,33	38,38
25	Sulawesi Selatan	234	26	0,97	79,91	73,04	30,19	29,54
26	Sulawesi Barat	176	26	0,97	74,30	51,96	20,67	29,55
27	Sulawesi Tenggara	174	24	0,95	78,98	71,62	20,48	34,90
28	Maluku	153	24	0,97	62,09	47,24	12,32	27,41
29	Maluku Utara	130	24	1,01	57,29	41,44	7,40	31,74
30	Bali	482	31	1,14	92,08	89,11	58,66	18,36
31	Nusa Tenggara Barat	201	26	0,99	68,12	59,06	26,40	32,67
32	Nusa Tenggara Timur	205	27	1,04	67,88	45,13	15,51	27,87
33	Papua	196	29	0,99	62,48	47,60	8,84	22,17
34	Papua Barat	161	25	0,99	68,24	53,72	17,23	32,54
	Indonesia	260	29	0,99	77,08	67,83	38,93	28,42

Jumlah laboratorium SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 3.314 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 88. Namun, indikator %Lab terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 41,44% dan terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 107,59% dengan angka nasional sebesar 67,83%, yang berarti ketersediaan laboratorium SMP di 7,59% sekolah di DI Yogyakarta memiliki lebih dari 1 laboratorium. Jadi, secara nasional terdapat 32,17% SMP belum memiliki laboratorium.

Jumlah RUKS SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 2.338 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 59. Namun, indikator %RUKS terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 7,40% dan terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 84,37% dengan angka nasional sebesar 38,93%, yang

berarti ketersediaan RUKS SMP hanya sebesar 38,93%. Jadi, secara nasional terdapat 61,17% SMP belum memiliki RUKS.

Jumlah toilet siswa SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 9.835 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 314. Namun, indikator %TS terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 18,36% dan terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 47,57% dengan angka nasional sebesar 28,42%, yang berarti ketersediaan toilet siswa SMP hanya 28,42%, sehingga masih terdapat 71,58% sekolah belum memiliki toilet siswa sesuai ketentuan 1 toilet untuk 40 siswa.

Tabel 4.7
Akses yang Meluas SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Meluas							Rata-rata	Jenis
		R-S/Sek 324	R-S/K 36	R-K/RK 1	% Perpus 100	% Lab 100	%RUKS 100	%TS 40		
1	DKI Jakarta	99,18	100,00	99,88	88,92	88,48	64,72	59,68	85,84	MADYA
2	Jawa Barat	92,02	100,00	96,29	72,30	62,18	38,37	54,76	73,70	KURANG
3	Banten	100,00	100,00	98,53	72,84	61,72	32,93	60,41	75,20	KURANG
4	Jawa Tengah	89,09	100,00	97,79	90,11	90,96	68,40	70,97	86,76	MADYA
5	DI Yogyakarta	100,00	100,00	94,50	96,32	100,00	84,37	94,65	95,69	PARIPURNA
6	Jawa Timur	100,00	100,00	99,69	75,36	71,93	50,75	71,61	81,34	PRATAMA
7	Aceh	100,00	100,00	88,14	82,51	74,53	20,45	88,06	79,10	KURANG
8	Sumatera Utara	100,00	100,00	96,40	78,06	64,40	25,35	63,67	75,41	KURANG
9	Sumatera Barat	100,00	100,00	95,30	84,21	82,58	38,47	68,09	81,24	PRATAMA
10	Riau	100,00	100,00	98,74	71,02	63,84	41,24	79,10	79,13	KURANG
11	Kepulauan Riau	100,00	100,00	99,03	74,71	66,57	47,67	81,45	81,35	PRATAMA
12	Jambi	100,00	100,00	93,25	78,10	66,92	37,01	94,43	81,39	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	100,00	100,00	97,83	78,89	63,11	42,84	72,30	79,28	KURANG
14	Bangka Belitung	100,00	100,00	95,08	90,00	90,00	44,76	97,35	88,17	MADYA
15	Bengkulu	100,00	100,00	94,43	84,25	77,57	39,14	88,24	83,37	PRATAMA
16	Lampung	100,00	100,00	95,36	78,94	69,04	42,58	75,31	80,18	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	100,00	100,00	97,23	73,82	53,44	39,61	97,86	80,28	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	100,00	100,00	92,64	69,22	55,72	30,66	84,09	76,05	KURANG
19	Kalimantan Selatan	100,00	100,00	93,06	93,65	86,62	50,67	94,78	88,40	MADYA
20	Kalimantan Timur	100,00	100,00	99,91	79,68	63,36	55,68	80,21	82,69	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	100,00	100,00	89,96	75,74	52,07	34,91	99,50	78,88	KURANG
22	Sulawesi Utara	100,00	100,00	97,54	85,85	68,91	23,39	91,30	81,00	PRATAMA
23	Gorontalo	100,00	100,00	98,50	76,29	66,26	28,57	90,24	79,98	KURANG
24	Sulawesi Tengah	100,00	100,00	95,34	67,83	54,62	25,33	95,94	77,01	KURANG
25	Sulawesi Selatan	100,00	100,00	97,27	79,91	73,04	30,19	73,85	79,18	KURANG
26	Sulawesi Barat	100,00	100,00	97,06	74,30	51,96	20,67	73,88	73,98	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	100,00	100,00	95,03	78,98	71,62	20,48	87,25	79,05	KURANG
28	Maluku	100,00	100,00	96,59	62,09	47,24	12,32	68,52	69,54	KURANG
29	Maluku Utara	100,00	100,00	99,45	57,29	41,44	7,40	79,35	69,28	KURANG
30	Bali	67,20	100,00	88,06	92,08	89,11	58,66	45,89	77,29	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	100,00	100,00	99,35	68,12	59,06	26,40	81,68	76,37	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	100,00	100,00	96,24	67,88	45,13	15,51	69,67	70,63	KURANG
33	Papua	100,00	100,00	99,25	62,48	47,60	8,84	55,43	67,66	KURANG
34	Papua Barat	100,00	100,00	98,95	68,24	53,72	17,23	81,35	74,21	KURANG
	Indonesia	98,46	100,00	96,23	77,35	66,90	36,05	78,55	79,08	KURANG
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses yang meluas SMP yang terdapat pada Tabel 4.7. Indikator R-S/Sek di 30 Provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 artinya karena kurang dari standar 324 dan kurang dari 100 terdapat di empat Provinsi dan terkecil sebesar 67,20 terjadi di Bali, sehingga nasional menjadi 98,46 termasuk kategori paripurna. Indikator R-S/K semua Provinsi telah ideal menjadi 100,00 termasuk kategori paripurna. Indikator R-K/RK terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 99,91 dan terkecil terjadi di

Provinsi Bali sebesar 88,06, sehingga nasional menjadi 96,23 termasuk kategori paripurna. Indikator %Perpus terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 96,32 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 57,29, sehingga nasional sebesar 77,35 termasuk kategori kurang. Indikator %Lab terbesar dan sudah ideal terdapat di Provinsi DI Yogyakarta dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 41,44, sehingga nasional sebesar 66,90 termasuk kategori kurang. Indikator %RUKS terbesar terdapat di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 84,37 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 7,40, sehingga nasional sebesar 36,05 termasuk kategori kurang. Indikator %TS terbesar terdapat di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 99,50 dan terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 45,89, sehingga nasional sebesar 78,55 termasuk kategori kurang.

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SMP yang meluas menjadi 79,08 termasuk kategori kurang. Hal ini berarti akses pendidikan SMP yang meluas sebesar 79% dari 100% atau tercapai kurang dari empat per lima. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata Provinsi DI Yogyakarta termasuk paripurna, 4 Provinsi termasuk madya, 9 Provinsi termasuk kategori pratama, dan 20 Provinsi termasuk kategori kurang. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 95,69 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 67,66 termasuk kategori kurang.

c. Sekolah Menengah (SM)

Data SM adalah penjumlahan dari data SMA dan SMK, sehingga dihasilkan analisis tujuh indikator akses pendidikan yang meluas tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9. Jumlah SM tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.430 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 87, sedangkan siswa SM tertinggi juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.722.099 dan terendah juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 25.266. Namun, dilihat dari indikator maka R-S/Sek SM terkecil terjadi pada Provinsi Maluku Utara sebesar 175 dan terbesar pada Provinsi Bali sebesar 547 dengan angka nasional sebesar 356. Dengan demikian, daya tampung sekolah hanya dimanfaatkan sebesar 82,41% dari standar sebesar 432.

Jumlah kelas SM tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 56.320 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 921. Namun, indikator R-S/K SM terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 31 dan terkecil pada Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara masing-masing sebesar 23 dengan angka nasional sebesar 29. Dengan demikian, pendayagunaan kelas hanya 80,56%, dengan kisaran ini jauh dari standar ideal sebesar 36. Rendahnya R-S/K SM menunjukkan bahwa sekolah belum terisi sesuai dengan kapasitas yang ada karena adanya perbedaan daerah dan geografis, walaupun di daerah padat pun ternyata tetap kurang dari standar.

Jumlah ruang kelas terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 52.092 dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 856. Namun, indikator R-K/RK SM berkisar antara 0,96 terendah di Provinsi Bangka Belitung sampai 1,14 tertinggi di Provinsi Bali dengan angka nasional sebesar 1,04, sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Papua dalam

kondisi ideal sebesar 1,00. Provinsi Bangka Belitung masih terdapat 4% ruang kelas yang belum digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, sebaliknya di Provinsi Bali terdapat 14% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga pada tingkat nasional terdapat 4% ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali untuk kegiatan belajar mengajar.

Tabel 4.8
Data Akses yang Meluas SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data							
		Sekolah	Siswa	Kelas	Ruang Kelas	Perpustakaan	Laboratorium	Ruang UKS	Toilet Siswa
1	DKI Jakarta	1.081	390.941	13.097	13.478	936	2.550	624	1.954
2	Jawa Barat	4.430	1.722.099	56.320	52.092	2.727	6.510	1.363	7.925
3	Banten	1.197	433.302	14.296	13.217	776	1.889	335	2.077
4	Jawa Tengah	2.427	1.179.127	39.584	37.743	2.005	6.422	1.449	6.124
5	DI Yogyakarta	383	143.956	5.496	5.330	348	994	291	1.066
6	Jawa Timur	3.507	1.271.977	43.785	39.611	2.279	6.293	1.504	6.739
7	Aceh	722	191.957	7.889	8.143	598	1.527	159	1.139
8	Sumatera Utara	2.042	667.420	22.498	22.866	1.543	3.715	542	3.394
9	Sumatera Barat	528	231.999	8.411	8.076	434	1.087	212	964
10	Riau	726	243.882	8.893	8.675	483	1.222	260	1.269
11	Kepulauan Riau	219	70.350	2.575	2.558	162	449	96	422
12	Jambi	394	124.319	4.542	4.552	317	655	156	884
13	Sumatera Selatan	888	316.175	10.536	10.261	701	1.542	403	1.709
14	Bangka Belitung	121	50.126	1.687	1.761	112	359	61	317
15	Bengkulu	231	76.052	2.927	2.984	196	453	119	450
16	Lampung	941	290.703	10.240	10.152	678	1.583	360	1.686
17	Kalimantan Barat	617	187.460	6.269	6.056	456	998	251	1.149
18	Kalimantan Tengah	373	89.571	3.532	3.531	276	590	137	602
19	Kalimantan Selatan	309	121.612	4.268	4.035	263	670	167	715
20	Kalimantan Timur	434	146.850	5.327	4.922	324	783	201	908
21	Kalimantan Utara	87	25.266	921	856	63	134	30	145
22	Sulawesi Utara	411	109.683	4.816	4.795	324	671	109	712
23	Gorontalo	117	46.454	1.765	1.838	105	288	49	238
24	Sulawesi Tengah	393	116.912	4.478	4.400	297	588	74	662
25	Sulawesi Selatan	1.017	364.603	13.318	13.325	797	1.871	279	1.600
26	Sulawesi Barat	220	55.848	2.105	2.074	132	264	27	284
27	Sulawesi Tenggara	439	122.592	4.918	4.926	354	712	77	608
28	Maluku	383	91.366	3.818	3.573	285	541	67	417
29	Maluku Utara	314	54.923	2.371	2.269	187	359	12	299
30	Bali	335	183.341	5.902	5.192	272	736	176	846
31	Nusa Tenggara Barat	608	174.267	6.254	5.902	380	780	112	1.095
32	Nusa Tenggara Timur	785	259.746	9.708	8.982	569	995	120	1.203
33	Papua	356	93.127	3.591	3.581	219	582	44	462
34	Papua Barat	170	39.670	1.658	1.620	115	258	25	243
	Indonesia	27.205	9.687.676	337.795	323.376	19.713	49.070	9.891	50.307

Jumlah perpustakaan SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 2.727 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 63. Namun, indikator %Perpus terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 59,55% dan terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 92,56% dengan angka nasional sebesar 72,46%, yang berarti ketersediaan perpustakaan SM hanya 72,46% dari sekolah yang ada, sehingga masih terdapat 27,54% sekolah tidak memiliki perpustakaan.

Jumlah laboratorium SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 6.510 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 134. Namun, indikator %Lab terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 22,87% dan terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 59,34% dengan angka nasional sebesar 36,07%,

yang berarti ketersediaan laboratorium SM hanya 36,87%, sehingga masih terdapat 63,13% sekolah tidak memiliki laboratorium sesuai dengan ketentuan.

Jumlah RUKS SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 1.504 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 30. Namun, indikator %RUKS terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 3,82% dan terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 75,98% dengan angka nasional sebesar 36,36%, yang berarti ketersediaan RUKS SM hanya 36,36%, sehingga masih terdapat 63,64% sekolah tidak memiliki RUKS sesuai dengan ketentuan.

Tabel 4.9
Indikator Akses yang Meluas SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Indikator						
		R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpus	% Lab	% RUKS	%TS
1	DKI Jakarta	362	30	0,97	86,59	47,18	57,72	19,99
2	Jawa Barat	389	31	1,08	61,56	29,39	30,77	18,41
3	Banten	362	30	1,08	64,83	31,56	27,99	19,17
4	Jawa Tengah	486	30	1,05	82,61	52,92	59,70	20,77
5	DI Yogyakarta	376	26	1,03	90,86	51,91	75,98	29,62
6	Jawa Timur	363	29	1,11	64,98	35,89	42,89	21,19
7	Aceh	266	24	0,97	82,83	42,30	22,02	23,73
8	Sumatera Utara	327	30	0,98	75,56	36,39	26,54	20,34
9	Sumatera Barat	439	28	1,04	82,20	41,17	40,15	16,62
10	Riau	336	27	1,03	66,53	33,66	35,81	20,81
11	Kepulauan Riau	321	27	1,01	73,97	41,00	43,84	23,99
12	Jambi	316	27	1,00	80,46	33,25	39,59	28,44
13	Sumatera Selatan	356	30	1,03	78,94	34,73	45,38	21,62
14	Bangka Belitung	414	30	0,96	92,56	59,34	50,41	25,30
15	Bengkulu	329	26	0,98	84,85	39,22	51,52	23,67
16	Lampung	309	28	1,01	72,05	33,65	38,26	23,20
17	Kalimantan Barat	304	30	1,04	73,91	32,35	40,68	24,52
18	Kalimantan Tengah	240	25	1,00	73,99	31,64	36,73	26,88
19	Kalimantan Selatan	394	28	1,06	85,11	43,37	54,05	23,52
20	Kalimantan Timur	338	28	1,08	74,65	36,08	46,31	24,73
21	Kalimantan Utara	290	27	1,08	72,41	30,80	34,48	22,96
22	Sulawesi Utara	267	23	1,00	78,83	32,65	26,52	25,97
23	Gorontalo	397	26	0,96	89,74	49,23	41,88	20,49
24	Sulawesi Tengah	297	26	1,02	75,57	29,92	18,83	22,65
25	Sulawesi Selatan	359	27	1,00	78,37	36,79	27,43	17,55
26	Sulawesi Barat	254	27	1,01	60,00	24,00	12,27	20,34
27	Sulawesi Tenggara	279	25	1,00	80,64	32,44	17,54	19,84
28	Maluku	239	24	1,07	74,41	28,25	17,49	18,26
29	Maluku Utara	175	23	1,04	59,55	22,87	3,82	21,78
30	Bali	547	31	1,14	81,19	43,94	52,54	18,46
31	Nusa Tenggara Barat	287	28	1,06	62,50	25,66	18,42	25,13
32	Nusa Tenggara Timur	331	27	1,08	72,48	25,35	15,29	18,53
33	Papua	262	26	1,00	61,52	32,70	12,36	19,84
34	Papua Barat	233	24	1,02	67,65	30,35	14,71	24,50
	Indonesia	356	29	1,04	72,46	36,07	36,36	20,77

Jumlah toilet siswa SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 7.925 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 145. Namun, indikator %TS terkecil terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 16,62% dan terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 29,62% dengan angka nasional sebesar 20,77%, yang berarti ketersediaan toilet siswa SM hanya 20,77%, sehingga masih terdapat 79,23%

sekolah tidak memiliki toilet siswa sesuai dengan ketentuan, yaitu 1 toilet untuk 40 per siswa.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai indikator akses pendidikan SM yang meluas pada Tabel 4.10. Indikator R-S/Sek di 31 Provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 dan terkecil sebesar 78,93 terjadi di Provinsi Bali, sehingga nasional menjadi 99,01 termasuk kategori paripurna. Indikator R-S/K semua Provinsi telah ideal menjadi 100,00 termasuk kategori paripurna. Indikator R-K/RK terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 99,97 dan terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 87,97, sehingga nasional menjadi 96,28 termasuk kategori paripurna. Indikator %Perpus terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 92,56 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 59,55, sehingga nasional sebesar 75,41 termasuk kategori kurang. Indikator %Lab terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 59,34 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 22,87, sehingga nasional sebesar 36,23 termasuk kategori kurang. Indikator %RUKS terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 75,98 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 3,82, sehingga nasional sebesar 34,70 termasuk kategori kurang. Indikator %TS terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 74,05 dan terkecil terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 41,55, sehingga nasional sebesar 55,36 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.10
Akses yang Meluas SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Meluas							Rata-rata	Jenis
		R-S/Sek	R-S/K	R-K/RK	% Perpus	% Lab	%RUKS	%TS		
		432	36	1	100	100	100	40		
1	DKI Jakarta	100,00	100,00	97,17	86,59	47,18	57,72	49,98	76,95	KURANG
2	Jawa Barat	100,00	100,00	92,49	61,56	29,39	30,77	46,02	65,75	KURANG
3	Banten	100,00	100,00	92,45	64,83	31,56	27,99	47,93	66,39	KURANG
4	Jawa Tengah	88,92	100,00	95,35	82,61	52,92	59,70	51,94	75,92	KURANG
5	DI Yogyakarta	100,00	100,00	96,98	90,86	51,91	75,98	74,05	84,25	PRATAMA
6	Jawa Timur	100,00	100,00	90,47	64,98	35,89	42,89	52,98	69,60	KURANG
7	Aceh	100,00	100,00	96,88	82,83	42,30	22,02	59,34	71,91	KURANG
8	Sumatera Utara	100,00	100,00	98,39	75,56	36,39	26,54	50,85	69,68	KURANG
9	Sumatera Barat	98,32	100,00	96,02	82,20	41,17	40,15	41,55	71,34	KURANG
10	Riau	100,00	100,00	97,55	66,53	33,66	35,81	52,03	69,37	KURANG
11	Kepulauan Riau	100,00	100,00	99,34	73,97	41,00	43,84	59,99	74,02	KURANG
12	Jambi	100,00	100,00	99,78	80,46	33,25	39,59	71,11	74,88	KURANG
13	Sumatera Selatan	100,00	100,00	97,39	78,94	34,73	45,38	54,05	72,93	KURANG
14	Bangka Belitung	100,00	100,00	95,80	92,56	59,34	50,41	63,24	80,19	PRATAMA
15	Bengkulu	100,00	100,00	98,09	84,85	39,22	51,52	59,17	76,12	KURANG
16	Lampung	100,00	100,00	99,14	72,05	33,65	38,26	58,00	71,58	KURANG
17	Kalimantan Barat	100,00	100,00	96,60	73,91	32,35	40,68	61,29	72,12	KURANG
18	Kalimantan Tengah	100,00	100,00	99,97	73,99	31,64	36,73	67,21	72,79	KURANG
19	Kalimantan Selatan	100,00	100,00	94,54	85,11	43,37	54,05	58,79	76,55	KURANG
20	Kalimantan Timur	100,00	100,00	92,40	74,65	36,08	46,31	61,83	73,04	KURANG
21	Kalimantan Utara	100,00	100,00	92,94	72,41	30,80	34,48	57,39	69,72	KURANG
22	Sulawesi Utara	100,00	100,00	99,56	78,83	32,65	26,52	64,91	71,78	KURANG
23	Gorontalo	100,00	100,00	96,03	89,74	49,23	41,88	51,23	75,45	KURANG
24	Sulawesi Tengah	100,00	100,00	98,26	75,57	29,92	18,83	56,62	68,46	KURANG
25	Sulawesi Selatan	100,00	100,00	99,95	78,37	36,79	27,43	43,88	69,49	KURANG
26	Sulawesi Barat	100,00	100,00	98,53	60,00	24,00	12,27	50,85	63,66	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	100,00	100,00	99,84	80,64	32,44	17,54	49,60	68,58	KURANG
28	Maluku	100,00	100,00	93,58	74,41	28,25	17,49	45,64	65,63	KURANG
29	Maluku Utara	100,00	100,00	95,70	59,55	22,87	3,82	54,44	62,34	KURANG
30	Bali	78,93	100,00	87,97	81,19	43,94	52,54	46,14	70,10	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	100,00	100,00	94,37	62,50	25,66	18,42	62,83	66,26	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	100,00	100,00	92,52	72,48	25,35	15,29	46,31	64,57	KURANG
33	Papua	100,00	100,00	99,72	61,52	32,70	12,36	49,61	65,13	KURANG
34	Papua Barat	100,00	100,00	97,71	67,65	30,35	14,71	61,26	67,38	KURANG
	Indonesia	99,01	100,00	96,28	75,41	36,23	34,70	55,36	71,00	KURANG
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	

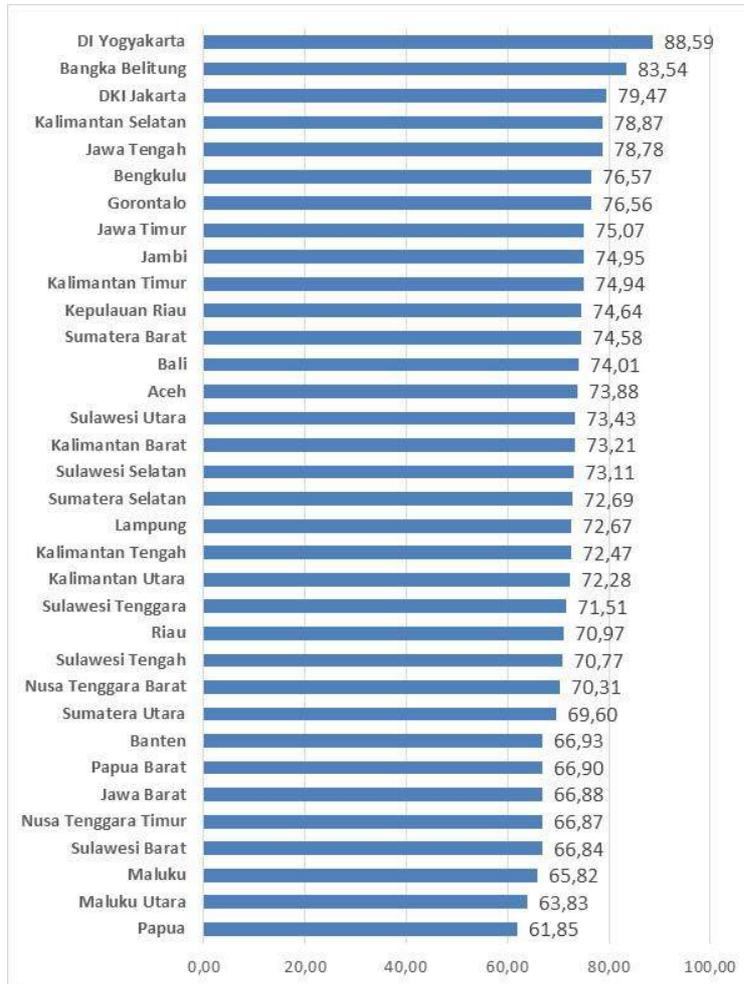
Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SM yang meluas menjadi 71,00 termasuk kategori kurang. Hal ini berarti akses pendidikan SM yang meluas sebesar 71% dari 100%. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata 32 Provinsi termasuk kategori kurang dan 2 Provinsi termasuk kategori pratama. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 84,25 dan Bangka Belitung sebesar 80,19 termasuk kategori pratama, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 62,34 termasuk kategori kurang.

d. Semua Jenjang

Tabel 4.11
Akses yang Meluas Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	75,63	85,84	76,95	79,47	KURANG
2	Jawa Barat	61,20	73,70	65,75	66,88	KURANG
3	Banten	59,20	75,20	66,39	66,93	KURANG
4	Jawa Tengah	73,67	86,76	75,92	78,78	KURANG
5	DI Yogyakarta	85,83	95,69	84,25	88,59	MADYA
6	Jawa Timur	74,28	81,34	69,60	75,07	KURANG
7	Aceh	70,63	79,10	71,91	73,88	KURANG
8	Sumatera Utara	63,72	75,41	69,68	69,60	KURANG
9	Sumatera Barat	71,15	81,24	71,34	74,58	KURANG
10	Riau	64,42	79,13	69,37	70,97	KURANG
11	Kepulauan Riau	68,55	81,35	74,02	74,64	KURANG
12	Jambi	68,59	81,39	74,88	74,95	KURANG
13	Sumatera Selatan	65,86	79,28	72,93	72,69	KURANG
14	Bangka Belitung	82,26	88,17	80,19	83,54	PRATAMA
15	Bengkulu	70,22	83,37	76,12	76,57	KURANG
16	Lampung	66,26	80,18	71,58	72,67	KURANG
17	Kalimantan Barat	67,23	80,28	72,12	73,21	KURANG
18	Kalimantan Tengah	68,57	76,05	72,79	72,47	KURANG
19	Kalimantan Selatan	71,67	88,40	76,55	78,87	KURANG
20	Kalimantan Timur	69,08	82,69	73,04	74,94	KURANG
21	Kalimantan Utara	68,22	78,88	69,72	72,28	KURANG
22	Sulawesi Utara	67,50	81,00	71,78	73,43	KURANG
23	Gorontalo	74,26	79,98	75,45	76,56	KURANG
24	Sulawesi Tengah	66,84	77,01	68,46	70,77	KURANG
25	Sulawesi Selatan	70,65	79,18	69,49	73,11	KURANG
26	Sulawesi Barat	62,87	73,98	63,66	66,84	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	66,90	79,05	68,58	71,51	KURANG
28	Maluku	62,30	69,54	65,63	65,82	KURANG
29	Maluku Utara	59,87	69,28	62,34	63,83	KURANG
30	Bali	74,65	77,29	70,10	74,01	KURANG
31	Nusa Tenggara Barat	68,29	76,37	66,26	70,31	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	65,40	70,63	64,57	66,87	KURANG
33	Papua	52,78	67,66	65,13	61,85	KURANG
34	Papua Barat	59,10	74,21	67,38	66,90	KURANG
	Indonesia	68,17	79,08	71,00	72,75	KURANG
	Jenis	KURANG	KURANG	KURANG	KURANG	

Berdasarkan tujuh indikator akses pendidikan yang meluas maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SM, dan rata-rata 3 jenjang seperti disajikan pada Tabel 4.11. Bila dilihat secara nasional maka SD memiliki nilai akses pendidikan yang meluas terkecil sebesar 68,17 termasuk kategori kurang dan terbesar pada SMP sebesar 79,08 juga termasuk kategori kurang, sedangkan SM sebesar 71,00 juga termasuk kategori kurang. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang meluas sebesar 72,75 juga termasuk kategori kurang.



Grafik 4.1
Akses yang Meluas Semua Jenjang Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

Bila dilihat akses pendidikan yang meluas untuk tiap Provinsi yang terbesar untuk SD adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 85,83 termasuk madya, untuk SMP juga pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 95,69 termasuk paripurna, sedangkan untuk SM pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 84,25 termasuk pratama. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang meluas terbesar juga terjadi pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 88,59 termasuk kategori madya.

Sebaliknya, akses pendidikan yang meluas terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Papua sebesar 52,78 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Papua sebesar 67,66 termasuk kurang, sedangkan untuk SM pada Provinsi Maluku Utara sebesar 62,34 termasuk kurang. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang meluas terkecil terjadi pada Provinsi Papua sebesar 61,85 termasuk kategori kurang.

Dengan demikian, dari tiga jenjang pendidikan akses pendidikan yang meluas hanya tercapai sebesar 72,75 termasuk kategori kurang. Bila dilihat setiap Provinsi maka terdapat 32 Provinsi termasuk kurang, 1 Provinsi termasuk pratama, dan 1 Provinsi termasuk madya.

Keberhasilan pendidikan dilihat dari akses pendidikan yang meluas semua jenjang dapat terlihat jelas pada Grafik 4.1, terlihat bahwa lima Provinsi terbawah adalah Papua, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sebaliknya, lima Provinsi teratas adalah DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Gorontalo.

2. Akses yang Merata

Terdapat tiga jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui akses yang merata. Dari tiga indikator tersebut, indikator yang dilakukan konversi, yaitu AMK SD, APK SMP/SM, dan TPS menggunakan standar tertentu yang terdapat pada Tabel 3.3, sehingga diperoleh satuan yang sama untuk menghasilkan nilai indikator, sedangkan APK SD, AM SMP/SM tak mengalami konversi. Ketiga nilai tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi 3 sehingga diperoleh nilai akses yang merata. Nilai maksimal 100, sehingga nilai makin mendekati 100 disebut makin merata.

Tabel 4.12 menunjukkan data, indikator, dan nilai akses yang merata menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat penduduk usia masuk SD sebesar 9.597.500, penduduk usia SD sebesar 27.843.400, usia SMP sebesar 13.440.000, dan usia SM sebesar 13.305.400. Lulusan SD sebesar 4.115.553 dan lulusan SMP sebesar 3.233.509. Siswa baru SD sebesar 4.257.224 lebih besar jika dibandingkan dengan lulusan SD, artinya masukan SD bertambah sehingga jumlah siswa menjadi bertambah. Siswa baru SMP sebesar 3.354.222, sedangkan SM sebesar 3.335.526. Kelas SD sebesar 1.115.194, SMP sebesar 354.518 sedangkan SM sebesar 337.795.

Berdasarkan jumlah kelas dibagi dengan 6 maka diperoleh sekolah ekuivalen SD sebesar 185.866, SMP sebesar 59.086, sedangkan SM sebesar 56.299. Dengan menggunakan data penduduk usia sekolah dan jumlah siswa maka diperoleh APK SD sebesar 94,93%, SMP sebesar 75,34%, sedangkan SM sebesar 72,81%. Berdasarkan siswa baru SD dan penduduk usia masuk sekolah atau usia 6 dan 7 tahun maka diperoleh AMK SD sebesar 44,36%, sedangkan siswa baru jenjang SMP dan SM dengan lulusan jenjang sebelumnya atau SD dan SMP maka diperoleh AM SMP sebesar 81,50% dan AM SM sebesar 103,15%. Dengan menggunakan penduduk usia masuk sekolah dan sekolah ekuivalen SD maka diperoleh TPS SD sebesar 52, berdasarkan lulusan SD dan sekolah ekuivalen SMP maka diperoleh TPS SMP sebesar 70, lulusan SMP dan sekolah ekuivalen SM maka diperoleh TPS SM sebesar 57.

Tabel 4.12
Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Merata

Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2017/2018

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A. Data						
1	Penduduk masuk SD	9.597.500	-	-		
2	Penduduk usia sekolah	27.843.400	13.440.400	13.305.400		
3	Lulusan	4.115.553	3.233.509	-		
4	Siswa Baru	4.257.224	3.354.222	3.335.526		
5	Kelas	1.115.194	354.518	337.795		
6	Sekolah ekuivalen	185.866	59.086	56.299		
B. Indikator						
1	APK (%)	91,54	75,34	72,81		
2	AMK (%)	44,36	-	-		
	AM (%)	-	81,50	103,15		
3	TPS	52	70	57		
C. Nilai Indikator						
1	APK	94,93	94,74	98,02	95,90	PARIPURNA
2	AMK/AM	91,70	81,67	97,83	90,40	UTAMA
3	TPS	97,12	99,94	99,35	98,80	PARIPURNA
	Akses yang Merata	94,59	92,12	98,40	95,03	PARIPURNA
	Jenis Akses yang Merata	UTAMA	UTAMA	PARIPURNA	PARIPURNA	

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka tiga indikator akses yang merata mengalami konversi, yaitu AMK SD, APK SMP dan SM serta TPS. APK SD menjadi sebesar 94,93, SMP menjadi 94,74, dan SM menjadi 98,02, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 95,90 termasuk kategori paripurna. AMK SD menjadi sebesar 91,70, AM SMP sebesar 81,67, dan SM sebesar 97,83, sehingga rata-rata semua jenjang sebesar 90,40 termasuk kategori utama. TPS SD menjadi 97,12, SMP mencapai 99,94, dan SM mencapai 99,35, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 98,80 termasuk kategori paripurna. Dengan demikian, akses yang merata SD sebesar 94,59 termasuk kategori utama, SMP sebesar 92,12 termasuk kategori utama, dan SM sebesar 98,40 termasuk paripurna, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 95,03 termasuk kategori paripurna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jenjang yang paling tinggi atau SM yang paling merata dan jenjang SMP yang paling kecil namun masih dalam kategori utama atau merata.

a. SD

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang merata tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.13. APK terbesar terjadi Provinsi Papua Barat sebesar 107,53% dan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 77,68% dengan rata-rata nasional sebesar 91,54%, yang berarti ketercapaian APK masih belum optimal karena masih kurang dari 100 sebagai standar. Namun, terdapat 10 Provinsi dengan APK SD lebih dari 100%.

Jumlah penduduk usia masuk sekolah atau 6-7 tahun terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.730.000 dan terkecil di Provinsi Papua Barat sebesar 36.500, siswa baru terbesar juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 755.041 dan terkecil juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 13.354. Dilihat dari indikator AMK SD terkecil juga terdapat di Provinsi Aceh sebesar 37,00%, namun yang terbesar

terdapat di Provinsi Papua Barat sebesar 62,25% dengan angka nasional sebesar 44,36%. Dengan demikian, masukan SD yang sesuai dengan usia masuk sekolah hanya tercapai 44,36%.

Tabel 4.13
Data dan Indikator Akses yang Merata SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data				Indikator		
		P6-7 Th	Siswa Baru	Kelas	Sekolah ekuivalen	APK	AMK	TPS
1	DKI Jakarta	376.300	141.055	29.754	4.959	90,30	37,48	76
2	Jawa Barat	1.730.000	755.041	161.871	26.979	91,76	43,64	64
3	Banten	492.900	199.934	42.126	7.021	93,37	40,56	70
4	Jawa Tengah	1.110.800	476.388	127.742	21.290	84,88	42,89	52
5	DI Yogyakarta	111.700	47.837	13.623	2.271	91,28	42,83	49
6	Jawa Timur	1.193.300	466.342	135.190	22.532	77,68	39,08	53
7	Aceh	224.600	83.109	24.315	4.053	81,07	37,00	55
8	Sumatera Utara	629.600	287.222	73.917	12.320	98,22	45,62	51
9	Sumatera Barat	218.000	107.568	30.433	5.072	101,69	49,34	43
10	Riau	279.400	137.558	33.735	5.623	101,11	49,23	50
11	Kepulauan Riau	88.600	38.924	9.288	1.548	90,90	43,93	57
12	Jambi	128.100	66.914	18.666	3.111	99,58	52,24	41
13	Sumatera Selatan	321.800	161.197	39.405	6.568	100,75	50,09	49
14	Bangka Belitung	51.700	29.278	6.464	1.077	102,51	56,63	48
15	Bengkulu	72.600	35.253	10.484	1.747	100,01	48,56	42
16	Lampung	321.500	143.108	37.123	6.187	92,12	44,51	52
17	Kalimantan Barat	196.200	106.944	30.687	5.115	100,18	54,51	38
18	Kalimantan Tengah	95.300	50.104	17.335	2.889	96,08	52,58	33
19	Kalimantan Selatan	165.900	67.041	20.566	3.428	87,78	40,41	48
20	Kalimantan Timur	135.094	70.253	17.488	2.915	100,28	52,00	46
21	Kalimantan Utara	26.406	13.354	3.884	647	99,44	50,57	41
22	Sulawesi Utara	83.400	35.298	14.311	2.385	98,01	42,32	35
23	Gorontalo	43.300	20.167	6.166	1.028	99,30	46,58	42
24	Sulawesi Tengah	118.300	53.934	18.842	3.140	99,13	45,59	38
25	Sulawesi Selatan	332.200	149.316	45.580	7.597	95,70	44,95	44
26	Sulawesi Barat	55.600	25.459	8.887	1.481	93,42	45,79	38
27	Sulawesi Tenggara	119.100	48.602	16.246	2.708	97,04	40,81	44
28	Maluku	77.000	38.021	11.765	1.961	92,54	49,38	39
29	Maluku Utara	54.000	24.848	8.281	1.380	100,14	46,01	39
30	Bali	133.800	65.231	17.162	2.860	98,68	48,75	47
31	Nusa Tenggara Barat	201.600	87.968	22.322	3.720	87,88	43,63	54
32	Nusa Tenggara Timur	243.700	126.970	36.857	6.143	106,55	52,10	40
33	Papua	129.200	74.265	17.649	2.942	91,51	57,48	44
34	Papua Barat	36.500	22.721	7.030	1.172	107,53	62,25	31
	Indonesia	9.597.500	4.257.224	1.115.194	185.866	91,54	44,36	52

Jumlah kelas SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 161.871 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3.884. Jumlah sekolah ekuivalen terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 26.979 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 647. Namun, indikator TPS terkecil atau terbaik karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih besar terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 31 dan terbesar atau terburuk karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih kecil terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 76, karena merupakan kota terbesar dan sebagai ibukota negara. Dengan demikian, kesempatan bersekolah di SD sebesar 52 atau mencapai 100% dari standar sebesar 52.

Tabel 4.14
Akses yang Merata SD Tiap Provinsi

Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Merata				Rata-rata	Jenis
		APK	AMK	TPS			
		100	50	52			
1	DKI Jakarta	90,30	74,97	68,53	77,93	KURANG	
2	Jawa Barat	91,76	87,29	81,09	86,71	MADYA	
3	Banten	93,37	81,13	74,07	82,85	PRATAMA	
4	Jawa Tengah	84,88	85,77	99,67	90,11	UTAMA	
5	DI Yogyakarta	91,28	85,65	100,00	92,31	UTAMA	
6	Jawa Timur	77,68	78,16	98,19	84,67	PRATAMA	
7	Aceh	81,07	74,01	93,82	82,97	PRATAMA	
8	Sumatera Utara	98,22	91,24	100,00	96,49	PARIPURNA	
9	Sumatera Barat	100,00	98,69	100,00	99,56	PARIPURNA	
10	Riau	100,00	98,47	100,00	99,49	PARIPURNA	
11	Kepulauan Riau	90,90	87,86	90,85	89,87	MADYA	
12	Jambi	99,58	100,00	100,00	99,86	PARIPURNA	
13	Sumatera Selatan	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
14	Bangka Belitung	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
15	Bengkulu	100,00	97,12	100,00	99,04	PARIPURNA	
16	Lampung	92,12	89,03	100,00	93,71	UTAMA	
17	Kalimantan Barat	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
18	Kalimantan Tengah	96,08	100,00	100,00	98,69	PARIPURNA	
19	Kalimantan Selatan	87,78	80,82	100,00	89,53	MADYA	
20	Kalimantan Timur	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
21	Kalimantan Utara	99,44	100,00	100,00	99,81	PARIPURNA	
22	Sulawesi Utara	98,01	84,65	100,00	94,22	UTAMA	
23	Gorontalo	99,30	93,15	100,00	97,48	PARIPURNA	
24	Sulawesi Tengah	99,13	91,18	100,00	96,77	PARIPURNA	
25	Sulawesi Selatan	95,70	89,90	100,00	95,20	PARIPURNA	
26	Sulawesi Barat	93,42	91,58	100,00	95,00	UTAMA	
27	Sulawesi Tenggara	97,04	81,62	100,00	92,88	UTAMA	
28	Maluku	92,54	98,76	100,00	97,10	PARIPURNA	
29	Maluku Utara	100,00	92,03	100,00	97,34	PARIPURNA	
30	Bali	98,68	97,51	100,00	98,73	PARIPURNA	
31	Nusa Tenggara Barat	87,88	87,27	95,96	90,37	UTAMA	
32	Nusa Tenggara Timur	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
33	Papua	91,51	100,00	100,00	97,17	PARIPURNA	
34	Papua Barat	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
	Indonesia	94,93	91,70	97,12	94,58	UTAMA	
	Jenis	UTAMA	UTAMA	PARIPURNA	UTAMA		

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SD yang merata yang terdapat pada Tabel 4.14. Indikator APK di 10 Provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 dan terkecil sebesar 77,68 terjadi di Provinsi Jawa Timur, sehingga nasional menjadi 94,93 termasuk kategori utama. Indikator AMK di 10 Provinsi telah ideal menjadi 100,00 dan terkecil sebesar 74,01 terjadi di Provinsi Aceh, sehingga nasional menjadi 91,70 termasuk kategori utama. Indikator TPS di 26 Provinsi telah ideal menjadi 100 dan terkecil terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 68,53, sehingga nasional menjadi 97,12 termasuk kategori paripurna.

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SD yang merata menjadi 94,58 termasuk kategori utama. Hal ini berarti akses pendidikan SD yang merata sebesar 95% dari 100% atau sudah mendekati ideal. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata 1 Provinsi termasuk kategori kurang, 3 Provinsi termasuk kategori pratama, 3 Provinsi termasuk madya, 7 Provinsi termasuk utama, dan 20 Provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di enam Provinsi dengan nilai sebesar 100 sudah ideal termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 77,93 termasuk kategori kurang.

b. SMP

Tabel 4.15
Data dan Indikator Akses yang Merata SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data				Indikator		
		Lulusan SD	Siswa Baru	Kelas	Sekolah ekuivalen	APK	AM	TPS
1	DKI Jakarta	133.562	122.652	12.142	2.024	87,30	91,83	66
2	Jawa Barat	740.555	591.437	56.795	9.466	72,27	79,86	78
3	Banten	188.965	139.102	13.706	2.284	67,83	73,61	83
4	Jawa Tengah	468.401	396.152	40.710	6.785	71,53	84,58	69
5	DI Yogyakarta	46.797	42.548	4.540	757	80,64	90,92	62
6	Jawa Timur	476.462	412.017	44.401	7.400	68,91	86,47	64
7	Aceh	73.282	62.027	7.998	1.333	71,21	84,64	55
8	Sumatera Utara	283.604	223.684	22.412	3.735	79,51	78,87	76
9	Sumatera Barat	102.572	75.034	8.219	1.370	73,76	73,15	75
10	Riau	123.627	88.961	9.480	1.580	71,94	71,96	78
11	Kepulauan Riau	34.329	30.591	2.870	478	87,24	89,11	72
12	Jambi	62.185	41.427	4.921	820	66,94	66,62	76
13	Sumatera Selatan	143.294	118.052	11.959	1.993	80,22	82,38	72
14	Bangka Belitung	24.118	20.725	1.991	332	82,13	85,93	73
15	Bengkulu	35.154	30.402	3.442	574	87,28	86,48	61
16	Lampung	133.021	104.558	11.228	1.871	73,70	78,60	71
17	Kalimantan Barat	92.626	80.823	8.509	1.418	88,04	87,26	65
18	Kalimantan Tengah	45.187	36.904	4.531	755	78,61	81,67	60
19	Kalimantan Selatan	59.899	39.664	4.655	776	57,09	66,22	77
20	Kalimantan Timur	63.233	52.485	5.537	923	84,49	83,00	69
21	Kalimantan Utara	11.975	10.806	1.215	203	87,18	90,24	59
22	Sulawesi Utara	42.961	38.601	4.828	805	97,07	89,85	53
23	Gorontalo	20.897	16.941	2.105	351	77,58	81,07	60
24	Sulawesi Tengah	58.801	43.605	5.400	900	83,22	74,16	65
25	Sulawesi Selatan	158.895	124.505	14.653	2.442	80,82	78,36	65
26	Sulawesi Barat	27.230	20.349	2.439	407	76,67	74,73	67
27	Sulawesi Tenggara	54.946	42.976	5.388	898	84,66	78,21	61
28	Maluku	37.187	32.263	3.966	661	91,91	86,76	56
29	Maluku Utara	25.568	19.977	2.562	427	84,25	78,13	60
30	Bali	66.241	62.820	6.190	1.032	97,69	94,84	64
31	Nusa Tenggara Barat	81.822	57.367	6.915	1.153	65,87	70,11	71
32	Nusa Tenggara Timur	123.865	115.364	12.552	2.092	98,13	93,14	59
33	Papua	54.891	42.685	4.383	731	63,56	77,76	75
34	Papua Barat	19.401	16.718	1.876	313	91,54	86,17	62
	Indonesia	4.115.553	3.354.222	354.518	59.086	75,34	81,50	70

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang merata tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.15. APK SMP terbesar terjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 98,15% dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 57,09% dengan rata-rata nasional sebesar 75,34%, yang berarti ketercapaian APK SMP hanya 94,18% dari standar sebesar 80 atau masih belum optimal.

Tabel 4.16
Akses yang Merata SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Merata			Rata-rata	Jenis
		APK 80	AM 100	TPS 81		
1	DKI Jakarta	100,00	91,83	100,00	97,28	PARIPURNA
2	Jawa Barat	90,34	79,86	100,00	90,07	UTAMA
3	Banten	84,79	73,61	97,92	85,44	MADYA
4	Jawa Tengah	89,42	84,58	100,00	91,33	UTAMA
5	DI Yogyakarta	100,00	90,92	100,00	96,97	PARIPURNA
6	Jawa Timur	86,13	86,47	100,00	90,87	UTAMA
7	Aceh	89,02	84,64	100,00	91,22	UTAMA
8	Sumatera Utara	99,39	78,87	100,00	92,75	UTAMA
9	Sumatera Barat	92,20	73,15	100,00	88,45	MADYA
10	Riau	89,93	71,96	100,00	87,30	MADYA
11	Kepulauan Riau	100,00	89,11	100,00	96,37	PARIPURNA
12	Jambi	83,68	66,62	100,00	83,43	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	100,00	82,38	100,00	94,13	UTAMA
14	Bangka Belitung	100,00	85,93	100,00	95,31	PARIPURNA
15	Bengkulu	100,00	86,48	100,00	95,49	PARIPURNA
16	Lampung	92,13	78,60	100,00	90,24	UTAMA
17	Kalimantan Barat	100,00	87,26	100,00	95,75	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	98,27	81,67	100,00	93,31	UTAMA
19	Kalimantan Selatan	71,36	66,22	100,00	79,19	KURANG
20	Kalimantan Timur	100,00	83,00	100,00	94,33	UTAMA
21	Kalimantan Utara	100,00	90,24	100,00	96,75	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	100,00	89,85	100,00	96,62	PARIPURNA
23	Gorontalo	96,98	81,07	100,00	92,68	UTAMA
24	Sulawesi Tengah	100,00	74,16	100,00	91,39	UTAMA
25	Sulawesi Selatan	100,00	78,36	100,00	92,79	UTAMA
26	Sulawesi Barat	95,83	74,73	100,00	90,19	UTAMA
27	Sulawesi Tenggara	100,00	78,21	100,00	92,74	UTAMA
28	Maluku	100,00	86,76	100,00	95,59	PARIPURNA
29	Maluku Utara	100,00	78,13	100,00	92,71	UTAMA
30	Bali	100,00	94,84	100,00	98,28	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	82,33	70,11	100,00	84,15	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	100,00	93,14	100,00	97,71	PARIPURNA
33	Papua	79,45	77,76	100,00	85,74	MADYA
34	Papua Barat	100,00	86,17	100,00	95,39	PARIPURNA
	Indonesia	94,74	81,67	99,94	92,12	UTAMA
	Jenis	UTAMA	PRATAMA	PARIPURNA	UTAMA	

Jumlah lulusan SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 740.555 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 11.975, sedangkan siswa baru SMP terbesar juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 591.437 dan terkecil juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 10.806. Namun, dilihat dari indikator AM SMP terkecil terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 66,22% dan terbesar terdapat di Provinsi Bali sebesar 94,84% dengan angka nasional sebesar 81,50%. Dengan demikian, masukan SMP hanya tercapai 81,50%, yang berarti masih terdapat 19,50% lulusan SD tidak melanjutkan ke SMP.

Jumlah kelas SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 56.795 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.215. Kondisi ini sejalan dengan jumlah sekolah ekuivalen SMP terbesar juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 9.466 dan terkecil juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 203. Namun, indikator TPS SMP terkecil atau terbaik karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih besar terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 53 dan terbesar atau terburuk karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih kecil terjadi di Provinsi Banten sebesar 83. Dengan demikian, secara nasional kesempatan bersekolah di SMP sebesar 70 atau 86,42% dari standar 81 atau berarti telah melayani secara merata.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SMP yang merata dan terdapat pada Tabel 4.16. Indikator APK SMP di 18 Provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 dan terkecil sebesar 71,36 terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga nasional menjadi 94,74 termasuk kategori utama. Indikator AM SMP terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 94,84 dan terkecil sebesar 66,22 terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga nasional menjadi 81,67 termasuk kategori pratama. Indikator TPS SMP di 33 Provinsi telah ideal menjadi 100 dan terkecil terjadi di Provinsi Banten sebesar 97,92, sehingga nasional menjadi 99,94 termasuk kategori paripurna.

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SMP yang merata menjadi 92,12 termasuk kategori utama. Hal ini berarti akses pendidikan SMP yang merata sebesar 92% dari 100% atau sembilan per sepuluh. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata 1 Provinsi termasuk kategori kurang, 2 Provinsi termasuk kategori pratama, 4 Provinsi termasuk madya, 15 Provinsi termasuk utama, dan 12 Provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 98,28 termasuk paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 79,19 termasuk kategori kurang.

c. SM

Berdasarkan penjumlahan data SMA dan SMK menjadi data SM maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang merata tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.17. APK SM terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 95,89% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 49,59% dengan rata-rata nasional sebesar 72,81%, yang berarti ketercapaian APK SM sudah optimal karena sudah sesuai dengan standar sebesar 70%.

Jumlah lulusan SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 570.722 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9.491, sedangkan siswa baru SM terbesar juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 592.452 dan terkecil juga di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9.016. Namun, dilihat dari indikator AM SM terkecil terdapat di Provinsi Papua sebesar 88,53% dan terbesar terdapat di 17 Provinsi karena nilainya lebih dari 100% dan terbesar pada Provinsi Sumatera Barat sebesar 120,40% dengan angka nasional sebesar 103,15%. Dengan demikian, masukan ke SM telah tercapai 103,15% lebih dari standar sebesar 100%, karena adanya lulusan dari Madrasah Tsanawiyah yang belum diperhitungkan dalam statistik SMA dan SMK.

Tabel 4.17
Data dan Indikator Akses yang Merata SM Tiap Provinsi

Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data				Indikator		
		Lulusan SMP	Siswa Baru	Kelas	Sekolah ekuivalen	APK	AM	TPS
1	DKI Jakarta	120.654	133.878	13.097	2.183	94,07	110,96	55
2	Jawa Barat	570.722	592.452	56.320	9.387	68,88	103,81	61
3	Banten	137.055	146.135	14.296	2.383	68,52	106,63	58
4	Jawa Tengah	392.207	400.725	39.584	6.597	69,52	102,17	59
5	DI Yogyakarta	42.705	48.992	5.496	916	90,54	114,72	47
6	Jawa Timur	407.305	436.627	43.785	7.298	68,82	107,20	56
7	Aceh	64.033	65.141	7.889	1.315	69,88	101,73	49
8	Sumatera Utara	210.477	231.605	22.498	3.750	83,66	110,04	56
9	Sumatera Barat	67.620	81.412	8.411	1.402	80,50	120,40	48
10	Riau	81.551	85.431	8.893	1.482	69,07	104,76	55
11	Kepulauan Riau	25.870	25.377	2.575	429	87,94	98,09	60
12	Jambi	40.434	43.186	4.542	757	67,93	106,81	53
13	Sumatera Selatan	111.344	111.428	10.536	1.756	74,25	100,08	63
14	Bangka Belitung	17.951	17.943	1.687	281	69,72	99,96	64
15	Bengkulu	27.932	26.293	2.927	488	74,71	94,13	57
16	Lampung	102.144	98.811	10.240	1.707	68,97	96,74	60
17	Kalimantan Barat	72.433	68.027	6.269	1.045	71,41	93,92	69
18	Kalimantan Tengah	33.805	31.294	3.532	589	66,94	92,57	57
19	Kalimantan Selatan	38.358	42.861	4.268	711	59,67	111,74	54
20	Kalimantan Timur	49.021	51.138	5.327	888	81,36	104,32	55
21	Kalimantan Utara	9.491	9.016	921	154	74,09	95,00	62
22	Sulawesi Utara	39.252	37.981	4.816	803	90,50	96,76	49
23	Gorontalo	15.292	16.096	1.765	294	71,80	105,26	52
24	Sulawesi Tengah	41.143	40.177	4.478	746	74,99	97,65	55
25	Sulawesi Selatan	127.560	123.372	13.318	2.220	75,02	96,72	57
26	Sulawesi Barat	20.277	19.849	2.105	351	71,88	97,89	58
27	Sulawesi Tenggara	40.906	41.752	4.918	820	83,34	102,07	50
28	Maluku	31.628	30.717	3.818	636	88,79	97,12	50
29	Maluku Utara	19.540	18.763	2.371	395	80,30	96,02	49
30	Bali	64.674	62.409	5.902	984	95,89	96,50	66
31	Nusa Tenggara Barat	58.463	59.193	6.254	1.042	65,34	101,25	56
32	Nusa Tenggara Timur	101.017	91.213	9.708	1.618	80,57	90,29	62
33	Papua	36.480	32.295	3.591	599	49,59	88,53	61
33	Papua Barat	14.165	13.937	1.658	276	80,63	98,39	51
	Indonesia	3.233.509	3.335.526	337.795	56.299	72,81	103,15	57

Jumlah kelas SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 56.320 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 921. Hal ini sejalan dengan jumlah sekolah ekuivalen SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 9.387 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 154. Namun, indikator TPS SM terkecil atau terbaik karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih besar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 47 dan terbesar atau terburuk karena memberi kesempatan bersekolah yang lebih kecil terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 69. Dengan demikian, kesempatan bersekolah di SM sebesar 57, berarti melayani secara merata atau sebesar 91,94% atau lebih kecil dari standar sebesar 62.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SM yang merata yang terdapat pada Tabel 4.18. Indikator APK SM di 21 Provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 atau sesuai dengan standar dan terkecil sebesar 70,84 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 98,02 termasuk kategori paripurna. Indikator AM SM terbesar dan sudah ideal sebesar 100 terjadi di 17

Provinsi dan terkecil sebesar 88,53 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 97,83 termasuk kategori paripurna. Indikator TPS SM di 29 Provinsi telah mencapai ideal sebesar 100 atau lebih rendah daripada standar dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 89,43, sehingga nasional menjadi 99,35 termasuk kategori paripurna.

Tabel 4.18
Akses yang Merata SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Merata				Rata-rata	Jenis
		APK	AM	TPS			
		70	100	62			
1	DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
2	Jawa Barat	98,39	100,00	100,00	99,46	PARIPURNA	
3	Banten	97,88	100,00	100,00	99,29	PARIPURNA	
4	Jawa Tengah	99,32	100,00	100,00	99,77	PARIPURNA	
5	DI Yogyakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
6	Jawa Timur	98,31	100,00	100,00	99,44	PARIPURNA	
7	Aceh	99,83	100,00	100,00	99,94	PARIPURNA	
8	Sumatera Utara	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
9	Sumatera Barat	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
10	Riau	98,67	100,00	100,00	99,56	PARIPURNA	
11	Kepulauan Riau	100,00	98,09	100,00	99,36	PARIPURNA	
12	Jambi	97,05	100,00	100,00	99,02	PARIPURNA	
13	Sumatera Selatan	100,00	100,00	97,78	99,26	PARIPURNA	
14	Bangka Belitung	99,59	99,96	97,11	98,89	PARIPURNA	
15	Bengkulu	100,00	94,13	100,00	98,04	PARIPURNA	
16	Lampung	98,53	96,74	100,00	98,42	PARIPURNA	
17	Kalimantan Barat	100,00	93,92	89,43	94,45	UTAMA	
18	Kalimantan Tengah	95,63	92,57	100,00	96,07	PARIPURNA	
19	Kalimantan Selatan	85,25	100,00	100,00	95,08	PARIPURNA	
20	Kalimantan Timur	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
21	Kalimantan Utara	100,00	95,00	100,00	98,33	PARIPURNA	
22	Sulawesi Utara	100,00	96,76	100,00	98,92	PARIPURNA	
23	Gorontalo	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
24	Sulawesi Tengah	100,00	97,65	100,00	99,22	PARIPURNA	
25	Sulawesi Selatan	100,00	96,72	100,00	98,91	PARIPURNA	
26	Sulawesi Barat	100,00	97,89	100,00	99,30	PARIPURNA	
27	Sulawesi Tenggara	100,00	100,00	100,00	100,00	PARIPURNA	
28	Maluku	100,00	97,12	100,00	99,04	PARIPURNA	
29	Maluku Utara	100,00	96,02	100,00	98,67	PARIPURNA	
30	Bali	100,00	96,50	94,30	96,93	PARIPURNA	
31	Nusa Tenggara Barat	93,35	100,00	100,00	97,78	PARIPURNA	
32	Nusa Tenggara Timur	100,00	90,29	99,31	96,53	PARIPURNA	
33	Papua	70,84	88,53	100,00	86,46	MADYA	
34	Papua Barat	100,00	98,39	100,00	99,46	PARIPURNA	
	Indonesia	98,02	97,83	99,35	98,40	PARIPURNA	
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA		

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SM yang merata menjadi 98,40 termasuk kategori paripurna. Hal ini berarti akses pendidikan SM yang merata sebesar 98% dari 100% atau telah mendekati ideal. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata 1 Provinsi termasuk kategori madya, 1 Provinsi termasuk utama, dan 32 Provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar dan sudah ideal terjadi di tujuh Provinsi, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 86,46 termasuk kategori madya.

d. Semua Jenjang

Berdasarkan tiga indikator akses pendidikan yang merata maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SM, dan rata-rata 3 jenjang seperti disajikan pada Tabel 4.19. Bila dilihat secara nasional maka SM memiliki nilai akses pendidikan yang merata terbesar sebesar 98,40 termasuk kategori paripurna dan terkecil pada SMP sebesar 92,12 termasuk kategori utama, sedangkan SD sebesar 94,58 termasuk kategori utama. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang merata sebesar 95,03 termasuk kategori paripurna.

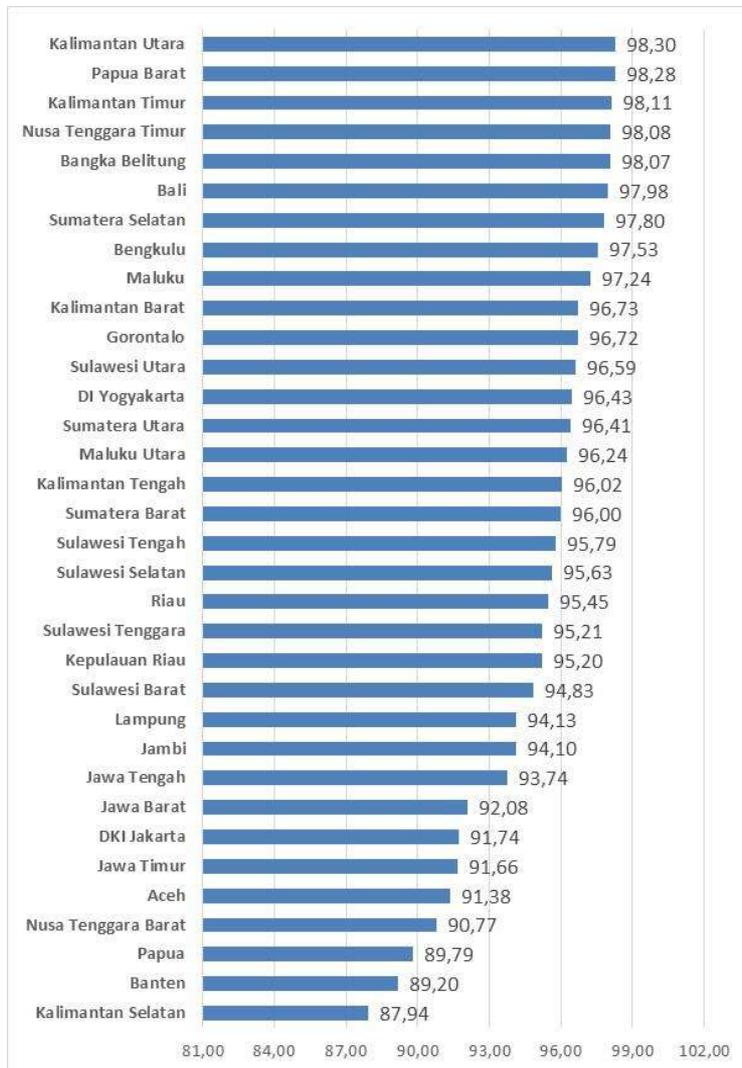
Bila dilihat akses pendidikan yang merata untuk tiap Provinsi yang terbesar maka untuk SD terjadi di enam Provinsi masing-masing 100 sudah ideal atau termasuk paripurna, untuk SMP pada Provinsi Bali sebesar 98,28 termasuk paripurna, dan untuk SM di tujuh Provinsi sudah ideal atau termasuk paripurna. Rata-rata tiga jenjang menunjukkan akses yang merata terbesar terjadi pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 98,30 termasuk kategori paripurna.

Tabel 4.19
Akses yang Merata Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	77,93	97,28	100,00	91,74	UTAMA
2	Jawa Barat	86,71	90,07	99,46	92,08	UTAMA
3	Banten	82,85	85,44	99,29	89,20	MADYA
4	Jawa Tengah	90,11	91,33	99,77	93,74	UTAMA
5	DI Yogyakarta	92,31	96,97	100,00	96,43	PARIPURNA
6	Jawa Timur	84,67	90,87	99,44	91,66	UTAMA
7	Aceh	82,97	91,22	99,94	91,38	UTAMA
8	Sumatera Utara	96,49	92,75	100,00	96,41	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	99,56	88,45	100,00	96,00	PARIPURNA
10	Riau	99,49	87,30	99,56	95,45	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	89,87	96,37	99,36	95,20	PARIPURNA
12	Jambi	99,86	83,43	99,02	94,10	UTAMA
13	Sumatera Selatan	100,00	94,13	99,26	97,80	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	100,00	95,31	98,89	98,07	PARIPURNA
15	Bengkulu	99,04	95,49	98,04	97,53	PARIPURNA
16	Lampung	93,71	90,24	98,42	94,13	UTAMA
17	Kalimantan Barat	100,00	95,75	94,45	96,73	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	98,69	93,31	96,07	96,02	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	89,53	79,19	95,08	87,94	MADYA
20	Kalimantan Timur	100,00	94,33	100,00	98,11	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	99,81	96,75	98,33	98,30	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	94,22	96,62	98,92	96,59	PARIPURNA
23	Gorontalo	97,48	92,68	100,00	96,72	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	96,77	91,39	99,22	95,79	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	95,20	92,79	98,91	95,63	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	95,00	90,19	99,30	94,83	UTAMA
27	Sulawesi Tenggara	92,88	92,74	100,00	95,21	PARIPURNA
28	Maluku	97,10	95,59	99,04	97,24	PARIPURNA
29	Maluku Utara	97,34	92,71	98,67	96,24	PARIPURNA
30	Bali	98,73	98,28	96,93	97,98	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	90,37	84,15	97,78	90,77	UTAMA
32	Nusa Tenggara Timur	100,00	97,71	96,53	98,08	PARIPURNA
33	Papua	97,17	85,74	86,46	89,79	MADYA
34	Papua Barat	100,00	95,39	99,46	98,28	PARIPURNA
	Indonesia	94,58	92,12	98,40	95,03	PARIPURNA
	Jenis	UTAMA	UTAMA	PARIPURNA	PARIPURNA	

Sebaliknya, akses pendidikan yang merata terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 77,93 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 79,19 termasuk kurang, untuk SM pada Provinsi Papua sebesar 86,46 termasuk madya.

Bila dilihat tiap Provinsi ternyata tiga Provinsi termasuk kategori madya, sembilan Provinsi termasuk utama, dan 22 Provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 98,30 termasuk paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 87,94 termasuk kategori madya.



Grafik 4.2
Akses yang Merata Semua Jenjang Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

Keberhasilan pendidikan dilihat dari akses pendidikan yang merata tiap Provinsi dapat terlihat jelas pada Grafik 4.2, terlihat bahwa lima Provinsi terbawah adalah Kalimantan Selatan, Banten, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Sebaliknya, lima Provinsi teratas adalah Kalimantan Utara, Papua Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung.

3. Akses yang Berkeadilan

Terdapat tiga jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui akses pendidikan yang berkeadilan. Ketiga indikator tersebut, yaitu PG APK, IPG APK, dan %S-Swt dilakukan konversi menggunakan standar tertentu yang terdapat pada Tabel 3.3, sehingga diperoleh satuan yang sama untuk menghasilkan nilai indikator. Ketiga nilai tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi 3 sehingga diperoleh akses yang berkeadilan. Nilai maksimal 100, sehingga nilai makin mendekati 100 disebut makin berkeadilan.

Tabel 4.20
Data, Indikator, dan Nilai Akses yang Berkeadilan
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2017/2018

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A.	Data					
1	Penduduk usia sek	27.843.400	13.440.400	13.305.400		
	a. Laki-laki	14.356.104	6.885.185	6.813.139		
	b. Perempuan	13.487.296	6.555.215	6.492.261		
2	Siswa	25.486.506	10.125.724	9.687.676		
	a. Laki-laki	13.288.345	5.173.914	4.930.655		
	b. Perempuan	12.198.161	4.951.810	4.757.021		
3	Siswa Swasta	3.333.265	2.585.169	4.081.355		
4	APK (%)	91,54	75,34	72,81		
	a. Laki-laki	92,56	75,15	72,37		
	b. Perempuan	90,44	75,54	73,27		
B.	Indikator					
1	PG APK (%)	2,12	-0,39	-0,90		
2	IPG APK	0,98	1,01	1,01		
3	%S-Swt	13,08	25,53	42,13		
C.	Nilai Indikator					
1	PG APK (%)	96,87	97,41	95,71	96,67	PARIPURNA
2	IPG APK	96,80	96,81	94,52	96,04	PARIPURNA
3	%S-Swt	80,07	69,49	55,12	68,23	KURANG
	Akses yang berkeadilan	91,24	87,90	81,78	86,98	MADYA
	Jenis Akses yg berkeadilan	UTAMA	MADYA	PRATAMA	MADYA	

Tabel 4.20 menunjukkan data, indikator, dan nilai akses yang berkeadilan menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat penduduk usia sekolah SD sebesar 27.843.400, usia SMP sebesar 13.440.400, dan usia SM sebesar 13.305.400. Siswa SD sebesar 25.486.506, SMP sebesar 10.125.724, dan SM sebesar 9.687.676. Siswa SD swasta sebesar 3.333.265, SMP sebesar 2.585.169, sedangkan SM sebesar 4.081.355.

APK laki-laki SD sebesar 92,56% lebih besar daripada perempuan sebesar 90,44%. APK laki-laki SMP sebesar 75,15% sedikit lebih kecil daripada perempuan sebesar 75,54%, sedangkan APK laki-laki SM sebesar 72,37% lebih kecil daripada perempuan sebesar 73,27%. Berdasarkan APK laki-laki dan perempuan, PG APK SD sebesar 2,12% lebih besar laki-laki, PG APK SMP -0,39% lebih besar perempuan, dan PG APK SM sebesar -0,90% lebih besar perempuan. Berdasarkan APK laki-laki dan perempuan, IPG APK SD sebesar 0,98 belum setara tetapi lebih besar laki-laki, IPG APK SMP sebesar 1,01 mendekati setara tetapi lebih besar perempuan, dan IPG APK SM sebesar 1,01 mendekati setara tetapi lebih besar perempuan.

Berdasarkan siswa swasta maka %S-Swt terbesar pada SM sebesar 42,13% dan terkecil pada SD sebesar 13,08%. Hal ini wajar karena SD Negeri sudah dibangun sejak tahun 1973/1974 ketika adanya Instruksi Presiden SD sehingga SD Swasta sangat kecil. Sebaliknya, partisipasi masyarakat pada jenjang yang lebih tinggi sangat besar terutama pada SM.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka tiga indikator akses yang berkeadilan mengalami konversi, yaitu PG APK, IPG APK, dan %S-Swt. PG APK SD menjadi sebesar 96,87, SMP menjadi 97,41, dan SM menjadi 95,71, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 96,67 termasuk kategori paripurna. IPG APK SD menjadi sebesar 96,80, IPG APK SMP sebesar 96,81, dan SM sebesar 94,52, sehingga rata-rata semua jenjang sebesar 96,04 termasuk kategori paripurna. %S-Swt SD menjadi 80,07, %S-Swt SMP mencapai 69,49, dan %S-Swt SM mencapai 55,12, sehingga rata-rata semua jenjang menjadi 68,23 termasuk kategori kurang. Dengan demikian, akses yang berkeadilan SD sebesar 91,24 termasuk kategori utama, SMP sebesar 87,90 termasuk kategori madya, SM sebesar 81,78 termasuk pratama sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 86,98 termasuk kategori madya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa jenjang SD yang paling berkeadilan, diikuti SMP, sedangkan SM termasuk pratama.

a. SD

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang berkeadilan tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.21. APK laki-laki SD terbesar terjadi Provinsi Papua Barat sebesar 111,31% dan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 78,83% dengan rata-rata nasional sebesar 92,56%. APK perempuan terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 105,76% dan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 76,47% dengan rata-rata nasional sebesar 90,44%.

Berdasarkan APK laki-laki dan perempuan SD maka PG APK SD terbesar pada Provinsi Papua sebesar 12,55% berarti lebih banyak laki-laki dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 0,32% berarti lebih sedikit laki-laki, dengan rata-rata nasional sebesar 2,12% berarti lebih banyak laki-laki. IPG APK SD terbesar pada Provinsi Papua sebesar 0,87 berarti sangat tidak setara dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara dan Maluku Utara sebesar 1,00 berarti setara dengan rata-rata nasional sebesar 0,98 berarti belum setara.

Tabel 4.21
Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data							Indikator					
		Penduduk 7-12 tahun			Siswa			Siswa Swasta	APK			PG APK	IPG APK	%S-Swt
		Laki2	Peremp	Jumlah	Laki2	Peremp	Jumlah		Laki2	Peremp	Rata2			
1	DKI Jakarta	471.850	445.850	917.700	429.023	399.684	828.707	245.858	90,92	89,65	90,30	1,28	0,99	29,67
2	Jawa Barat	2.532.957	2.380.143	4.913.100	2.333.192	2.175.164	4.508.356	459.029	92,11	91,39	91,76	0,73	0,99	10,18
3	Banten	659.657	620.943	1.280.600	621.036	574.617	1.195.653	167.316	94,15	92,54	93,37	1,61	0,98	13,99
4	Jawa Tengah	1.742.586	1.623.814	3.366.400	1.490.019	1.367.344	2.857.363	259.598	85,51	84,21	84,88	1,30	0,98	9,09
5	DI Yogyakarta	172.142	149.458	321.600	152.425	141.143	293.568	79.270	88,55	94,44	91,28	-5,89	1,07	27,00
6	Jawa Timur	1.875.080	1.779.720	3.654.800	1.478.049	1.360.884	2.838.933	344.312	78,83	76,47	77,68	2,36	0,97	12,13
7	Aceh	317.346	287.454	604.800	256.245	234.081	490.326	23.423	80,75	81,43	81,07	-0,69	1,01	4,78
8	Sumatera Utara	907.682	858.818	1.766.500	902.074	833.004	1.735.078	327.791	99,38	96,99	98,22	2,39	0,98	18,89
9	Sumatera Barat	326.150	303.250	629.400	336.538	303.508	640.046	43.225	103,19	100,09	101,69	3,10	0,97	6,75
10	Riau	408.540	380.860	789.400	417.347	380.847	798.194	118.073	102,16	100,00	101,11	2,16	0,98	14,79
11	Kepulauan Riau	127.800	121.100	248.900	117.748	108.509	226.257	65.448	92,13	89,60	90,90	2,53	0,97	28,93
12	Jambi	200.656	190.444	391.100	202.813	186.631	389.444	26.089	101,07	98,00	99,58	3,08	0,97	6,70
13	Sumatera Selatan	479.800	446.900	926.700	486.379	447.225	933.604	71.572	101,37	100,07	100,75	1,30	0,99	7,67
14	Bangka Belitung	80.708	76.092	156.800	83.844	76.894	160.738	12.011	103,89	101,05	102,51	2,83	0,97	7,47
15	Bengkulu	110.400	103.800	214.200	112.678	101.533	214.211	14.053	102,06	97,82	100,01	4,25	0,96	6,56
16	Lampung	465.000	449.800	914.800	438.956	403.755	842.711	63.845	94,40	89,76	92,12	4,64	0,95	7,58
17	Kalimantan Barat	308.619	284.781	593.400	312.219	282.255	594.474	52.048	101,17	99,11	100,18	2,05	0,98	8,76
18	Kalimantan Tengah	154.468	145.132	299.600	150.976	136.869	287.845	36.665	97,74	94,31	96,08	3,43	0,96	12,74
19	Kalimantan Selatan	221.060	213.240	434.300	199.521	181.686	381.207	27.304	90,26	85,20	87,78	5,05	0,94	7,16
20	Kalimantan Timur	214.677	197.223	411.900	215.977	197.071	413.048	54.030	100,61	99,92	100,28	0,68	0,99	13,08
21	Kalimantan Utara	41.300	37.700	79.000	41.130	37.426	78.556	6.163	99,59	99,27	99,44	0,32	1,00	7,85
22	Sulawesi Utara	127.275	118.225	245.500	126.036	114.582	240.618	90.816	99,03	96,92	98,01	2,11	0,98	37,74
23	Gorontalo	63.562	60.838	124.400	64.290	59.238	123.528	2.534	101,15	97,37	99,30	3,78	0,96	2,05
24	Sulawesi Tengah	178.122	168.578	346.700	179.406	164.261	343.667	23.659	100,72	97,44	99,13	3,28	0,97	6,88
25	Sulawesi Selatan	495.800	473.900	969.700	483.412	444.617	928.029	50.340	97,50	93,82	95,70	3,68	0,96	5,42
26	Sulawesi Barat	88.676	83.624	172.300	84.730	76.233	160.963	2.544	95,55	91,16	93,42	4,39	0,95	1,58
27	Sulawesi Tenggara	171.489	158.611	330.100	166.962	153.362	320.324	6.708	97,36	96,69	97,04	0,67	0,99	2,09
28	Maluku	123.141	124.059	247.200	120.231	108.523	228.754	65.116	97,64	87,48	92,54	10,16	0,90	28,47
29	Maluku Utara	82.600	75.500	158.100	82.890	75.425	158.315	24.720	100,35	99,90	100,14	0,45	1,00	15,61
30	Bali	208.461	196.539	405.000	208.291	191.353	399.644	38.876	99,92	97,36	98,68	2,56	0,97	9,73
31	Nusa Tenggara Barat	300.900	282.500	583.400	267.186	245.480	512.666	21.050	88,80	86,90	87,88	1,90	0,98	4,11
32	Nusa Tenggara Timur	382.341	346.759	729.100	410.097	366.747	776.844	290.613	107,26	105,76	106,55	1,50	0,99	37,41
33	Papua	250.810	239.290	490.100	244.885	203.598	448.483	166.215	97,64	85,08	91,51	12,55	0,87	37,06
34	Papua Barat	64.449	62.351	126.800	71.740	64.612	136.352	52.951	111,31	103,63	107,53	7,69	0,93	38,83
	Indonesia	14.356.104	13.487.296	27.843.400	13.288.345	12.198.161	25.486.506	3.333.265	92,56	90,44	91,54	2,12	0,98	13,08

Berdasarkan siswa swasta SD maka diperoleh %S-Swt SD terbesar pada Provinsi Papua Barat sebesar 38,83% berarti sekolah swasta sangat besar dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,58% berarti sekolah swasta sangat kecil dengan rata-rata nasional sebesar 13,08%.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SD yang berkeadilan yang terdapat pada Tabel 4.22. Indikator PG APK SD terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 99,68 dan terkecil sebesar 87,45 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 96,87 termasuk kategori paripurna. Indikator IPG APK SD terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 99,68 dan terkecil sebesar 87,14 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 96,80 termasuk kategori paripurna. Indikator %S-Swt SD di 16 Provinsi telah ideal atau melebihi standar 10% dan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 15,80, sehingga nasional menjadi 80,07 termasuk kategori pratama.

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SD yang berkeadilan menjadi 91,24 termasuk kategori utama. Hal ini berarti akses pendidikan SD yang berkeadilan sebesar 91% dari 100% atau sekitar sembilan per sepuluh. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata empat Provinsi termasuk kategori kurang, dua Provinsi termasuk kategori pratama, tujuh Provinsi termasuk madya, lima Provinsi termasuk utama, dan 16 Provinsi termasuk paripurna. Nilai terbesar terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 99,70 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 68,94 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.22
Akses yang Berkeadilan SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Berkeadilan				
		PG APK	IPG APK	%S-Swt	Rata-rata	Jenis
		0	1	10		
1	DKI Jakarta	98,72	98,59	100,00	99,11	PARIPURNA
2	Jawa Barat	99,27	99,21	100,00	99,50	PARIPURNA
3	Banten	98,39	98,29	100,00	98,90	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	98,70	98,48	90,85	96,01	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	94,11	93,76	100,00	95,96	PARIPURNA
6	Jawa Timur	97,64	97,01	100,00	98,22	PARIPURNA
7	Aceh	99,31	99,16	47,77	82,08	PRATAMA
8	Sumatera Utara	97,61	97,60	100,00	98,40	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	96,90	97,00	67,53	87,14	MADYA
10	Riau	97,84	97,89	100,00	98,58	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	97,47	97,25	100,00	98,24	PARIPURNA
12	Jambi	96,92	96,96	66,99	86,96	MADYA
13	Sumatera Selatan	98,70	98,72	76,66	91,36	UTAMA
14	Bangka Belitung	97,17	97,27	74,72	89,72	MADYA
15	Bengkulu	95,75	95,84	65,60	85,73	MADYA
16	Lampung	95,36	95,09	75,76	88,74	MADYA
17	Kalimantan Barat	97,95	97,97	87,55	94,49	UTAMA
18	Kalimantan Tengah	96,57	96,49	100,00	97,69	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	94,95	94,40	71,63	86,99	MADYA
20	Kalimantan Timur	99,32	99,32	100,00	99,55	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	99,68	99,68	78,45	92,61	UTAMA
22	Sulawesi Utara	97,89	97,87	100,00	98,59	PARIPURNA
23	Gorontalo	96,22	96,27	20,51	71,00	KURANG
24	Sulawesi Tengah	96,72	96,74	68,84	87,43	MADYA
25	Sulawesi Selatan	96,32	96,23	54,24	82,26	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	95,61	95,41	15,80	68,94	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	99,33	99,31	20,94	73,19	KURANG
28	Maluku	89,84	89,59	100,00	93,14	UTAMA
29	Maluku Utara	99,55	99,55	100,00	99,70	PARIPURNA
30	Bali	97,44	97,44	97,28	97,39	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	98,10	97,86	41,06	79,01	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	98,50	98,61	100,00	99,04	PARIPURNA
33	Papua	87,45	87,14	100,00	91,53	UTAMA
34	Papua Barat	92,31	93,09	100,00	95,14	PARIPURNA
	Indonesia	96,87	96,80	80,07	91,24	UTAMA
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PRATAMA	UTAMA	

b. SMP

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang berkeadilan tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.23. APK laki-laki terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 99,22% dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan

Selatan sebesar 57,56% dengan rata-rata nasional sebesar 75,15%. APK perempuan terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 100,94% dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 56,60% dengan rata-rata nasional sebesar 75,54%.

Tabel 4.23
Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data							Indikator					
		Penduduk 13-15 tahun			Siswa			Siswa Swasta	APK			PG APK	IPG APK	%S-Swt
		Laki2	Peremp	Jumlah	Laki2	Peremp	Jumlah		Laki2	Peremp	Rata2			
1	DKI Jakarta	214.811	207.289	422.100	186.572	181.910	368.482	153.728	86,85	87,76	87,30	-0,90	1,01	41,72
2	Jawa Barat	1.271.267	1.213.733	2.485.000	916.351	879.649	1.796.000	631.396	72,08	72,47	72,27	-0,39	1,01	35,16
3	Banten	320.900	304.800	625.700	219.003	205.403	424.406	166.470	68,25	67,39	67,83	0,86	0,99	39,22
4	Jawa Tengah	864.529	805.571	1.670.100	608.857	585.809	1.194.666	262.828	70,43	72,72	71,53	-2,29	1,03	22,00
5	DI Yogyakarta	80.511	78.889	159.400	66.325	62.213	128.538	38.323	82,38	78,86	80,64	3,52	0,96	29,81
6	Jawa Timur	930.700	890.600	1.821.300	654.126	600.845	1.254.971	394.993	70,28	67,47	68,91	2,82	0,96	31,47
7	Aceh	137.763	132.837	270.600	101.300	91.402	192.702	26.549	73,53	68,81	71,21	4,72	0,94	13,78
8	Sumatera Utara	428.238	410.462	838.700	341.382	325.501	666.883	214.137	79,72	79,30	79,51	0,42	0,99	32,11
9	Sumatera Barat	150.600	145.500	296.100	110.344	108.056	218.400	19.773	73,27	74,27	73,76	-1,00	1,01	9,05
10	Riau	186.700	179.000	365.700	133.730	129.369	263.099	48.893	71,63	72,27	71,94	-0,64	1,01	18,58
11	Kepulauan Riau	50.522	48.978	99.500	44.017	42.786	86.803	17.517	87,12	87,36	87,24	-0,23	1,00	20,18
12	Jambi	95.300	93.900	189.200	64.377	62.279	126.656	13.683	67,55	66,32	66,94	1,23	0,98	10,80
13	Sumatera Selatan	226.600	216.300	442.900	178.935	176.371	355.306	67.627	78,97	81,54	80,22	-2,57	1,03	19,03
14	Bangka Belitung	37.800	36.000	73.800	30.556	30.053	60.609	8.429	80,84	83,48	82,13	-2,64	1,03	13,91
15	Bengkulu	52.900	50.200	103.100	45.655	44.330	89.985	4.669	86,30	88,31	87,28	-2,00	1,02	5,19
16	Lampung	219.573	207.927	427.500	159.621	155.464	315.085	79.853	72,70	74,77	73,70	-2,07	1,03	25,34
17	Kalimantan Barat	138.331	132.769	271.100	119.194	119.482	238.676	41.092	86,17	89,99	88,04	-3,83	1,04	17,22
18	Kalimantan Tengah	71.637	68.163	139.800	55.892	54.008	109.900	15.176	78,02	79,23	78,61	-1,21	1,02	13,81
19	Kalimantan Selatan	108.400	103.200	211.600	62.391	58.412	120.803	10.875	57,56	56,60	57,09	0,96	0,98	9,00
20	Kalimantan Timur	95.335	89.865	185.200	80.087	76.384	156.471	30.258	84,01	85,00	84,49	-0,99	1,01	19,34
21	Kalimantan Utara	18.635	17.565	36.200	16.099	15.459	31.558	2.865	86,39	88,01	87,18	-1,62	1,02	9,08
22	Sulawesi Utara	63.959	59.941	123.900	61.337	58.931	120.268	31.914	95,90	98,32	97,07	-2,41	1,03	26,54
23	Gorontalo	33.625	31.975	65.600	24.823	26.070	50.893	1.803	73,82	81,53	77,58	-7,71	1,10	3,54
24	Sulawesi Tengah	82.099	77.601	159.700	66.014	66.883	132.897	10.818	80,41	86,19	83,22	-5,78	1,07	8,14
25	Sulawesi Selatan	243.631	231.569	475.200	192.349	191.696	384.045	56.119	78,95	82,78	80,82	-3,83	1,05	14,61
26	Sulawesi Barat	42.168	39.932	82.100	30.846	32.097	62.943	5.011	73,15	80,38	76,67	-7,23	1,10	7,96
27	Sulawesi Tenggara	78.800	75.000	153.800	65.755	64.446	130.201	5.775	83,45	85,93	84,66	-2,48	1,03	4,44
28	Maluku	54.200	51.400	105.600	50.193	46.862	97.055	20.010	92,61	91,17	91,91	1,44	0,98	20,62
29	Maluku Utara	37.100	35.900	73.000	31.160	30.343	61.503	13.138	83,99	84,52	84,25	-0,53	1,01	21,36
30	Bali	102.019	97.381	199.400	101.221	93.575	194.796	42.137	99,22	96,09	97,69	3,13	0,97	21,63
31	Nusa Tenggara Barat	139.100	133.400	272.500	93.653	85.836	179.489	25.658	67,33	64,34	65,87	2,98	0,96	14,30
32	Nusa Tenggara Timur	175.441	168.459	343.900	167.430	170.035	337.465	78.024	95,43	100,94	98,13	-5,50	1,06	23,12
33	Papua	105.291	93.709	199.000	69.521	56.956	126.477	32.663	66,03	60,78	63,56	5,25	0,92	25,83
34	Papua Barat	26.700	25.400	52.100	24.798	22.895	47.693	12.965	92,88	90,14	91,54	2,74	0,97	27,18
	Indonesia	6.885.185	6.555.215	13.440.400	5.173.914	4.951.810	10.125.724	2.585.169	75,15	75,54	75,34	-0,39	1,01	25,53

Berdasarkan APK laki-laki dan perempuan SMP maka PG APK SMP terbesar pada Provinsi Gorontalo sebesar -7,71% berarti lebih banyak perempuan dan terkecil pada Provinsi Kepulauan Riau sebesar -0,23% berarti sedikit lebih banyak perempuan, dengan rata-rata nasional sebesar -0,39% berarti sedikit lebih banyak perempuan. Demikian juga dengan IPG APK SMP terbesar pada Provinsi Papua sebesar 0,92 berarti belum setara dan terkecil pada 2 Provinsi, yaitu Gorontalo dan Sulawesi Barat sebesar 1,10, sedangkan Kepulauan Riau sebesar 1,00 artinya setara

atau ideal dengan rata-rata nasional sebesar 1,01 berarti mendekati setara dan perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Tabel 4.24
Akses yang Berkeadilan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Berkeadilan			Rata-rata	Jenis
		PG APK 0	IPG APK 1	%S-Swt 25		
1	DKI Jakarta	99,10	98,97	100,00	99,36	PARIPURNA
2	Jawa Barat	99,61	99,46	100,00	99,69	PARIPURNA
3	Banten	99,14	98,74	100,00	99,30	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	97,71	96,85	88,00	94,18	UTAMA
5	DI Yogyakarta	96,48	95,73	100,00	97,40	PARIPURNA
6	Jawa Timur	97,18	95,99	100,00	97,72	PARIPURNA
7	Aceh	95,28	93,57	55,11	81,32	PRATAMA
8	Sumatera Utara	99,58	99,48	100,00	99,69	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	99,00	98,66	36,21	77,96	KURANG
10	Riau	99,36	99,11	74,33	90,93	UTAMA
11	Kepulauan Riau	99,77	99,73	80,72	93,41	UTAMA
12	Jambi	98,77	98,18	43,21	80,06	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	97,43	96,84	76,13	90,13	UTAMA
14	Bangka Belitung	97,36	96,83	55,63	83,27	PRATAMA
15	Bengkulu	98,00	97,73	20,75	72,16	KURANG
16	Lampung	97,93	97,23	100,00	98,39	PARIPURNA
17	Kalimantan Barat	96,17	95,75	68,87	86,93	MADYA
18	Kalimantan Tengah	98,79	98,47	55,24	84,16	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	99,04	98,34	36,01	77,80	KURANG
20	Kalimantan Timur	99,01	98,83	77,35	91,73	UTAMA
21	Kalimantan Utara	98,38	98,16	36,31	77,62	KURANG
22	Sulawesi Utara	97,59	97,54	100,00	98,38	PARIPURNA
23	Gorontalo	92,29	90,54	14,17	65,67	KURANG
24	Sulawesi Tengah	94,22	93,29	32,56	73,36	KURANG
25	Sulawesi Selatan	96,17	95,37	58,45	83,33	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	92,77	91,01	31,84	71,87	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	97,52	97,11	17,74	70,79	KURANG
28	Maluku	98,56	98,45	82,47	93,16	UTAMA
29	Maluku Utara	99,47	99,37	85,45	94,76	UTAMA
30	Bali	96,87	96,85	86,53	93,42	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	97,02	95,57	57,18	83,26	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	94,50	94,55	92,48	93,84	UTAMA
33	Papua	94,75	92,05	100,00	95,60	PARIPURNA
34	Papua Barat	97,26	97,05	100,00	98,10	PARIPURNA
	Indonesia	97,41	96,81	69,49	87,90	MADYA
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	KURANG	MADYA	

Berdasarkan siswa swasta SMP maka diperoleh %S-Swt SMP terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 41,72% karena sekolah swasta sangat besar dan terkecil pada Provinsi Gorontalo sebesar 3,54% karena sekolah swasta sangat kecil dengan rata-rata nasional sebesar 25,53% atau seperempat dari siswa SMP yang ada.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SMP yang berkeadilan yang terdapat pada Tabel 4.24. Indikator PG APK SMP terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 99,77 dan terkecil terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 92,29, sehingga nasional menjadi 97,41 termasuk kategori paripurna. Indikator IPG APK SMP terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 99,73 dan terkecil terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 90,54, sehingga nasional menjadi 96,81 termasuk kategori paripurna. Indikator %S-Swt SMP di 10

Provinsi telah ideal atau melebihi standar 25% dan terkecil terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 14,17, sehingga nasional menjadi 69,49 termasuk kategori kurang.

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SMP yang berkeadilan menjadi 87,90 termasuk kategori madya. Hal ini berarti akses pendidikan SMP yang berkeadilan sebesar 88% dari 100% atau sembilan per sepuluh. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata delapan Provinsi termasuk kategori kurang, enam Provinsi termasuk kategori pratama, satu Provinsi termasuk madya, sembilan Provinsi termasuk utama, dan 10 Provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 99,69 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 65,67 termasuk kategori kurang.

c. SM

Berdasarkan penjumlahan data SMA dan SMK maka dihasilkan analisis tiga indikator akses pendidikan yang berkeadilan tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.25. APK laki-laki terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 99,67% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 52,48% dengan rata-rata nasional sebesar 72,37%. APK perempuan terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 95,04% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 46,30% dengan rata-rata nasional sebesar 73,27%.

Berdasarkan APK laki-laki dan perempuan SM maka PG APK SM terbesar pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar -8,98% berarti lebih banyak perempuan dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,20% berarti sedikit lebih banyak laki-laki, dengan rata-rata nasional sebesar -0,90% berarti lebih banyak perempuan. IPG APK SM terbesar pada Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1,12 berarti sangat tidak setara karena laki-laki jauh lebih sedikit. Pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1,00 berarti setara sedangkan empat Provinsi lainnya sebesar 0,99 artinya mendekati setara tetapi lebih banyak laki-laki yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jambi, dan Kalimantan Selatan dengan rata-rata nasional sebesar 1,01 berarti mendekati setara dan perempuan lebih banyak.

Berdasarkan siswa swasta SM maka diperoleh %S-Swt SM terbesar pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 65,75% berarti sekolah siswa yang bersekolah di swasta sangat besar dan terkecil pada Provinsi Gorontalo sebesar 8,34% berarti sekolah swasta sangat kecil dengan rata-rata nasional sebesar 42,13% berarti lebih dari 40% siswa bersekolah di swasta.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator akses SM yang berkeadilan yang terdapat pada Tabel 4.26. Nilai PG APK SM terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 99,80 dan terkecil sebesar 91,02 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga nasional menjadi 95,71 termasuk kategori paripurna. Nilai IPG APK SM terbesar terjadi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 99,75 dan terkecil terjadi di Provinsi sebesar 88,22 terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga nasional menjadi 94,52 termasuk kategori utama. Nilai %S-Swt SM terbesar terjadi di lima Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebesar 100 atau sudah ideal dan terkecil terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 16,67, sehingga nasional menjadi 55,12 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.25
Data dan Indikator Akses yang Berkeadilan SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data							Indikator					
		Penduduk 16-18 tahun			Siswa			Siswa Swasta	APK			PG APK	IPG APK	%S-Swt
		Laki2	Peremp	Jumlah	Laki2	Peremp	Jumlah		Laki2	Peremp	Rata2			
1	DKI Jakarta	205.500	210.100	415.600	194.158	196.783	390.941	257.059	94,48	93,66	94,07	0,82	0,99	65,75
2	Jawa Barat	1.276.644	1.223.656	2.500.300	888.792	833.307	1.722.099	999.891	69,62	68,10	68,88	1,52	0,98	58,06
3	Banten	325.900	306.500	632.400	223.922	209.380	433.302	248.272	68,71	68,31	68,52	0,40	0,99	57,30
4	Jawa Tengah	889.142	806.858	1.696.000	601.685	577.442	1.179.127	618.638	67,67	71,57	69,52	-3,90	1,06	52,47
5	DI Yogyakarta	84.248	74.752	159.000	72.909	71.047	143.956	61.869	86,54	95,04	90,54	-8,50	1,10	42,98
6	Jawa Timur	944.500	903.900	1.848.400	670.162	601.815	1.271.977	638.255	70,95	66,58	68,82	4,37	0,94	50,18
7	Aceh	139.000	135.700	274.700	95.549	96.408	191.957	21.357	68,74	71,04	69,88	-2,30	1,03	11,13
8	Sumatera Utara	404.900	392.900	797.800	335.271	332.149	667.420	312.761	82,80	84,54	83,66	-1,73	1,02	46,86
9	Sumatera Barat	145.600	142.600	288.200	111.554	120.445	231.999	32.881	76,62	84,46	80,50	-7,85	1,10	14,17
10	Riau	179.340	173.760	353.100	121.990	121.892	243.882	60.436	68,02	70,15	69,07	-2,13	1,03	24,78
11	Kepulauan Riau	38.965	41.035	80.000	35.436	34.914	70.350	17.199	90,94	85,08	87,94	5,86	0,94	24,45
12	Jambi	92.300	90.700	183.000	62.956	61.363	124.319	20.028	68,21	67,65	67,93	0,55	0,99	16,11
13	Sumatera Selatan	216.700	209.100	425.800	159.310	156.865	316.175	97.631	73,52	75,02	74,25	-1,50	1,02	30,88
14	Bangka Belitung	36.800	35.100	71.900	24.508	25.618	50.126	9.918	66,60	72,99	69,72	-6,39	1,10	19,79
15	Bengkulu	51.900	49.900	101.800	38.312	37.740	76.052	6.695	73,82	75,63	74,71	-1,81	1,02	8,80
16	Lampung	217.200	204.300	421.500	145.366	145.337	290.703	118.306	66,93	71,14	68,97	-4,21	1,06	40,70
17	Kalimantan Barat	133.700	128.800	262.500	91.983	95.477	187.460	54.004	68,80	74,13	71,41	-5,33	1,08	28,81
18	Kalimantan Tengah	68.300	65.500	133.800	45.477	44.094	89.571	10.980	66,58	67,32	66,94	-0,73	1,01	12,26
19	Kalimantan Selatan	104.300	99.500	203.800	62.571	59.041	121.612	21.695	59,99	59,34	59,67	0,65	0,99	17,84
20	Kalimantan Timur	92.353	88.147	180.500	75.226	71.624	146.850	39.716	81,45	81,26	81,36	0,20	1,00	27,05
21	Kalimantan Utara	17.447	16.653	34.100	12.521	12.745	25.266	3.992	71,77	76,53	74,09	-4,77	1,07	15,80
22	Sulawesi Utara	62.200	59.000	121.200	54.707	54.976	109.683	32.885	87,95	93,18	90,50	-5,23	1,06	29,98
23	Gorontalo	32.800	31.900	64.700	22.318	24.136	46.454	3.873	68,04	75,66	71,80	-7,62	1,11	8,34
24	Sulawesi Tengah	80.000	75.900	155.900	56.961	59.951	116.912	17.873	71,20	78,99	74,99	-7,79	1,11	15,29
25	Sulawesi Selatan	248.700	237.300	486.000	178.171	186.432	364.603	77.618	71,64	78,56	75,02	-6,92	1,10	21,29
26	Sulawesi Barat	39.700	38.000	77.700	27.054	28.794	55.848	9.522	68,15	75,77	71,88	-7,63	1,11	17,05
27	Sulawesi Tenggara	75.000	72.100	147.100	60.808	61.784	122.592	12.118	81,08	85,69	83,34	-4,61	1,06	9,88
28	Maluku	52.800	50.100	102.900	45.858	45.508	91.366	19.085	86,85	90,83	88,79	-3,98	1,05	20,89
29	Maluku Utara	35.000	33.400	68.400	27.507	27.416	54.923	13.803	78,59	82,08	80,30	-3,49	1,04	25,13
30	Bali	97.100	94.100	191.200	96.782	86.559	183.341	74.940	99,67	91,99	95,89	7,69	0,92	40,87
31	Nusa Tenggara Barat	135.800	130.900	266.700	92.503	81.764	174.267	39.974	68,12	62,46	65,34	5,65	0,92	22,94
32	Nusa Tenggara Timur	164.000	158.400	322.400	124.892	134.854	259.746	86.587	76,15	85,14	80,57	-8,98	1,12	33,34
33	Papua	100.000	87.800	187.800	52.478	40.649	93.127	31.072	52,48	46,30	49,59	6,18	0,88	33,37
34	Papua Barat	25.300	23.900	49.200	20.958	18.712	39.670	10.422	82,84	78,29	80,63	4,55	0,95	26,27
	Indonesia	6.813.139	6.492.261	13.305.400	4.930.655	4.757.021	9.687.676	4.081.355	72,37	73,27	72,81	-0,90	1,01	42,13

Dengan demikian, jumlah nilai akses pendidikan SM yang berkeadilan menjadi 81,78 termasuk kategori pratama. Hal ini berarti akses pendidikan SM yang berkeadilan sebesar 82% dari 100% atau sekitar empat per lima. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata 16 Provinsi termasuk kategori kurang, delapan Provinsi termasuk kategori pratama, tiga Provinsi termasuk madya, satu Provinsi termasuk utama, dan enam Provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Banten sebesar 99,68 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 66,33 termasuk kategori kurang.

Tabel 4.26
Akses yang Berkeadilan SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Akses yang Berkeadilan				
		PG APK	IPG APK	%S-Swt	Rata-rata	Jenis
		0	1	50		
1	DKI Jakarta	99,18	99,13	100,00	99,44	PARIPURNA
2	Jawa Barat	98,48	97,82	100,00	98,77	PARIPURNA
3	Banten	99,60	99,42	100,00	99,68	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	96,10	94,56	100,00	96,89	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	91,50	91,05	85,96	89,50	MADYA
6	Jawa Timur	95,63	93,83	100,00	96,49	PARIPURNA
7	Aceh	97,70	96,76	22,25	72,23	KURANG
8	Sumatera Utara	98,27	97,95	93,72	96,65	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	92,15	90,71	28,35	70,40	KURANG
10	Riau	97,87	96,97	49,56	81,47	PRATAMA
11	Kepulauan Riau	94,14	93,56	48,90	78,86	KURANG
12	Jambi	99,45	99,19	32,22	76,95	KURANG
13	Sumatera Selatan	98,50	98,00	61,76	86,08	MADYA
14	Bangka Belitung	93,61	91,25	39,57	74,81	KURANG
15	Bengkulu	98,19	97,60	17,61	71,13	KURANG
16	Lampung	95,79	94,08	81,39	90,42	UTAMA
17	Kalimantan Barat	94,67	92,81	57,62	81,70	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	99,27	98,91	24,52	74,23	KURANG
19	Kalimantan Selatan	99,35	98,91	35,68	77,98	KURANG
20	Kalimantan Timur	99,80	99,75	54,09	84,55	PRATAMA
21	Kalimantan Utara	95,23	93,77	31,60	73,53	KURANG
22	Sulawesi Utara	94,77	94,39	59,96	83,04	PRATAMA
23	Gorontalo	92,38	89,93	16,67	66,33	KURANG
24	Sulawesi Tengah	92,21	90,14	30,58	70,98	KURANG
25	Sulawesi Selatan	93,08	91,19	42,58	75,61	KURANG
26	Sulawesi Barat	92,37	89,93	34,10	72,14	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	95,39	94,61	19,77	69,92	KURANG
28	Maluku	96,02	95,62	41,78	77,80	KURANG
29	Maluku Utara	96,51	95,75	50,26	80,84	PRATAMA
30	Bali	92,31	92,29	81,75	88,78	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	94,35	91,70	45,88	77,31	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	91,02	89,45	66,67	82,38	PRATAMA
33	Papua	93,82	88,22	66,73	82,92	PRATAMA
34	Papua Barat	95,45	94,51	52,54	80,84	PRATAMA
	Indonesia	95,71	94,52	55,12	81,78	PRATAMA
	Jenis	PARIPURNA	UTAMA	KURANG	PRATAMA	

d. Semua Jenjang

Berdasarkan tiga indikator akses pendidikan yang berkeadilan maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.27. Bila dilihat secara nasional maka SD memiliki nilai akses pendidikan yang berkeadilan terbesar sebesar 91,24 termasuk kategori utama dan terkecil pada SM sebesar 81,78 termasuk kategori pratama.

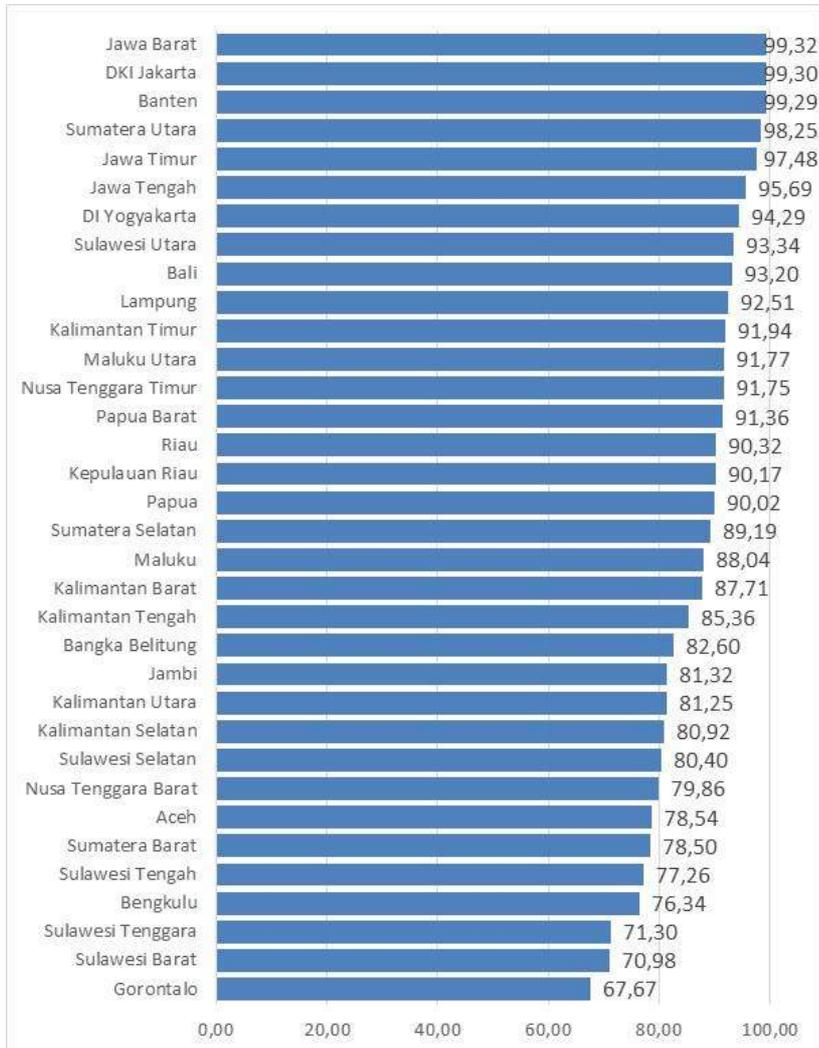
Bila dilihat akses pendidikan yang berkeadilan untuk tiap Provinsi yang terbesar maka untuk SD terbesar terjadi Provinsi Maluku Utara sebesar 99,70 termasuk paripurna, untuk SMP pada Provinsi Jawa Barat sebesar 99,69 termasuk paripurna, untuk SM pada Provinsi Banten sebesar 99,68 termasuk paripurna. Sebaliknya, akses pendidikan yang berkeadilan terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 68,94 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Gorontalo sebesar 65,67 termasuk kurang, untuk SM juga pada Provinsi Gorontalo sebesar 66,33 termasuk kurang.

Tabel 4.27
Akses yang Berkeadilan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	99,11	99,36	99,44	99,30	PARIPURNA
2	Jawa Barat	99,50	99,69	98,77	99,32	PARIPURNA
3	Banten	98,90	99,30	99,68	99,29	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	96,01	94,18	96,89	95,69	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	95,96	97,40	89,50	94,29	UTAMA
6	Jawa Timur	98,22	97,72	96,49	97,48	PARIPURNA
7	Aceh	82,08	81,32	72,23	78,54	KURANG
8	Sumatera Utara	98,40	99,69	96,65	98,25	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	87,14	77,96	70,40	78,50	KURANG
10	Riau	98,58	90,93	81,47	90,32	UTAMA
11	Kepulauan Riau	98,24	93,41	78,86	90,17	UTAMA
12	Jambi	86,96	80,06	76,95	81,32	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	91,36	90,13	86,08	89,19	MADYA
14	Bangka Belitung	89,72	83,27	74,81	82,60	PRATAMA
15	Bengkulu	85,73	72,16	71,13	76,34	KURANG
16	Lampung	88,74	98,39	90,42	92,51	UTAMA
17	Kalimantan Barat	94,49	86,93	81,70	87,71	MADYA
18	Kalimantan Tengah	97,69	84,16	74,23	85,36	MADYA
19	Kalimantan Selatan	86,99	77,80	77,98	80,92	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	99,55	91,73	84,55	91,94	UTAMA
21	Kalimantan Utara	92,61	77,62	73,53	81,25	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	98,59	98,38	83,04	93,34	UTAMA
23	Gorontalo	71,00	65,67	66,33	67,67	KURANG
24	Sulawesi Tengah	87,43	73,36	70,98	77,26	KURANG
25	Sulawesi Selatan	82,26	83,33	75,61	80,40	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	68,94	71,87	72,14	70,98	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	73,19	70,79	69,92	71,30	KURANG
28	Maluku	93,14	93,16	77,80	88,04	MADYA
29	Maluku Utara	99,70	94,76	80,84	91,77	UTAMA
30	Bali	97,39	93,42	88,78	93,20	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	79,01	83,26	77,31	79,86	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	99,04	93,84	82,38	91,75	UTAMA
33	Papua	91,53	95,60	82,92	90,02	UTAMA
34	Papua Barat	95,14	98,10	80,84	91,36	UTAMA
	Indonesia	91,24	87,90	81,78	86,98	MADYA
	Jenis	UTAMA	MADYA	PRATAMA	MADYA	

Bila dilihat tiap Provinsi ternyata 8 Provinsi termasuk kategori kurang, lima Provinsi termasuk pratama, empat Provinsi termasuk madya, 11 Provinsi termasuk utama, dan enam Provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 99,32 termasuk paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 67,67 termasuk kategori kurang.

Keberhasilan pendidikan dilihat dari akses pendidikan yang berkeadilan dapat terlihat jelas pada Grafik 4.3, terlihat bahwa lima Provinsi terbawah adalah Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Sebaliknya, lima Provinsi teratas adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.



Grafik 4.3
Akses yang Berkeadilan Semua Jenjang Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

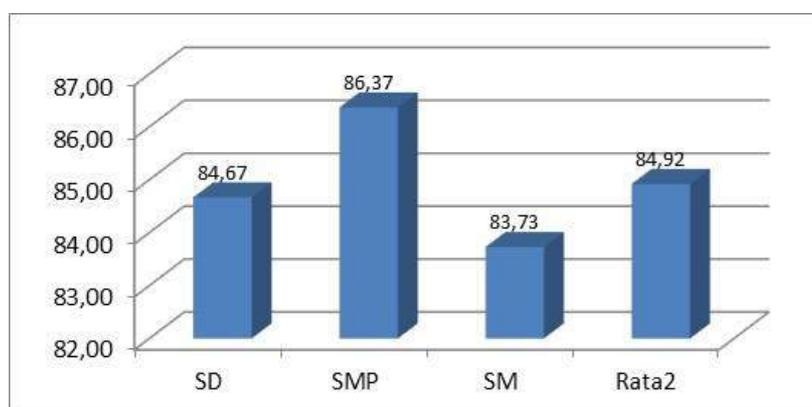
4. Rangkuman Akses Pendidikan

Berdasarkan akses pendidikan tiap jenjang pendidikan yang terdapat pada Tabel 4.28 maka dapat dikatakan bahwa akses pendidikan yang meluas memiliki nilai yang paling rendah tercapai sebesar 72,75 termasuk kategori kurang. Akses yang merata memiliki nilai yang paling tinggi sebesar 95,04 termasuk kategori utama, sedangkan akses yang berkeadilan memiliki nilai sebesar 86,98 termasuk kategori madya. Dengan demikian, rata-rata akses pendidikan menjadi sebesar 84,92 termasuk kategori pratama.

Tabel 4.28
Rangkuman Akses Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017/2018

No.	Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A.	Akses yang meluas	68,17	79,08	71,00	72,75	KURANG
B.	Akses yang merata	94,58	92,12	98,40	95,03	PARIPURNA
C.	Akses yang berkeadilan	91,24	87,90	81,78	86,98	MADYA
	Akses Pendidikan	84,67	86,37	83,73	84,92	PRATAMA
	Jenis	PRATAMA	MADYA	PRATAMA	PRATAMA	

Bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka nilai akses pendidikan SD sebesar 84,67 termasuk pratama, SMP sebesar 86,37 termasuk kategori madya, dan SM sebesar 83,73 termasuk kategori pratama, sehingga rata-rata tiga kelompok indikator dan tiga jenjang pendidikan sebesar 84,92 termasuk kategori pratama.



Grafik 4.4
Rangkuman Akses Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017/2018

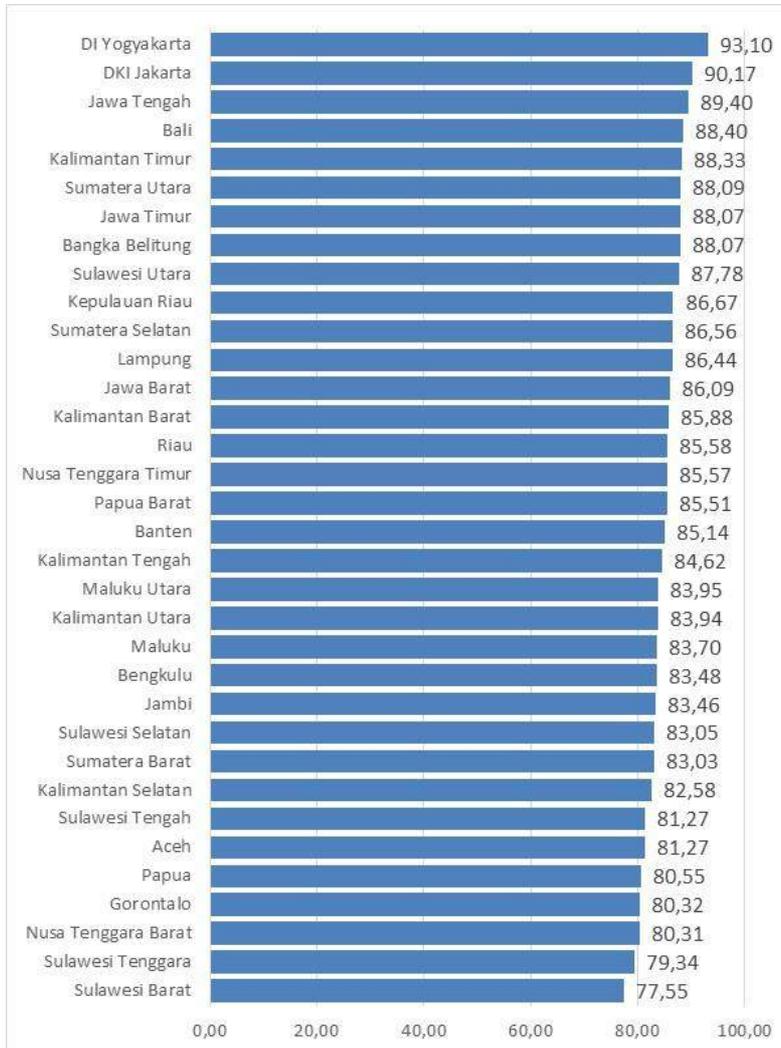
Berdasarkan tiga kelompok indikator akses pendidikan maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan tiap Provinsi seperti disajikan pada Tabel 4.29. Bila dilihat akses pendidikan tiap Provinsi yang terbesar maka untuk SD terbesar terjadi Provinsi DI Yogyakarta sebesar 91,37 termasuk utama, untuk SMP pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 96,69 termasuk paripurna, untuk SM juga pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 91,25 termasuk utama. Sebaliknya, akses pendidikan terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 75,60 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 78,68 termasuk kurang, untuk SM pada Provinsi Papua sebesar 78,17 termasuk kurang. Dengan demikian, rata-rata tiga jenjang terbesar terjadi di DI Yogyakarta sebesar 93,10 termasuk utama dan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 77,55 termasuk kurang.

Tabel 4.29
Rangkuman Akses Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Akses Pendidikan				Jenis
		SD	SMP	SM	Rata-rata	
1	DKI Jakarta	84,22	94,16	92,13	90,17	UTAMA
2	Jawa Barat	82,47	87,82	87,99	86,09	MADYA
3	Banten	80,32	86,65	88,45	85,14	MADYA
4	Jawa Tengah	86,59	90,76	90,86	89,40	MADYA
5	DI Yogyakarta	91,37	96,69	91,25	93,10	UTAMA
6	Jawa Timur	85,72	89,98	88,51	88,07	MADYA
7	Aceh	78,56	83,88	81,36	81,27	PRATAMA
8	Sumatera Utara	86,20	89,28	88,77	88,09	MADYA
9	Sumatera Barat	85,95	82,55	80,58	83,03	PRATAMA
10	Riau	87,49	85,79	83,46	85,58	MADYA
11	Kepulauan Riau	85,55	90,38	84,08	86,67	MADYA
12	Jambi	85,13	81,63	83,62	83,46	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	85,74	87,85	86,09	86,56	MADYA
14	Bangka Belitung	90,66	88,92	84,63	88,07	MADYA
15	Bengkulu	85,00	83,68	81,77	83,48	PRATAMA
16	Lampung	82,90	89,60	86,81	86,44	MADYA
17	Kalimantan Barat	87,24	87,65	82,76	85,88	MADYA
18	Kalimantan Tengah	88,32	84,51	81,03	84,62	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	82,73	81,80	83,20	82,58	PRATAMA
20	Kalimantan Timur	89,54	89,59	85,86	88,33	MADYA
21	Kalimantan Utara	86,88	84,42	80,53	83,94	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	86,77	92,00	84,58	87,78	MADYA
23	Gorontalo	80,92	79,44	80,59	80,32	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	83,68	80,58	79,55	81,27	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	82,71	85,10	81,34	83,05	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	75,60	78,68	78,37	77,55	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	77,66	80,86	79,50	79,34	KURANG
28	Maluku	84,18	86,09	80,82	83,70	PRATAMA
29	Maluku Utara	85,64	85,58	80,62	83,95	PRATAMA
30	Bali	90,25	89,66	85,27	88,40	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	79,22	81,26	80,45	80,31	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	88,15	87,40	81,16	85,57	MADYA
33	Papua	80,49	83,00	78,17	80,55	PRATAMA
34	Papua Barat	84,75	89,24	82,56	85,51	MADYA
	Indonesia	84,67	86,37	83,73	84,92	PRATAMA
	Jenis	PRATAMA	MADYA	PRATAMA	PRATAMA	

Bila dilihat tiap Provinsi ternyata dua Provinsi termasuk kategori kurang, 16 Provinsi termasuk pratama, 16 Provinsi termasuk madya, dan dua Provinsi termasuk utama yaitu Provinsi DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 77,55 termasuk kategori kurang.

Keberhasilan pendidikan dilihat dari akses pendidikan dapat terlihat jelas pada Grafik 4.5 bahwa lima Provinsi terbawah adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Sebaliknya, lima Provinsi teratas adalah DI Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Bali.



Grafik 4.5
Rangkuman Akses Pendidikan Semua Jenjang Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

B. Pembelajaran yang Bermutu

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu dapat dilihat dari tiga segi, yaitu mutu dari guru menggunakan 2 indikator, mutu dari siswa menggunakan 3 indikator, dan mutu dari prasarana menggunakan 5 indikator.

1. Mutu Guru

Oleh karena keterbatasan data yang tersedia maka hanya terdapat dua jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui mutu guru, yaitu %GL dan R-

S/G. R-S/G dilakukan konversi menggunakan standar yang terdapat pada Tabel 3.3, sedangkan %GL tidak dilakukan konversi, sehingga diperoleh satuan yang sama untuk menghasilkan nilai indikator. Kedua indikator tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi 2, sehingga diperoleh mutu guru. Nilai maksimal 100, artinya nilai makin mendekati 100 disebut makin bermutu.

Tabel 4.30
Data, Indikator, dan Nilai Mutu Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017/2018

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A.	Data					
1	Guru	1.485.602	628.052	599.963		
2	Guru S1+	1.277.444	585.066	576.010		
3	Siswa	25.486.506	10.125.724	9.687.676		
B.	Indikator					
1	%GL	85,99	93,16	96,01		
2	R-S/G	17	16	16		
C.	Nilai Indikator					
1	%GL	81,32	91,95	95,97	89,74	MADYA
2	R-S/G	88,29	87,63	82,97	86,30	MADYA
	Mutu Guru	84,80	89,79	89,47	88,02	MADYA
	Jenis Mutu Guru	PRATAMA	MADYA	MADYA	MADYA	

Tabel 4.30 menunjukkan data, indikator, dan nilai mutu guru menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat guru SD sebesar 1.485.602, SMP sebesar 628.052, dan SM sebesar 599.963. Bila dibandingkan dengan guru yang berijazah S1 dan lebih maka %GL terbesar terjadi pada SM sebesar 96,01% dan terkecil pada guru SD sebesar 85,99%. Guru SD yang terkecil karena sebelumnya guru layak mengajar di SD adalah yang berijazah Diploma 2 (PGSD), guru SMP sebesar 93,16% sehingga masih terdapat 6,84% guru yang harus disetarakan agar layak mengajar di SMP, sedangkan di SM berarti masih terdapat 3,99% guru yang harus disetarakan agar layak mengajar di SM.

Bila dibandingkan dengan siswa, maka R-S/G di jenjang SD sebesar 17 sedangkan jenjang SMP dan SM sebesar 16. Artinya, masih terdapat kekurangan guru SM karena standarnya harusnya 12, demikian juga guru SMP karena standarnya 14, demikian halnya guru SD melebihi standar sebesar 16.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka rata-rata %GL mengajar di tiga jenjang sebesar 89,74 termasuk kategori madya. Setelah R-S/G mengalami konversi, SD menjadi 88,29, SMP menjadi 87,63, dan SM menjadi 82,97, sehingga rata-rata menjadi 86,30 termasuk kategori madya. Dengan demikian, mutu guru terbaik pada SMP sebesar 89,79 termasuk kategori madya dan mutu guru SD terkecil sebesar 84,80 termasuk pratama. Selanjutnya, mutu guru SM sebesar 89,47 termasuk madya, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 88,02 termasuk madya. Hal ini berarti pencapaian hanya 88 dari 100.

a. SD

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis dua indikator mutu guru tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.31. Guru SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 199.718 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 5.327. Namun, %GL terbesar di Provinsi Bali sebesar 93,27% dan terkecil di Provinsi Maluku Utara sebesar 54,72% dengan rata-rata nasional sebesar 85,99%. Hal ini berarti terdapat 14,01% guru yang perlu disetarakan agar layak mengajar di SD.

Tabel 4.31
Data dan Indikator Mutu Guru SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data			Mutu 3.1 Guru	
		Guru	Guru S1+	Siswa	%GL	R-S/G
1	DKI Jakarta	38.436	35.646	828.707	92,74	22
2	Jawa Barat	199.718	185.144	4.508.356	92,70	23
3	Banten	53.354	48.256	1.195.653	90,44	22
4	Jawa Tengah	166.322	154.601	2.857.363	92,95	17
5	DI Yogyakarta	18.823	17.105	293.568	90,87	16
6	Jawa Timur	188.484	174.833	2.838.933	92,76	15
7	Aceh	45.600	36.285	490.326	79,57	11
8	Sumatera Utara	100.454	79.789	1.735.078	79,43	17
9	Sumatera Barat	41.059	37.427	640.046	91,15	16
10	Riau	47.420	40.413	798.194	85,22	17
11	Kepulauan Riau	12.595	11.147	226.257	88,50	18
12	Jambi	25.261	19.681	389.444	77,91	15
13	Sumatera Selatan	54.676	44.125	933.604	80,70	17
14	Bangka Belitung	8.105	6.731	160.738	83,05	20
15	Bengkulu	14.128	11.789	214.211	83,44	15
16	Lampung	51.543	42.148	842.711	81,77	16
17	Kalimantan Barat	35.340	26.357	594.474	74,58	17
18	Kalimantan Tengah	22.500	18.563	287.845	82,50	13
19	Kalimantan Selatan	27.806	24.286	381.207	87,34	14
20	Kalimantan Timur	23.524	20.160	413.048	85,70	18
21	Kalimantan Utara	5.327	4.038	78.556	75,80	15
22	Sulawesi Utara	16.434	12.500	240.618	76,06	15
23	Gorontalo	7.542	6.534	123.528	86,63	16
24	Sulawesi Tengah	24.494	17.044	343.667	69,58	14
25	Sulawesi Selatan	65.408	57.790	928.029	88,35	14
26	Sulawesi Barat	11.939	8.121	160.963	68,02	13
27	Sulawesi Tenggara	21.724	17.537	320.324	80,73	15
28	Maluku	15.506	10.165	228.754	65,56	15
29	Maluku Utara	9.247	5.060	158.315	54,72	17
30	Bali	24.210	22.581	399.644	93,27	17
31	Nusa Tenggara Barat	36.544	30.690	512.666	83,98	14
32	Nusa Tenggara Timur	48.856	36.001	776.844	73,69	16
33	Papua	16.208	9.545	448.483	58,89	28
34	Papua Barat	7.015	5.352	136.352	76,29	19
	Indonesia	1.485.602	1.277.444	25.486.506	85,99	17

Demikian juga siswa SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.508.356 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 78.556. Dengan membandingkan siswa dan guru maka R-S/G terbesar terjadi di Provinsi Papua sebesar 28, berarti seorang guru rata-rata melayani 27 siswa atau kekurangan guru dan terkecil terjadi di Provinsi Aceh sebesar 11, berarti seorang guru melayani 11

siswa, berarti kelebihan guru bila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 17 atau kekurangan guru yang standarnya sebesar 16.

Tabel 4.32
Mutu Guru SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Mutu Guru			
		%GL	R-S/G	Rata-rata	Jenis
		100	16		
1	DKI Jakarta	92,74	74,21	83,48	PRATAMA
2	Jawa Barat	92,70	70,88	81,79	PRATAMA
3	Banten	90,44	71,40	80,92	PRATAMA
4	Jawa Tengah	92,95	93,13	93,04	UTAMA
5	DI Yogyakarta	90,87	97,48	94,17	UTAMA
6	Jawa Timur	92,76	94,14	93,45	UTAMA
7	Aceh	79,57	67,20	73,39	KURANG
8	Sumatera Utara	79,43	92,63	86,03	MADYA
9	Sumatera Barat	91,15	97,43	94,29	UTAMA
10	Riau	85,22	95,05	90,14	UTAMA
11	Kepulauan Riau	88,50	89,07	88,79	MADYA
12	Jambi	77,91	96,36	87,13	MADYA
13	Sumatera Selatan	80,70	93,70	87,20	MADYA
14	Bangka Belitung	83,05	80,68	81,86	PRATAMA
15	Bengkulu	83,44	94,76	89,10	MADYA
16	Lampung	81,77	97,86	89,82	MADYA
17	Kalimantan Barat	74,58	95,12	84,85	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	82,50	79,96	81,23	PRATAMA
19	Kalimantan Selatan	87,34	85,68	86,51	MADYA
20	Kalimantan Timur	85,70	91,12	88,41	MADYA
21	Kalimantan Utara	75,80	92,17	83,98	PRATAMA
22	Sulawesi Utara	76,06	91,51	83,79	PRATAMA
23	Gorontalo	86,63	97,69	92,16	UTAMA
24	Sulawesi Tengah	69,58	87,69	78,64	KURANG
25	Sulawesi Selatan	88,35	88,68	88,52	MADYA
26	Sulawesi Barat	68,02	84,26	76,14	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	80,73	92,16	86,44	MADYA
28	Maluku	65,56	92,20	78,88	KURANG
29	Maluku Utara	54,72	93,45	74,09	KURANG
30	Bali	93,27	96,93	95,10	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	83,98	87,68	85,83	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	73,69	99,38	86,53	MADYA
33	Papua	58,89	57,82	58,36	KURANG
34	Papua Barat	76,29	82,32	79,31	KURANG
	Indonesia	81,32	88,29	84,80	PRATAMA
	Jenis	PRATAMA	MADYA	PRATAMA	

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu guru SD yang terdapat pada Tabel 4.32. Nilai %GL terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 93,27 dan terkecil di Provinsi Maluku Utara sebesar 54,72, sehingga nasional menjadi 81,32 termasuk kategori pratama. Nilai R-S/G SD terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 99,38 dan terkecil di Provinsi Papua sebesar 57,82, sehingga nasional menjadi 88,29 termasuk kategori madya.

Dengan demikian, jumlah nilai mutu guru SD menjadi 84,80 termasuk kategori pratama. Hal ini berarti mutu guru SD tercapai 84% dari 100% atau empat per lima. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata 7 Provinsi termasuk kategori kurang, 8 Provinsi termasuk kategori pratama, 12 Provinsi termasuk madya, 6 Provinsi termasuk utama, dan 1 Provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di

Provinsi Bali sebesar 95,10 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 58,36 termasuk kategori kurang.

b. SMP

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis dua indikator mutu guru tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.33. Guru SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 83.327 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 2.303. Namun, %GL terbesar terjadi Provinsi Jawa Timur sebesar 96,22% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku sebesar 79,52% dengan rata-rata nasional sebesar 93,16%. Hal ini berarti masih terdapat 6,84% guru yang perlu disetarakan agar layak mengajar di SMP.

Tabel 4.33
Data dan Indikator Mutu Guru SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data			Mutu Guru	
		Guru	Guru S1+	Siswa	%GL	R-S/G
1	DKI Jakarta	18.802	17.986	368.482	95,66	20
2	Jawa Barat	83.327	78.441	1.796.000	94,14	22
3	Banten	19.995	18.879	424.406	94,42	21
4	Jawa Tengah	69.085	65.936	1.194.666	95,44	17
5	DI Yogyakarta	8.711	8.108	128.538	93,08	15
6	Jawa Timur	78.042	75.093	1.254.971	96,22	16
7	Aceh	21.749	20.117	192.702	92,50	9
8	Sumatera Utara	40.498	37.101	666.883	91,61	16
9	Sumatera Barat	17.556	16.118	218.400	91,81	12
10	Riau	18.042	16.412	263.099	90,97	15
11	Kepulauan Riau	4.826	4.469	86.803	92,60	18
12	Jambi	10.025	9.329	126.656	93,06	13
13	Sumatera Selatan	23.655	21.741	355.306	91,91	15
14	Bangka Belitung	3.054	2.790	60.609	91,36	20
15	Bengkulu	6.608	6.178	89.985	93,49	14
16	Lampung	21.105	18.717	315.085	88,69	15
17	Kalimantan Barat	13.897	12.076	238.676	86,90	17
18	Kalimantan Tengah	8.426	7.821	109.900	92,82	13
19	Kalimantan Selatan	8.859	8.449	120.803	95,37	14
20	Kalimantan Timur	9.469	8.946	156.471	94,48	17
21	Kalimantan Utara	2.303	2.145	31.558	93,14	14
22	Sulawesi Utara	8.157	7.013	120.268	85,98	15
23	Gorontalo	3.693	3.416	50.893	92,50	14
24	Sulawesi Tengah	9.686	8.932	132.897	92,22	14
25	Sulawesi Selatan	27.964	26.725	384.045	95,57	14
26	Sulawesi Barat	4.508	3.977	62.943	88,22	14
27	Sulawesi Tenggara	10.240	9.617	130.201	93,92	13
28	Maluku	7.633	6.070	97.055	79,52	13
29	Maluku Utara	4.741	4.083	61.503	86,12	13
30	Bali	11.677	11.196	194.796	95,88	17
31	Nusa Tenggara Barat	16.970	16.264	179.489	95,84	11
32	Nusa Tenggara Timur	23.739	21.054	337.465	88,69	14
33	Papua	7.547	6.582	126.477	87,21	17
34	Papua Barat	3.463	3.285	47.693	94,86	14
	Indonesia	628.052	585.066	10.125.724	93,16	16

Demikian juga siswa SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.796.000 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 31.558. Dengan membandingkan siswa dan guru maka R-S/G terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 20, berarti seorang guru rata-rata melayani 22 siswa dan terkecil terjadi di Provinsi Aceh sebesar 9, berarti seorang guru melayani 9 siswa dengan rata-rata nasional sebesar 16. Hal ini berarti terjadi kekurangan guru SMP karena standar sebesar 14 lebih kecil daripada rasio yang ada.

Tabel 4.34
Mutu Guru SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Mutu Guru			
		%GL	R-S/G	Rata-rata	Jenis
		100	14		
1	DKI Jakarta	95,66	71,44	83,55	PRATAMA
2	Jawa Barat	94,14	64,95	79,55	KURANG
3	Banten	94,42	65,96	80,19	PRATAMA
4	Jawa Tengah	95,44	80,96	88,20	MADYA
5	DI Yogyakarta	93,08	94,88	93,98	UTAMA
6	Jawa Timur	96,22	87,06	91,64	UTAMA
7	Aceh	92,50	63,29	77,89	KURANG
8	Sumatera Utara	91,61	85,02	88,32	MADYA
9	Sumatera Barat	91,81	88,86	90,33	UTAMA
10	Riau	90,97	96,00	93,49	UTAMA
11	Kepulauan Riau	92,60	77,84	85,22	MADYA
12	Jambi	93,06	90,24	91,65	UTAMA
13	Sumatera Selatan	91,91	93,21	92,56	UTAMA
14	Bangka Belitung	91,36	70,54	80,95	PRATAMA
15	Bengkulu	93,49	97,27	95,38	PARIPURNA
16	Lampung	88,69	93,77	91,23	UTAMA
17	Kalimantan Barat	86,90	81,52	84,21	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	92,82	93,16	92,99	UTAMA
19	Kalimantan Selatan	95,37	97,40	96,39	PARIPURNA
20	Kalimantan Timur	94,48	84,72	89,60	MADYA
21	Kalimantan Utara	93,14	97,88	95,51	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	85,98	94,95	90,46	UTAMA
23	Gorontalo	92,50	98,44	95,47	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	92,22	98,00	95,11	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	95,57	98,10	96,83	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	88,22	99,73	93,98	UTAMA
27	Sulawesi Tenggara	93,92	90,82	92,37	UTAMA
28	Maluku	79,52	90,82	85,17	MADYA
29	Maluku Utara	86,12	92,66	89,39	MADYA
30	Bali	95,88	83,92	89,90	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	95,84	75,55	85,69	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	88,69	98,48	93,59	UTAMA
33	Papua	87,21	83,54	85,38	MADYA
34	Papua Barat	94,86	98,37	96,62	PARIPURNA
	Indonesia	91,95	87,63	89,79	MADYA
	Jenis	UTAMA	MADYA	MADYA	

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu guru SMP yang terdapat pada Tabel 4.34. Nilai %GL terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 96,22 dan terkecil di Provinsi Maluku sebesar 79,52 terjadi di Provinsi Maluku, sehingga nasional menjadi 91,95 termasuk kategori utama. Nilai R-

S/G SMP terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 99,73 dan terkecil di Provinsi Aceh sebesar 63,29, sehingga nasional menjadi 87,63 termasuk kategori madya.

Dengan demikian, nilai mutu guru SMP menjadi 89,79 termasuk kategori madya. Hal ini berarti mutu guru SMP tercapai 89% dari 100% atau sembilan per sepuluh. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata 3 Provinsi termasuk kategori kurang, 4 Provinsi termasuk kategori pratama, 9 Provinsi termasuk madya, 12 Provinsi termasuk utama, dan 7 Provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 96,83 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Aceh sebesar 63,29 termasuk kategori kurang.

c. SM

Tabel 4.35
Data dan Indikator Mutu Guru SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data			Mutu Guru	
		Guru	Guru S1+	Siswa	%GL	R-S/G
1	DKI Jakarta	21.482	20.783	390.941	96,75	18
2	Jawa Barat	83.341	79.070	1.722.099	94,88	21
3	Banten	20.513	19.485	433.302	94,99	21
4	Jawa Tengah	66.873	64.609	1.179.127	96,61	18
5	DI Yogyakarta	11.117	10.744	143.956	96,64	13
6	Jawa Timur	73.568	71.363	1.271.977	97,00	17
7	Aceh	20.337	19.774	191.957	97,23	9
8	Sumatera Utara	39.223	37.265	667.420	95,01	17
9	Sumatera Barat	18.985	18.521	231.999	97,56	12
10	Riau	17.649	16.846	243.882	95,45	14
11	Kepulauan Riau	4.808	4.614	70.350	95,97	15
12	Jambi	9.389	9.062	124.319	96,52	13
13	Sumatera Selatan	20.823	19.973	316.175	95,92	15
14	Bangka Belitung	3.045	2.876	50.126	94,45	16
15	Bengkulu	6.118	5.938	76.052	97,06	12
16	Lampung	19.391	17.968	290.703	92,66	15
17	Kalimantan Barat	10.423	9.797	187.460	93,99	18
18	Kalimantan Tengah	6.888	6.641	89.571	96,41	13
19	Kalimantan Selatan	8.099	7.851	121.612	96,94	15
20	Kalimantan Timur	9.121	8.745	146.850	95,88	16
21	Kalimantan Utara	1.945	1.889	25.266	97,12	13
22	Sulawesi Utara	8.511	8.158	109.683	95,85	13
23	Gorontalo	3.345	3.246	46.454	97,04	14
24	Sulawesi Tengah	8.212	7.862	116.912	95,74	14
25	Sulawesi Selatan	24.530	24.030	364.603	97,96	15
26	Sulawesi Barat	4.023	3.782	55.848	94,01	14
27	Sulawesi Tenggara	9.845	9.609	122.592	97,60	12
28	Maluku	7.879	7.439	91.366	94,42	12
29	Maluku Utara	4.451	4.170	54.923	93,69	12
30	Bali	11.048	10.645	183.341	96,35	17
31	Nusa Tenggara Barat	15.220	14.836	174.267	97,48	11
32	Nusa Tenggara Timur	19.335	18.399	259.746	95,16	13
33	Papua	7.094	6.797	93.127	95,81	13
34	Papua Barat	3.332	3.223	39.670	96,73	12
	Indonesia	599.963	576.010	9.687.676	96,01	16

Berdasarkan data SMA dan SMK menjadi SM maka dihasilkan analisis dua indikator mutu guru tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.35. Guru SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 83.341 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.945. Namun, %GL terbesar terjadi Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 97,96% dan terkecil terjadi di Provinsi Lampung sebesar 92,66% dengan rata-rata nasional sebesar 96,01%. Hal ini berarti masih terdapat 3,99% guru yang perlu disetarakan agar layak mengajar di SM.

Tabel 4.36
Mutu Guru SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Mutu Guru			
		%GL	R-S/G	Rata-rata	Jenis
		100	12		
1	DKI Jakarta	96,75	65,94	81,34	PRATAMA
2	Jawa Barat	94,88	58,07	76,47	KURANG
3	Banten	94,99	56,81	75,90	KURANG
4	Jawa Tengah	96,61	68,06	82,34	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	96,64	92,67	94,66	UTAMA
6	Jawa Timur	97,00	69,41	83,20	PRATAMA
7	Aceh	97,23	78,66	87,94	MADYA
8	Sumatera Utara	95,01	70,52	82,76	PRATAMA
9	Sumatera Barat	97,56	98,20	97,88	PARIPURNA
10	Riau	95,45	86,84	91,15	UTAMA
11	Kepulauan Riau	95,97	82,01	88,99	MADYA
12	Jambi	96,52	90,63	93,57	UTAMA
13	Sumatera Selatan	95,92	79,03	87,47	MADYA
14	Bangka Belitung	94,45	72,90	83,67	PRATAMA
15	Bengkulu	97,06	96,53	96,80	PARIPURNA
16	Lampung	92,66	80,04	86,35	MADYA
17	Kalimantan Barat	93,99	66,72	80,36	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	96,41	92,28	94,35	UTAMA
19	Kalimantan Selatan	96,94	79,92	88,43	MADYA
20	Kalimantan Timur	95,88	74,53	85,21	MADYA
21	Kalimantan Utara	97,12	92,38	94,75	UTAMA
22	Sulawesi Utara	95,85	93,12	94,48	UTAMA
23	Gorontalo	97,04	86,41	91,72	UTAMA
24	Sulawesi Tengah	95,74	84,29	90,01	UTAMA
25	Sulawesi Selatan	97,96	80,73	89,35	MADYA
26	Sulawesi Barat	94,01	86,44	90,23	UTAMA
27	Sulawesi Tenggara	97,60	96,37	96,99	PARIPURNA
28	Maluku	94,42	96,63	95,53	PARIPURNA
29	Maluku Utara	93,69	97,25	95,47	PARIPURNA
30	Bali	96,35	72,31	84,33	PRATAMA
31	Nusa Tenggara Barat	97,48	95,42	96,45	PARIPURNA
32	Nusa Tenggara Timur	95,16	89,33	92,24	UTAMA
33	Papua	95,81	91,41	93,61	UTAMA
34	Papua Barat	96,73	99,21	97,97	PARIPURNA
	Indonesia	95,97	82,97	89,47	MADYA
	Jenis	PARIPURNA	PRATAMA	MADYA	

Demikian juga siswa SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 1.722.099 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 25.266. Dengan membandingkan siswa dan guru maka R-S/G terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Banten masing-masing sebesar 21, berarti seorang guru rata-rata melayani 21 siswa dan terkecil terjadi di Provinsi Aceh sebesar 9, berarti seorang guru melayani 9 siswa dengan rata-rata nasional sebesar 16. Hal ini berarti terjadi kekurangan guru SM karena standar sebesar 12 lebih kecil daripada rasio yang ada.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu guru SM yang terdapat pada Tabel 4.36. Nilai %GL terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 97,96 dan terkecil sebesar 92,66 terjadi di Provinsi Lampung, sehingga nasional menjadi 95,97 termasuk kategori paripurna. Nilai R-S/G SMA terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 99,21 dan terkecil di Provinsi Banten sebesar 56,81, sehingga nasional menjadi 82,97 termasuk kategori pratama.

Dengan demikian, jumlah nilai mutu guru SM menjadi 89,47 termasuk kategori madya. Hal ini berarti mutu guru SM tercapai 89% dari 100% atau sembilan per sepuluh. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata dua provinsi termasuk kategori kurang, tujuh Provinsi termasuk kategori pratama, tujuh Provinsi termasuk madya, 11 Provinsi termasuk utama, dan tujuh Provinsi termasuk kategori paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 97,97 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Banten sebesar 75,90 termasuk kategori kurang.

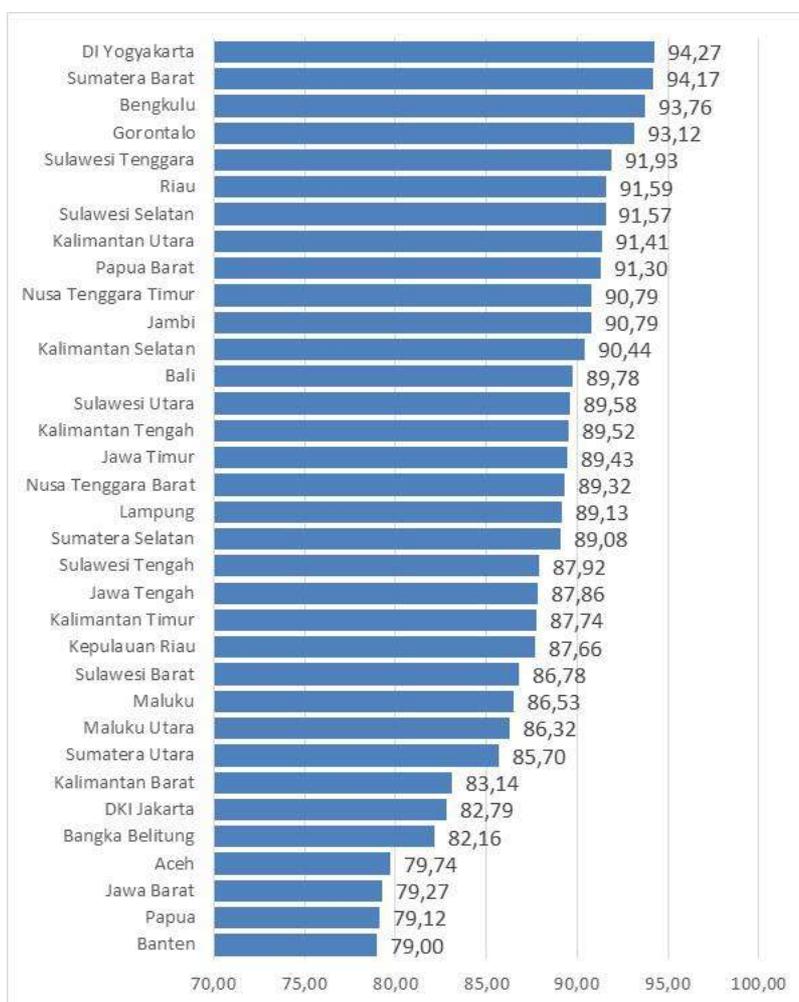
d. Semua Jenjang

Tabel 4.37
Mutu Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	83,48	83,55	81,34	82,79	PRATAMA
2	Jawa Barat	81,79	79,55	76,47	79,27	KURANG
3	Banten	80,92	80,19	75,90	79,00	KURANG
4	Jawa Tengah	93,04	88,20	82,34	87,86	MADYA
5	DI Yogyakarta	94,17	93,98	94,66	94,27	UTAMA
6	Jawa Timur	93,45	91,64	83,20	89,43	MADYA
7	Aceh	73,39	77,89	87,94	79,74	KURANG
8	Sumatera Utara	86,03	88,32	82,76	85,70	MADYA
9	Sumatera Barat	94,29	90,33	97,88	94,17	UTAMA
10	Riau	90,14	93,49	91,15	91,59	UTAMA
11	Kepulauan Riau	88,79	85,22	88,99	87,66	MADYA
12	Jambi	87,13	91,65	93,57	90,79	UTAMA
13	Sumatera Selatan	87,20	92,56	87,47	89,08	MADYA
14	Bangka Belitung	81,86	80,95	83,67	82,16	PRATAMA
15	Bengkulu	89,10	95,38	96,80	93,76	UTAMA
16	Lampung	89,82	91,23	86,35	89,13	MADYA
17	Kalimantan Barat	84,85	84,21	80,36	83,14	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	81,23	92,99	94,35	89,52	MADYA
19	Kalimantan Selatan	86,51	96,39	88,43	90,44	UTAMA
20	Kalimantan Timur	88,41	89,60	85,21	87,74	MADYA
21	Kalimantan Utara	83,98	95,51	94,75	91,41	UTAMA
22	Sulawesi Utara	83,79	90,46	94,48	89,58	MADYA
23	Gorontalo	92,16	95,47	91,72	93,12	UTAMA
24	Sulawesi Tengah	78,64	95,11	90,01	87,92	MADYA
25	Sulawesi Selatan	88,52	96,83	89,35	91,57	UTAMA
26	Sulawesi Barat	76,14	93,98	90,23	86,78	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	86,44	92,37	96,99	91,93	UTAMA
28	Maluku	78,88	85,17	95,53	86,53	MADYA
29	Maluku Utara	74,09	89,39	95,47	86,32	MADYA
30	Bali	95,10	89,90	84,33	89,78	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	85,83	85,69	96,45	89,32	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	86,53	93,59	92,24	90,79	UTAMA
33	Papua	58,36	85,38	93,61	79,12	KURANG
34	Papua Barat	79,31	96,62	97,97	91,30	UTAMA
	Indonesia	84,80	89,79	89,47	88,02	MADYA
	Jenis	PRATAMA	MADYA	MADYA	MADYA	

Berdasarkan dua indikator mutu guru maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.37. Bila dilihat secara nasional maka SMP memiliki nilai mutu guru terbesar sebesar 89,79 termasuk kategori madya dan terkecil pada SD sebesar 84,80 termasuk kategori pratama, sedangkan SM sebesar 89,47 juga termasuk madya.

Dengan demikian, mutu guru semua jenjang sebesar 88,02 termasuk madya. Hal ini berarti mutu guru semua jenjang tercapai 88% dari 100% atau tujuh per delapan. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata empat Provinsi termasuk kategori kurang, tiga Provinsi termasuk kategori pratama, 15 Provinsi termasuk madya, dan 12 Provinsi termasuk utama. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 94,27 termasuk kategori utama, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Banten sebesar 79,00 termasuk kategori kurang.



Grafik 4.6
Mutu Guru Semua Jenjang Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

Bila dilihat mutu guru tiap Provinsi yang terbesar maka untuk SD terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 95,10 termasuk paripurna, untuk SMP pada Provinsi Papua Barat sebesar 96,62 termasuk paripurna, untuk SM pada Provinsi Papua Barat sebesar 97,97 termasuk paripurna. Sebaliknya, mutu guru terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Papua sebesar 58,36 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Aceh sebesar 77,89 termasuk kurang, dan untuk SM pada Provinsi Banten sebesar 75,90 juga termasuk kurang.

Mutu guru semua jenjang terdapat pada Grafik 4.6 di mana terlihat bahwa lima Provinsi terbawah adalah Banten, Papua, Jawa Barat, Aceh dan Bangka Belitung. Sebaliknya, lima Provinsi teratas adalah DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Bengkulu, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara.

2. Mutu Siswa

Oleh karena ketersediaan data maka hanya terdapat tiga jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui mutu siswa, yaitu AL, AU, dan APS. AU dan APS dilakukan konversi menggunakan standar yang terdapat pada Tabel 3.3, sedangkan AL tidak dilakukan konversi, sehingga diperoleh satuan yang sama untuk menghasilkan nilai indikator. Nilai ketiga indikator tersebut kemudian dijumlahkan dan dibagi 3, sehingga menghasilkan mutu siswa. Nilai maksimal 100, artinya makin mendekati 100 disebut siswa makin bermutu.

Tabel 4.38
Data, Indikator, dan Nilai Mutu Siswa
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2017/2018

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A. Data						
1	Lulusan	4.115.553	3.233.509	2.707.954		
2	Siswa tk tertinggi th lalu*)	4.124.688	3.265.428	2.785.475		
3	Mengulang	370.116	28.470	23.025		
4	Putus Sekolah	32.127	51.190	104.511		
5	Siswa tahun lalu	25.618.078	10.145.416	9.342.455		
B. Indikator						
1	AL (%)	99,78	99,02	97,22		
2	AU (%)	1,44	0,28	0,25		
3	APS (%)	0,13	0,50	1,12		
C. Nilai Indikator						
1	AL (%)	99,68	99,01	96,38	98,36	PARIPURNA
2	AU (%)	98,08	99,58	99,62	99,09	PARIPURNA
3	APS (%)	99,85	99,51	98,96	99,44	PARIPURNA
	Nilai Mutu Siswa	99,20	99,37	98,32	98,96	PARIPURNA
	Jenis Mutu Siswa	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	

Tabel 4.38 menunjukkan data, indikator, dan nilai mutu dari siswa menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat lulusan SD sebesar 4.115.553, SMP sebesar 3.233.509, dan SM sebesar 2.707.954. Bila dibandingkan dengan siswa tingkat tertinggi tahun lalu maka AL terbesar terjadi pada SD sebesar 99,78% dan terkecil pada SM sebesar 97,22%.

Mengulang terbesar pada SD sebesar 370.116, SMP sebesar 28.470, dan SM sebesar 23.025. Sebaliknya, putus sekolah terbesar pada SM sebesar 104.511, SMP sebesar 51.190, dan SD sebesar 32.127. Bila dibandingkan dengan siswa tahun lalu maka AU terbesar pada SD sebesar 1,44% dan terkecil pada SM sebesar 0,25%. Sebaliknya, APS terbesar pada SM sebesar 1,12% dan terkecil pada SD sebesar 0,13%.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka rata-rata AL di tiga jenjang sebesar 98,36 termasuk kategori paripurna, AU sebesar 99,09 termasuk kategori paripurna, dan APS sebesar 99,44 termasuk kategori paripurna, sehingga nilai mutu siswa sebesar 98,32 juga termasuk kategori paripurna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua jenjang memiliki siswa yang bermutu.

a. SD

Tabel 4.39
Data dan Indikator Mutu Siswa SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data					Mutu Siswa		
		Lulusan	Siswa tk tertinggi	Mengulang	Putus Sek	Siswa th lalu	AL	AU	APS
1	DKI Jakarta	133.562	133.684	4.386	793	815.318	99,91	0,54	0,10
2	Jawa Barat	740.555	741.528	17.663	3.596	4.516.574	99,87	0,39	0,08
3	Banten	188.965	189.191	9.524	926	1.198.472	99,88	0,79	0,08
4	Jawa Tengah	468.401	468.749	53.440	2.238	2.878.870	99,93	1,86	0,08
5	DI Yogyakarta	46.797	46.814	2.624	151	292.590	99,96	0,90	0,05
6	Jawa Timur	476.462	476.935	26.971	1.980	2.864.696	99,90	0,94	0,07
7	Aceh	73.282	73.407	5.246	594	483.896	99,83	1,08	0,12
8	Sumatera Utara	283.604	284.597	16.111	3.873	1.757.716	99,65	0,92	0,22
9	Sumatera Barat	102.572	102.680	21.137	649	648.211	99,89	3,26	0,10
10	Riau	123.627	123.958	12.320	1.357	799.928	99,73	1,54	0,17
11	Kepulauan Riau	34.329	34.377	2.724	245	224.643	99,86	1,21	0,11
12	Jambi	62.185	62.372	5.778	655	390.863	99,70	1,48	0,17
13	Sumatera Selatan	143.294	144.062	16.383	2.134	937.515	99,47	1,75	0,23
14	Bangka Belitung	24.118	24.172	4.657	207	158.669	99,78	2,94	0,13
15	Bengkulu	35.154	35.274	4.219	493	218.662	99,66	1,93	0,23
16	Lampung	133.021	133.371	11.407	1.212	846.401	99,74	1,35	0,14
17	Kalimantan Barat	92.626	92.894	25.684	1.041	601.076	99,71	4,27	0,17
18	Kalimantan Tengah	45.187	45.327	6.711	380	289.686	99,69	2,32	0,13
19	Kalimantan Selatan	59.899	59.991	9.364	464	381.950	99,85	2,45	0,12
20	Kalimantan Timur	63.233	63.343	6.063	432	413.209	99,83	1,47	0,10
21	Kalimantan Utara	11.975	12.018	1.620	129	79.089	99,64	2,05	0,16
22	Sulawesi Utara	42.961	43.009	2.634	145	250.976	99,89	1,05	0,06
23	Gorontalo	20.897	20.976	4.859	313	128.947	99,62	3,77	0,24
24	Sulawesi Tengah	58.801	59.039	7.301	574	355.151	99,60	2,06	0,16
25	Sulawesi Selatan	158.895	159.402	11.446	1.464	948.609	99,68	1,21	0,15
26	Sulawesi Barat	27.230	27.491	2.948	540	164.992	99,05	1,79	0,33
27	Sulawesi Tenggara	54.946	55.188	5.794	503	330.949	99,56	1,75	0,15
28	Maluku	37.187	37.330	4.919	235	228.846	99,62	2,15	0,10
29	Maluku Utara	25.568	25.703	2.781	209	155.628	99,47	1,79	0,13
30	Bali	66.241	66.270	1.985	177	402.553	99,96	0,49	0,04
31	Nusa Tenggara Barat	81.822	81.959	7.092	450	512.297	99,83	1,38	0,09
32	Nusa Tenggara Timur	123.865	124.177	32.087	1.181	799.332	99,75	4,01	0,15
33	Papua	54.891	55.916	16.431	2.521	408.762	98,17	4,02	0,62
34	Papua Barat	19.401	19.484	5.807	266	133.002	99,57	4,37	0,20
	Indonesia	4.115.553	4.124.688	370.116	32.127	25.618.078	99,78	1,44	0,13

Berdasarkan data SD maka dihasilkan analisis tiga indikator mutu siswa tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.39. Lulusan SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa

Barat sebesar 740.555 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 11.975. Namun, AL terbesar terjadi Provinsi Di Yogyakarta sebesar 99,96% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 98,17% dengan rata-rata nasional sebesar 99,78%. Hal ini berarti hanya 0,22% siswa tingkat VI yang tidak lulus SD.

Jumlah mengulang SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 53.440 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.620. Dengan membandingkan mengulang dengan siswa tahun lalu maka AU terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 4,37% dan terkecil terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 0,39% dengan rata-rata nasional sebesar 1,44%.

Jumlah putus sekolah SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 4.596 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 129. Dengan membandingkan putus sekolah dengan siswa tahun lalu maka APS SD terbesar terjadi di Provinsi Papua sebesar 0,62% dan terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 0,04% dengan rata-rata nasional sebesar 0,13%.

Tabel 4.40
Mutu Siswa SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Mutu Siswa			Rata-rata	Jenis
		AL	AU	APS		
		100	0	0		
1	DKI Jakarta	99,91	99,46	99,90	99,76	PARIPURNA
2	Jawa Barat	99,87	99,61	99,92	99,80	PARIPURNA
3	Banten	99,88	99,21	99,92	99,67	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	99,93	98,14	99,92	99,33	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	99,96	99,10	99,95	99,67	PARIPURNA
6	Jawa Timur	99,90	99,06	99,93	99,63	PARIPURNA
7	Aceh	99,83	98,92	99,88	99,54	PARIPURNA
8	Sumatera Utara	99,65	99,08	99,78	99,50	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	99,89	96,74	99,90	98,84	PARIPURNA
10	Riau	99,73	98,46	99,83	99,34	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	99,86	98,79	99,89	99,51	PARIPURNA
12	Jambi	99,70	98,52	99,83	99,35	PARIPURNA
13	Sumatera Selatan	99,47	98,25	99,77	99,16	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	99,78	97,06	99,87	98,90	PARIPURNA
15	Bengkulu	99,66	98,07	99,77	99,17	PARIPURNA
16	Lampung	99,74	98,65	99,86	99,42	PARIPURNA
17	Kalimantan Barat	99,71	95,73	99,83	98,42	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	99,69	97,68	99,87	99,08	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	99,85	97,55	99,88	99,09	PARIPURNA
20	Kalimantan Timur	99,83	98,53	99,90	99,42	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	99,64	97,95	99,84	99,14	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	99,89	98,95	99,94	99,59	PARIPURNA
23	Gorontalo	99,62	96,23	99,76	98,54	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	99,60	97,94	99,84	99,13	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	99,68	98,79	99,85	99,44	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	99,05	98,21	99,67	98,98	PARIPURNA
27	Sulawesi Tenggara	99,56	98,25	99,85	99,22	PARIPURNA
28	Maluku	99,62	97,85	99,90	99,12	PARIPURNA
29	Maluku Utara	99,47	98,21	99,87	99,18	PARIPURNA
30	Bali	99,96	99,51	99,96	99,81	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	99,83	98,62	99,91	99,45	PARIPURNA
32	Nusa Tenggara Timur	99,75	95,99	99,85	98,53	PARIPURNA
33	Papua	98,17	95,98	99,38	97,84	PARIPURNA
34	Papua Barat	99,57	95,63	99,80	98,34	PARIPURNA
	Indonesia	99,68	98,08	99,85	99,20	PARIPURNA
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu siswa SD yang terdapat pada Tabel 4.40. Nilai AL terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 99,96 dan terkecil sebesar 98,17 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 99,68 termasuk kategori paripurna. Nilai AU SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 99,61 dan terkecil sebesar 95,63 terjadi di Provinsi Papua Barat, sehingga nasional menjadi 98,08 termasuk kategori paripurna. Nilai APS SD terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 99,96 dan terkecil sebesar 99,38 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 99,85 termasuk kategori paripurna.

Dengan demikian, jumlah nilai mutu siswa SD menjadi 99,20 termasuk kategori paripurna. Hal ini berarti mutu siswa SD tercapai mendekati ideal 100. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata semua Provinsi termasuk kategori paripurna kecuali Provinsi Papua termasuk kategori utama. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 99,81, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 97,84.

b. SMP

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis tiga indikator mutu siswa tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.41. Lulusan SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 570.722 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9.491. Namun, AL terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 99,80% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 96,47% dengan rata-rata nasional sebesar 99,02%. Hal ini berarti 0,98% siswa tingkat IX yang tidak lulus SMP.

Jumlah mengulang SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 3.178 dan terkecil di Provinsi Bali sebesar 84. Dengan membandingkan mengulang dengan siswa tahun lalu maka AU terbesar terjadi di Provinsi Papua sebesar 1,48% dan terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 0,04% dengan rata-rata nasional sebesar 0,28%.

Jumlah putus sekolah SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 9.340 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 170. Dengan membandingkan putus sekolah dengan siswa tahun lalu maka APS terbesar terjadi di Provinsi Papua sebesar 1,27% dan terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 0,14% dengan rata-rata nasional sebesar 0,50%.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu siswa SMP yang terdapat pada Tabel 4.42. Nilai AL terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 99,80 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 96,47 dengan rata-rata nasional sebesar 99,01 termasuk kategori paripurna.

Nilai AU SMP terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 99,96 dan terkecil sebesar 98,52 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 99,58 termasuk kategori paripurna. Nilai APS SMP terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 99,86 dan terkecil sebesar 98,73 terjadi di Provinsi Papua, sehingga nasional menjadi 99,51 termasuk kategori paripurna.

Dengan demikian, jumlah nilai mutu dari siswa SMP menjadi 99,37 termasuk kategori paripurna. Hal ini berarti mutu siswa SMP tercapai mendekati 100% atau ideal. Bila dilihat tiap Provinsi ternyata semua Provinsi termasuk kategori paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 99,87 termasuk kategori paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 97,91 juga termasuk kategori paripurna.

Tabel 4.41
Data dan Indikator Mutu Siswa SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data					Mutu Siswa		
		Lulusan	Siswa tk tertinggi	Mengulang	Putus Sek	Siswa th lalu	AL	AU	APS
1	DKI Jakarta	120.654	121.647	1.425	1.757	369.313	99,18	0,39	0,48
2	Jawa Barat	570.722	576.517	2.260	9.340	1.801.954	98,99	0,13	0,52
3	Banten	137.055	138.690	796	2.682	429.092	98,82	0,19	0,63
4	Jawa Tengah	392.207	394.694	2.599	4.891	1.209.241	99,37	0,21	0,40
5	DI Yogyakarta	42.705	42.920	201	420	129.305	99,50	0,16	0,32
6	Jawa Timur	407.305	412.212	3.178	7.532	1.267.489	98,81	0,25	0,59
7	Aceh	64.033	64.628	864	883	195.454	99,08	0,44	0,45
8	Sumatera Utara	210.477	212.965	1.241	3.645	665.139	98,83	0,19	0,55
9	Sumatera Barat	67.620	67.927	1.735	883	216.200	99,55	0,80	0,41
10	Riau	81.551	82.123	610	1.149	260.187	99,30	0,23	0,44
11	Kepulauan Riau	25.870	25.994	404	232	83.518	99,52	0,48	0,28
12	Jambi	40.434	40.782	454	609	126.563	99,15	0,36	0,48
13	Sumatera Selatan	111.344	112.516	955	1.855	355.251	98,96	0,27	0,52
14	Bangka Belitung	17.951	18.113	326	394	59.380	99,11	0,55	0,66
15	Bengkulu	27.932	28.159	303	363	88.808	99,19	0,34	0,41
16	Lampung	102.144	103.189	422	1.786	318.457	98,99	0,13	0,56
17	Kalimantan Barat	72.433	73.021	1.257	1.201	236.189	99,19	0,53	0,51
18	Kalimantan Tengah	33.805	34.118	346	548	108.204	99,08	0,32	0,51
19	Kalimantan Selatan	38.358	38.604	228	451	121.265	99,36	0,19	0,37
20	Kalimantan Timur	49.021	49.366	576	591	155.671	99,30	0,37	0,38
21	Kalimantan Utara	9.491	9.573	211	170	30.889	99,14	0,68	0,55
22	Sulawesi Utara	39.252	39.372	472	191	121.863	99,70	0,39	0,16
23	Gorontalo	15.292	15.412	424	215	50.644	99,22	0,84	0,42
24	Sulawesi Tengah	41.143	41.464	558	504	131.342	99,23	0,42	0,38
25	Sulawesi Selatan	127.560	128.811	1.316	1.761	390.852	99,03	0,34	0,45
26	Sulawesi Barat	20.277	20.634	246	386	63.243	98,27	0,39	0,61
27	Sulawesi Tenggara	40.906	41.471	645	538	128.703	98,64	0,50	0,42
28	Maluku	31.628	31.897	162	358	96.510	99,16	0,17	0,37
29	Maluku Utara	19.540	19.762	218	208	59.251	98,88	0,37	0,35
30	Bali	64.674	64.804	84	270	196.845	99,80	0,04	0,14
31	Nusa Tenggara Barat	58.463	59.278	620	1.054	181.961	98,63	0,34	0,58
32	Nusa Tenggara Timur	101.017	102.537	884	2.402	329.792	98,52	0,27	0,73
33	Papua	36.480	37.815	1.779	1.532	120.260	96,47	1,48	1,27
34	Papua Barat	14.165	14.413	671	389	46.581	98,28	1,44	0,84
	Indonesia	3.233.509	3.265.428	28.470	51.190	10.145.416	99,02	0,28	0,50

Tabel 4.42
Mutu Siswa SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Mutu Siswa				
		AL	AU	APS	Rata-rata	Jenis
		100	0	0		
1	DKI Jakarta	99,18	99,61	99,52	99,44	PARIPURNA
2	Jawa Barat	98,99	99,87	99,48	99,45	PARIPURNA
3	Banten	98,82	99,81	99,37	99,34	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	99,37	99,79	99,60	99,58	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	99,50	99,84	99,68	99,67	PARIPURNA
6	Jawa Timur	98,81	99,75	99,41	99,32	PARIPURNA
7	Aceh	99,08	99,56	99,55	99,40	PARIPURNA
8	Sumatera Utara	98,83	99,81	99,45	99,37	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	99,55	99,20	99,59	99,45	PARIPURNA
10	Riau	99,30	99,77	99,56	99,54	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	99,52	99,52	99,72	99,59	PARIPURNA
12	Jambi	99,15	99,64	99,52	99,44	PARIPURNA
13	Sumatera Selatan	98,96	99,73	99,48	99,39	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	99,11	99,45	99,34	99,30	PARIPURNA
15	Bengkulu	99,19	99,66	99,59	99,48	PARIPURNA
16	Lampung	98,99	99,87	99,44	99,43	PARIPURNA
17	Kalimantan Barat	99,19	99,47	99,49	99,38	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	99,08	99,68	99,49	99,42	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	99,36	99,81	99,63	99,60	PARIPURNA
20	Kalimantan Timur	99,30	99,63	99,62	99,52	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	99,14	99,32	99,45	99,30	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	99,70	99,61	99,84	99,72	PARIPURNA
23	Gorontalo	99,22	99,16	99,58	99,32	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	99,23	99,58	99,62	99,47	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	99,03	99,66	99,55	99,41	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	98,27	99,61	99,39	99,09	PARIPURNA
27	Sulawesi Tenggara	98,64	99,50	99,58	99,24	PARIPURNA
28	Maluku	99,16	99,83	99,63	99,54	PARIPURNA
29	Maluku Utara	98,88	99,63	99,65	99,39	PARIPURNA
30	Bali	99,80	99,96	99,86	99,87	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	98,63	99,66	99,42	99,24	PARIPURNA
32	Nusa Tenggara Timur	98,52	99,73	99,27	99,17	PARIPURNA
33	Papua	96,47	98,52	98,73	97,91	PARIPURNA
34	Papua Barat	98,28	98,56	99,16	98,67	PARIPURNA
	Indonesia	99,01	99,58	99,51	99,37	PARIPURNA
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	

c. SM

Berdasarkan data SMA dan SMK yang menjadi SM maka dihasilkan analisis tiga indikator mutu siswa tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.43. Lulusan SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 456.958 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6.935. Namun, AL terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 99,05% dan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 91,80% dengan rata-rata nasional sebesar 97,22%. Hal ini berarti hanya 2,78% siswa tingkat XII yang tidak lulus SM.

Tabel 4.43
Data dan Indikator Mutu Siswa SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data				Mutu Siswa			
		Lulusan	Siswa tk tertinggi	Mengulang	Putus Sek	Siswa th lalu	AL	AU	APS
1	DKI Jakarta	114.248	115.963	605	3.941	378.607	98,52	0,16	1,04
2	Jawa Barat	456.958	466.990	2.168	22.273	1.634.916	97,85	0,13	1,36
3	Banten	121.127	123.813	623	4.858	416.139	97,83	0,15	1,17
4	Jawa Tengah	341.967	346.985	1.508	11.249	1.148.891	98,55	0,13	0,98
5	DI Yogyakarta	41.589	42.317	322	1.234	139.277	98,28	0,23	0,89
6	Jawa Timur	353.788	365.207	3.572	15.565	1.231.243	96,87	0,29	1,26
7	Aceh	54.450	56.709	1.203	2.003	187.987	96,02	0,64	1,07
8	Sumatera Utara	194.321	200.347	1.095	8.477	653.887	96,99	0,17	1,30
9	Sumatera Barat	64.718	67.228	1.078	1.953	224.952	96,27	0,48	0,87
10	Riau	68.390	69.763	537	1.743	233.206	98,03	0,23	0,75
11	Kepulauan Riau	18.963	19.403	268	388	65.902	97,73	0,41	0,59
12	Jambi	35.505	36.833	405	1.075	120.690	96,39	0,34	0,89
13	Sumatera Selatan	88.403	91.097	737	3.343	305.977	97,04	0,24	1,09
14	Bangka Belitung	12.974	13.718	159	578	47.518	94,58	0,33	1,22
15	Bengkulu	20.659	22.034	151	1.037	74.401	93,76	0,20	1,39
16	Lampung	80.606	82.727	330	3.237	280.833	97,44	0,12	1,15
17	Kalimantan Barat	47.372	49.574	708	1.873	174.933	95,56	0,40	1,07
18	Kalimantan Tengah	23.721	24.774	243	796	84.892	95,75	0,29	0,94
19	Kalimantan Selatan	32.888	33.923	272	887	116.058	96,95	0,23	0,76
20	Kalimantan Timur	40.035	41.804	581	1.487	141.083	95,77	0,41	1,05
21	Kalimantan Utara	6.935	7.286	155	229	24.762	95,18	0,63	0,92
22	Sulawesi Utara	31.310	32.889	718	977	105.611	95,20	0,68	0,93
23	Gorontalo	12.743	13.483	346	425	45.861	94,51	0,75	0,93
24	Sulawesi Tengah	31.859	32.732	342	834	110.792	97,33	0,31	0,75
25	Sulawesi Selatan	108.746	112.374	735	3.520	361.223	96,77	0,20	0,97
26	Sulawesi Barat	15.488	16.165	204	485	52.314	95,81	0,39	0,93
27	Sulawesi Tenggara	36.201	37.394	563	925	118.855	96,81	0,47	0,78
28	Maluku	27.274	27.742	192	512	89.111	98,31	0,22	0,57
29	Maluku Utara	15.954	16.868	81	1.141	52.430	94,58	0,15	2,18
30	Bali	53.546	54.057	68	670	176.269	99,05	0,04	0,38
31	Nusa Tenggara Barat	50.213	53.054	804	2.214	173.010	94,65	0,46	1,28
32	Nusa Tenggara Timur	69.548	72.463	493	3.162	245.616	95,98	0,20	1,29
33	Papua	24.920	26.283	1.148	866	87.130	94,81	1,32	0,99
34	Papua Barat	10.535	11.476	611	554	38.079	91,80	1,60	1,45
	Indonesia	2.707.954	2.785.475	23.025	104.511	9.342.455	97,22	0,25	1,12

Jumlah mengulang SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 3.572 dan terkecil di Bali sebesar 68. Dengan membandingkan mengulang dengan siswa tahun lalu maka AU terbesar terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 1,60% dan terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 0,04% dengan rata-rata nasional sebesar 0,25%.

Jumlah putus sekolah SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 22.273 dan terkecil di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 229. Dengan membandingkan putus sekolah dengan siswa tahun lalu maka APS terbesar terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara masing-masing sebesar 2,18% dan terkecil terjadi di Provinsi Bali sebesar 0,38% dengan rata-rata nasional sebesar 1,12%.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu siswa SM yang terdapat pada Tabel 4.44. Nilai AL terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 99,05 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 91,80 dengan rata-rata nasional sebesar 96,38 termasuk kategori paripurna.

Tabel 4.44
Mutu Siswa SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Mutu Siswa				
		AL	AU	APS	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	98,52	99,84	98,96	99,11	PARIPURNA
2	Jawa Barat	97,85	99,87	98,64	98,79	PARIPURNA
3	Banten	97,83	99,85	98,83	98,84	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	98,55	99,87	99,02	99,15	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	98,28	99,77	99,11	99,05	PARIPURNA
6	Jawa Timur	96,87	99,71	98,74	98,44	PARIPURNA
7	Aceh	96,02	99,36	98,93	98,10	PARIPURNA
8	Sumatera Utara	96,99	99,83	98,70	98,51	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	96,27	99,52	99,13	98,31	PARIPURNA
10	Riau	98,03	99,77	99,25	99,02	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	97,73	99,59	99,41	98,91	PARIPURNA
12	Jambi	96,39	99,66	99,11	98,39	PARIPURNA
13	Sumatera Selatan	97,04	99,76	98,91	98,57	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	94,58	99,67	98,78	97,68	PARIPURNA
15	Bengkulu	93,76	99,80	98,61	97,39	PARIPURNA
16	Lampung	97,44	99,88	98,85	98,72	PARIPURNA
17	Kalimantan Barat	95,56	99,60	98,93	98,03	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	95,75	99,71	99,06	98,18	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	96,95	99,77	99,24	98,65	PARIPURNA
20	Kalimantan Timur	95,77	99,59	98,95	98,10	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	95,18	99,37	99,08	97,88	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	95,20	99,32	99,07	97,86	PARIPURNA
23	Gorontalo	94,51	99,25	99,07	97,61	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	97,33	99,69	99,25	98,76	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	96,77	99,80	99,03	98,53	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	95,81	99,61	99,07	98,16	PARIPURNA
27	Sulawesi Tenggara	96,81	99,53	99,22	98,52	PARIPURNA
28	Maluku	98,31	99,78	99,43	99,17	PARIPURNA
29	Maluku Utara	94,58	99,85	97,82	97,42	PARIPURNA
30	Bali	99,05	99,96	99,62	99,55	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	94,65	99,54	98,72	97,63	PARIPURNA
32	Nusa Tenggara Timur	95,98	99,80	98,71	98,16	PARIPURNA
33	Papua	94,81	98,68	99,01	97,50	PARIPURNA
34	Papua Barat	91,80	98,40	98,55	96,25	PARIPURNA
	Indonesia	96,38	99,62	98,96	98,32	PARIPURNA
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	

Nilai AU SM terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 99,96 dan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 98,40 sehingga nasional menjadi 99,62 termasuk kategori paripurna. Nilai APS SM terbesar terjadi di Provinsi bali sebesar 99,62 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 97,82, sehingga nasional menjadi 98,96 termasuk kategori paripurna.

Dengan demikian, jumlah nilai mutu siswa SM menjadi 98,32 termasuk kategori paripurna. Hal ini berarti mutu siswa SM tercapai 98% dari 100% atau mendekati ideal. Bila dilihat ternyata semua Provinsi termasuk kategori paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 99,55, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 96,25.

d. Semua Jenjang

Berdasarkan tiga indikator mutu siswa maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.45. Bila dilihat secara nasional maka semua jenjang memiliki nilai mutu siswa termasuk kategori paripurna dengan nilai terbesar pada SMP sebesar 99,37 dan terkecil pada SM sebesar 98,32. Dengan demikian, mutu siswa semua jenjang sebesar 98,96 termasuk paripurna.

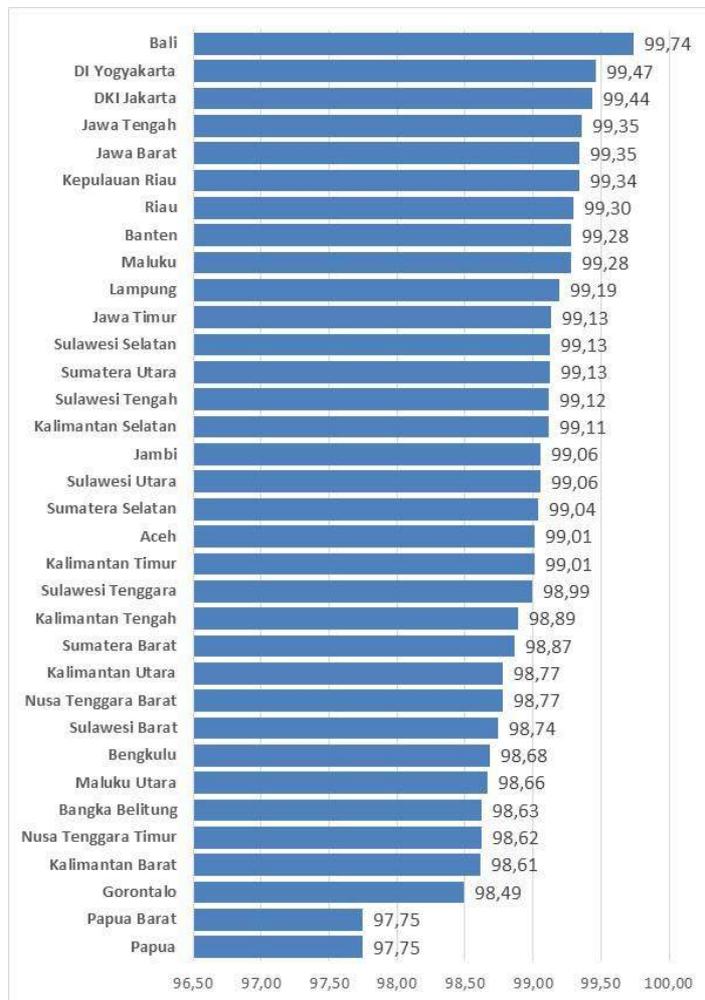
Tabel 4.45
Mutu Siswa Menurut Jenjang Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	99,76	99,44	99,11	99,44	PARIPURNA
2	Jawa Barat	99,80	99,45	98,79	99,35	PARIPURNA
3	Banten	99,67	99,34	98,84	99,28	PARIPURNA
4	Jawa Tengah	99,33	99,58	99,15	99,35	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	99,67	99,67	99,05	99,47	PARIPURNA
6	Jawa Timur	99,63	99,32	98,44	99,13	PARIPURNA
7	Aceh	99,54	99,40	98,10	99,01	PARIPURNA
8	Sumatera Utara	99,50	99,37	98,51	99,13	PARIPURNA
9	Sumatera Barat	98,84	99,45	98,31	98,87	PARIPURNA
10	Riau	99,34	99,54	99,02	99,30	PARIPURNA
11	Kepulauan Riau	99,51	99,59	98,91	99,34	PARIPURNA
12	Jambi	99,35	99,44	98,39	99,06	PARIPURNA
13	Sumatera Selatan	99,16	99,39	98,57	99,04	PARIPURNA
14	Bangka Belitung	98,90	99,30	97,68	98,63	PARIPURNA
15	Bengkulu	99,17	99,48	97,39	98,68	PARIPURNA
16	Lampung	99,42	99,43	98,72	99,19	PARIPURNA
17	Kalimantan Barat	98,42	99,38	98,03	98,61	PARIPURNA
18	Kalimantan Tengah	99,08	99,42	98,18	98,89	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	99,09	99,60	98,65	99,11	PARIPURNA
20	Kalimantan Timur	99,42	99,52	98,10	99,01	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	99,14	99,30	97,88	98,77	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	99,59	99,72	97,86	99,06	PARIPURNA
23	Gorontalo	98,54	99,32	97,61	98,49	PARIPURNA
24	Sulawesi Tengah	99,13	99,47	98,76	99,12	PARIPURNA
25	Sulawesi Selatan	99,44	99,41	98,53	99,13	PARIPURNA
26	Sulawesi Barat	98,98	99,09	98,16	98,74	PARIPURNA
27	Sulawesi Tenggara	99,22	99,24	98,52	98,99	PARIPURNA
28	Maluku	99,12	99,54	99,17	99,28	PARIPURNA
29	Maluku Utara	99,18	99,39	97,42	98,66	PARIPURNA
30	Bali	99,81	99,87	99,55	99,74	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	99,45	99,24	97,63	98,77	PARIPURNA
32	Nusa Tenggara Timur	98,53	99,17	98,16	98,62	PARIPURNA
33	Papua	97,84	97,91	97,50	97,75	PARIPURNA
34	Papua Barat	98,34	98,67	96,25	97,75	PARIPURNA
	Indonesia	99,20	99,37	98,32	98,96	PARIPURNA
	Jenis	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	PARIPURNA	

Bila dilihat mutu siswa tiap Provinsi maka untuk SD terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 99,81, untuk SMP pada Provinsi Bali sebesar 99,87, dan untuk SM pada Provinsi Bali sebesar 99,55. Sebaliknya, mutu siswa terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Papua sebesar 97,84, untuk SMP pada Provinsi Papua sebesar 97,91, dan untuk SM pada Provinsi Papua Barat sebesar 96,25.

Mutu siswa semua jenjang terdapat pada Grafik 4.7 di mana terlihat bahwa semua Provinsi termasuk kategori paripurna, namun lima Provinsi terbawah adalah Papua,

Papua Barat, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya, lima Provinsi teratas adalah Bali, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa tengah, dan Jawa Barat.



Grafik 4.7
Mutu Siswa Semua Jenjang Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

3. Mutu Prasarana

Berdasarkan ketersediaan data yang ada maka terdapat lima jenis indikator yang dianggap paling penting untuk mengetahui mutu prasarana, yaitu %RKB, %Perpusb, %Lab, %RUKS, dan %TSb. Rata-rata nilai kelima indikator tersebut menunjukkan mutu prasarana. Nilai maksimal 100, artinya nilai makin mendekati 100 disebut makin bermutu.

Tabel 4.46 menunjukkan data, indikator, dan nilai mutu prasarana menurut jenjang pendidikan. Berdasarkan data maka terdapat ruang kelas milik SD sebesar

1.072.136, SMP sebesar 358.361, dan SM sebesar 323.376. Bila dibandingkan dengan ruang kelas milik baik maka %Rkb terbesar terjadi pada SM sebesar 93,25% dan terkecil pada SD sebesar 82,39%. Perpustakaan SD sebesar 94.550, SMP sebesar 30.030, dan SM sebesar 19.713. Bila dibandingkan dengan perpustakaan baik maka %Perpusb terbesar terjadi pada SM sebesar 91,38% dan terkecil pada SMP sebesar 81,25%. Laboratorium SD sebesar 17.772, SMP sebesar 26.426, dan SM sebesar 49.070. Bila dibandingkan dengan laboratorium baik maka %Labb terbesar terjadi pada SM sebesar 92,62% dan terkecil pada SMP sebesar 79,98%. RUKS SD sebesar 44.894, SMP sebesar 15.169, dan SM sebesar 9.891. Bila dibandingkan dengan RUKS baik maka %RUKSb terbesar terjadi pada SM sebesar 92,95% dan terkecil pada SD sebesar 83,94%. Toilet siswa SD sebesar 215.075, SMP sebesar 71.948, dan SM sebesar 50.307. Bila dibandingkan dengan toilet siswa baik maka %TSb terbesar terjadi pada SM sebesar 90,93% dan terkecil pada SD sebesar 76,38%.

Tabel 4.46
Data, Indikator, dan Nilai Mutu Prasarana
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2017/2018

No.	Jenis Indikator	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
A. Data						
1	Ruang kelas milik	1.072.136	358.361	323.376		
2	Ruang kelas baik	883.316	300.373	301.532		
3	Perpustakaan	94.550	30.030	19.713		
4	Perpustakaan baik	82.077	24.400	18.013		
5	Laboratorium	17.772	26.426	49.070		
6	Laboratorium baik	16.310	21.135	45.447		
7	Ruang UKS	44.894	15.169	9.891		
8	Ruang UKS baik	37.684	12.986	9.194		
9	Toilet Siswa	215.075	71.948	50.307		
10	Toilet Siswa Baik	164.279	56.680	45.745		
B. Indikator						
1	%Rkb	82,39	83,82	93,25		
2	%Perpusb	86,81	81,25	91,38		
3	%Labb	91,77	79,98	92,62		
4	%RUKSb	83,94	85,61	92,95		
5	%TSb	76,38	78,78	90,93		
C. Nilai Indikator						
1	%Rkb	82,03	82,95	92,93	85,97	MADYA
2	%Perpusb	86,38	80,63	91,54	86,19	MADYA
3	%Labb	90,30	78,35	91,91	86,86	MADYA
4	%RUKSb	84,71	82,96	92,72	86,80	MADYA
5	%TSb	77,01	77,37	90,38	81,59	PRATAMA
	Nilai Mutu Prasarana	84,09	80,45	91,64	85,39	MADYA
	Jenis Mutu Prasarana	PRATAMA	PRATAMA	UTAMA	MADYA	

Berdasarkan standar pada Tabel 3.3 maka nilai mutu %Rkb terbaik pada SM sebesar 92,93 atau termasuk kategori utama dan terkecil pada SD sebesar 82,03 termasuk kategori pratama, sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 85,97 termasuk kategori madya. %Perpusb terbaik pada SM sebesar 91,54 termasuk kategori utama dan terkecil pada SMP sebesar 80,63 termasuk pratama sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 86,19 termasuk kategori madya. %Labb terbaik pada SM sebesar 91,91 termasuk kategori utama dan terkecil pada SMP sebesar 78,35 termasuk pratama sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 86,86 termasuk kategori madya. %RUKSb terbaik pada SM sebesar 92,72 termasuk kategori utama dan terkecil pada SMP sebesar 82,96 termasuk pratama sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 86,80

termasuk kategori madya. %TSb terbaik pada SM sebesar 90,38 termasuk kategori utama dan terkecil pada SD sebesar 77,01 termasuk kurang sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 81,59 termasuk kategori pratama. Dengan demikian, nilai mutu prasarana terbesar adalah SM sebesar 91,64 termasuk kategori utama dan terkecil pada SMP sebesar 80,45 termasuk pratama, sedangkan SD sebesar 84,09 termasuk pratama, sehingga rata-rata tiga jenjang menjadi 85,39 termasuk madya.

a. SD

Berdasarkan data SD yang terdapat pada Tabel 4.47 maka dihasilkan analisis indikator mutu prasarana tiap Provinsi pada Tabel 4.48. Ruang kelas SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 141.721 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 3.516. Ruang kelas baik terbesar pada Provinsi Jawa Timur sebesar 113.921 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 2.982. Namun, %Rkb terbesar terjadi Provinsi DI Yogyakarta sebesar 94,38% dan terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 67,89% dengan rata-rata nasional sebesar 82,39%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 17,61% ruang kelas.

Tabel 4.47
Data Mutu Prasarana SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data									
		Ruang Kelas	Ruang Kelas Baik	Perpustakaan	Perpustakaan Baik	Laboratorium	Laboratorium Baik	Ruang UKS	RUKS Baik	Toilet Siswa	Toilet Baik
1	DKI Jakarta	27.973	26.133	1.899	1.753	2.094	1.996	1.683	1.568	4.607	4.247
2	Jawa Barat	141.721	113.646	10.316	8.737	2.364	2.183	4.882	3.986	30.549	22.002
3	Banten	37.282	32.380	2.433	2.169	891	828	1.120	1.006	6.600	5.605
4	Jawa Tengah	128.968	110.441	13.213	11.846	3.288	2.886	8.490	6.941	33.511	25.799
5	DI Yogyakarta	13.941	13.158	1.628	1.547	1.081	1.040	1.508	1.413	3.958	3.648
6	Jawa Timur	135.735	113.921	12.054	10.409	3.743	3.381	7.610	6.196	28.152	21.482
7	Aceh	24.465	19.658	2.734	2.282	131	125	862	712	4.262	3.032
8	Sumatera Utara	71.859	61.306	5.497	4.953	612	592	1.371	1.225	12.373	9.717
9	Sumatera Barat	30.185	26.442	2.800	2.540	169	160	1.283	1.108	6.190	4.998
10	Riau	31.343	26.645	2.050	1.808	500	462	1.082	944	5.645	4.644
11	Kepulauan Riau	7.981	7.262	664	594	185	180	440	406	1.715	1.515
12	Jambi	17.876	13.684	1.624	1.301	96	92	708	557	3.326	2.281
13	Sumatera Selatan	34.933	29.133	3.039	2.709	264	247	1.257	1.095	7.348	5.734
14	Bangka Belitung	6.677	6.036	795	746	134	128	692	667	1.967	1.700
15	Bengkulu	10.496	8.464	1.052	886	68	60	387	323	1.757	1.314
16	Lampung	34.975	26.157	2.884	2.412	284	255	1.210	956	6.373	4.481
17	Kalimantan Barat	28.958	21.892	2.872	2.406	181	165	950	762	7.006	4.949
18	Kalimantan Tengah	17.271	14.505	1.561	1.379	84	84	654	567	3.103	2.492
19	Kalimantan Selatan	20.834	18.103	1.990	1.821	217	206	1.010	911	4.123	3.468
20	Kalimantan Timur	16.108	14.680	1.183	1.054	270	265	839	767	3.384	2.995
21	Kalimantan Utara	3.516	2.982	274	239	30	29	163	146	677	552
22	Sulawesi Utara	14.527	11.900	1.464	1.276	64	56	502	432	2.904	2.133
23	Gorontalo	6.444	5.410	792	706	40	36	367	321	1.288	1.029
24	Sulawesi Tengah	18.975	14.465	1.815	1.533	49	36	465	368	3.023	2.002
25	Sulawesi Selatan	44.348	35.313	4.941	4.208	208	187	1.609	1.273	8.543	6.088
26	Sulawesi Barat	8.882	6.146	794	630	19	19	193	146	1.036	695
27	Sulawesi Tenggara	16.029	11.576	1.652	1.320	51	40	504	394	2.373	1.595
28	Maluku	11.364	9.162	1.034	852	51	38	251	201	1.466	1.060
29	Maluku Utara	8.085	5.799	748	575	12	10	69	58	917	662
30	Bali	17.191	16.115	1.940	1.862	248	242	907	840	4.160	3.738
31	Nusa Tenggara Barat	21.503	16.862	2.303	1.980	89	73	751	613	4.239	3.059
32	Nusa Tenggara Timur	38.550	26.171	3.384	2.624	107	85	877	621	5.889	3.661
33	Papua	16.553	12.914	739	615	106	95	109	85	1.663	1.215
34	Papua Barat	6.588	4.855	382	305	42	29	89	76	948	687
	Indonesia	1.072.136	883.316	94.550	82.077	17.772	16.310	44.894	37.684	215.075	164.279

Perpustakaan SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 13.213 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 274. Perpustakaan baik terbesar pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 11.486 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 239. Namun, %Perpusb terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 95,98% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 76,87% dengan rata-rata nasional sebesar 86,81%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 13,19% perpustakaan milik.

Tabel 4.48
Indikator Mutu Prasarana SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Mutu 3.3				
		%RKb	%Perpusb	%Labb	%RUKSb	%TSb
1	DKI Jakarta	93,42	92,31	95,32	93,17	92,19
2	Jawa Barat	80,19	84,69	92,34	81,65	72,02
3	Banten	86,85	89,15	92,93	89,82	84,92
4	Jawa Tengah	85,63	89,65	87,77	81,76	76,99
5	DI Yogyakarta	94,38	95,02	96,21	93,70	92,17
6	Jawa Timur	83,93	86,35	90,33	81,42	76,31
7	Aceh	80,35	83,47	95,42	82,60	71,14
8	Sumatera Utara	85,31	90,10	96,73	89,35	78,53
9	Sumatera Barat	87,60	90,71	94,67	86,36	80,74
10	Riau	85,01	88,20	92,40	87,25	82,27
11	Kepulauan Riau	90,99	89,46	97,30	92,27	88,34
12	Jambi	76,55	80,11	95,83	78,67	68,58
13	Sumatera Selatan	83,40	89,14	93,56	87,11	78,03
14	Bangka Belitung	90,40	93,84	95,52	96,39	86,43
15	Bengkulu	80,64	84,22	88,24	83,46	74,79
16	Lampung	74,79	83,63	89,79	79,01	70,31
17	Kalimantan Barat	75,60	83,77	91,16	80,21	70,64
18	Kalimantan Tengah	83,98	88,34	100,00	86,70	80,31
19	Kalimantan Selatan	86,89	91,51	94,93	90,20	84,11
20	Kalimantan Timur	91,13	89,10	98,15	91,42	88,50
21	Kalimantan Utara	84,81	87,23	96,67	89,57	81,54
22	Sulawesi Utara	81,92	87,16	87,50	86,06	73,45
23	Gorontalo	83,95	89,14	90,00	87,47	79,89
24	Sulawesi Tengah	76,23	84,46	73,47	79,14	66,23
25	Sulawesi Selatan	79,63	85,16	89,90	79,12	71,26
26	Sulawesi Barat	69,20	79,35	100,00	75,65	67,08
27	Sulawesi Tenggara	72,22	79,90	78,43	78,17	67,21
28	Maluku	80,62	82,40	74,51	80,08	72,31
29	Maluku Utara	71,73	76,87	83,33	84,06	72,19
30	Bali	93,74	95,98	97,58	92,61	89,86
31	Nusa Tenggara Barat	78,42	85,97	82,02	81,62	72,16
32	Nusa Tenggara Timur	67,89	77,54	79,44	70,81	62,17
33	Papua	78,02	83,22	89,62	77,98	73,06
34	Papua Barat	73,69	79,84	69,05	85,39	72,47
	Indonesia	82,39	86,81	91,77	83,94	76,38

Laboratorium SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 3.743 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara masing-masing sebesar 12. Laboratorium baik terbesar juga pada Provinsi Jawa Timur sebesar 3.381 dan terkecil juga pada Provinsi Maluku Utara sebesar 10. Namun, %Perpusb yang sudah ideal 100% terdapat di dua Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat dan terkecil terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 69,05% dengan rata-rata nasional sebesar 91,77%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 8,23% laboratorium SD.

RUKS SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 8.490 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 69. RUKS baik terbesar pada juga di Provinsi Jawa Tengah sebesar 6.941 dan terkecil juga pada Provinsi Maluku Utara sebesar 58. Namun, %RUKSb terbesar terjadi Provinsi Bangka Belitung sebesar 96,39% dan terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 70,81% dengan rata-rata nasional sebesar 83,94%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 16,06% RUKS milik.

Tabel 4.49
Mutu Prasarana SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Mutu Prasarana					Rata-rata	Jenis
		%RKB	%Perpusb	%Labb	%RUKSb	%TSb		
1	DKI Jakarta	93,42	92,31	95,32	93,17	92,19	93,28	UTAMA
2	Jawa Barat	80,19	84,69	92,34	81,65	72,02	82,18	PRATAMA
3	Banten	86,85	89,15	92,93	89,82	84,92	88,74	MADYA
4	Jawa Tengah	85,63	89,65	87,77	81,76	76,99	84,36	PRATAMA
5	DI Yogyakarta	94,38	95,02	96,21	93,70	92,17	94,30	UTAMA
6	Jawa Timur	83,93	86,35	90,33	81,42	76,31	83,67	PRATAMA
7	Aceh	80,35	83,47	95,42	82,60	71,14	82,60	PRATAMA
8	Sumatera Utara	85,31	90,10	96,73	89,35	78,53	88,01	MADYA
9	Sumatera Barat	87,60	90,71	94,67	86,36	80,74	88,02	MADYA
10	Riau	85,01	88,20	92,40	87,25	82,27	87,02	MADYA
11	Kepulauan Riau	90,99	89,46	97,30	92,27	88,34	91,67	UTAMA
12	Jambi	76,55	80,11	95,83	78,67	68,58	79,95	KURANG
13	Sumatera Selatan	83,40	89,14	93,56	87,11	78,03	86,25	MADYA
14	Bangka Belitung	90,40	93,84	95,52	96,39	86,43	92,51	UTAMA
15	Bengkulu	80,64	84,22	88,24	83,46	74,79	82,27	PRATAMA
16	Lampung	74,79	83,63	89,79	79,01	70,31	79,51	KURANG
17	Kalimantan Barat	75,60	83,77	91,16	80,21	70,64	80,28	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	83,98	88,34	100,00	86,70	80,31	87,87	MADYA
19	Kalimantan Selatan	86,89	91,51	94,93	90,20	84,11	89,53	MADYA
20	Kalimantan Timur	91,13	89,10	98,15	91,42	88,50	91,66	UTAMA
21	Kalimantan Utara	84,81	87,23	96,67	89,57	81,54	87,96	MADYA
22	Sulawesi Utara	81,92	87,16	87,50	86,06	73,45	83,22	PRATAMA
23	Gorontalo	83,95	89,14	90,00	87,47	79,89	86,09	MADYA
24	Sulawesi Tengah	76,23	84,46	73,47	79,14	66,23	75,91	KURANG
25	Sulawesi Selatan	79,63	85,16	89,90	79,12	71,26	81,02	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	69,20	79,35	100,00	75,65	67,08	78,25	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	72,22	79,90	78,43	78,17	67,21	75,19	KURANG
28	Maluku	80,62	82,40	74,51	80,08	72,31	77,98	KURANG
29	Maluku Utara	71,73	76,87	83,33	84,06	72,19	77,64	KURANG
30	Bali	93,74	95,98	97,58	92,61	89,86	93,95	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	78,42	85,97	82,02	81,62	72,16	80,04	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	67,89	77,54	79,44	70,81	62,17	71,57	KURANG
33	Papua	78,02	83,22	89,62	77,98	73,06	80,38	PRATAMA
34	Papua Barat	73,69	79,84	69,05	85,39	72,47	76,09	KURANG
	Indonesia	82,03	86,38	90,30	84,71	77,01	84,09	PRATAMA

Toilet siswa SD terbesar terjadi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 30.990 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 569. Toilet siswa baik terbesar juga pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 33.511 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 677. Namun, %TSb terbesar terjadi Provinsi DKI Jakarta sebesar 92,19% dan terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 62,17%

dengan rata-rata nasional sebesar 76,38%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 23,62% toilet siswa SD.

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu prasarana SD yang terdapat pada Tabel 4.49. Oleh karena semua standarnya 100 maka tidak ada indikator yang dilakukan konversi. Dengan demikian, rata-rata nilai prasarana SD terbesar terjadi Provinsi DI Yogyakarta sebesar 94,30 dan terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 71,57 dengan rata-rata nasional sebesar 84,09 termasuk kategori pratama.

b. SMP

Tabel 4.50
Data Mutu Prasarana SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data									
		Ruang Kelas	Ruang Kelas Baik	Perpustakaan	Perpustakaan Baik	Laboratorium	Laboratorium Baik	Ruang UKS	RUKS Baik	Toilet Siswa	ToiletS Baik
1	DKI Jakarta	12.127	11.445	1.003	934	998	940	730	685	2.199	2.061
2	Jawa Barat	54.690	45.945	3.688	3.068	3.172	2.609	1.957	1.713	9.835	8.034
3	Banten	13.911	12.210	1.035	899	877	757	468	426	2.564	2.134
4	Jawa Tengah	41.632	36.336	2.960	2.530	2.988	2.544	2.247	1.948	8.478	7.014
5	DI Yogyakarta	4.804	4.516	419	390	468	420	367	341	1.358	1.253
6	Jawa Timur	44.537	38.102	3.472	2.925	3.314	2.744	2.338	2.047	8.987	7.287
7	Aceh	9.074	6.805	920	667	831	599	228	181	1.697	1.093
8	Sumatera Utara	23.249	19.745	1.971	1.628	1.626	1.340	640	575	4.246	3.364
9	Sumatera Barat	8.624	7.313	672	545	659	517	307	254	1.487	1.171
10	Riau	9.601	8.112	811	664	729	596	471	410	2.081	1.695
11	Kepulauan Riau	2.898	2.595	257	230	229	198	164	156	707	634
12	Jambi	5.277	4.207	517	396	443	315	245	203	1.196	871
13	Sumatera Selatan	11.699	8.992	1.035	766	828	573	562	446	2.569	1.757
14	Bangka Belitung	2.094	1.911	189	171	189	167	94	84	590	531
15	Bengkulu	3.645	2.602	353	266	325	231	164	121	794	506
16	Lampung	11.774	9.274	1.053	774	921	660	568	453	2.373	1.676
17	Kalimantan Barat	8.751	6.894	956	746	692	530	513	399	2.439	1.781
18	Kalimantan Tengah	4.891	4.101	569	438	458	353	252	201	1.307	1.016
19	Kalimantan Selatan	5.002	4.506	560	494	518	445	303	274	1.145	929
20	Kalimantan Timur	5.532	5.080	498	451	396	367	348	310	1.255	1.155
21	Kalimantan Utara	1.093	957	128	111	88	71	59	51	314	267
22	Sulawesi Utara	4.950	3.987	613	474	492	350	167	128	1.098	744
23	Gorontalo	2.137	1.834	251	215	218	173	94	79	564	457
24	Sulawesi Tengah	5.664	4.460	565	407	455	298	211	150	1.275	832
25	Sulawesi Selatan	15.065	12.422	1.313	1.022	1.200	897	496	416	2.836	2.201
26	Sulawesi Barat	2.513	1.860	266	191	186	138	74	58	465	331
27	Sulawesi Tenggara	5.670	4.311	590	417	535	379	153	105	1.136	763
28	Maluku	4.106	3.183	393	295	299	211	78	63	665	489
29	Maluku Utara	2.548	1.805	271	189	196	125	35	24	488	315
30	Bali	5.451	5.081	372	341	360	324	237	223	894	813
31	Nusa Tenggara Barat	6.960	5.350	609	460	528	377	236	181	1.466	1.049
32	Nusa Tenggara Timur	12.080	9.198	1.116	819	742	517	255	195	2.351	1.644
33	Papua	4.416	3.645	403	321	307	250	57	47	701	540
34	Papua Barat	1.896	1.589	202	156	159	120	51	39	388	273
	Indonesia	358.361	300.373	30.030	24.400	26.426	21.135	15.169	12.986	71.948	56.680

Berdasarkan data SMP maka dihasilkan analisis indikator mutu prasarana tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.50. Ruang kelas SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 54.690 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 1.093. Ruang kelas baik SMP terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 45.945 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 957. Namun, %Rkb SMP terbesar terjadi Provinsi DKI Jakarta sebesar 94,38% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 70,84% dengan rata-rata nasional sebesar 83,82%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 16,18% ruang kelas milik.

Perpustakaan SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.688 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 120. Perpustakaan baik terbesar juga pada Provinsi Jawa Barat sebesar 2.964 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 128. Namun, %Perpusb terbesar terjadi Provinsi DKI Jakarta sebesar 93,12% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 69,74% dengan rata-rata nasional sebesar 81,25%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 18,75% perpustakaan milik.

Tabel 4.51
Indikator Mutu Prasarana SMP
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Mutu3.3				
		%RKb	%Perpusb	%Labb	%RUKSb	%TSb
1	DKI Jakarta	94,38	93,12	94,19	93,84	93,72
2	Jawa Barat	84,01	83,19	82,25	87,53	81,69
3	Banten	87,77	86,86	86,32	91,03	83,23
4	Jawa Tengah	87,28	85,47	85,14	86,69	82,73
5	DI Yogyakarta	94,00	93,08	89,74	92,92	92,27
6	Jawa Timur	85,55	84,25	82,80	87,55	81,08
7	Aceh	74,99	72,50	72,08	79,39	64,41
8	Sumatera Utara	84,93	82,60	82,41	89,84	79,23
9	Sumatera Barat	84,80	81,10	78,45	82,74	78,75
10	Riau	84,49	81,87	81,76	87,05	81,45
11	Kepulauan Riau	89,54	89,49	86,46	95,12	89,67
12	Jambi	79,72	76,60	71,11	82,86	72,83
13	Sumatera Selatan	76,86	74,01	69,20	79,36	68,39
14	Bangka Belitung	91,26	90,48	88,36	89,36	90,00
15	Bengkulu	71,39	75,35	71,08	73,78	63,73
16	Lampung	78,77	73,50	71,66	79,75	70,63
17	Kalimantan Barat	78,78	78,03	76,59	77,78	73,02
18	Kalimantan Tengah	83,85	76,98	77,07	79,76	77,74
19	Kalimantan Selatan	90,08	88,21	85,91	90,43	81,14
20	Kalimantan Timur	91,83	90,56	92,68	89,08	92,03
21	Kalimantan Utara	87,56	86,72	80,68	86,44	85,03
22	Sulawesi Utara	80,55	77,32	71,14	76,65	67,76
23	Gorontalo	85,82	85,66	79,36	84,04	81,03
24	Sulawesi Tengah	78,74	72,04	65,49	71,09	65,25
25	Sulawesi Selatan	82,46	77,84	74,75	83,87	77,61
26	Sulawesi Barat	74,02	71,80	74,19	78,38	71,18
27	Sulawesi Tenggara	76,03	70,68	70,84	68,63	67,17
28	Maluku	77,52	75,06	70,57	80,77	73,53
29	Maluku Utara	70,84	69,74	63,78	68,57	64,55
30	Bali	93,21	91,67	90,00	94,09	90,94
31	Nusa Tenggara Barat	76,87	75,53	71,40	76,69	71,56
32	Nusa Tenggara Timur	76,14	73,39	69,68	76,47	69,93
33	Papua	82,54	79,65	81,43	82,46	77,03
34	Papua Barat	83,81	77,23	75,47	76,47	70,36
	Indonesia	83,82	81,25	79,98	85,61	78,78

Laboratorium SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 3.314 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 88. Laboratorium baik terbesar juga pada Provinsi Jawa Timur sebesar 2.744 dan terkecil juga pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 71. Namun, %Labb terbesar terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 94,19% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 63,78% dengan rata-rata nasional sebesar 79,98%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 20,02% laboratorium SMP.

RUKS SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 2.338 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 35. RUKS baik terbesar pada juga di Provinsi Jawa Timur sebesar 2.047 dan terkecil juga pada Provinsi Maluku Utara sebesar 24. Namun, %RUKSb terbesar terjadi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 95,12% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 68,57% dengan rata-rata nasional sebesar 85,61%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 14,39% RUKS.

Toilet siswa SMP terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 9.835 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 314. Toilet siswa baik terbesar juga pada Provinsi Jawa Barat sebesar 8.034 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 267. Namun, %TSb terbesar terjadi Provinsi DKI Jakarta sebesar 93,72% dan terkecil terjadi di Provinsi Bengkulu sebesar 63,73% dengan rata-rata nasional sebesar 78,78%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 21,22% toilet siswa SMP.

Tabel 4.52
Mutu Prasarana SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Mutu Prasarana					Rata-rata	Jenis
		%RKB	%Perpusb	%Labbb	%RUKSb	%TSb		
		100	100	100	100	100		
1	DKI Jakarta	94,38	93,12	94,19	93,84	93,72	93,85	UTAMA
2	Jawa Barat	84,01	83,19	82,25	87,53	81,69	83,73	PRATAMA
3	Banten	87,77	86,86	86,32	91,03	83,23	87,04	MADYA
4	Jawa Tengah	87,28	85,47	85,14	86,69	82,73	85,46	MADYA
5	DI Yogyakarta	94,00	93,08	89,74	92,92	92,27	92,40	UTAMA
6	Jawa Timur	85,55	84,25	82,80	87,55	81,08	84,25	PRATAMA
7	Aceh	74,99	72,50	72,08	79,39	64,41	72,67	KURANG
8	Sumatera Utara	84,93	82,60	82,41	89,84	79,23	83,80	PRATAMA
9	Sumatera Barat	84,80	81,10	78,45	82,74	78,75	81,17	PRATAMA
10	Riau	84,49	81,87	81,76	87,05	81,45	83,32	PRATAMA
11	Kepulauan Riau	89,54	89,49	86,46	95,12	89,67	90,06	UTAMA
12	Jambi	79,72	76,60	71,11	82,86	72,83	76,62	KURANG
13	Sumatera Selatan	76,86	74,01	69,20	79,36	68,39	73,57	KURANG
14	Bangka Belitung	91,26	90,48	88,36	89,36	90,00	89,89	MADYA
15	Bengkulu	71,39	75,35	71,08	73,78	63,73	71,06	KURANG
16	Lampung	78,77	73,50	71,66	79,75	70,63	74,86	KURANG
17	Kalimantan Barat	78,78	78,03	76,59	77,78	73,02	76,84	KURANG
18	Kalimantan Tengah	83,85	76,98	77,07	79,76	77,74	79,08	KURANG
19	Kalimantan Selatan	90,08	88,21	85,91	90,43	81,14	87,15	MADYA
20	Kalimantan Timur	91,83	90,56	92,68	89,08	92,03	91,24	UTAMA
21	Kalimantan Utara	87,56	86,72	80,68	86,44	85,03	85,29	MADYA
22	Sulawesi Utara	80,55	77,32	71,14	76,65	67,76	74,68	KURANG
23	Gorontalo	85,82	85,66	79,36	84,04	81,03	83,18	PRATAMA
24	Sulawesi Tengah	78,74	72,04	65,49	71,09	65,25	70,52	KURANG
25	Sulawesi Selatan	82,46	77,84	74,75	83,87	77,61	79,30	KURANG
26	Sulawesi Barat	74,02	71,80	74,19	78,38	71,18	73,91	KURANG
27	Sulawesi Tenggara	76,03	70,68	70,84	68,63	67,17	70,67	KURANG
28	Maluku	77,52	75,06	70,57	80,77	73,53	75,49	KURANG
29	Maluku Utara	70,84	69,74	63,78	68,57	64,55	67,50	KURANG
30	Bali	93,21	91,67	90,00	94,09	90,94	91,98	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	76,87	75,53	71,40	76,69	71,56	74,41	KURANG
32	Nusa Tenggara Timur	76,14	73,39	69,68	76,47	69,93	73,12	KURANG
33	Papua	82,54	79,65	81,43	82,46	77,03	80,62	PRATAMA
34	Papua Barat	83,81	77,23	75,47	76,47	70,36	76,67	KURANG
	Indonesia	82,95	80,63	78,35	82,96	77,37	80,45	PRATAMA

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu prasarana SMP yang terdapat pada Tabel 4.52. Oleh karena semua standarnya 100 maka tidak ada indikator yang dilakukan konversi. Dengan demikian, rata-rata nilai prasarana SMP terbesar terjadi Provinsi DKI Jakarta sebesar 93,85 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 67,5 dengan rata-rata nasional sebesar 80,45 termasuk kategori pratama.

c. SM

Berdasarkan data SM yang terdapat pada Tabel 4.53 maka dihasilkan analisis indikator mutu prasarana tiap Provinsi yang disajikan pada Tabel 4.54. Ruang kelas SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 52.092 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 856. Ruang kelas baik SM terbesar juga pada Provinsi Jawa Barat sebesar 48.403 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 820. Namun, %RKb SM terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 99,19% dan terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 86,37% dengan rata-rata nasional sebesar 93,25%. Dengan demikian, masih diperlukan rehabilitasi sebesar 6,75% ruang kelas milik.

Tabel 4.53
Data Mutu Prasarana SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Data									
		Ruang Kelas	Ruang Kelas Baik	Perpustakaan	Perpustakaan Baik	Laboratorium	Laboratorium Baik	Ruang UKS	RUKS Baik	Toilet Siswa	Toilet Baik
1	DKI Jakarta	13.478	13.202	936	895	2.550	2.471	624	604	1.954	1.868
2	Jawa Barat	52.092	48.403	2.727	2.456	6.510	5.958	1.363	1.243	7.925	7.159
3	Banten	13.217	12.072	776	696	1.889	1.718	335	303	2.077	1.828
4	Jawa Tengah	37.743	36.010	2.005	1.860	6.422	6.101	1.449	1.349	6.124	5.745
5	DI Yogyakarta	5.330	5.129	348	327	994	960	291	279	1.066	1.024
6	Jawa Timur	39.611	37.379	2.279	2.102	6.293	5.943	1.504	1.397	6.739	6.210
7	Aceh	8.143	7.166	598	517	1.527	1.363	159	148	1.139	943
8	Sumatera Utara	22.866	21.178	1.543	1.398	3.715	3.423	542	518	3.394	3.035
9	Sumatera Barat	8.076	7.611	434	403	1.087	1.018	212	199	964	885
10	Riau	8.675	7.953	483	447	1.222	1.122	260	245	1.269	1.158
11	Kepulauan Riau	2.558	2.487	162	156	449	429	96	91	422	405
12	Jambi	4.552	4.157	317	287	655	579	156	144	884	779
13	Sumatera Selatan	10.261	9.551	701	637	1.542	1.416	403	368	1.709	1.531
14	Bangka Belitung	1.761	1.710	112	109	359	350	61	57	317	300
15	Bengkulu	2.984	2.800	196	180	453	421	119	106	450	407
16	Lampung	10.152	9.324	678	619	1.583	1.422	360	326	1.686	1.494
17	Kalimantan Barat	6.056	5.631	456	418	998	905	251	232	1.149	1.038
18	Kalimantan Tengah	3.531	3.372	276	252	590	553	137	124	602	543
19	Kalimantan Selatan	4.035	3.894	263	253	670	649	167	163	715	678
20	Kalimantan Timur	4.922	4.773	324	312	783	752	201	196	908	868
21	Kalimantan Utara	856	820	63	59	134	128	30	30	145	138
22	Sulawesi Utara	4.795	4.527	324	300	671	628	109	104	712	640
23	Gorontalo	1.838	1.724	105	99	288	272	49	46	238	231
24	Sulawesi Tengah	4.400	4.021	297	268	588	531	74	64	662	555
25	Sulawesi Selatan	13.325	12.461	797	725	1.871	1.723	279	258	1.600	1.493
26	Sulawesi Barat	2.074	1.913	132	116	264	242	27	24	284	249
27	Sulawesi Tenggara	4.926	4.285	354	297	712	601	77	65	608	514
28	Maluku	3.573	3.095	285	245	541	459	67	61	417	334
29	Maluku Utara	2.269	2.029	187	158	359	300	12	11	299	242
30	Bali	5.192	5.150	272	266	736	711	176	172	846	835
31	Nusa Tenggara Barat	5.902	5.288	380	339	780	683	112	103	1.095	977
32	Nusa Tenggara Timur	8.982	7.758	569	513	995	872	120	100	1.203	1.004
33	Papua	3.581	3.210	219	202	582	515	44	39	462	420
34	Papua Barat	1.620	1.449	115	102	258	229	25	25	243	215

Perpustakaan SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 2.727 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 63. Perpustakaan baik terbesar pada Provinsi Jawa Barat sebesar 2.456 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 59. Namun, %Perpusb terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 97,79% dan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 83,90% dengan rata-rata nasional sebesar 91,38%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 8,62% perpustakaan milik.

Laboratorium SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 6.510 dan terkecil terjadi di Kalimantan Utara masing-masing sebesar 134. Laboratorium baik terbesar pada Provinsi Jawa Tengah sebesar 6.101 dan terkecil juga pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 128. Namun, %Labb terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung sebesar 97,49% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 83,57% dengan rata-rata nasional sebesar 92,62%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 7,38% laboratorium SM.

Tabel 4.54
Indikator Mutu Prasarana SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Mutu3.3				
		%Rkb	%Perpusb	%Labb	%RUKSb	%TSb
1	DKI Jakarta	97,95	95,62	96,90	96,79	95,60
2	Jawa Barat	92,92	90,06	91,52	91,20	90,33
3	Banten	91,34	89,69	90,95	90,45	88,01
4	Jawa Tengah	95,41	92,77	95,00	93,10	93,81
5	DI Yogyakarta	96,23	93,97	96,58	95,88	96,06
6	Jawa Timur	94,37	92,23	94,44	92,89	92,15
7	Aceh	88,00	86,45	89,26	93,08	82,79
8	Sumatera Utara	92,62	90,60	92,14	95,57	89,42
9	Sumatera Barat	94,24	92,86	93,65	93,87	91,80
10	Riau	91,68	92,55	91,82	94,23	91,25
11	Kepulauan Riau	97,22	96,30	95,55	94,79	95,97
12	Jambi	91,32	90,54	88,40	92,31	88,12
13	Sumatera Selatan	93,08	90,87	91,83	91,32	89,58
14	Bangka Belitung	97,10	97,32	97,49	93,44	94,64
15	Bengkulu	93,83	91,84	92,94	89,08	90,44
16	Lampung	91,84	91,30	89,83	90,56	88,61
17	Kalimantan Barat	92,98	91,67	90,68	92,43	90,34
18	Kalimantan Tengah	95,50	91,30	93,73	90,51	90,20
19	Kalimantan Selatan	96,51	96,20	96,87	97,60	94,83
20	Kalimantan Timur	96,97	96,30	96,04	97,51	95,59
21	Kalimantan Utara	95,79	93,65	95,52	100,00	95,17
22	Sulawesi Utara	94,41	92,59	93,59	95,41	89,89
23	Gorontalo	93,80	94,29	94,44	93,88	97,06
24	Sulawesi Tengah	91,39	90,24	90,31	86,49	83,84
25	Sulawesi Selatan	93,52	90,97	92,09	92,47	93,31
26	Sulawesi Barat	92,24	87,88	91,67	88,89	87,68
27	Sulawesi Tenggara	86,99	83,90	84,41	84,42	84,54
28	Maluku	86,62	85,96	84,84	91,04	80,10
29	Maluku Utara	89,42	84,49	83,57	91,67	80,94
30	Bali	99,19	97,79	96,60	97,73	98,70
31	Nusa Tenggara Barat	89,60	89,21	87,56	91,96	89,22
32	Nusa Tenggara Timur	86,37	90,16	87,64	83,33	83,46
33	Papua	89,64	92,24	88,49	88,64	90,91
34	Papua Barat	89,44	88,70	88,76	100,00	88,48
	Indonesia	93,25	91,38	92,62	92,95	90,93

RUKS SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur sebesar 1.504 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 12. RUKS baik terbesar pada juga di Provinsi Jawa Timur sebesar 1.397 dan terkecil juga pada Provinsi Maluku Utara sebesar 11. Namun, %RUKSb terbaik terjadi di Provinsi Kalimantan Utara karena 100% atau sudah ideal dan terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 83,33% dengan rata-rata nasional sebesar 92,95%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 7,05% RUKS.

Toilet siswa SM terbesar terjadi di Provinsi Jawa Barat sebesar 7.925 dan terkecil terjadi di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 145. Toilet siswa baik terbesar juga pada Provinsi Jawa Barat sebesar 7.159 dan terkecil pada Provinsi Kalimantan Utara sebesar 138. Namun, %TSb terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 98,70% dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku sebesar 80,10% dengan rata-rata nasional sebesar 90,93%. Hal ini berarti masih diperlukan rehabilitasi sebesar 9,07% toilet siswa SM.

Tabel 4.55
Mutu Prasarana SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Nilai Mutu Prasarana					Rata-rata	Jenis
		%RKB	%Perpusb	%Labbb	%RUKSb	%TSb		
		100	100	100	100	100		
1	DKI Jakarta	97,95	95,62	96,90	96,79	95,60	96,23	PARIPURNA
2	Jawa Barat	92,92	90,06	91,52	91,20	90,33	90,78	UTAMA
3	Banten	91,34	89,69	90,95	90,45	88,01	89,77	UTAMA
4	Jawa Tengah	95,41	92,77	95,00	93,10	93,81	93,67	PARIPURNA
5	DI Yogyakarta	96,23	93,97	96,58	95,88	96,06	95,62	PARIPURNA
6	Jawa Timur	94,37	92,23	94,44	92,89	92,15	92,93	UTAMA
7	Aceh	88,00	86,45	89,26	93,08	82,79	87,90	MADYA
8	Sumatera Utara	92,62	90,60	92,14	95,57	89,42	91,93	UTAMA
9	Sumatera Barat	94,24	92,86	93,65	93,87	91,80	93,05	UTAMA
10	Riau	91,68	92,55	91,82	94,23	91,25	92,46	UTAMA
11	Kepulauan Riau	97,22	96,30	95,55	94,79	95,97	95,65	PARIPURNA
12	Jambi	91,32	90,54	88,40	92,31	88,12	89,84	UTAMA
13	Sumatera Selatan	93,08	90,87	91,83	91,32	89,58	90,90	UTAMA
14	Bangka Belitung	97,10	97,32	97,49	93,44	94,64	95,72	PARIPURNA
15	Bengkulu	93,83	91,84	92,94	89,08	90,44	91,07	UTAMA
16	Lampung	91,84	91,30	89,83	90,56	88,61	90,07	UTAMA
17	Kalimantan Barat	92,98	91,67	90,68	92,43	90,34	91,28	UTAMA
18	Kalimantan Tengah	95,50	91,30	93,73	90,51	90,20	91,44	PARIPURNA
19	Kalimantan Selatan	96,51	96,20	96,87	97,60	94,83	96,37	PARIPURNA
20	Kalimantan Timur	96,97	96,30	96,04	97,51	95,59	96,36	PARIPURNA
21	Kalimantan Utara	95,79	93,65	95,52	100,00	95,17	96,09	PARIPURNA
22	Sulawesi Utara	94,41	92,59	93,59	95,41	89,89	92,87	UTAMA
23	Gorontalo	93,80	94,29	94,44	93,88	97,06	94,92	UTAMA
24	Sulawesi Tengah	91,39	90,24	90,31	86,49	83,84	87,72	UTAMA
25	Sulawesi Selatan	93,52	90,97	92,09	92,47	93,31	92,21	UTAMA
26	Sulawesi Barat	92,24	87,88	91,67	88,89	87,68	89,03	UTAMA
27	Sulawesi Tenggara	86,99	83,90	84,41	84,42	84,54	84,32	MADYA
28	Maluku	86,62	85,96	84,84	91,04	80,10	85,49	MADYA
29	Maluku Utara	89,42	84,49	83,57	91,67	80,94	85,17	MADYA
30	Bali	99,19	97,79	96,60	97,73	98,70	97,71	PARIPURNA
31	Nusa Tenggara Barat	89,60	89,21	87,56	91,96	89,22	89,49	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	86,37	90,16	87,64	83,33	83,46	86,15	MADYA
33	Papua	89,64	92,24	88,49	88,64	90,91	90,07	MADYA
34	Papua Barat	89,44	88,70	88,76	100,00	88,48	91,48	MADYA
	Indonesia	92,93	91,54	91,91	92,72	90,38	91,64	UTAMA

Berdasarkan standar yang terdapat pada Tabel 3.3 maka dihasilkan nilai setiap indikator mutu prasarana SM yang terdapat pada Tabel 4.55. Oleh karena semua standarnya 100 maka tidak ada indikator yang dilakukan konversi. Dengan demikian, rata-rata nilai prasarana SM terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 97,71 dan terkecil terjadi di Provinsi Maluku sebesar 84,32 dengan rata-rata nasional sebesar 91,64 termasuk kategori utama.

d. Semua Jenjang

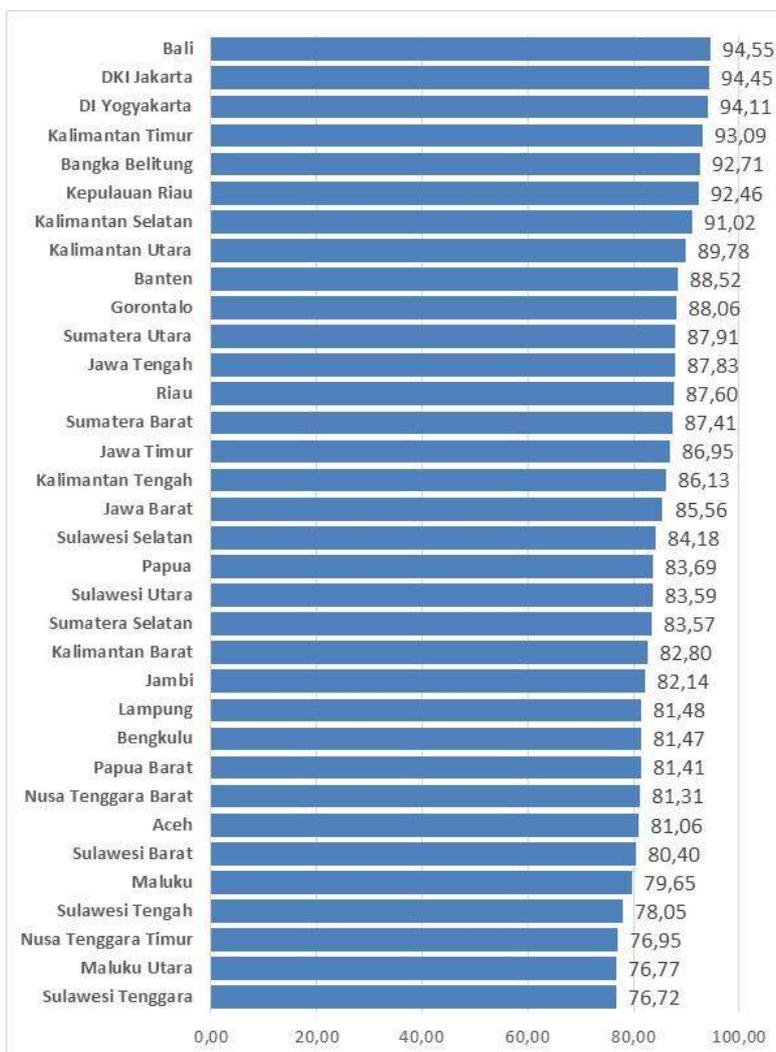
Berdasarkan mutu prasarana maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.56. Bila dilihat secara nasional maka SM memiliki nilai mutu prasarana terbesar sebesar 91,64 termasuk kategori utama dan terkecil pada SMP sebesar 80,45 termasuk kategori pratama. Seperti halnya SMP, mutu prasarana SD sebesar 84,09 juga termasuk kategori pratama. Dengan demikian, mutu prasarana semua jenjang sebesar 85,39 termasuk kategori madya.

Tabel 4.56
Mutu Prasarana Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	93,28	93,85	96,23	94,45	UTAMA
2	Jawa Barat	82,18	83,73	90,78	85,56	MADYA
3	Banten	88,74	87,04	89,77	88,52	MADYA
4	Jawa Tengah	84,36	85,46	93,67	87,83	MADYA
5	DI Yogyakarta	94,30	92,40	95,62	94,11	UTAMA
6	Jawa Timur	83,67	84,25	92,93	86,95	MADYA
7	Aceh	82,60	72,67	87,90	81,06	PRATAMA
8	Sumatera Utara	88,01	83,80	91,93	87,91	MADYA
9	Sumatera Barat	88,02	81,17	93,05	87,41	MADYA
10	Riau	87,02	83,32	92,46	87,60	MADYA
11	Kepulauan Riau	91,67	90,06	95,65	92,46	UTAMA
12	Jambi	79,95	76,62	89,84	82,14	PRATAMA
13	Sumatera Selatan	86,25	73,57	90,90	83,57	PRATAMA
14	Bangka Belitung	92,51	89,89	95,72	92,71	UTAMA
15	Bengkulu	82,27	71,06	91,07	81,47	PRATAMA
16	Lampung	79,51	74,86	90,07	81,48	PRATAMA
17	Kalimantan Barat	80,28	76,84	91,28	82,80	PRATAMA
18	Kalimantan Tengah	87,87	79,08	91,44	86,13	MADYA
19	Kalimantan Selatan	89,53	87,15	96,37	91,02	UTAMA
20	Kalimantan Timur	91,66	91,24	96,36	93,09	UTAMA
21	Kalimantan Utara	87,96	85,29	96,09	89,78	MADYA
22	Sulawesi Utara	83,22	74,68	92,87	83,59	PRATAMA
23	Gorontalo	86,09	83,18	94,92	88,06	MADYA
24	Sulawesi Tengah	75,91	70,52	87,72	78,05	KURANG
25	Sulawesi Selatan	81,02	79,30	92,21	84,18	PRATAMA
26	Sulawesi Barat	78,25	73,91	89,03	80,40	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	75,19	70,67	84,32	76,72	KURANG
28	Maluku	77,98	75,49	85,49	79,65	KURANG
29	Maluku Utara	77,64	67,50	85,17	76,77	KURANG
30	Bali	93,95	91,98	97,71	94,55	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	80,04	74,41	89,49	81,31	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	71,57	73,12	86,15	76,95	KURANG
33	Papua	80,38	80,62	90,07	83,69	PRATAMA
34	Papua Barat	76,09	76,67	91,48	81,41	PRATAMA
	Indonesia	84,09	80,45	91,64	85,39	MADYA
	Jenis	PRATAMA	PRATAMA	UTAMA	MADYA	

Bila dilihat setiap Provinsi maka nilai mutu prasarana SM yang terbesar sebesar 97,71 termasuk paripurna dan terkecil pada SMP sebesar 67,50 termasuk kurang. Mutu prasarana SD terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 94,30, di SMP terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 93,85, sedangkan di SM terjadi di Provinsi Bali sebesar 97,71, sehingga rata-rata dari tiga jenjang terbesar terjadi di Provinsi Bali sebesar 94,55 termasuk kategori utama.

Sebaliknya, mutu prasarana SD terkecil terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 71,57, di SMP terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 67,50, sedangkan di SM terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 84,32, sehingga rata-rata dari tiga jenjang terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 76,72 termasuk kategori kurang.



Grafik 4.8
Mutu Prasarana Semua Jenjang Tiap Profinsi
Tahun 2017/2018

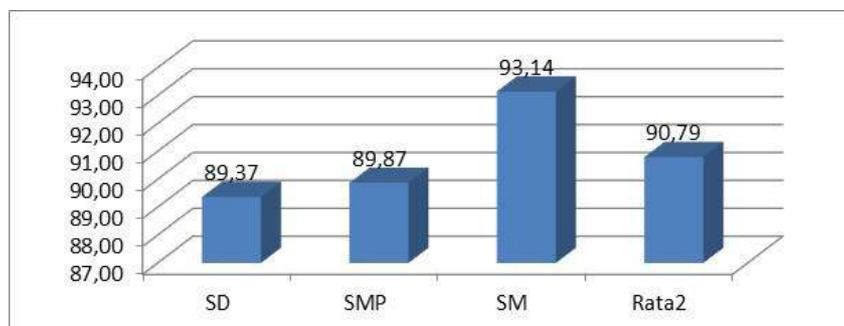
Keberhasilan pendidikan dilihat dari mutu prasarana pendidikan semua jenjang terdapat pada Grafik 4.8, terlihat bahwa lima provinsi termasuk kategori kurang, 12 provinsi termasuk pratama, 10 provinsi termasuk kategori madya, dan tujuh Provinsi termasuk kategori utama. Lima provinsi terbawah termasuk aktegori kurang adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Sebaliknya, lima Provinsi teratas adalah Provinsi Bali, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan bangka Belitung termasuk kategori utama.

4. Rangkuman Pembelajaran Bermutu

Berdasarkan pembelajaran bermutu tiap jenjang pendidikan yang terdapat pada Tabel 4.57 maka dapat dikatakan bahwa mutu guru tercapai sebesar 88,02 termasuk kategori madya. Mutu siswa memiliki nilai yang paling tinggi sebesar 98,96 mendekati ideal termasuk kategori paripurna, sedangkan mutu prasarana memiliki nilai sebesar 85,39 termasuk kategori madya. Dengan demikian, rata-rata pembelajaran bermutu menjadi sebesar 90,79 termasuk kategori utama.

Tabel 4.57
Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017/2018

No.	Indikator	SD	SMP	SM	Rata2	Jenis
A.	Mutu Guru	84,80	89,79	89,47	88,02	MADYA
B.	Mutu Siswa	99,20	99,37	98,32	98,96	PARIPURNA
C.	Mutu Prasarana	84,09	80,45	91,64	85,39	MADYA
	Pembelajaran Bermutu	89,37	89,87	93,14	90,79	UTAMA
	Jenis	MADYA	MADYA	UTAMA	UTAMA	



Grafik 4.9
Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017/2018

Bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka nilai pembelajaran bermutu SD sebesar 89,37 termasuk kategori madya, SMP sebesar 89,87 termasuk kategori utama, dan SM sebesar 93,14 termasuk kategori utama, sehingga rata-rata tiga kelompok indikator dan tiga jenjang pendidikan sebesar 90,79 termasuk kategori utama. Hal ini berarti ketercapaian mutu sudah sampai sembilan per sepuluh.

Berdasarkan tiga kelompok indikator mutu pendidikan maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.58. Bila dilihat pembelajaran bermutu tiap Provinsi maka untuk SD terbesar terjadi Provinsi Bali sebesar 96,29 termasuk paripurna, untuk SMP pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 95,35 termasuk paripurna, untuk SM pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 96,44 termasuk paripurna.

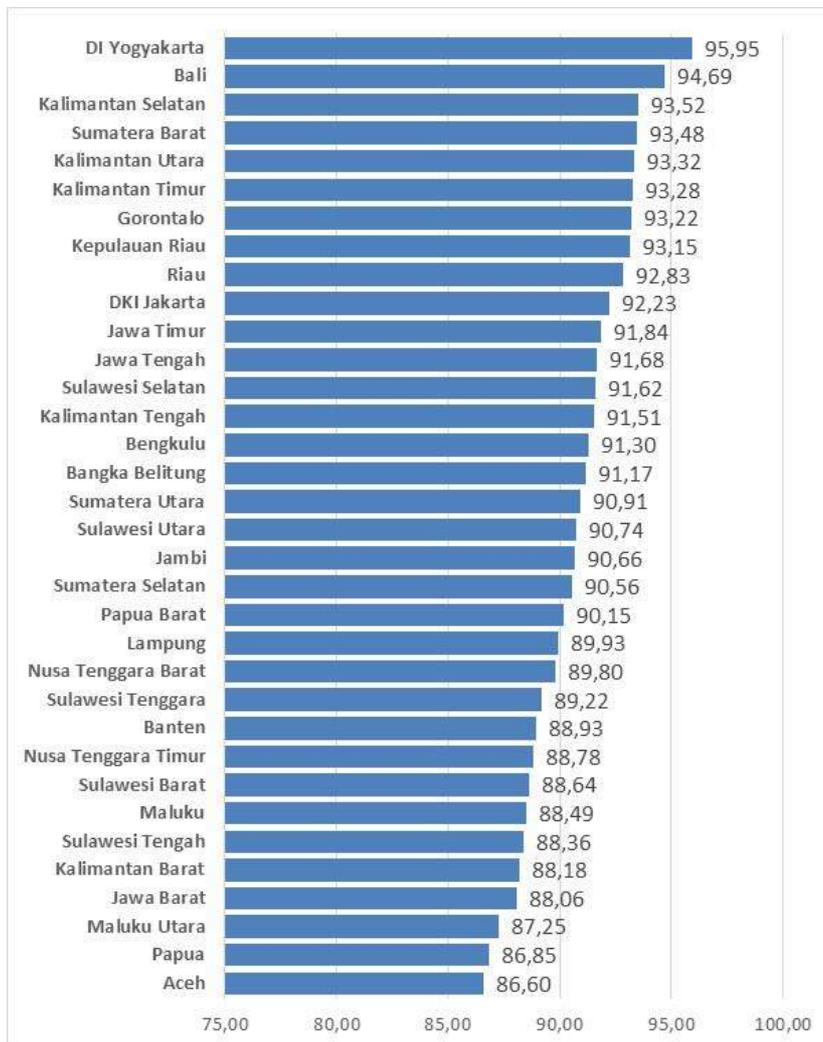
Sebaliknya, pembelajaran bermutu terkecil untuk SD terjadi pada Provinsi Papua sebesar 78,86 termasuk kurang, untuk SMP pada Provinsi Aceh sebesar 83,32 termasuk pratama, untuk SM pada Provinsi Banten sebesar 88,17 termasuk madya.

Tabel 4.58
Rangkuman Pembelajaran Bermutu Menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Pembelajaran Bermutu				
		SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
1	DKI Jakarta	92,17	92,28	92,23	92,23	UTAMA
2	Jawa Barat	87,92	87,58	88,68	88,06	MADYA
3	Banten	89,78	88,86	88,17	88,93	MADYA
4	Jawa Tengah	92,24	91,08	91,72	91,68	UTAMA
5	DI Yogyakarta	96,05	95,35	96,44	95,95	PARIPURNA
6	Jawa Timur	92,25	91,74	91,52	91,84	UTAMA
7	Aceh	85,18	83,32	91,32	86,60	MADYA
8	Sumatera Utara	91,18	90,49	91,07	90,91	UTAMA
9	Sumatera Barat	93,72	90,32	96,41	93,48	UTAMA
10	Riau	92,17	92,12	94,21	92,83	UTAMA
11	Kepulauan Riau	93,32	91,62	94,52	93,15	UTAMA
12	Jambi	88,81	89,24	93,93	90,66	UTAMA
13	Sumatera Selatan	90,87	88,50	92,31	90,56	UTAMA
14	Bangka Belitung	91,09	90,05	92,36	91,17	UTAMA
15	Bengkulu	90,18	88,64	95,09	91,30	UTAMA
16	Lampung	89,58	88,51	91,72	89,93	MADYA
17	Kalimantan Barat	87,85	86,81	89,89	88,18	MADYA
18	Kalimantan Tengah	89,39	90,50	94,65	91,51	UTAMA
19	Kalimantan Selatan	91,71	94,38	94,48	93,52	UTAMA
20	Kalimantan Timur	93,16	93,45	93,22	93,28	UTAMA
21	Kalimantan Utara	90,36	93,37	96,24	93,32	UTAMA
22	Sulawesi Utara	88,87	88,29	95,07	90,74	UTAMA
23	Gorontalo	92,26	92,66	94,75	93,22	UTAMA
24	Sulawesi Tengah	84,56	88,37	92,16	88,36	MADYA
25	Sulawesi Selatan	89,66	91,85	93,36	91,62	UTAMA
26	Sulawesi Barat	84,46	88,99	92,47	88,64	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	86,95	87,43	93,27	89,22	MADYA
28	Maluku	85,33	86,73	93,40	88,49	MADYA
29	Maluku Utara	83,64	85,42	92,68	87,25	MADYA
30	Bali	96,29	93,92	93,86	94,69	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	88,44	86,45	94,52	89,80	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	85,54	88,63	92,18	88,78	MADYA
33	Papua	78,86	87,97	93,73	86,85	MADYA
34	Papua Barat	84,58	90,65	95,23	90,15	UTAMA
	Indonesia	89,37	89,87	93,14	90,79	UTAMA
	Jenis	MADYA	MADYA	UTAMA	UTAMA	

Bila dilihat tiap Provinsi ternyata 13 Provinsi termasuk kategori madya, 20 Provinsi termasuk utama, dan 1 Provinsi termasuk paripurna. Provinsi dengan nilai terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 95,95 termasuk paripurna, sedangkan nilai terendah terjadi di Provinsi Aceh sebesar 86,60 termasuk kategori madya, ternyata masih cukup baik.

Keberhasilan pendidikan dilihat dari pembelajaran bermutu pendidikan dapat terlihat jelas pada Grafik 4.10 bahwa lima Provinsi terbawah adalah Aceh, Papua, Maluku Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat. Sebaliknya, lima Provinsi teratas adalah DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Utara.



Grafik 4.10
Rangkuman Pembelajaran Bermutu Semua Jenjang Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

C. Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan

Dengan menggunakan rumus yang terdapat pada Metodologi maka keberhasilan program pendidikan dihitung dari misi 2 akses pendidikan dan misi 3 pembelajaran yang bermutu. Keberhasilan program pembangunan pendidikan disajikan pada Tabel 4.59 maka akses pendidikan SD sebesar 84,67 dan pembelajaran bermutu SD sebesar 89,37, sehingga keberhasilan program pembangunan SD sebesar 87,02 termasuk kategori madya. Akses pendidikan SMP sebesar 86,37 dan pembelajaran bermutu SMP sebesar 89,87, sehingga keberhasilan program SMP sebesar 88,12 termasuk kategori madya. Akses pendidikan SM sebesar 83,73 dan pembelajaran bermutu SM sebesar 93,14, sehingga keberhasilan program SM sebesar 88,44 termasuk kategori madya.

Dengan demikian, keberhasilan program pendidikan rata-rata tiga jenjang sebesar 87,86 termasuk kategori madya dengan akses pendidikan sebesar 84,92 termasuk kategori pratama dan pembelajaran bermutu sebesar 90,79 termasuk kategori utama.

Tabel 4.59
Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Misi 2, Misi 3 dan Jenjang Pendidikan Tahun 2017/2018

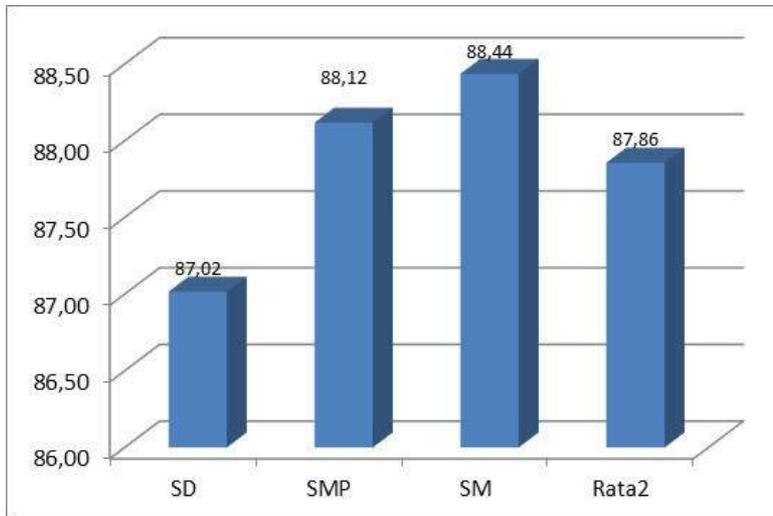
No.	Nilai Indikator	SD	SMP	SM	Rata-rata	Jenis
A.	Akses Pendidikan	84,67	86,37	83,73	84,92	PRATAMA
	1. Akses yang Meluas	68,17	79,08	71,00	72,75	KURANG
	2. Akses yang Merata	94,58	92,12	98,40	95,03	PARIPURNA
	3. Akses yang Berkeadilan	91,24	87,90	81,78	86,98	MADYA
B.	Pembelajaran yang Bermutu	89,37	89,87	93,14	90,79	UTAMA
	1. Mutu Guru	84,80	89,79	89,47	88,02	MADYA
	2. Mutu Siswa	99,20	99,37	98,32	98,96	PARIPURNA
	3. Mutu Prasarana	84,09	80,45	91,64	85,39	MADYA
	Keberhasilan Program	87,02	88,12	88,44	87,86	MADYA
	Jenis Keberhasilan Program	MADYA	MADYA	MADYA	MADYA	

Oleh karena itu, program pendidikan SD perlu ditingkatkan terutama dalam akses yang meluas karena nilainya hanya sebesar 68,17 termasuk sangat kurang. Program pendidikan SMP perlu ditingkatkan terutama pada akses yang meluas karena nilainya hanya 79,08 termasuk kategori kurang. Program pendidikan SM juga perlu ditingkatkan pada akses yang meluas sebesar 71,00 termasuk kategori kurang. Jadi, program akses yang meluas pada tiga jenjang hanya 72,75 termasuk kategori kurang. Akses merata sudah bagus sebesar 95,03 termasuk kategori paripurna sehingga perlu dipertahan. Demikian juga akses berkeadilan juga sudah bagus sebesar 86,98 sehingga perlu dipertahankan.

Program pembelajaran bermutu berasal dari mutu dari guru, mutu dari siswa, dan mutu dari prasarana menunjukkan kondisi cukup bagus, masing-masing sebesar 88,02 termasuk madya, 98,96 termasuk paripurna, dan 85,39 termasuk madya.

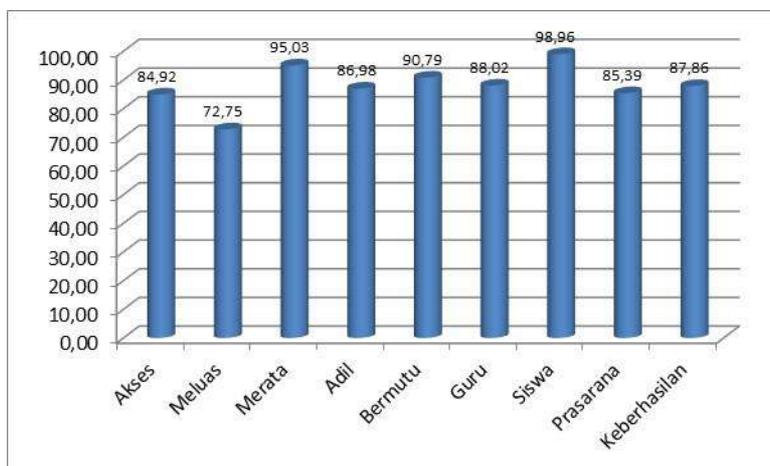
Berdasarkan Grafik 4.11 terlihat bahwa keberhasilan program pendidikan menurut jenjang pendidikan maka pendidikan SM yang terbaik sebesar 88,44 termasuk kategori madya dan pendidikan SD yang terkecil sebesar 87,02 termasuk kategori

madya, dan SMP sebesar 88,12 juga termasuk madya sehingga rata-rata tiga jenjang sebesar 87,86 juga termasuk madya.



Grafik 4.11
Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017/2018

Oleh karena itu, pada Grafik 4.12 terlihat rata-rata program pendidikan tiga jenjang yang perlu ditingkatkan terutama dalam akses yang meluas sebesar 72,75 yang termasuk kategori kurang. Selanjutnya, akses merata mencapai kategori paripurna dan akses berkeadilan mencapai kategori madya. Sebaliknya, mutu siswa yang terbaik sebesar 98,96 mendekati ideal, sedangkan mutu guru dan prasarana termasuk kategori madya.



Grafik 4.12
Keberhasilan Program Pendidikan Menurut Misi 2 dan Misi 3 Pendidikan Tahun 2017/2018

a. SD

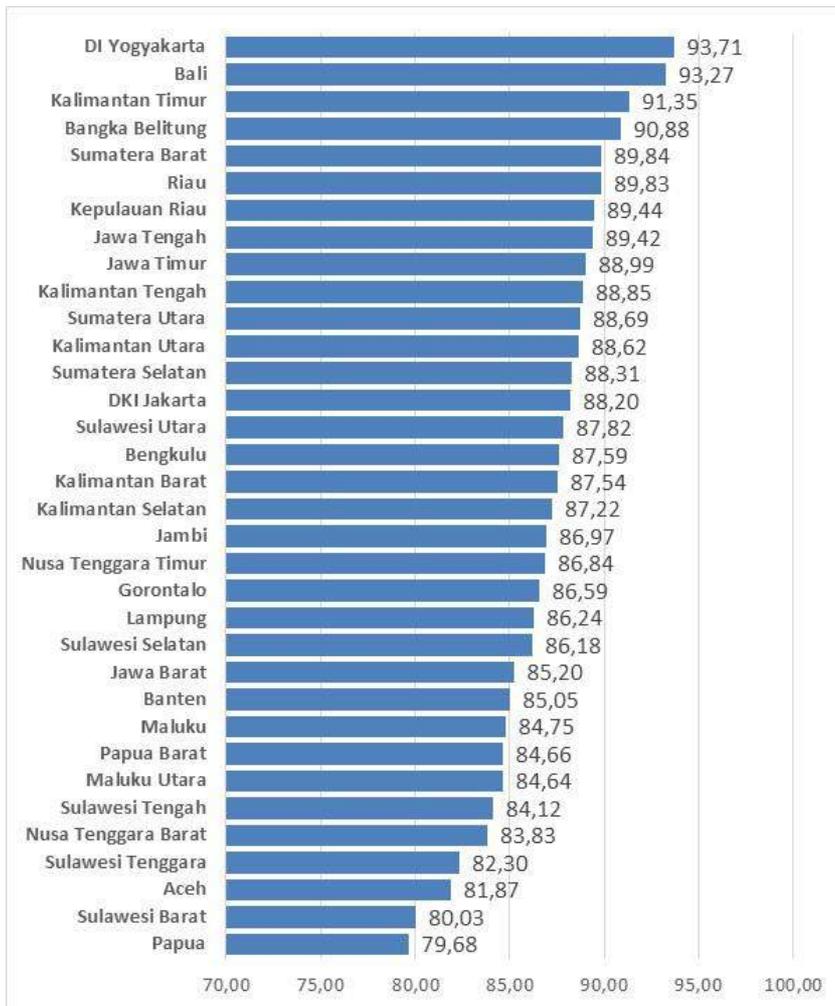
Berdasarkan Tabel 4.60 diketahui keberhasilan pendidikan SD menurut misi 2 dan misi 3 pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa akses pendidikan di Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai tertinggi sebesar 91,37 termasuk kategori utama dan Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai terendah sebesar 75,60 termasuk kategori kurang, sehingga secara nasional akses pendidikan menjadi 84,67 termasuk kategori pratama. Namun, pembelajaran bermutu tertinggi terjadi di Provinsi Bali sebesar 96,29 termasuk paripurna dan nilai terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 78,86 termasuk kategori kurang, sehingga pembelajaran bermutu nasional menjadi 89,37 termasuk kategori madya.

Tabel 4.60
Keberhasilan Program Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Akses	Mutu	Keberhasilan Program	
				Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	84,22	92,17	88,20	MADYA
2	Jawa Barat	82,47	87,92	85,20	MADYA
3	Banten	80,32	89,78	85,05	MADYA
4	Jawa Tengah	86,59	92,24	89,42	MADYA
5	DI Yogyakarta	91,37	96,05	93,71	UTAMA
6	Jawa Timur	85,72	92,25	88,99	MADYA
7	Aceh	78,56	85,18	81,87	PRATAMA
8	Sumatera Utara	86,20	91,18	88,69	MADYA
9	Sumatera Barat	85,95	93,72	89,84	MADYA
10	Riau	87,49	92,17	89,83	MADYA
11	Kepulauan Riau	85,55	93,32	89,44	MADYA
12	Jambi	85,13	88,81	86,97	MADYA
13	Sumatera Selatan	85,74	90,87	88,31	MADYA
14	Bangka Belitung	90,66	91,09	90,88	UTAMA
15	Bengkulu	85,00	90,18	87,59	MADYA
16	Lampung	82,90	89,58	86,24	MADYA
17	Kalimantan Barat	87,24	87,85	87,54	MADYA
18	Kalimantan Tengah	88,32	89,39	88,85	MADYA
19	Kalimantan Selatan	82,73	91,71	87,22	MADYA
20	Kalimantan Timur	89,54	93,16	91,35	UTAMA
21	Kalimantan Utara	86,88	90,36	88,62	MADYA
22	Sulawesi Utara	86,77	88,87	87,82	MADYA
23	Gorontalo	80,92	92,26	86,59	MADYA
24	Sulawesi Tengah	83,68	84,56	84,12	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	82,71	89,66	86,18	MADYA
26	Sulawesi Barat	75,60	84,46	80,03	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	77,66	86,95	82,30	PRATAMA
28	Maluku	84,18	85,33	84,75	PRATAMA
29	Maluku Utara	85,64	83,64	84,64	PRATAMA
30	Bali	90,25	96,29	93,27	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	79,22	88,44	83,83	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	88,15	85,54	86,84	MADYA
33	Papua	80,49	78,86	79,68	KURANG
34	Papua Barat	84,75	84,58	84,66	PRATAMA
	Indonesia	84,67	89,37	87,02	MADYA
	Jenis Keberhasilan	PRATAMA	MADYA	MADYA	

Jadi, keberhasilan program pendidikan SD terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 93,71 termasuk utama dan terkecil terjadi di Provinsi Papua sebesar 79,68 termasuk kurang, sehingga nasional menjadi 87,02 termasuk kategori madya. Bila dilihat tiap Provinsi maka terdapat satu Provinsi termasuk kurang, delapan Provinsi termasuk pratama, 21 Provinsi termasuk madya, dan empat Provinsi termasuk utama.

Berdasarkan Grafik 4.13 maka keberhasilan program pembangunan SD lima Provinsi teratas ada pada DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat, sedangkan terkecil ada pada Papua, Sulawesi Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.



Grafik 4.13
Keberhasilan Program Pendidikan SD Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

b. SMP

Berdasarkan Tabel 4.61 diketahui keberhasilan program pendidikan SMP menurut misi 2 dan misi 3 pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa akses pendidikan di Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai tertinggi sebesar 96,69 termasuk kategori paripurna dan Provinsi Sulawesi Barat memiliki nilai terendah sebesar 78,68 termasuk kategori kurang, sehingga secara nasional keberhasilan akses pendidikan menjadi 86,37 termasuk kategori madya. Pembelajaran bermutu tertinggi juga terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 95,35 dan Provinsi Aceh memiliki nilai terendah sebesar 83,32 termasuk kategori pratama, sehingga pembelajaran bermutu nasional menjadi 89,87 termasuk madya.

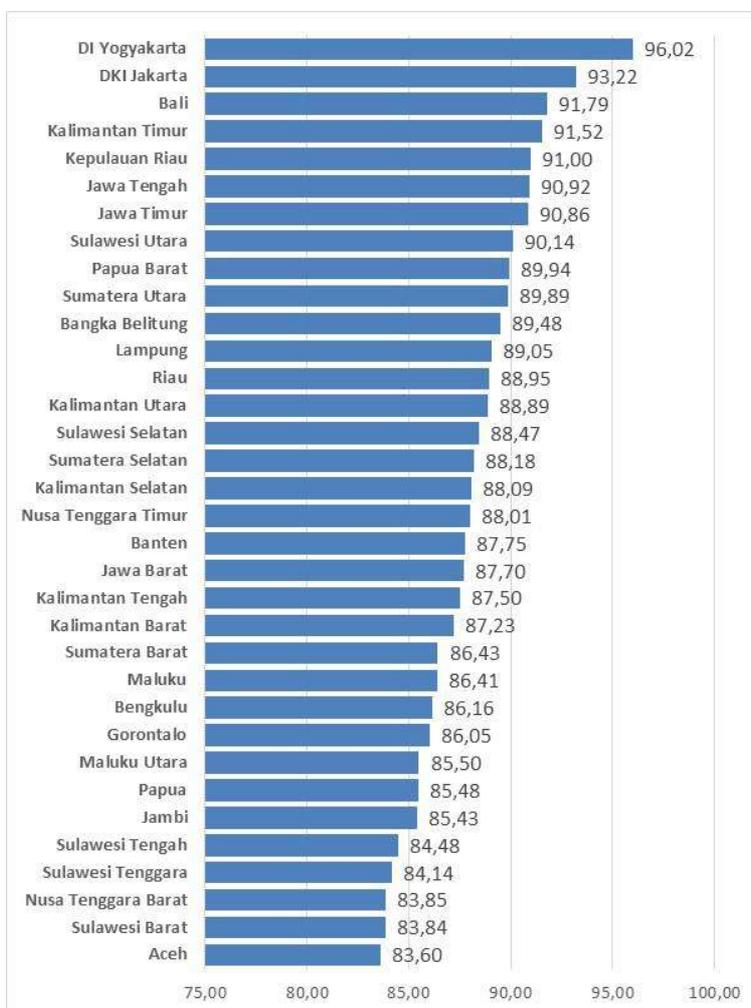
Tabel 4.61
Keberhasilan Program Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Akses	Mutu	Keberhasilan Program	
				Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	94,16	92,28	93,22	UTAMA
2	Jawa Barat	87,82	87,58	87,70	MADYA
3	Banten	86,65	88,86	87,75	MADYA
4	Jawa Tengah	90,76	91,08	90,92	UTAMA
5	DI Yogyakarta	96,69	95,35	96,02	PARI PURNA
6	Jawa Timur	89,98	91,74	90,86	UTAMA
7	Aceh	83,88	83,32	83,60	PRATAMA
8	Sumatera Utara	89,28	90,49	89,89	MADYA
9	Sumatera Barat	82,55	90,32	86,43	MADYA
10	Riau	85,79	92,12	88,95	MADYA
11	Kepulauan Riau	90,38	91,62	91,00	UTAMA
12	Jambi	81,63	89,24	85,43	MADYA
13	Sumatera Selatan	87,85	88,50	88,18	MADYA
14	Bangka Belitung	88,92	90,05	89,48	MADYA
15	Bengkulu	83,68	88,64	86,16	MADYA
16	Lampung	89,60	88,51	89,05	MADYA
17	Kalimantan Barat	87,65	86,81	87,23	MADYA
18	Kalimantan Tengah	84,51	90,50	87,50	MADYA
19	Kalimantan Selatan	81,80	94,38	88,09	MADYA
20	Kalimantan Timur	89,59	93,45	91,52	UTAMA
21	Kalimantan Utara	84,42	93,37	88,89	MADYA
22	Sulawesi Utara	92,00	88,29	90,14	UTAMA
23	Gorontalo	79,44	92,66	86,05	MADYA
24	Sulawesi Tengah	80,58	88,37	84,48	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	85,10	91,85	88,47	MADYA
26	Sulawesi Barat	78,68	88,99	83,84	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	80,86	87,43	84,14	PRATAMA
28	Maluku	86,09	86,73	86,41	MADYA
29	Maluku Utara	85,58	85,42	85,50	MADYA
30	Bali	89,66	93,92	91,79	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	81,26	86,45	83,85	PRATAMA
32	Nusa Tenggara Timur	87,40	88,63	88,01	MADYA
33	Papua	83,00	87,97	85,48	MADYA
34	Papua Barat	89,24	90,65	89,94	MADYA
	Indonesia	86,37	89,87	88,12	MADYA
	Jenis Keberhasilan	MADYA	MADYA	MADYA	

Jadi, keberhasilan program pendidikan SMP terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 96,02 termasuk paripurna dan terkecil terjadi di Provinsi Aceh sebesar 83,60 termasuk pratama, sehingga secara nasional menjadi 88,12 termasuk

kategori madya. Bila dilihat tiap Provinsi maka terdapat lima Provinsi termasuk pratama, 21 Provinsi termasuk madya, tujuh Provinsi termasuk utama, dan satu Provinsi termasuk paripurna.

Berdasarkan Grafik 4.14 maka keberhasilan program pembangunan SMP lima Provinsi terbesar ada pada DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau, sedangkan terkecil ada pada Aceh, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.



Grafik 4.14
Keberhasilan Program Pendidikan SMP Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

d. SM

Berdasarkan Tabel 4.62 diketahui keberhasilan program pendidikan SM menurut misi 2 dan misi 3 pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa akses pendidikan di Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi sebesar 92,13 termasuk kategori utama dan

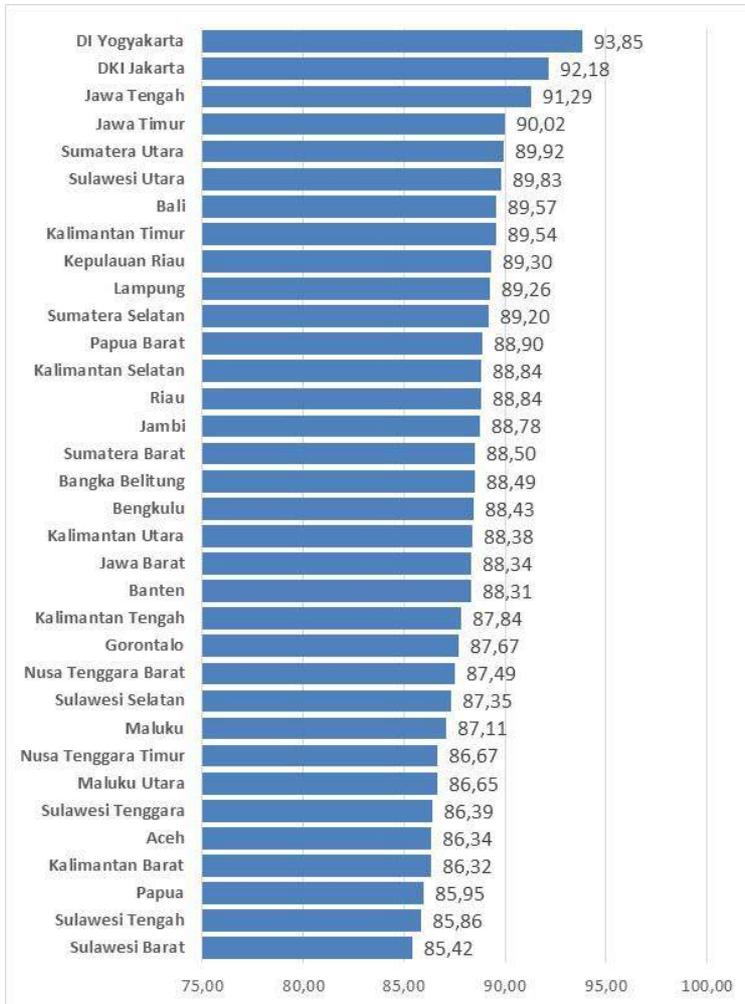
Provinsi Papua memiliki nilai terendah sebesar 78,17 termasuk kategori kurang, sehingga secara nasional akses pendidikan menjadi 83,73 termasuk pratama. Pembelajaran bermutu tertinggi terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 96,44 dan Provinsi Banten memiliki nilai terendah sebesar 88,17 termasuk kategori madya, sehingga secara nasional pembelajaran bermutu menjadi 93,14 termasuk utama.

Tabel 4.62
Keberhasilan Program Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	Akses	Mutu	Keberhasilan Program	
				Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	92,13	92,23	92,18	UTAMA
2	Jawa Barat	87,99	88,68	88,34	MADYA
3	Banten	88,45	88,17	88,31	MADYA
4	Jawa Tengah	90,86	91,72	91,29	UTAMA
5	DI Yogyakarta	91,25	96,44	93,85	UTAMA
6	Jawa Timur	88,51	91,52	90,02	UTAMA
7	Aceh	81,36	91,32	86,34	MADYA
8	Sumatera Utara	88,77	91,07	89,92	MADYA
9	Sumatera Barat	80,58	96,41	88,50	MADYA
10	Riau	83,46	94,21	88,84	MADYA
11	Kepulauan Riau	84,08	94,52	89,30	MADYA
12	Jambi	83,62	93,93	88,78	MADYA
13	Sumatera Selatan	86,09	92,31	89,20	MADYA
14	Bangka Belitung	84,63	92,36	88,49	MADYA
15	Bengkulu	81,77	95,09	88,43	MADYA
16	Lampung	86,81	91,72	89,26	MADYA
17	Kalimantan Barat	82,76	89,89	86,32	MADYA
18	Kalimantan Tengah	81,03	94,65	87,84	MADYA
19	Kalimantan Selatan	83,20	94,48	88,84	MADYA
20	Kalimantan Timur	85,86	93,22	89,54	MADYA
21	Kalimantan Utara	80,53	96,24	88,38	MADYA
22	Sulawesi Utara	84,58	95,07	89,83	MADYA
23	Gorontalo	80,59	94,75	87,67	MADYA
24	Sulawesi Tengah	79,55	92,16	85,86	MADYA
25	Sulawesi Selatan	81,34	93,36	87,35	MADYA
26	Sulawesi Barat	78,37	92,47	85,42	MADYA
27	Sulawesi Tenggara	79,50	93,27	86,39	MADYA
28	Maluku	80,82	93,40	87,11	MADYA
29	Maluku Utara	80,62	92,68	86,65	MADYA
30	Bali	85,27	93,86	89,57	MADYA
31	Nusa Tenggara Barat	80,45	94,52	87,49	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	81,16	92,18	86,67	MADYA
33	Papua	78,17	93,73	85,95	MADYA
34	Papua Barat	82,56	95,23	88,90	MADYA
	Indonesia	83,73	93,14	88,44	MADYA
	Jenis Keberhasilan	PRATAMA	UTAMA	MADYA	

Jadi, keberhasilan program pendidikan SM terbesar terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 93,85 termasuk utama dan terkecil terjadi di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 85,42 termasuk pratama, sehingga secara nasional menjadi 88,44 termasuk kategori madya. Bila dilihat setiap Provinsi maka terdapat dua Provinsi termasuk pratama, 30 Provinsi termasuk madya, dan empat Provinsi termasuk utama.

Berdasarkan Grafik 4.15 maka keberhasilan program pembangunan SM lima Provinsi teratas ada pada DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, sedangkan lima Provinsi terendah ada pada Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Barat, dan Aceh.



Grafik 4.15
Keberhasilan Program Pendidikan SM Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

d. Semua Jenjang

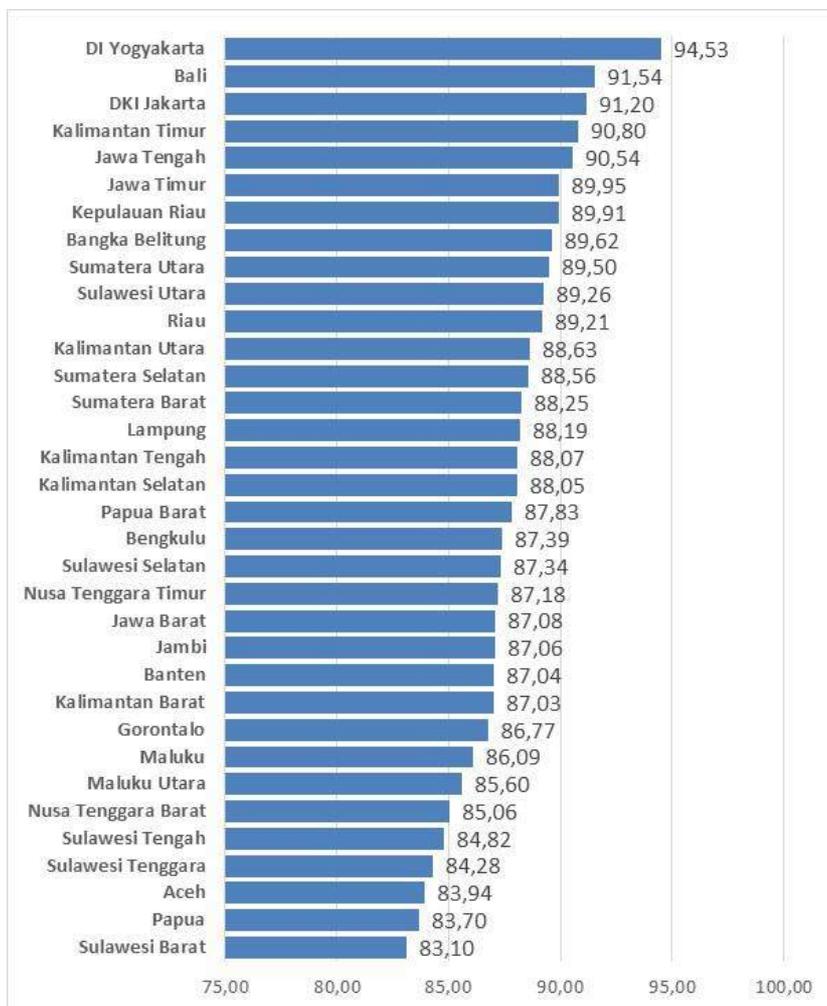
Berdasarkan indikator akses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu maka diperoleh rangkuman menurut jenjang pendidikan seperti disajikan pada Tabel 4.63. Bila dilihat secara nasional maka SM memiliki nilai keberhasilan pembangunan pendidikan terbesar sebesar 88,44 termasuk kategori madya dan terkecil pada SD sebesar 87,02 juga termasuk kategori madya. Keberhasilan SMP sebesar 88,12 juga termasuk madya. Dengan demikian, keberhasilan semua jenjang sebesar 87,86 termasuk kategori madya.

Tabel 4.63
Keberhasilan Program Pendidikan menurut Jenjang Pendidikan Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

No.	Provinsi	SD	SMP	SM	Rata-rata	
					Nilai	Jenis
1	DKI Jakarta	88,20	93,22	92,18	91,20	UTAMA
2	Jawa Barat	85,20	87,70	88,34	87,08	MADYA
3	Banten	85,05	87,75	88,31	87,04	MADYA
4	Jawa Tengah	89,42	90,92	91,29	90,54	UTAMA
5	DI Yogyakarta	93,71	96,02	93,85	94,53	UTAMA
6	Jawa Timur	88,99	90,86	90,02	89,95	MADYA
7	Aceh	81,87	83,60	86,34	83,94	PRATAMA
8	Sumatera Utara	88,69	89,89	89,92	89,50	MADYA
9	Sumatera Barat	89,84	86,43	88,50	88,25	MADYA
10	Riau	89,83	88,95	88,84	89,21	MADYA
11	Kepulauan Riau	89,44	91,00	89,30	89,91	MADYA
12	Jambi	86,97	85,43	88,78	87,06	MADYA
13	Sumatera Selatan	88,31	88,18	89,20	88,56	MADYA
14	Bangka Belitung	90,88	89,48	88,49	89,62	MADYA
15	Bengkulu	87,59	86,16	88,43	87,39	MADYA
16	Lampung	86,24	89,05	89,26	88,19	MADYA
17	Kalimantan Barat	87,54	87,23	86,32	87,03	MADYA
18	Kalimantan Tengah	88,85	87,50	87,84	88,07	MADYA
19	Kalimantan Selatan	87,22	88,09	88,84	88,05	MADYA
20	Kalimantan Timur	91,35	91,52	89,54	90,80	UTAMA
21	Kalimantan Utara	88,62	88,89	88,38	88,63	MADYA
22	Sulawesi Utara	87,82	90,14	89,83	89,26	MADYA
23	Gorontalo	86,59	86,05	87,67	86,77	MADYA
24	Sulawesi Tengah	84,12	84,48	85,86	84,82	PRATAMA
25	Sulawesi Selatan	86,18	88,47	87,35	87,34	MADYA
26	Sulawesi Barat	80,03	83,84	85,42	83,10	PRATAMA
27	Sulawesi Tenggara	82,30	84,14	86,39	84,28	PRATAMA
28	Maluku	84,75	86,41	87,11	86,09	MADYA
29	Maluku Utara	84,64	85,50	86,65	85,60	MADYA
30	Bali	93,27	91,79	89,57	91,54	UTAMA
31	Nusa Tenggara Barat	83,83	83,85	87,49	85,06	MADYA
32	Nusa Tenggara Timur	86,84	88,01	86,67	87,18	MADYA
33	Papua	79,68	85,48	85,95	83,70	PRATAMA
34	Papua Barat	84,66	89,94	88,90	87,83	MADYA
	Indonesia	87,02	88,12	88,44	87,86	MADYA
	Jenis Keberhasilan	MADYA	MADYA	MADYA	MADYA	

Bila dilihat setiap Provinsi maka rata-rata tiga jenjang memiliki nilai keberhasilan program pendidikan terbesar pada Provinsi DI Yogyakarta sebesar 94,53 termasuk kategori utama dan terkecil pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 83,10 termasuk kategori pratama. Bila dirinci tiap Provinsi maka lima Provinsi termasuk pratama, 24 Provinsi termasuk madya, dan lima Provinsi termasuk utama.

Keberhasilan pendidikan rata-rata tiga jenjang dapat dilihat pada Grafik 4.16 dengan lima Provinsi terkecil adalah Sulawesi Barat, Papua, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Sebaliknya, lima Provinsi terbesar adalah DI Yogyakarta, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah.



Grafik 4.16
Keberhasilan Program Pendidikan Semua Jenjang Tiap Provinsi
Tahun 2017/2018

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Keberhasilan program pembangunan pendidikan didasarkan pada Renstra Kemendikbud misi 2 dan misi 3 pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan program ini dihitung dari komposit indikator akses pendidikan yang terdiri dari tiga akses dan pembelajaran bermutu yang terdiri dari tiga jenis mutu. Indikator akses pendidikan dan pembelajaran bermutu tersebut dalam satuan yang berbeda maka dilakukan proses konversi sehingga menghasilkan nilai dengan satuan yang sama dengan jumlah nilai maksimum sebesar 100. Hasilnya menjadi dasar penilaian terhadap keberhasilan program pembangunan pendidikan.

Sesuai dengan tujuan pertama maka akses pendidikan rata-rata tiga jenjang sebesar 84,92 termasuk pratama atau tercapai hanya delapan per sepuluh. Akses pendidikan yang terbesar adalah SMP sebesar 86,37 termasuk madya dan terkecil adalah SD sebesar 83,73 termasuk pratama. Akses yang meluas rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 72,75 termasuk kurang. Akses yang merata rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 95,03 termasuk paripurna. Akses yang berkeadilan rata-rata tiga jenjang sebesar 86,98 termasuk madya.

Tujuan kedua adalah pembelajaran yang bermutu maka rata-rata tiga jenjang sebesar 90,79 termasuk utama atau tercapai sembilan per sepuluh. Mutu yang terbesar adalah SM sebesar 93,14 termasuk utama dan terkecil adalah SD sebesar 89,37 termasuk kategori madya. Mutu dari guru rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 88,02 termasuk madya. Mutu dari siswa rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 98,96 termasuk paripurna. Mutu prasarana rata-rata tiga jenjang pendidikan sebesar 85,39 termasuk kategori madya.

Tujuan ketiga adalah keberhasilan program pembangunan pendidikan dilihat untuk tiap jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP, SM, dan rata-rata tiga jenjang sebesar 87,86 termasuk madya, artinya tercapai hampir sembilan per sepuluh. Bila dilihat menurut jenjang pendidikan maka keberhasilan pendidikan terbesar adalah SM sebesar 88,44 termasuk madya dan terkecil adalah SD sebesar 87,02 termasuk madya, sedangkan SMP sebesar 88,12 termasuk madya.

Bila dilihat tiap Provinsi maka keberhasilan program pembangunan pendidikan SD sebesar 87,02 termasuk madya dengan lima peringkat tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, dan Sumatera Barat. Sebaliknya, lima peringkat terendah adalah Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

Bila dilihat tiap Provinsi maka keberhasilan program pembangunan pendidikan SMP sebesar 88,12 termasuk kategori madya dengan lima peringkat tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau. Sebaliknya, lima peringkat terendah adalah Provinsi Aceh, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Bila dilihat setiap Provinsi maka keberhasilan program pembangunan pendidikan SM sebesar 88,44 termasuk kategori madya dengan lima peringkat tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sebaliknya, lima peringkat terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan Barat, dan Aceh.

Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tiga jenjang sebesar 87,86 termasuk madya dengan lima peringkat tertinggi adalah Provinsi DI Yogyakarta, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Sebaliknya, lima peringkat terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat, Papua, Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

B. Saran

Memperhatikan simpulan di atas maka dipandang perlu adanya tindak lanjut yang diupayakan demi mendekati keberhasilan program pembangunan pendidikan menuju yang lebih baik atau mencapai paripurna sebesar 95 dan yang lebih tinggi. Untuk itu, saran yang diberikan dirinci menurut jenjang pendidikan sebagai berikut:

1. SD

Keberhasilan program pembangunan pendidikan SD pada misi 2 akses yang meluas dengan nilai sebesar 68,17 termasuk kategori kurang, oleh karena itu perlu ditingkatkan melalui cara penambahan ruang perpustakaan yang nilainya sangat kecil sebesar 65,87, laboratorium yang nilainya sebesar 10,94, RUKS yang nilainya sebesar 30,45, dan toilet siswa yang nilainya 78,26 sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan perpustakaan SD perlu diprioritaskan pada Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 65,87 angka nasional, yaitu terdapat di 18 Provinsi. Pengadaan laboratorium untuk SD perlu dilaksanakan di semua Provinsi karena nilainya sangat kecil. Pengadaan RUKS perlu diprioritaskan pada Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 30,45 angka nasional, yaitu terdapat di 22 Provinsi. Pengadaan toilet siswa SD perlu diprioritaskan pada Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 78,26 angka nasional, yaitu terdapat di 15 Provinsi. Dari empat jenis prasarana tersebut maka prioritas hendaknya diberikan kepada laboratorium untuk SD karena nilainya sangat kecil.

Walaupun nilai misi 2 lainnya, yaitu akses yang merata dan akses berkeadilan SD sudah utama tetapi tetap perlu dipertahankan dan bila mungkin ditingkatkan menjadi paripurna. Demikian juga, untuk mutu guru dan mutu prasarana SD termasuk pratama perlu dipertahankan atau ditingkatkan menjadi madya bahkan utama.

2. SMP

Keberhasilan program pembangunan pendidikan SMP pada misi 2 akses yang meluas dengan nilai 79,08 termasuk kategori kurang, oleh karena itu perlu

ditingkatkan melalui cara penambahan ruang perpustakaan yang nilainya sangat kecil sebesar 77,35, laboratorium yang nilainya sebesar 66,90, RUKS yang nilainya sebesar 36,05, dan toilet siswa yang nilainya 78,55 sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan perpustakaan SMP perlu diprioritaskan pada 17 Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 77,35 angka nasional. Pengadaan laboratorium untuk SMP perlu diprioritaskan pada 19 Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 66,90 angka nasional. Pengadaan RUKS perlu diprioritaskan pada 17 Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 36,05 angka nasional. Pengadaan toilet siswa SMP perlu diprioritaskan pada 15 Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 79,08 angka nasional.

Walaupun nilai misi 2 lainnya, yaitu akses yang merata SMP sudah utama dan akses berkeadilan SMP sudah madya tetapi tetap perlu dipertahankan dan bila mungkin ditingkatkan menjadi paripurna. Demikian juga, untuk mutu guru SMP sudah madya dan mutu prasarana SMP termasuk pratama perlu dipertahankan atau ditingkatkan menjadi madya bahkan utama.

3. SM

Keberhasilan program pembangunan pendidikan SM pada misi 2 akses yang meluas dengan nilai 71,00 termasuk kategori kurang, oleh karena itu perlu ditingkatkan melalui cara penambahan ruang perpustakaan yang nilainya sangat kecil sebesar 75,41, laboratorium yang nilainya sebesar 36,23, RUKS yang nilainya sebesar 34,70, dan toilet siswa yang nilainya 55,36 sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan perpustakaan SM perlu diprioritaskan pada 17 Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 75,41 angka nasional. Pengadaan laboratorium untuk SM perlu diprioritaskan pada 21 Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 36,23 angka nasional. Pengadaan RUKS perlu diprioritaskan pada 16 Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 34,70 angka nasional. Pengadaan toilet siswa SM perlu diprioritaskan pada 18 Provinsi yang memiliki nilai kurang dari 55,36 angka nasional.

Walaupun nilai misi 2 lainnya, yaitu akses yang merata SM sudah paripurna tetap perlu dipertahankan dan akses berkeadilan SM termasuk pratama perlu ditingkatkan menjadi madya atau utama. Demikian juga, untuk mutu guru SM sudah madya dan mutu prasarana SM termasuk utama perlu dipertahankan atau ditingkatkan menjadi utama bahkan paripurna.

4. Ketiga Jenjang

Bila ketiga jenjang pendidikan tersebut dapat ditingkatkan indikator akses yang meluas maka diharapkan keberhasilan program pembangunan pendidikan tiap Provinsi juga akan meningkat. Pada akhirnya secara nasional keberhasilan program pembangunan pendidikan dasar dan menengah juga akan meningkat.

C. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan bukan terhadap simpulan yang dihasilkan melainkan mengenai metode yang digunakan adalah:

1. Pengungkapan keberhasilan program pembangunan pendidikan ini didasarkan atas gencarnya pandangan pemerhati pendidikan mengenai misi 2 dan misi 3 pendidikan, sehingga ditetapkan untuk memfokuskan kriteria dengan menerapkan 23 indikator yang tersedia datanya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa langkah ini malah mendatangkan hasil yang cukup berbeda dari hasil yang diperoleh jika dilakukan penerapan dengan menggunakan semua indikator yang ada, baik ke arah positif maupun ke arah negatif. Oleh sebab itu, untuk kajian selanjutnya sebaiknya dapat digunakan indikator yang lebih lengkap dan sama untuk tiap jenjang pendidikan.
2. Salah satu indikator penting dalam kaitan dengan mutu pendidikan ialah kelayakan guru mengajar, untuk jenjang pendidikan haruslah berijazah Sarjana/S1 atau Diploma 4 dan yang lebih tinggi untuk semua jenjang pendidikan. Hal ini menyebabkan mutu di SD dan SMP menurun karena pada kenyataannya masih banyak guru SD yang berijazah di bawah S1/Diploma 4, guru SMP yang berijazah Diploma 2, demikian juga masih banyak guru SM yang berijazah Diploma 3 atau Sarjana Muda.
3. Keberhasilan pembangunan pendidikan yang diindikasikan oleh komposit dari indikator-indikator yang digunakan dalam kajian ini dipersyaratkan pula oleh indikator lainnya seperti prasarana. Dalam kajian ini hanya digunakan data mengenai ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, RUKS, dan toilet siswa untuk mengetahui akses yang meluas. Bila dikaitkan dengan mutu untuk semua jenjang maka ketidakterediaan data perpustakaan, laboratorium, RUKS, dan toilet siswa yang baik dan prasarana lainnya yang baik menyebabkan hasil lebih baik atau bahkan lebih buruk karena jenis prasarana yang tersedia datanya memang dalam kondisi kurang. Oleh sebab itu, dalam kajian mendatang, perlu diikutkan indikator sarana dan prasarana lainnya seperti ruang komputer, ruang sirkulasi, tempat berolahraga, dan indikator lainnya yang baik di setiap jenjang yang dapat membawa dampak terhadap keberhasilan program pendidikan.

PUSTAKA ACUAN

- Bappenas, BPS, dan UNFPA. 2012. *Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia, Population Projection) 2010—2035*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 27, Tahun 2007 tentang *Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 23, Tahun 2013 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15, Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015a. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015—2019*. Jakarta. Pusat Informasi dan Humas.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 11, Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta
- Kintamani, Ida. 2013. *Indikator Misi Pendidikan 5K Berdasarkan Rencana Strategis Pendidikan 2010—2014*. Bahan Pelatihan Provinsi Riau. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan.
- Kintamani, Ida. 2016. *Penyusunan Profil Pendidikan Dasar dan Menengah 2015/2016 dalam rangka workshop di Bengkulu dan Mataram*. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2017a. *Statistik Persekolahan Sekolah Dasar 2017/2018*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2017b. *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Pertama 2017/2018*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2017c. *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Atas 2017/2018*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2017d. *Statistik Persekolahan Sekolah Menengah Kejuruan 2017/2018*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Keberhasilan Program Pembangunan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2015/2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- UNESCO/OECD, 2016, *Education at a Glance 2015*, UNESCO Publishing & Bernan Press.